



**SAMARINDA PUSAT PERADABAN
BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA
YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2045**

Badan Perencanaan Pembangunan
Riset Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2045.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur Penyelenggara Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Samarinda adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Samarinda periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Samarinda untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 1 (satu) tahun.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II KERANGKA RPJPD

Pasal 2

Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD.

Pasal 3

(1) RPJPD terdiri atas:

- a. BAB I. Pendahuluan;
- b. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis;
- d. BAB IV. Visi dan Misi Daerah;
- e. BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
- f. BAB VI. Penutup.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Visi RPJPD adalah Samarinda Pusat Peradaban Berbasis Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
 - a. peningkatan pendapatan per kapita;
 - b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
 - c. peningkatan Perekonomian dan daya saing daerah;
 - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
 - e. penurunan emisi GRK menuju *Net Zero Emission*.
- (3) Misi RPJPD adalah:
 - a. transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing;
 - b. mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah;
 - c. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik
 - d. mewujudkan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah.
 - e. mewujudkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan yang sehat dan asri.
 - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
 - g. memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan strategis; dan
 - h. mewujudkan kesinambungan pembangunan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 52 (lima puluh dua) indikator utama pembangunan.

BAB III

RPJPD SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
 - a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.
- (2) RPJPD menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang, Kepala Daerah yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJPD untuk periode 20 tahun berikutnya.

Pasal 8

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Gubernur pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya dengan berdasarkan pada RPJPD.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

RPJPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup wilayah Kota Samarinda sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pelaksana unsur Perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
 - b. evaluasi terhadap hasil RPJPD
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi penilaian terhadap:
 - a. pencapaian target sasaran visi RPJPD; dan
 - b. pencapaian target indikator utama pembangunan RPJPD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.

Pasal 11

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan terhadap RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi hasil RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, atau *force majeure* dan/atau keadaan di luar jangkauan kemampuan stabil/normal.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJPD kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJPD.
- (2) Penyebarluasan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah serta produk hukum daerah lainnya yang terkait, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, penyusunan dan periodisasi RPJMD, wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJPD.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 53

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/I/64/3/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Hubungan Dokumen RPJPD dengan Perencanaan Lainnya	I-8
1.5 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Geografi	II-1
2.1.1.1 Letak, Batas, dan Luas Kota Samarinda	II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng	II-3
2.1.1.3 Kondisi Geologi	II-11
2.1.1.4 Kondisi Hidrologis	II-12
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi	II-13
2.1.1.6 Kondisi Jenis Tanah	II-16
2.1.1.7 Kondisi Hidrologi	II-18
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana	II-18
2.1.2 Demografi	II-28
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-32
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi	II-32
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya	II-42
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-49
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-50
2.3.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-60
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-61
2.3.2.1 Rasio Ketergantungan	II-61
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-65
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-66
2.3.4.1 Realisasi Investasi	II-66
2.3.4.2 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	II-66
2.3.4.3 Angka Kriminalitas	II-68
2.3.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-69
2.3.6 Capaian TPB Kota Samarinda	II-93
2.3.6.1 Pelaksanaan TPB di Kota Samarinda	II-93
2.3.6.1.1 Target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)	II-93
2.3.6.1.2 Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai	II-94

	target (SB)	
	2.3.6.1.3 Target TPB yang belum dikerjakan dan belum target/ (BB)	II-94
	2.3.6.1.4 Target TPB yang belum ada data (NA)	II-95
	2.3.6.2 Capaian TPB Berdasarkan Pilar	II-96
	2.3.6.2.1 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial	II-96
	2.3.6.2.2 Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi	II-96
	2.3.6.2.3 Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan	II-97
	2.3.6.2.5 Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Dan Tata Kelola	II-98
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-98
	2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-98
	2.4.1.1 Pendidikan	II-98
	2.4.1.2 Kesehatan	II-102
	2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-107
	2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-112
	2.4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-118
	2.4.1.6 Sosial	II-120
	2.4.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-121
	2.4.1.8 Pangan	II-123
	2.4.1.9 Lingkungan Hidup	II-125
	2.4.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil	II-158
	2.4.1.11 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-161
	2.4.1.12 Perhubungan	II-162
	2.4.1.13 Komunikasi dan Informatika	II-165
	2.4.1.14 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-166
	2.4.1.15 Penanaman Modal	II-169
	2.4.1.16 Kepemudaan dan Olahraga	II-169
	2.4.1.17 Kepemudaan dan Olahraga	II-170
	2.4.1.18 Statistik	II-171
	2.4.1.19 Persandian	II-172
	2.4.1.20 Kebudayaan	II-173
	2.4.1.21 Perpustakaan	II-175
	2.4.1.22 Kearsipan	II-176
	2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-176
	2.4.2.1 Kelautan dan Perikanan	II-176
	2.4.2.2 Pariwisata	II-178
	2.4.2.3 Pertanian	II-179
	2.4.2.4 Perdagangan	II-180
	2.5.2.5 Perindustrian	II-181
2.4.3	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	II-183

	2.4.4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-185
	2.4.4.1	Perencanaan	II-185
	2.4.4.2	Kuangan	II-187
	2.4.4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-188
	2.4.5	Pengawasan	II-190
2.5		Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-192
	2.5.1	Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJPD	II-192
	2.5.2	Rekomendasi Tindak Lanjut	II-199
2.6		Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-200
	2.6.1	Proyeksi Penduduk	II-200
	2.6.2	Proyeksi Sarana dan Prasarana	II-201
2.7		Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-205
	2.7.1	Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur	II-216
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III -1
	3.1	Permasalahan	III-1
	3.2	Isu Strategis Daerah	III-9
	3.2.1	Penelaahan Isu Internasional	III-9
	3.2.2	Penelaahan Isu/Kebijakan Nasional	III-10
	3.2.3	Penelaahan Isu/Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur	III-36
	3.2.4	Penelaahan Isu/Kebijakan Kota Samarinda	III-39
	3.2.5	Penentuan Isu Strategis RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045	III-57
BAB IV		VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
	4.1	Visi	IV-1
	4.1.1	Visi Indonesia Emas 2045	IV-1
	4.1.2	Visi Kota Samarinda 2045	IV-3
	4.2	Misi	IV-8
BAB V		ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
	5.1	Arah Kebijakan	V-1
	5.2	Sasaran Pokok	V-14
	5.2.1	Arah Pembangunan Daerah	V-22
	5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi	V-24
	5.2.3	Upaya Transformasi Super Prioritas (GAME CHANGERS)	V-41
	5.2.4	Indikator Utama Pembangunan Daerah	V-46
BAB VI		PENUTUP	VI-1
	6.1	Kaidah Pelaksanaan	VI-1
	6.2	Manajemen Resiko	VI-2
	6.3	Pembiayaan Pembangunan	VI-3

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan Rukun Tetangga Berdasarkan Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2023	II-2
2.2. Kondisi Topografi di Kota Samarinda	II-4
2.3. Kondisi Fisiografi Kota Samarinda	II-4
2.4. Luas Bentuk Lahan di Kota Samarinda	II-6
2.5. Kondisi Geologi di Kota Samarinda	II-11
2.6. Kondisi Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kota Samarinda Tahun 2023	II-15
2.7. Jenis Tanah Kota Samarinda	II-16
2.8. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Timur	II-19
2.9. Kelas Bahaya Dominan di Kota Samarinda	II-19
2.10. Rincian Luas Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan Kota Samarinda	II-20
2.11. Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda	II-24
2.12. Rincian Luas Potensi Bahaya Longsor Per Kecamatan Kota Samarinda	II-25
2.13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Samarinda Tahun 2022 dan 2023	II-27
2.14. Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023 Kota Samarinda	II-30
2.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2023 Kota Samarinda	II-31
2.16. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-36
2.17. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023	II-39
2.18. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023	II-40
2.19. Umur Harapan Hidup Penduduk Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023	II-41

Tabel		Halaman
2.20.	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)	II-42
2.21.	Jumlah Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2018-2023	II-45
2.22.	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-50
2.23.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023	II-52
2.24.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023	II-54
2.25.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)	II-56
2.26.	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Samarinda Tahun 2019-2023 (%)	II-57
2.27.	PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-58
2.28.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (Rp/bulan)	II-61
2.29.	Rasio Ketergantungan Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-62
2.30.	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu 2019-2023 Kota Samarinda (orang)	II-63
2.31.	Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-68
2.32.	Realisasi SPM Urusan Pendidikan Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	II-69
2.33.	Realisasi SPM Urusan Pendidikan Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023	II-69
2.34.	Realisasi SPM Urusan Kesehatan Berdasar Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	II-72
2.35.	Realisasi SPM Urusan Kesehatan Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023	II-73
2.36.	Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	II-81
2.37.	Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023	II-82
2.38.	Realisasi SPM Urusan Perumahan Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	II-83

Tabel		Halaman
2.39.	Realisasi SPM Urusan Perumahan dan Permukiman Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023	II-84
2.40.	Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	II-85
2.41.	Realisasi SPM Urusan Trantibunlinmas Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023	II-85
2.42.	Realisasi SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	II-88
2.43.	Realisasi SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Tahun 2023	II-88
2.44.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)	II-99
2.45.	Rasio Guru dan Murid Tahun Ajaran 2018/2019-2022/2023 Kota Samarinda	II-101
2.46.	Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-102
2.47.	Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-103
2.48.	Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-104
2.49.	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-106
2.50.	Perkembangan Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (orang)	II-107
2.51.	Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (km)	II-108
2.52.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2023 Kota Samarinda	II-109
2.53.	Penanganan Banjir Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-110
2.54.	Kondisi Drainase Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (meter)	II-110
2.55.	Perkembangan Jaringan Irigasi Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (meter)	II-111
2.56.	Luasan Permukiman Kumuh Kota Samarinda (Ha) Tahun 2021-2023	II-112
2.57.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kota Samarinda	II-117
2.58.	Rasio Pol PP dan Linmas Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (orang)	II-118
2.59.	Penegakan PERDA Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-119
2.60.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-120
2.61.	Persentase PMKS/ PPKS Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-120

Tabel		Halaman
2.62.	Data Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-122
2.63.	Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (orang)	II-123
2.64.	Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-123
2.65.	Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda	II-128
2.66.	Status Daya Dukung Air Kota Samarinda	II-131
2.67.	Kelas Bahaya Dominan di Kota Samarinda	II-134
2.68.	Risiko Bencana di Kota Samarinda	II-135
2.69.	Klasifikasi Jasa Lingkungan	II-140
2.70.	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Samarinda	II-142
2.71.	Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kota Samarinda	II-144
2.72.	Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda	II-145
2.73.	Ambang Batas Air Kota Samarinda	II-147
2.74.	Ambang Batas Air Kota Samarinda	II-148
2.75.	Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda	II-149
2.76.	Jasa Lingkungan Pendukung Kehati Kota Samarinda	II-152
2.77.	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-156
2.78.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-157
2.79.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (perusahaan)	II-158
2.80.	Kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-158
2.81.	Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-159
2.82.	Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-159
2.83.	Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-160
2.84.	Perpindahan Penduduk Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-160
2.85.	Jumlah Peserta Program KB Aktif Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-161

Tabel		Halaman
2.86.	Jumlah Penumpang Angkutan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (orang)	II-162
2.87.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-163
2.88.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (unit)	II-164
2.89.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-165
2.90.	Hasil Evaluasi SPBE Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-166
2.91.	Persentase Koperasi Aktif Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-167
2.92.	Jumlah UMKM Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (unit)	II-168
2.93.	Realisasi Investasi Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (Ribu Rupiah)	II-169
2.94.	Perkembangan Prestasi Olahraga Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-170
2.95.	Capaian Pembangunan Pemuda Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-171
2.96.	Capaian NSPK Statistik Sektor Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-172
2.97.	Sarana Dan Prasarana Seni Budaya Kota Samarinda Tahun 2019-2023 (unit)	II-173
2.98.	Perkembangan Seni dan Budaya Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-173
2.99.	Koleksi Buku Perpustakaan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-175
2.100.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-175
2.101.	Perkembangan Pengelolaan Kearsipan Kota Samarinda Tahun 2019-2023 (unit)	II-176
2.102.	Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (ton)	II-177
2.103.	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (Ton)	II-178
2.104.	Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (orang)	II-178
2.105.	Luas Tanaman Pangan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (Ha)	II-180
2.106.	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Sektor Perdagangan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)	II-181

Tabel		Halaman
2.107.	Jumlah Sarana Perdagangan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (buah)	II-181
2.108.	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Sektor Industri Pengolahan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)	II-182
2.109.	Jenis Industri Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-182
2.110.	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-183
2.111.	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Samarinda	II-184
2.112.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-186
2.113.	Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-187
2.114.	Persentase Realisasi PAD Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-188
2.115.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-189
2.116.	Rasio Pegawai Fungsional Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-190
2.117.	Rasio Temuan BPK yang ditindaklanjuti Tahun 2019-2023 Kota Samarinda	II-191
2.118.	Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Samarinda Periode Pelaksanaan: tahun 2005–2025	II-195
2.119.	Proyeksi Penduduk Kota Samarinda Tahun 2025–2045	II-201
2.120.	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2025-2045	II-201
2.121.	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Samarinda Tahun 2025-2045	II-201
2.122.	Proyeksi Jumlah Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Samarinda Tahun 2025-2045	II-202
2.123.	Proyeksi Jumlah Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Samarinda Tahun 2025-2045	II-202
2.124.	Proyeksi Jumlah Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Samarinda Tahun 2025-2045	II-203
2.125.	Proyeksi Jumlah Proyeksi Timbunan Sampah dan Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kota Samarinda Tahun 2025 2045	II-204
2.126.	Proyeksi Jumlah Proyeksi Fasilitas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2025-2045	II-204
2.127.	Proyeksi Jumlah Proyeksi Fasilitas Pendidikan Kota Samarinda Tahun 2025-2045	II-205

Tabel		Halaman
2.128.	Bagian Wilayah Perencanaan Kota Samarinda	II-211
2.129.	Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur	II-216
3.1	Peran dan Fungsi Kabupaten/Kota di Sekitar Kota Samarinda	III-31
3.2	Isu Strategis Kota Samarinda Berdasarkan Hasil Analisis Masterplan	III-31
3.3	Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045	III-38
3.4	Hubungan antara Permasalahan dan Isu Strategis Kota Samarinda menurut Sustainable Development Aspects	III-46
3.5	Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dari TPB 1	III-48
3.6	Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dari TPB 3	III-48
3.7	Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam dari TPB 6	III-48
3.8	Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dari TPB 8	III-49
3.9	Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dari TPB 11	III-49
3.10	Energi GRK (ton CO ₂ e) Berdasarkan Jenis Bahan Bakar	III-51
3.11	Emisi Sektor Industri dari Tahun 2019 Hingga 2022	III-52
3.12	Hasil Perhitungan GRK Sektor Pertanian Kota Samarinda Tahun 2022	III-53
3.13	Tingkat Emisi GRK Akumulatif Periode Tahun 2014-2018 Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lainnya (dalam 1000 ton CO ₂ e)	III-54
3.14	Emisi GRK Bersih (ton CO ₂ e) Sektor Limbah Berdasarkan Kecamatan di Kota Samarinda	III-54
3.15	Emisi GRK (ton CO ₂ e) Berdasarkan Jenis Limbah	III-55
3.16	Emisi GRK (ton CO ₂ e) Sektor Limbah Berdasarkan Jenis GRK	III-56
4.1	Sasaran Visi RPJPD Kota Samarinda 2025-2045	IV-7
4.2	Penyelarasan Visi dan Misi RPJPD Kota Samarinda dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045	IV-18
5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045	V-9
5.2	Arah Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2045	V-23
5.3	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Samarinda	V-25

Tabel		Halaman
5.4	Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer)	V-42
5.5	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045	V-47

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Bagan Alur Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Samarinda	I-4
1.2	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lain	I-10
2.1.	Peta Administrasi Kota Samarinda	II-2
2.2.	Peta Geologi Kota Samarinda	II-11
2.3.	Kondisi Bentuk Lahan Kota Samarinda	II-12
2.4.	Peta Hidrologi Kota Samarinda	II-13
2.5.	Peta Curah Hujan Kota Samarinda	II-15
2.6.	Peta Jenis Tanah Kota Samarinda	II-17
2.7.	Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Samarinda	II-18
2.8.	Peta Risiko Banjir Kota Samarinda	II-21
2.9.	Peta Risiko Longsor Kota Samarinda	II-26
2.10.	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)	II-28
2.11.	Piramida Penduduk Tahun 2023 Kota Samarinda	II-31
2.12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	II-32
2.13.	Laju Inflasi Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-34
2.14.	Gini Ratio Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-35
2.15.	Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	II-37
2.16.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-39
2.17.	Umur Harapan Hidup Tahun 2019-2023 Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur (tahun)	II-41
2.18.	Indeks Ketimpangan Gender Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	II-47
2.19.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	II-48
2.20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	II-49

Gambar	Halaman
2.21. Proporsi Capaian TPB Kota Samarinda Tahun 2023	II-93
2.22. Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS)	II-94
2.23. Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)	II-94
2.24. Capaian TPB Kategori Belum Dikerjakan dan Belum Mencapai Target (BB)	II-95
2.25. Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data (NA)	II-95
2.26. Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Sosial	II-96
2.27. Persentase status ketercapaian TPB Pilar Ekonomi	II-97
2.28. Persentase status ketercapaian TPB Pilar Lingkungan	II-97
2.29. Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola	II-98
2.30. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)	II-99
2.31. Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)	II-100
2.32. Prevalensi Stunting Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)	II-105
2.33. Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (poin)	II-125
2.34. Peta Tipe Vegetasi di Kota Samarinda	II-126
2.35. Peta Kebutuhan Pangan Kota Samarinda	II-129
2.36. Peta Ketersediaan Pangan Kota Samarinda	II-129
2.37. Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda	II-130
2.38. Peta Kebutuhan Air Kota Samarinda	II-132
2.39. Peta Ketersediaan Air Kota Samarinda	II-133
2.40. Peta Status Daya Dukung Air Kota Samarinda	II-133
2.41. Peta Risiko Banjir Kota Samarinda	II-137
2.42. Peta Risiko Longsor Kota Samarinda	II-138
2.43. Risiko karhutla, kekeringan dan cuaca ekstrim	II-139
2.44. Jasa ekosistem penyedia pangan Kota Samarinda	II-143
2.45. Jasa ekosistem penyedia air Kota Samarinda	II-144
2.46. Jasa ekosistem tata aliran air dan banjir Kota Samarinda	II-146
2.47. Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kota Samarinda	II-149
2.48. Kerangka Berfikir Kategori Terhadap Resiko Penyimpangan Iklim	II-151

Gambar		Halaman
2.49.	Indeks kerentanan terhadap perubahan iklim Kota Samarinda	II-151
2.50.	Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati Kota Samarinda	II-154
2.51.	Peta Ekosistem Unik di Kota Samarinda	II-155
2.52.	Kepemilikan Akta Kematian 2019-2023 Kota Samarinda (orang)	II-160
2.53.	Proporsi Kunjungan Wisatawan Domestik Per Objek Wisata Kota Samarinda	II-179
2.54.	Struktur Ruang Kota Samarinda	II-214
3.1	Orientasi Samarinda dengan wilayah IKN	III-19
3.2	Dasar Pertimbangan Penentuan Branding Kota Samarinda	III-34
3.3	Kebutuhan dan Konsep Penanganan	III-35
3.4	Konsep Penanganan	III-35
3.5	Tahap Pengembangan Masterplan	III-36
3.6	Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	III-47
3.7	Rekomendasi Terhadap Visi Dan Misi	III-48
4.1	Visi Indonesia Emas Tahun 2045	IV-2
4.2	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045	IV-2
5.1	Tema Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2025-2045	V-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Samarinda yang dikenal sebagai Kota Tepian, dulunya merupakan salah satu wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara di Martadipura. Sampai pertengahan abad ke-17, wilayah Samarinda merupakan lahan persawahan dan perladangan bagi beberapa penduduk. Lahan persawahan dan perladangan itu umumnya dipusatkan di sepanjang tepi Sungai Karang Mumus dan Sungai Karang Asam. Pada sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang berasal dari tanah Sulawesi membuka perkampungan di Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini oleh Sultan Kutai dimaksudkan sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina, yang sering melakukan perampokan di berbagai daerah pantai wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Selain itu, Sultan yang dikenal bijaksana ini memang bermaksud memberikan tempat bagi masyarakat Bugis yang mencari suaka ke Kutai akibat peperangan di daerah asal mereka. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Sama Rendah.

Nama ini tentunya bukan asal sebut. Sama Rendah dimaksudkan agar semua penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, berderajat sama. Tidak ada perbedaan antara orang Bugis, Kutai, Banjar dan suku lainnya. Kondisi rumah rakit yang berada di atas air, harus sama tinggi antara rumah satu dengan yang lainnya, melambangkan tidak ada perbedaan derajat apakah bangsawan atau tidak, semua "sama" derajatnya dengan lokasi yang berada di sekitar muara sungai yang berulak dan di kiri kanan sungai daratan atau "rendah". Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarenda atau lama-kelamaan berubah ejaan menjadi Samarinda. Istilah atau nama itu memang sesuai dengan keadaan lahan atau lokasi yang terdiri atas dataran rendah dan daerah persawahan yang subur.



Berdasarkan uraian singkat sejarah di atas, yang sesuai perkembangan kebijakan dalam NKRI, maka selanjutnya Pemerintah Negara Indonesia mendeklarasikan terbentuknya Kota Samarinda. Kota Samarinda dibentuk pada tanggal 21 Januari 1960, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, Lembaran Negara Nomor 97 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Timur. Semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, dan Samarinda Seberang. Kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 18/SK/TH-Pem/1969 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 55/TH-Pem/SK/1969, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1969, wilayah administratif Kodya Dati II Samarinda ditambah atau dimekarkan dengan terbentuknya 4 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Palaran, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Samboja (dengan luas sekitar 2.727 km²).

Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki dinamika perkembangan wilayah yang pesat. Kota Samarinda adalah kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,2%. Jumlah penduduk Kota Samarinda akan terus meningkat ke arah Kota Metropolitan (jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa). Hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya luasan Kota Samarinda sebagai kawasan resapan, karena kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk. Selain prediksi Kota Samarinda yang menjadi Kota Metropolitan, Kota Samarinda juga mempunyai peran penting, yaitu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bersama-sama dengan Kota/Kabupaten sekitarnya, yaitu: Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Sanga-sanga dan Muara Jawa), dan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET SASAMBA), serta bersama dengan Kota Bontang, Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), Balikpapan, dan Penajam sebagai Kawasan Andalan Bontamsembajam. Oleh karena itu, Kota Samarinda memerlukan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah yang bersinergi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, dan kebutuhan ruang di masa mendatang yang tertuang dalam Dokumen RPJP Kota Samarinda tahun 2025-2045 (perencanaan pembangunan dua puluh tahun mendatang).



Pada beberapa dekade terakhir, Kota Samarinda mengalami pertumbuhan pada beberapa bidang dan sektor, namun ada juga yang mengalami penurunan. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah Kota Samarinda tidak boleh lengah untuk terus meningkatkan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda dapat terus ditingkatkan. Pembangunan daerah ini memerlukan suatu perencanaan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dengan aspek lingkungan hidup, sehingga pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakatnya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah inilah yang menjadi salah satu instrumen pembangunan yang mengedepankan prinsip keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan pembangunan dengan bertumpu pada kearifan lokal. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis karena memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Proses penyusunan RPJPD dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan masyarakat di Kota Samarinda. RPJPD Kota Samarinda disusun untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2045 sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang dengan pelaksanaan tahapan-tahapannya dalam jangka menengah.

Substansi RPJPD Kota Samarinda disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota, serta memperhatikan RPJPD Provinsi, RPJP Nasional, hasil evaluasi RPJPD kota periode sebelumnya, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Samarinda 2025-2045. RPJPD Kota Samarinda disusun dengan memperhatikan hasil KLHS untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan sudah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk keseimbangan lingkungan masa kini sampai dengan masa datang.

Dokumen RPJPD disusun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana pembangunan jangka panjang kota disusun dengan memperhatikan karakteristik dan potensi Kota Samarinda, evaluasi hasil pembangunan jangka panjang periode

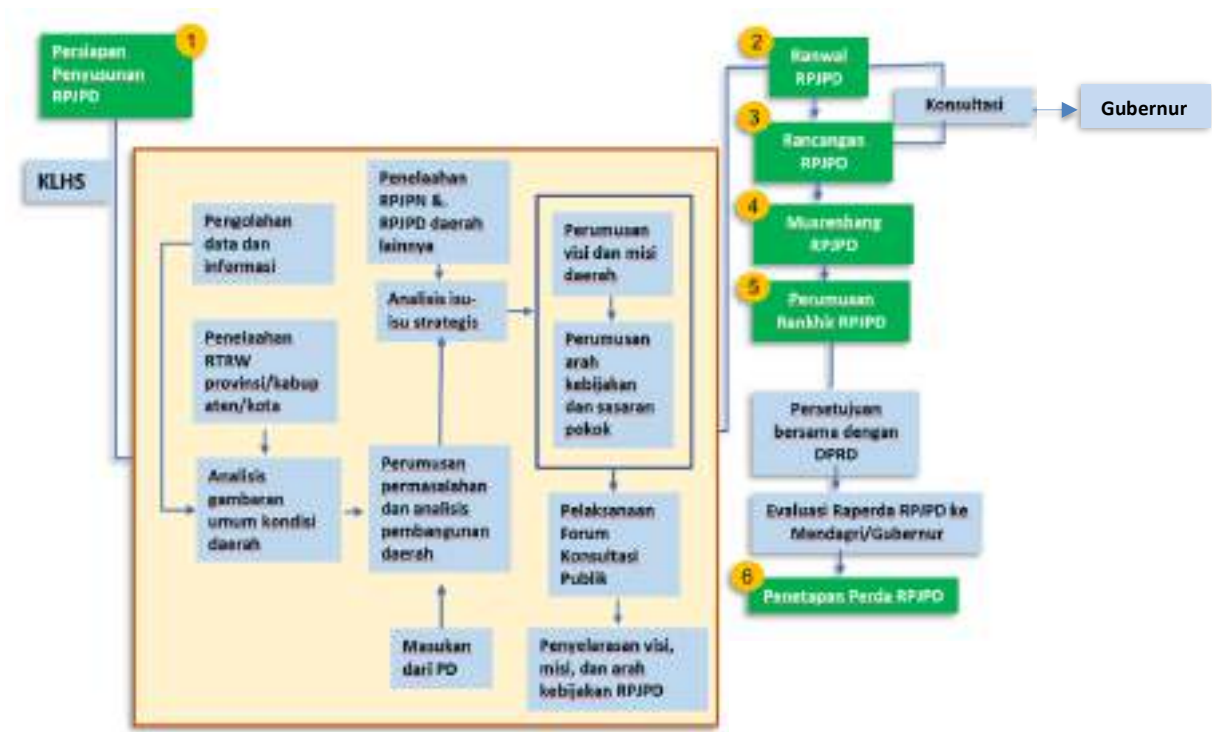


sebelumnya dan isu strategis kota. Dengan mempertimbangkan setiap aspek penting perencanaan, diharapkan RPJPD Kota Samarinda dapat memuat visi, misi, dan arah pembangunan kota selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yang fokus, dapat dilaksanakan dan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Perumusan dan penyusunan RPJPD Kota Samarinda 2025-2045 menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*. RPJPD ini selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan (RPJMD), yaitu: periode 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045. RPJPD selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah dan bersifat mengikat seluruh komponen masyarakat Kota Samarinda, baik itu pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media massa, maupun masyarakat luas.

Gambar 1.1.

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Samarinda



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan



- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan



- Timur Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045;
 17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 19. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan dilakukan secara bertahap melalui pembangunan jangka menengah dengan kolaborasi dan sinergi antar pelaku pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Samarinda tahun 2045. Selanjutnya, RPJPD akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD selama 4 (empat) periode.

Tujuan penyusunan RPJPD Kota Samarinda yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian pembangunan jangka panjang periode sebelumnya sebagai masukan bagi perencanaan jangka panjang periode 2025-2045.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan kota.
3. Merumuskan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota.
4. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.
5. Menetapkan arah kebijakan transformasi, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan berserta target yang akan dicapai sampai tahun 2045.



6. Mewujudkan sinergi pembangunan jangka panjang kota, provinsi, dan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

1.4. Hubungan Dokumen RPJPD dengan Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam lingkup Kota Samarinda, dokumen RPJPD Kota Samarinda 2025 – 2045 adalah satu kesatuan yang utuh dari pengelolaan pembangunan, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang di dalam berbagai dokumen perencanaan baik daerah maupun pusat. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya adalah sebagai berikut:

1.4.1. RPJPD Kota Samarinda dengan RPJP Nasional

Penyusunan RPJPD Kota Samarinda 2025–2045 mengacu pada RPJP Nasional 2025–2045 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Oleh karena itu substansi yang terkandung dalam RPJPD Kota Samarinda, mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi dan kota. Hal ini dimaksudkan agar dalam mencapai tujuan pembangunan, tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang antara Kota Samarinda dengan pembangunan Nasional dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4.2. RPJPD Kota Samarinda dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 terutama kebijakan Provinsi Kalimantan Timur yang berpengaruh langsung terhadap Kota Samarinda, secara khusus pada pengembangan



Kota Samarinda sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), arah kebijakan infrastruktur transportasi, pengembangan sumber daya manusia, kapasitas potensi pertumbuhan ekonomi daerah, penjagaan kondusifitas daerah, dan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Samarinda.

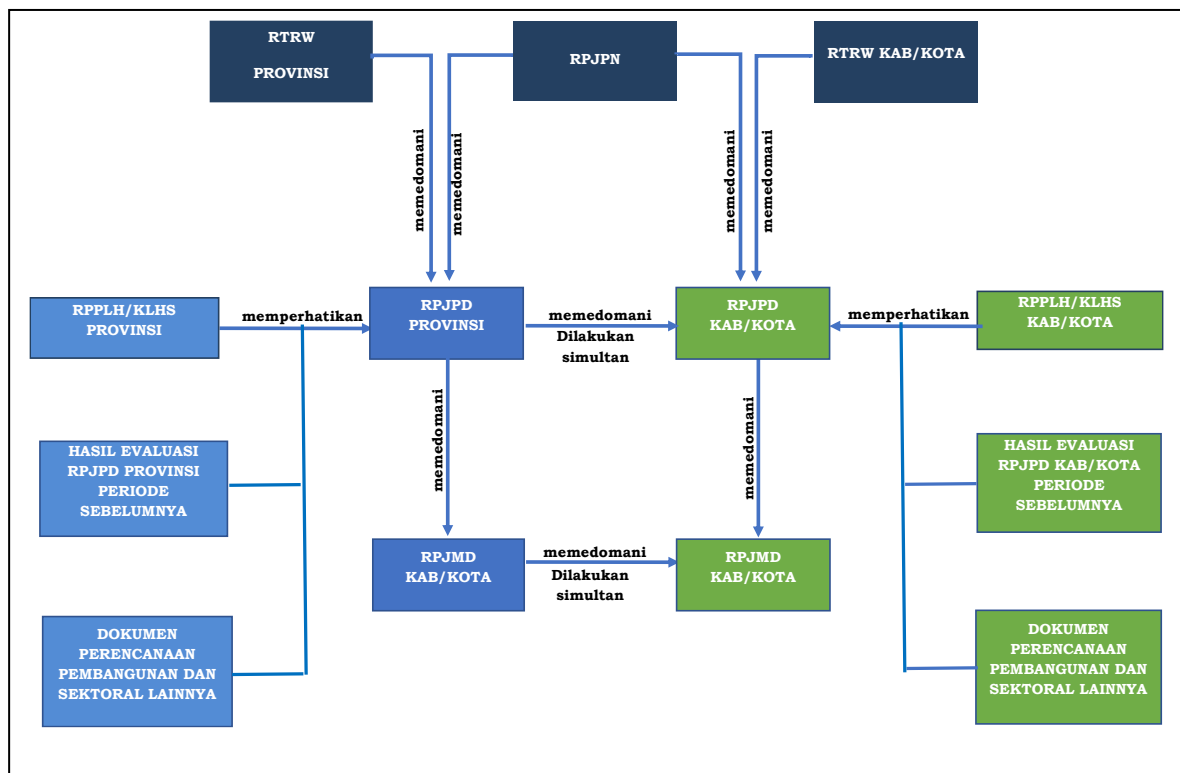
1.4.3. RPJPD Kota Samarinda dengan RTRW Kota Samarinda

Penyusunan RPJPD Kota Samarinda 2025 – 2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah selama 20 tahun ke depan. Dengan demikian, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Samarinda 2025 – 2045 adalah selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Kota Samarinda.

Keterkaitan dokumen RPJPD Kota Samarinda dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kabupaten/Kota sekitar di wilayah Kalimantan Timur, disebabkan karena semua pembangunan yang direncanakan maupun dilaksanakan pada ruang (spasial) sebagai titik pertumbuhan sangat terkait dengan ruang-ruang sekitarnya. Peran dan fungsi RTRW di dalam dokumen perencanaan daerah adalah; (1) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (2) acuan dalam pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah Kota, (3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kota, (4) acuan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, (5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota, (6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan atau pengembangan wilayah Kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan (7) sebagai acuan dalam administrasi pertanahan.

Keterkaitan dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.4.4. RPJPD Kota Samarinda dengan RPJMD Kota Samarinda

Dokumen RPJPD Kota Samarinda 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Samarinda selama 4 (empat) periode yaitu periode 2025-2029, periode 2030-2034, periode 2035-2039, dan periode 2040-2045. Selanjutnya, RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota untuk periode perencanaan 5 tahunan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Samarinda, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.4.5. RPJPD Kota Samarinda dengan RPJPD Kabupaten /Kota Lainnya

Penyusunan RPJPD Kota Samarinda 2025-2045 juga memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka panjang antar Kota Samarinda dengan kabupaten/kota lainnya, terutama yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.



1.4.6. RPJPD Kota Samarinda dengan KLHS RPJPD Kota Samarinda

Penyusunan RPJPD Kota Samarinda juga diperkaya dengan rekomendasi KLHS RPJPD Tahun 2025-2045. Penginterasian rekomendasi KLHS ditujukan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka panjang kota dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJPD.
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**, menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2045, tren demografi dan proyeksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis**, menguraikan permasalahan pembangunan memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Selain itu, dimuat juga isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Samarinda dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.
- BAB IV Visi dan Misi Daerah**, berisi pernyataan visi yaitu kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045, dilengkapi dengan sasaran visi serta indikator dan target yang akan dicapai pada akhir periode.



BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, memuat arah kebijakan yang dibagi menjadi 4 tahapan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu pada bab ini memuat juga sasaran pokok yang merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian misi RPJPD Tahun 2025-2045 yang dilengkapi dengan indikator utama pembangunan serta arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi.

BAB VI Penutup, memuat kaidah pelaksanaan dan hal-hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Letak, Batas, dan Luas Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Luas Wilayah Perencanaan yakni 71.678,36 Ha (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma tiga enam hektare) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun batas administrasi Kota Samarinda sebagai berikut:

sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara
sebelah Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara
sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
sebelah Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara

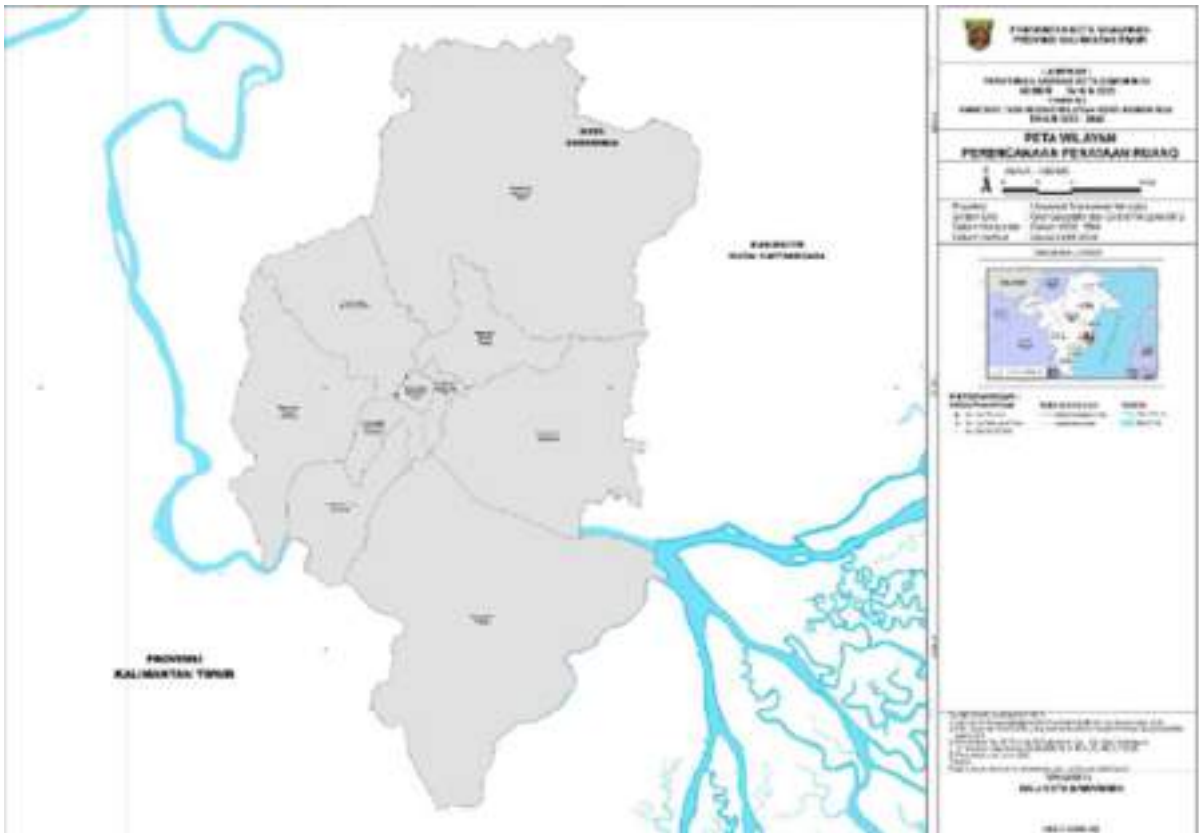
Kota Samarinda secara administratif terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yakni Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, L

oa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sementara itu, untuk jumlah kelurahan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 59 kelurahan, dan 1.975 rukun tetangga. Jumlah kelurahan yang paling banyak yaitu di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang.

Luas Wilayah berdasarkan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 229,52 Km² dan Kecamatan Palaran dengan luas 221,19 Km². Berikut luas per kecamatan di Kota Samarinda (Gambar 2.1.), dan secara terinci luas kecamatan disajikan pada Tabel 2.1.



Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Samarinda



Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan Rukun Tetangga
Berdasarkan Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa	Kelurahan	Rukun Tetangga
Palaran	221,19	5	5	170
Samarinda Ilir	17,18	5	5	189
Samarinda Kota	11,12	5	5	124
Sambutan	100,95	5	5	111
Samarinda Seberang	12,49	6	6	119
Loa Janan Ilir	26,13	5	5	142
Sungai Kunjang	43,04	7	7	307
Samarinda Ulu	22,12	8	8	321
Samarinda Utara	229,52	8	8	244
Sungai Pinang	34,16	5	5	248
Kota Samarinda	718,00	59	59	1.975

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2024

**2.1.1.2. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng**

Secara umum topografi Kota Samarinda terbagi dalam dua wilayah yakni tanah datar dan berbukit, sebagai berikut:

1. Dataran rendah dengan ketinggian 18 m diatas permukaan laut yang tersebar di seluruh Kecamatan pada Kota Samarinda dengan luas wilayah berkisar 36.846,45 hektar atau dengan persentase sebesar 51,5% dari seluruh wilayah Kota Samarinda.
2. Dataran dengan ketinggian 35 m diatas permukaan laut persebaran yang mendominasi terdapat pada Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang serta Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas total keseluruhan 17.241,80 hektar atau dengan persentase sebesar 24,1% dari seluruh Kota Samarinda.
3. Dataran dengan ketinggian 54 m diatas permukaan laut tersebar pada wilayah Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang serta Kecamatan Sungai Pinang, dengan luasan berkisar 8.404,33 Ha atau dengan persentase sebesar 11,7% dari luas wilayah Kota Samarinda.
4. Dataran dengan ketinggian 78 m diatas permukaan laut yang tersebar diantaranya Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang serta Sungai Pinang, dengan luasan keseluruhan 5.523,34 hektar atau 7,7% dari wilayah Kota Samarinda.
5. Dataran dengan ketinggian 122 m diatas permukaan laut berada pada beberapa Kecamatan pada wilayah Kota Samarinda, diantaranya Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu serta Samarinda Utara dengan luasan 2.565,13 hektar dengan persentase 3,6% dari luas wilayah Kota Samarinda.
6. Dataran dengan ketinggian 247 m diatas permukaan laut merupakan ketinggian yang hanya terdapat pada Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan 1.007,32 hektar dengan persentase 1,4% dari total luas wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan hal tersebut, menunjukan bahwa kondisi topografi Kota Samarinda terdiri dari 6 (enam) klasifikasi. Keragaman kondisi topografi tersebut didominasi oleh ketinggian 18 mdpl (tersebar hampir seluruh kecamatan di Kota Samarinda) dan 247 mdpl menjadi ketinggian



tertinggi (yang hanya tersebar di wilayah utara Kota Samarinda). Topografi per kecamatan Kota Samarinda secara terinci disajikan Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kondisi Topografi di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Topografi (Ha)					
	18 mdpl	35 mdpl	54 mdpl	78 mdpl	122 mdpl	247 mdpl
Kec. Palaran	13.304,58	4.304,11	882,89	517,86	69,50	
Kec. Samarinda Ilir	337,74	225,76				
Kec. Samarinda Kota	362,35	0,08				
Kec. Samarinda Seberang	893,23	257,45		12,12	5,92	
Kec. Samarinda Ulu	1.191,60	1.843,47	1.390,91	619,47	116,37	
Kec. Samarinda Utara	6.072,40	6.031,25	4.758,35	3.968,66	2.231,18	1.007,33
Kec. Sambutan	7.067,72	845,03	132,26			
Kec. Sungai Kunjang	4.028,27	1.806,35	725,95	147,91		
Kec. Sungai Pinang	1.331,08	1.277,92	513,96	49,95		
Kec. Loa Janan Ilir	2.257,49	650,37		207,36	142,15	

Sumber: Hasil Analisis Digital Elevation Model (DEM) dan Batimetri Nasional Resolusi 5 Meter

Kemiringan lereng pada Kota Samarinda terbagi menjadi 5 (lima) kemiringan lereng, diantaranya 0–8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% serta >45% yang tersebar di seluruh Kota Samarinda. Untuk kemiringan lereng yang paling mendominasi pada Kota Samarinda yaitu kemiringan lereng 0-8% (datar) dengan kuasa 32985,13 hektar sedangkan untuk luasan terkecil yaitu kemiringan lereng >45% (Sangat Curam), yang banyak terdapat pada Kecamatan Samarinda Utara. Adapun luas wilayah dan persentase berdasarkan klasifikasi kelas kelerengan, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Fisiografi Kota Samarinda

Kecamatan	Kemiringan Lereng				
	0 - 8%	8 - 15%	15 -25%	25 -45%	>45%
Palaran	11.459,79	4.107,83	2.717,59	682,24	111,49
Samarinda Seberang	734,08	222,98	154,59	38,24	18,84
Samarinda Ulu	1.392,85	1.796,04	1.320,18	544,59	108,12
Samarinda Ilir	205,86	58,08	117,58	100,23	81,75
Samarinda Utara	7.412,24	6.238,22	5.829,68	3.428,26	1.160,95
Sungai Kunjang	2.920,38	1.197,01	1.353,67	1.202,77	34,66
Sungai Pinang	1.177,58	1.052,24	824,74	118,35	
Sambutan	5.961,14	1.234,88	720,05	128,64	0,30
Samarinda Kota	329,20	33,23			
Loa Janan Ilir	1.392,01	532,32	455,96	630,64	246,44

Sumber: Hasil Analisis Digital Elevation Model (DEM) dan Batimetri Nasional Resolusi 5 Meter



Kondisi penggunaan lahan di Kota Samarinda berdasarkan tutupan lahannya terdiri atas Area Parkir dan Lapangan, Bangunan Industri dan Perdagangan, Bangunan Non Permukiman Lain, Danau Buatan Lainnya, Danau Wisata Air, Hutan Lahan Rendah Primer Kepadatan Tinggi, Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Rendah, Jaringan Jalan Aspal/ Beton/ Tanah, Kebun Campuran, Kolam Air Tawar Lain, Ladang/ Tegalan Dengan Palawija, Lahan Terbuka Lain, Landasan Pacu (Runway) dan Taxiway, Lapangan Diperkeras, Padang Golf, Padang Rumput, Pekarangan, Pelabuhan Penambangan.

Terbuka Bukan Sirtu, Penggalian Pasir, Tanah dan Batu (Sirtu), Perairan Lain, Perkebunan Kelapa Sawit, Permukiman Perdesaan, Permukiman Perkotaan, Pertahanan Keamanan, Rawa, Sawah Dengan Padi Terus Menerus, Semak/Belukar, Stadion dan Sarana Olahraga, Sungai, Taman Kota, Tampungan Air Lain, Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah Terminal Bandara, Terminal Bus, Terminal Timbang, Waduk Irigasi dan Waduk Multiguna.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Tabel 2.4
Luas Bentuk Lahan di Kota Samarinda

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Area Parkir dan Lapangan	Bangunan Industri dan Perdagangan	Bangunan Non Permukiman Lain	Danau Buatan Lainnya	Danau Wisata Air	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Tinggi	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Rendah	Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	Kebun Campuran	Kolam Air Tawar Lain
Kecamatan Loa Janan Ilir		84,18	9,14	4,61				41,45	698,87	0,08
Kecamatan Palaran	12,97	261,99	13,21					138,34	7.360,83	0,47
Kecamatan Samarinda Ilir	1,10	15,92						0,01	97,89	
Kecamatan Samarinda Kota		38,37	0,76				2,32	7,46		
Kecamatan Samarinda Seberang		29,24	5,33					17,75	83,03	
Kecamatan Samarinda Ulu	2,75	45,53	2,22	9,71			7,89	40,87	1.687,71	0,03
Kecamatan Samarinda Utara	1,27	15,1	10,53	2,2		364,56	25,90	23,83	9.896,05	0,66
Kecamatan Sambutan	2,90	146,04	5,76	0,50	2,56			11,05	1.120,29	
Kecamatan Sungai Kunjang		184,22	5,63		0,21			33,46	892,30	0,33



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Kecamatan Sungai Pinang	1,43	12,13	11,56					15,35	833,20	0,27



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Tabel 2.4 [Lanjutan]

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Ladang/Tegalan Dengan Palawija	Lahan Terbuka Lain	Landasan Pacu (Runway) dan Taxiway	Lapangan Diperkeras	Padang Golf	Padang Rumput	Pekarangan	Pelabuhan	Penambahan Terbuka Bukan Sirtu	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu (Sirtu)
Kecamatan Loa Janan Ilir	1,35			0,19	73,41				45,74	128,25
Kecamatan Palaran	100,04	57,83				74,64		2,08	3499,75	174,23
Kecamatan Samarinda Ilir								2,60		1,58
Kecamatan Samarinda Kota		2,17						7,28		
Kecamatan Samarinda Seberang										8,34
Kecamatan Samarinda Ulu	239,12			5,50		5,42			219,21	36,99
Kecamatan Samarinda Utara	2107,01	1,52	106,14		40,63	66,85			1849,78	280,98
Kecamatan Sambutan	53,33	0,88				115,71			843,02	13,34
Kecamatan Sungai Kunjang	314,49	1,24				22,30		1,50	468,97	52,84
Kecamatan Sungai Pinang	0,21						21,45		184,48	29,41



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Tabel 2.4 [Lanjutan]

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Perairan Lainnya	Perkebunan Kelapa Sawit	Permukiman Perdesaan	Permukiman Perkotaan	Pertahanan Keamanan	Rawa	Sawah Dengan Padi Terus Menerus	Semak/Belukar	Stadion dan Sarana Olahraga	Sungai
Kecamatan Loa Janan Ilir	3,97		266,55	560,2		0,18	365,96	691,53		199,61
Kecamatan Palaran	320,01	24,93	466,47	914,37		512,37	656,79	3441,13	83,74	991,75
Kecamatan Samarinda Ilir				328,42				66,62		66,05
Kecamatan Samarinda Kota				211,58	1,58			4,28	10,61	67,91
Kecamatan Samarinda Seberang	2,16		31,27	487,20	15,28	1,01	12,15	205,96		288,03
Kecamatan Samarinda Ulu	121,16		48,14	1359,27		198,95	2,17	1045,58		39,58
Kecamatan Samarinda Utara	151,78	366,03	668,58	1494,43		1584,34	953,78	3181,23		3,46
Kecamatan Sambutan	139,07		736,88	468,65		1254,40	748,16	3044,51		514,51
Kecamatan Sungai Kunjang	224,10		207,82	1418,19	2,34	771,06	53,90	1723,17		427,00
Kecamatan Sungai Pinang	8,18		65,64	1086,72		14,53	29,02	492,25		5,92



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



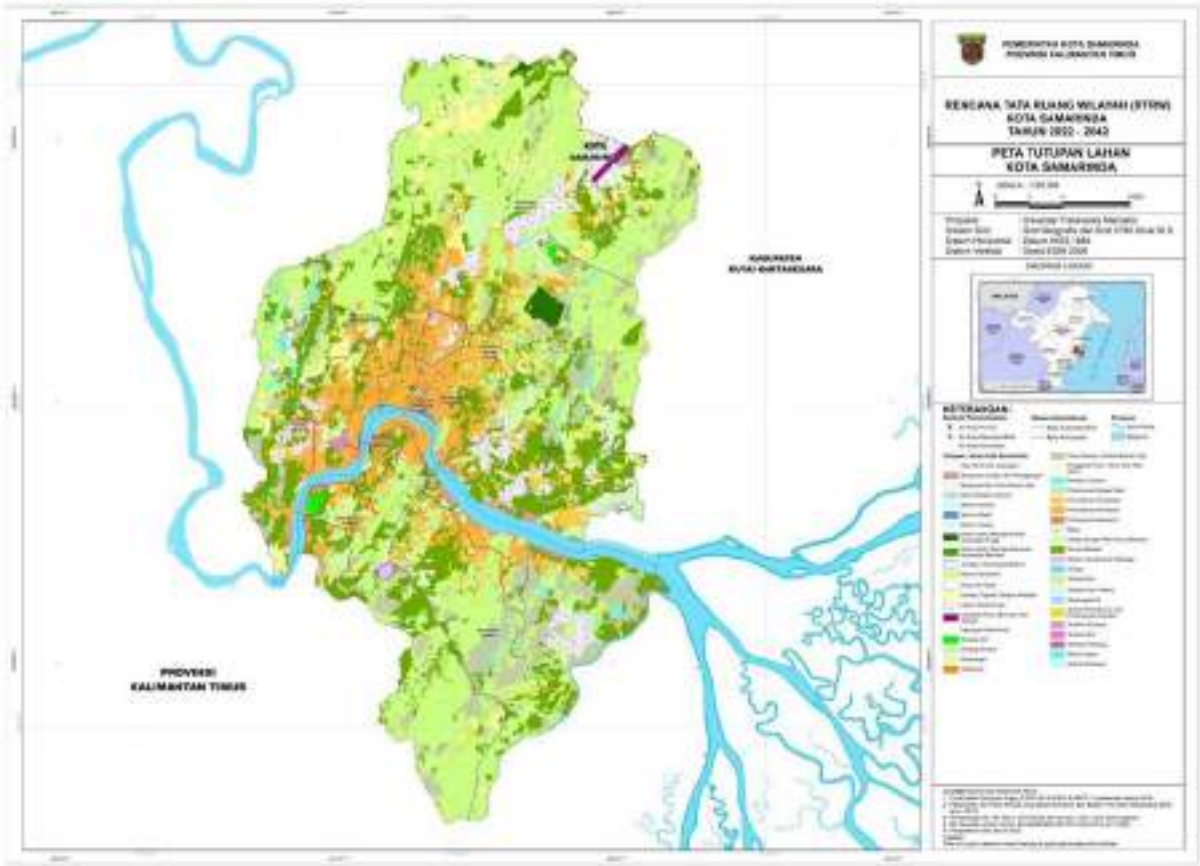
Tabel 2.4 [Lanjutan]

Kecamatan	Tutupan Lahan							
	Taman Kota	Tampungan Air Lain	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	Terminal Bandara	Terminal Bus	Terminal Timbang	Waduk Irigasi	Waduk Multiguna
Kecamatan Loa Janan Ilir	2,08	8,67				0,82		
Kecamatan Palaran		2,73						
Kecamatan Samarinda Ilir	1,87	0,24						
Kecamatan Samarinda Kota	5,77							
Kecamatan Samarinda Seberang	0,45	1,38			1,02			
Kecamatan Samarinda Ulu	3,37	0,43	13,39					
Kecamatan Samarinda Utara		9,17		37,82			14,33	7,91
Kecamatan Sambutan	1,26	2,95	6,91					
Kecamatan Sungai Kunjang	9,71	0,12			1,91			
Kecamatan Sungai Pinang	0,04	0,74		12,27				

Sumber: Hasil Survei Lapangan Serta Interpretasi Satelite SPOT 7, 2019



Gambar 2.2.
Peta Geologi Kota Samarinda



Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Secara struktur geologi di Kota Samarinda terdiri dari 4 (empat) jenis yakni aluvium, formasi balikpapan, formasi pulau balang dan formasi kampung baru. Adapun penjabaran secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.3 berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Geologi di Kota Samarinda

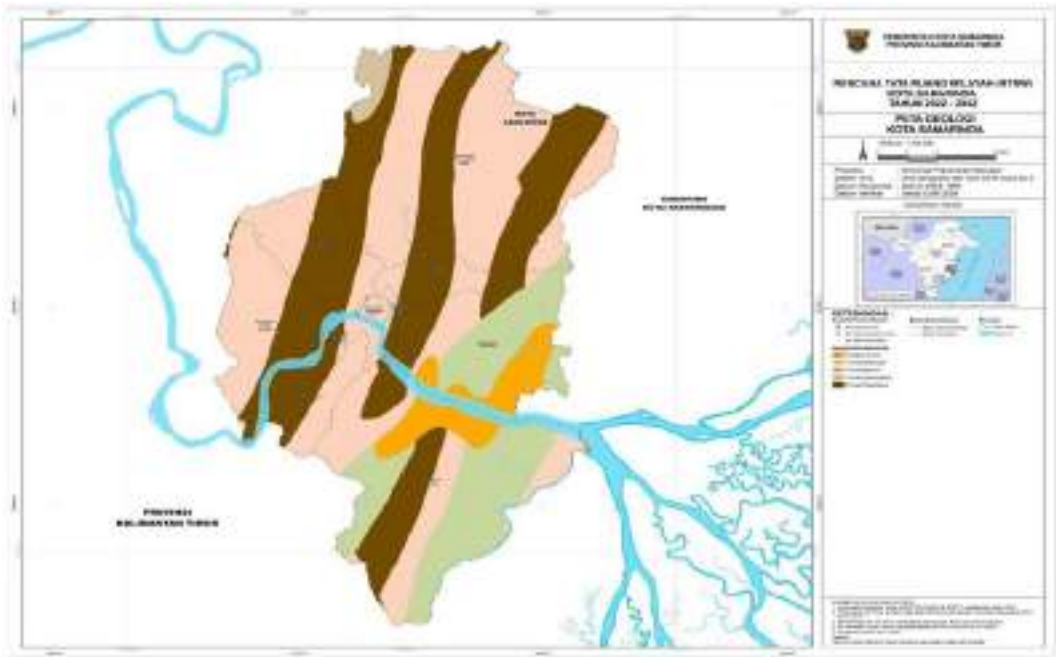
Kecamatan	Endapan Aluvium	Formasi Balikpapan	Formasi Bebuluh	Formasi Kampung Baru	Formasi Pulau Balang
	Qa	Tmbp	Tmb	Tmpk	Tmpb
Palaran	2224,62	5485,03		7669,79	3699,50
Samarinda Seberang		586,99			581,73
Samarinda Ulu		2582,12			2579,70
Samarinda Ilir		219,42			344,08



Kecamatan	Endapan Aluvium	Formasi Balikpapan	Formasi Bebuluh	Formasi Kampun g Baru	Formasi Pulau Balang
	Qa	Tmbp	Tmb	Tmpk	Tmpb
Samarinda Utara		12508,01	897,31	961,90	9701,96
Sungai Kunjang		4127,79			2580,69
Sungai Pinang		1285,35			1887,57
Sambutan	2355,09	1191,18		3204,68	1294,06
Samarinda Kota		362,42			
Loa Janan Ilir		1667,78			1589,59
Total	4579,71	30016,1	897,31	11836,36	24258,89

Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi: 2005, Peta Geologi Bersistem, Indonesia, Lembar (Quadrangle) Samarinda 1815, 1915 Skala 1:250.000 Tahun 2011

Gambar 2.3.
Kondisi Bentuk Lahan Kota Samarinda



Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

2.1.1.4. Kondisi Hidrologis

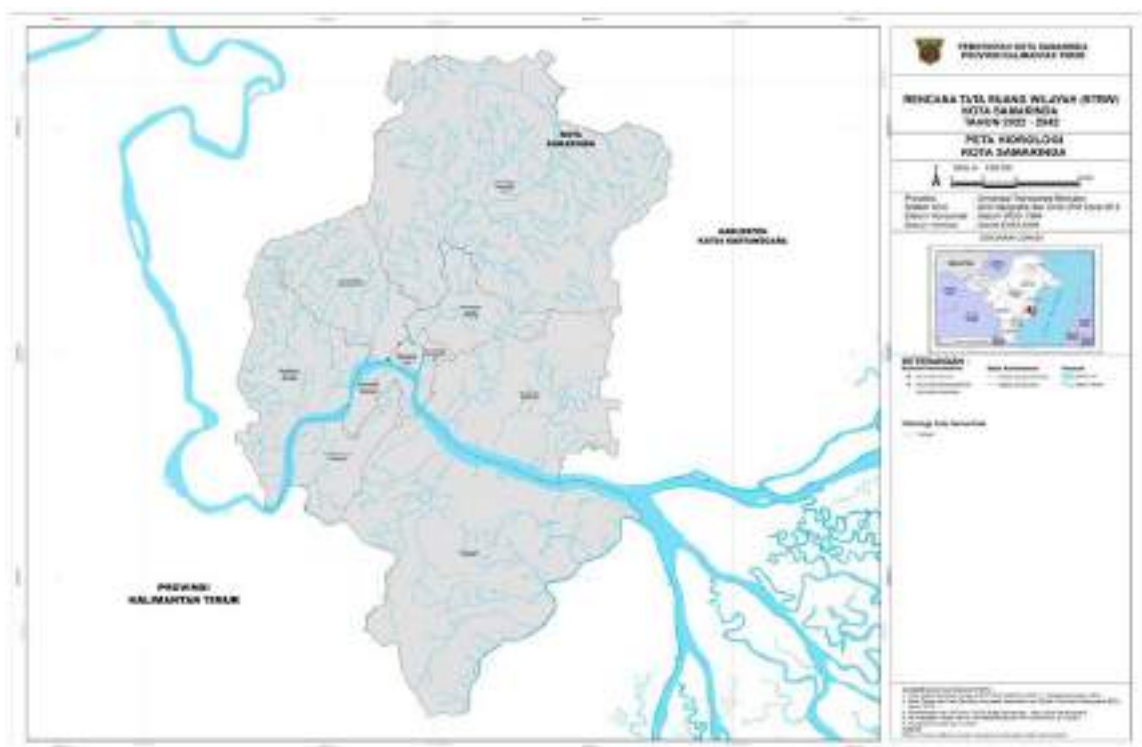
Berdasarkan kondisi hidrologinya, Kota Samarinda dipengaruhi oleh sekitar 20 daerah aliran sungai (DAS). Sungai Mahakam adalah sungai utama yang membelah Kota Samarinda dengan lebar antara 300 - 500 meter, sungai-sungai lainnya adalah anak-anak sungai yang bermuara di Sungai Mahakam, sebagai berikut:

1. Sungai Karang Mumus dengan luas DAS sekitar 218,60 km².



2. Sungai Palaran dengan luas DAS 67,68 km².
3. Anak sungai lainnya antara lain Sungai Loa Bakung, Loa Bahu, Bayur, Betepung, Muang, Pampang, Kerbau, Sambutan, Lais, Tas, Anggana, Loa Janan, Handil Bhakti, Loa Hui, Rapak Dalam, Mangkupalas, Bukuan, Ginggang, Pulung, Payau, Balik Buaya, Banyuur, Sakatiga, dan Sungai Bantuas.

Gambar 2.4.
Peta Hidrologi Kota Samarinda



Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Kota Samarinda memiliki Iklim Tropika Humida yakni memiliki musim penghujan dan musim kemarau. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Kota Samarinda pada tahun 2023, Samarinda mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,3°C. Suhu udara terendah 26,50°C terjadi pada bulan Maret dan tertinggi 27,70°C pada bulan Januari, Februari, Oktober. Kota Samarinda mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 2023, kelembaban udara berkisar antara 81,40% sampai dengan 89,80%, dengan kelembaban udara rata-rata 85,4%. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 170,2 mm³ per tahun, dengan curah hujan tertinggi 303,3 mm³ pada Bulan April 2023 dan terendah 45 mm³ pada Bulan



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Agustus. Sedangkan curah hujan terbanyak terjadi di Bulan Maret 2023. Persentase penyinaran matahari di Kota Samarinda rata-rata 5,3%, dan jumlah hari hujan rata-rata tahun 2023 adalah 18,17 Hari. Hujan Kota Samarinda per bulan, dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.5.

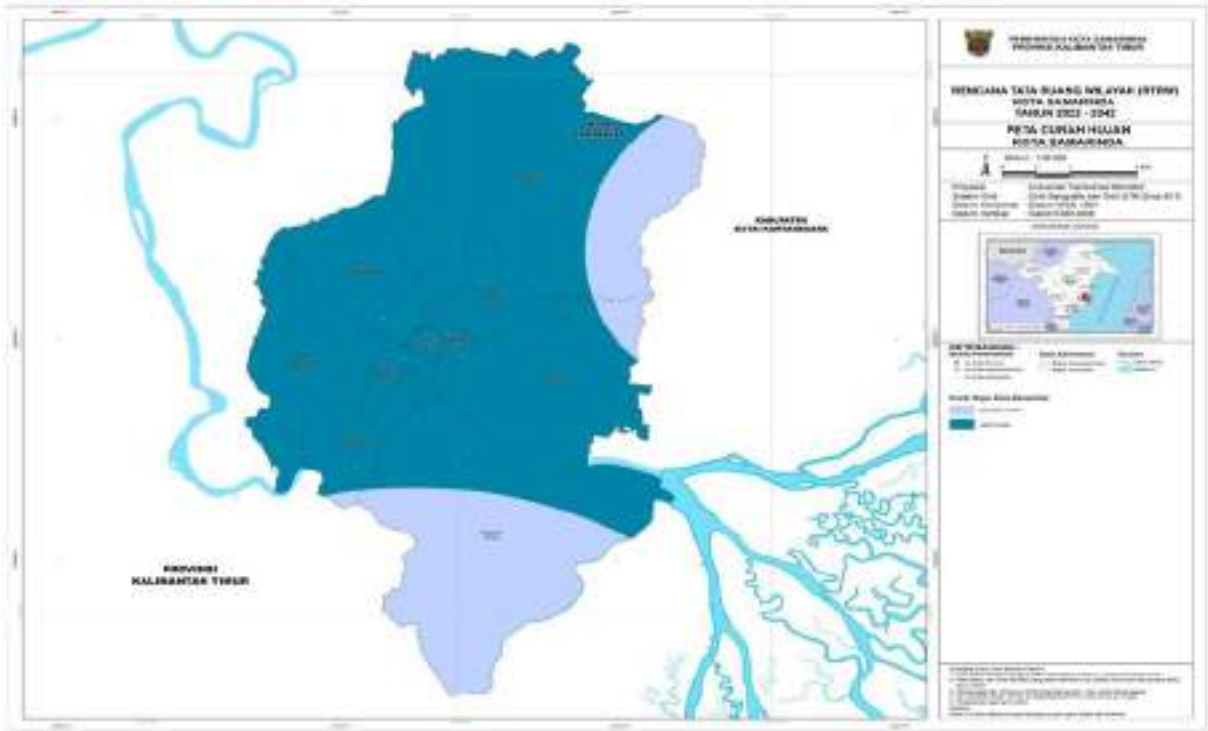


Tabel 2.6
Kondisi Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kota Samarinda
Tahun 2023

Bulan/Tahun	Curah Hujan(MM)	Suhu	Kelembapan(%)	Tekanan Udara (MB)	Kecepatan Angin(m/det)
	2023	2023	2023	2023	2023
Januari	144.4	27.70	81.50	1006.50	3.60
Februari	152.8	27.70	81.40	1006.70	3.70
Maret	232.1	26.50	89.00	1007.80	2.60
April	303.3	26.80	88.80	1006.60	2.50
Mei	176.6	27.20	89.00	1007.70	2.50
Juni	229.8	26.70	89.80	1007.50	2.50
Juli	71.8	27.10	86.20	1008.00	3.30
Agustus	45	27.60	82.60	1008.50	3.60
September	134.3	27.60	82.20	1007.80	3.40
Oktober	110.7	27.70	83.50	1008.40	2.70
November	282.8	27.30	86.10	1007.20	2.40
Desember	158.7	27.60	84.70	1007.40	2.80
Rata-Rata	170.2	27.29	85.40	1007.51	2.97

Sumber: BPS Kota Samarinda Tahun 2024

Gambar 2.5.
Peta Curah Hujan Kota Samarinda



Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042



2.1.1.6. Kondisi Jenis Tanah

Secara eksploratif Kota Samarinda terdiri dari beberapa jenis tanah, diantaranya:

- 1. Jenis tanah Aluvial yang hanya terdapat pada Kecamatan Palaran 14,89 hektar
- 2. Jenis tanah Organosol Glei Humus terdapat pada tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Kunjang dengan luasan total 6.608,96 hektar
- 3. Jenis tanah Komplek Podsolik Merah Kuning terdapat di Kecamatan Palaran dan Samarinda Utara dengan luasan total 3.661,80 hektar.
- 4. Jenis tanah Podsolik Merah Kuning merupakan jenis tanah yang tersebar di seluruh Kota Samarinda dan memiliki luasan 58.760,68 hektar.

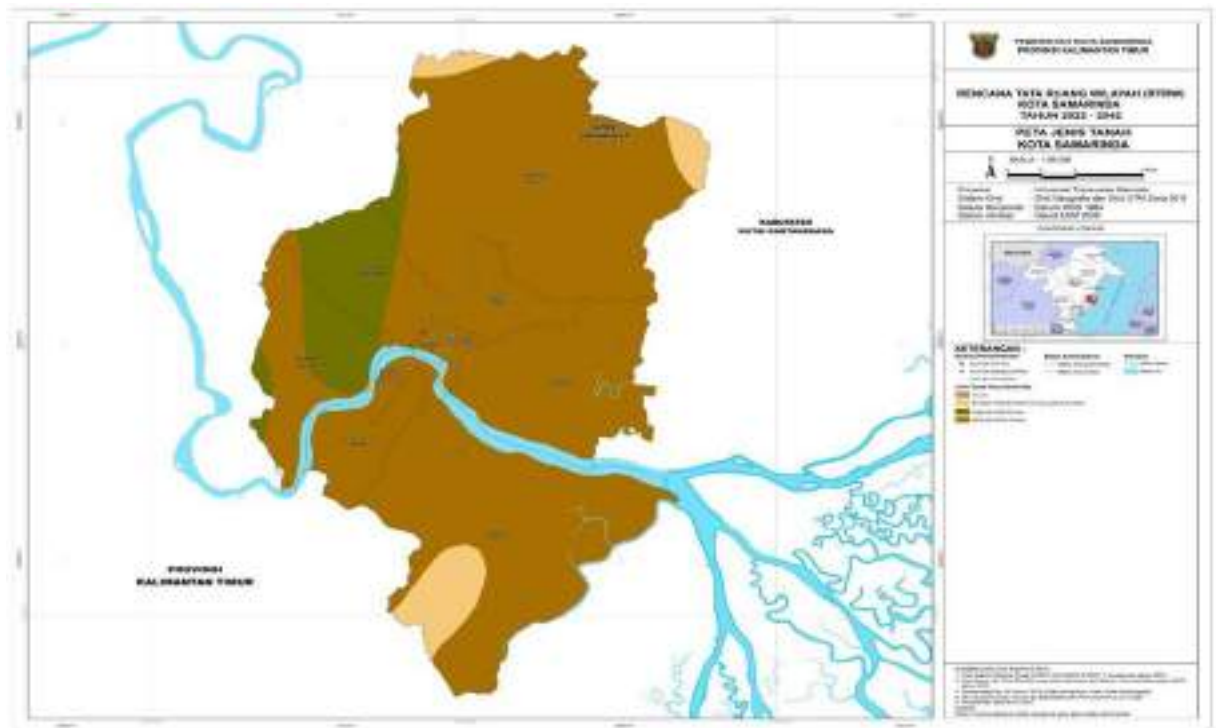
Adapun penjabaran secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.6 berikut:

Tabel 2.7
Jenis Tanah Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Jenis Tanah Kota Samarinda (Ha)				
	Aluvial	Komplek Padsolik Merah Kuning, Latosol & Litosol	Organoso l Glei Humus	Padsolik, Merah Kuning	Sungai
Palaran	14,90	2.300,58		15.800,19	978,33
Samarinda Seberang				862,30	307,35
Samarinda Ulu			3.493,24	1.635,79	36,90
Samarinda Ilir				504,73	59,22
Samarinda Utara		1.364,11	438,72	22.285,28	
Sungai Kunjang			2.682,26	3.606,61	424,96
Sungai Pinang				3.175,42	
Sambutan				7.583,76	467,58
Samarinda Kota				299,72	62,99
Loa Janan Ilir				3.053,26	206,71

Sumber: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 2000 (Skala 1:1.000.000)

Gambar 2.6.
Peta Jenis Tanah Kota Samarinda



Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

Berdasarkan informasi dari Peta Tanah Skala 1 : 50.000 (BBSDLP Kementan, 2016), wilayah Kota Samarinda didominasi oleh tanah dari kombinasi ordo Kambisol Distrik dan Podsolik Haplik, diikuti oleh kombinasi ordo Podsolik Haplik dan Kambisol Distrik, serta ordo Kambisol Distrik dan Gleisol Sulfik. Ketiga kombinasi ordo ini dicirikan dengan kedalaman tanah yang dalam (60-90 cm), drainase yang baik, tekstur halus hingga sedang, kapasitas tukar kation bervariasi antara tinggi hingga sedang, dengan bahan induk batu liat dan batu pasir. Selebihnya, wilayah Kota Samarinda masih didominasi kombinasi ordo yang serupa kecuali kombinasi ordo Aluvial Sulfidik dan Gleysol Sulfik, yang kedalaman tanahnya dangkal (0-30 cm), dan drainasenya sangat terhambat yang tersebar di dataran estuarin di sekitar muara Sungai Mahakam atau bagian timur Kota Samarinda. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah yang arealnya terluas di Kota Samarinda mencapai 57,57% dan

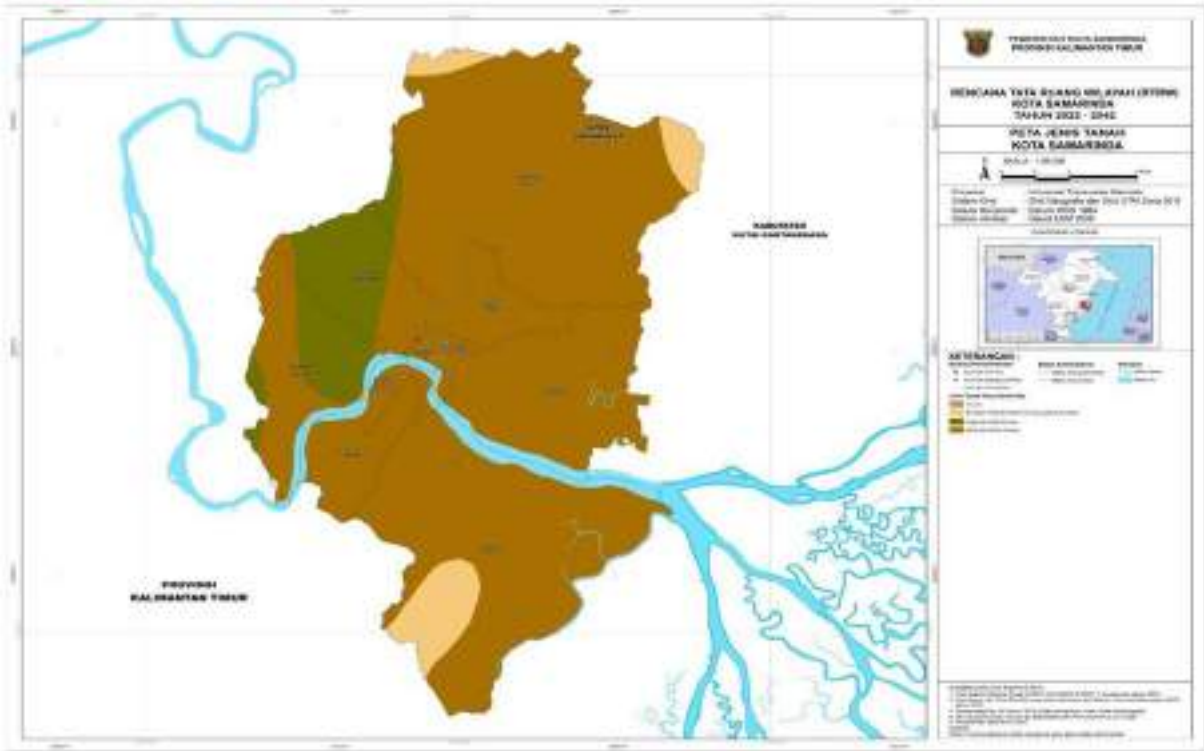


masih tersedia untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur-unsur hara di permukaan belum habis melalui proses *biocycle*.

2.1.1.7. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologis, Kota Samarinda merupakan bagian muara dari Sungai Mahakam yang membentang sepanjang kurang lebih 920 kilometer dari hulunya. Beberapa anak sungai yang bermuara di Sungai Mahakam dan sebagian besar daerah aliran sungainya membentuk Kota Samarinda, adalah: Sungai Karang Mumus, Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, Loa Bakung, Palaran, dan Sambutan. Sebagaimana disajikan pada Gambar 2.7., Daerah Aliran Sungai Karang Mumus memiliki wilayah hingga di luar wilayah administratif Kota Samarinda, sehingga penanganan DAS ini membutuhkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten di sekitarnya (Kutai Kartanegara).

Gambar 2.7.
Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Samarinda



Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana



Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022, diketahui bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan yang tergolong tinggi, diikuti oleh longsor, kekeringan dan konflik sosial. Namun apabila dicermati di tingkat Provinsi Kaltim, Kota Samarinda justru memiliki skor terendah dalam Indeks Rawan Bencana dibanding kabupaten/kota se-Kaltim. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2023 Kota Samarinda menempati peringkat 10 di Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 98,29 dan masuk kelas rawan “Sedang”.

Tabel 2.8
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023
Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Rawan	Rangking Provinsi
Samarinda	98,29	Sedang	10
Kutai Kartanegara	114,30	Sedang	9
Balikpapan	118,21	Sedang	8
Bontang	127,25	Sedang	7
Penajam Paser Utara	129,44	Sedang	6
Kutai Barat	149,15	Tinggi	5
Mahakam Ulu	156,40	Tinggi	4
Berau	173,74	Tinggi	3
Kutai Timur	185,17	Tinggi	2
Paser	191,78	Tinggi	1

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023

Apabila dilihat lebih mendalam seluruh kelas bahaya yang ada di Kota Samarinda, berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda bahwa kelas bahaya dominan paling tinggi adalah Banjir. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Kelas Bahaya Dominan di Kota Samarinda

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1	Banjir	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi
3	Difteri	Rendah
4	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah



No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah
6	Kekeringan	Sedang
7	Konflik Sosial	Sedang
8	Longsor	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022, bencana Banjir dan Cuaca Ekstrem tergolong kelas bahaya dominan tinggi, kemudian diikuti bencana Longsor, Kekeringan, dan Konflik Sosial yang tergolong kelas bahaya dominan sedang. Apabila melihat frekuensi terjadinya di Kota Samarinda, bencana Banjir dan Longsor adalah dua bencana yang kerap terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Tabel 2.10
Rincian Luas Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan
Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Luas Potensi Bahaya Banjir (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah (%)	Kelas Dominan Wilayah Banjir
1	Loa Janan Ilir	578	18,22	Tinggi
2	Palaran	4.862	24,94	Tinggi
3	Samarinda Ilir	221	39,22	Tinggi
4	Samarinda Kota	287	79,19	Tinggi
5	Samarinda Seberang	609	52,11	Tinggi
6	Samarinda Ulu	723	13,40	Tinggi
7	Samarinda Utara	3.476	15,29	Tinggi
8	Sambutan	3.572	41,42	Tinggi
9	Sungai Kunjang	1.691	24,04	Tinggi
10	Sungai Pinang	582	18,34	Tinggi
Kota Samarinda		16.601	23,14	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan yang memicu migrasi juga turut memberikan dampak pada ancaman bencana banjir di Kota Samarinda. Peningkatan jumlah penduduk dikawasan perkotaan sehingga dataran banjir yang sebenarnya rawan terhadap genangan dan banjir terpaksa digunakan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Bencana banjir dengan indeks risiko tinggi, utamanya

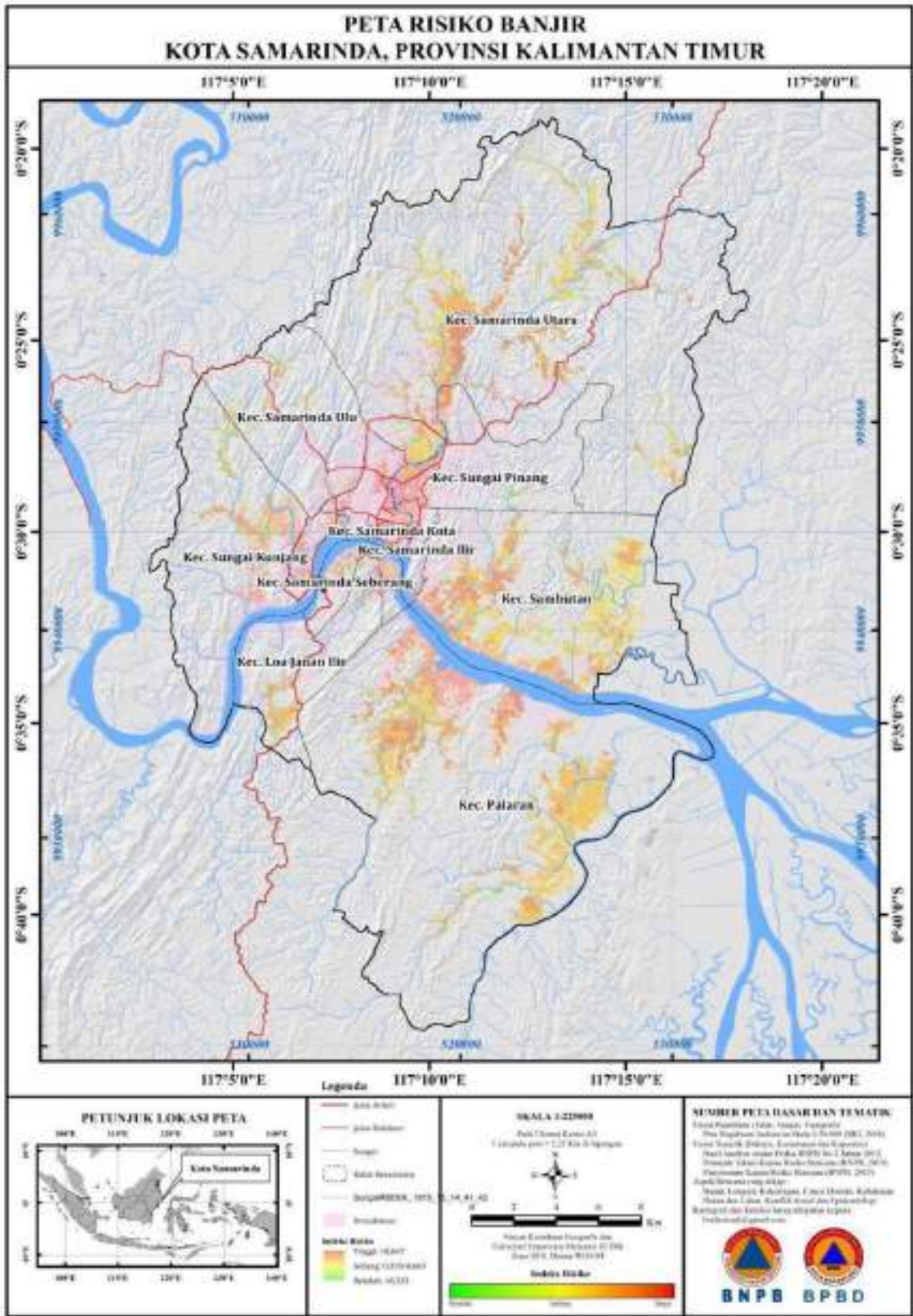


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



banyak terdapat di kecamatan Samarinda Kota, sisi timur kecamatan Sungai Pinang, bagian tengah kecamatan Samarinda Utara, pada dataran banjir S. Karang Mumus. Berikutnya, terdapat di sebagian Samarinda Seberang, Sambutan, Palaran, Sungai Kunjang, Loa Janan Ilir, barat laut Samarinda Ilir dan sebagian kecil tenggara Samarinda Ilir.

Gambar 2.8.
Peta Risiko Banjir Kota Samarinda



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Apabila dilihat lebih dalam pada kawasan kelurahan, yang banyak terdapat risiko tinggi risiko banjir adalah kelurahan Mesjid, Tenun Samarinda, Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, Sungai Pinang Luar, Pelita, Bandara, Temindung Permai. Kawasan risiko tinggi banjir juga terdapat pada sebagian kawasan lain, yakni sisi utara kelurahan Rawa



Makmur, sebagian barat laut kelurahan Handil Bakti, separuh sisi barat kelurahan Sungai Kapih, sebagian selatan kelurahan Pulau Atas, sebagian timur kelurahan Bukuan, separuh utara kelurahan Karang Asam Ulu dan separuh timur kelurahan Karang Asam Ilir, bantaran Sungai Karang Asam Besar pada kelurahan Lok Bahu, sebagian hilir bantaran Sungai Karang Asam Kecil pada kelurahan Air Putih, bantaran Sungai Karang Mumus pada bagian timur kelurahan Gunung Kelua, Sempaja Selatan, Sempaja Timur; bagian barat kelurahan Gunung Lingai, Lempake. Pada bagian kawasan lain, terdapat indeks risiko sedang hingga rendah untuk banjir, yang utamanya terdapat pada kawasan perbukitan di kecamatan-kecamatan yang ada di Samarinda.

Oleh karena itu diperlukan ruang evakuasi bencana banjir yaitu:

1. Perumahan Bukit Alaya Kecamatan Sungai Pinang;
2. GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu;
3. Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir;
4. Stadion Madya Sempaja Kecamatan Samarinda Utara;
5. Balai Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Kota;
6. Islamic Centre Kecamatan Sungai Kunjang;
7. Gedung SMA Negeri 11 Kecamatan Sambutan;
8. Lapangan KNPI Kecamatan Samarinda Seberang.

Bencana banjir di Kota Samarinda merupakan bencana terstruktur yang harus segera diantisipasi dengan pembenahan secara masif dan konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda telah membuat sebuah skenario masterplan penanganan bencana banjir dari tahun 2016 hingga tahun 2035 yang diperkirakan menelan dana hingga mencapai 5,26 triliun dalam jangka waktu 20 tahun. Kegiatan dalam masterplan tersebut adalah pembuatan atau perbaikan saluran sanitasi lingkungan, pembuatan kolam retensi, pengadaan pompa, pengadaan alat penangkap lumpur, serta penanganan-penanganan khusus bencana banjir.

Di Kota Samarinda terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 9 kecamatan dimana hanya wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak pernah mengalami bencana banjir seperti yang terlihat pada Tabel 2.11. Titik bencana banjir terbanyak berada di Kecamatan Palaran yang mencapai 9 titik, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Utara yang masing-masing sebanyak 7 titik banjir. Pada tahun 2005, setiap titik banjir tersebut hanya mengalami 6-10 kali bencana banjir dalam setahun, tetapi



pada masa sekarang hampir setiap kondisi hujan mengalami bencana banjir. Melihat keadaan seperti itu bukan hal yang aneh jika urgensi penanganan banjir di Kota Samarinda menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah periode saat ini.

Tabel 2.11
Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Panjang Saluran (Km)	Kolam Retensi	Jumlah Pompa	Jumlah Penangkap Lumpur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Palaran	9	57,25	4	8	124
2	Samarinda Ilir	7	34,35	7	8	95
3	Samarinda Kota	4	18,00	-	2	51
4	Sambutan	-	-	-	-	-
5	Samarinda Seberang	6	29,70	3	5	84
6	Loa Janan Ilir	4	25,50	2	4	51
7	Sungai Kunjang	5	34,25	4	4	63
8	Samarinda Ulu	4	34,25	3	6	66
9	Samarinda Utara	7	33,75	4	9	87
10	Sungai Pinang	4	19,50	4	8	58
Total		50	286,55	31	54	679

Sumber: Skenario Masterplan Banjir Kota Samarinda Tahun 2016-2035

Dalam menangani banjir di Kota Samarinda sebagai bagian dari *masterplan* perencanaan penanganan bencana banjir, setidaknya terdapat empat kegiatan yang akan ditempuh ditambah dengan penanganan khusus terhadap beberapa wilayah. Program dan kegiatan pertama dalam menangani permasalahan banjir di Kota Samarinda adalah dengan meningkatkan panjang saluran air sekaligus mengefisiensikan sanitas lingkungan. Peningkatan saluran air ini merupakan pembuatan saluran baru atau memperbaiki saluran lama yang telah rusak dengan total saluran sepanjang 286,55 Km di seluruh Kota Samarinda. Sebagian besar peningkatan saluran air berada di Kecamatan Palaran sepanjang 57,25 Km dan paling pendek pembuatan saluran berada di Kecamatan Samarinda Kota sepanjang 18,00 Km.



Selain banjir, bencana longsor kerap terjadi di Kota Samarinda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa di Kota Samarinda telah terjadi total 41 kejadian bencana longsor, 3 orang meninggal, 2 luka-luka dan 422 orang menderita. Adapun rincian bahaya longsor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Rincian Luas Potensi Bahaya Longsor Per Kecamatan
Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Luas Potensi (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah Kecamatan (%)	Kelas Dominan
1	Loa Janan Ilir	3.170	99,90	Sedang
2	Palaran	19.422	99,62	Sedang
3	Samarinda Ilir	563	99,91	Rendah
4	Samarinda Kota	364	100,00	Rendah
5	Samarinda Seberang	1.172	100,00	Rendah
6	Samarinda Ulu	5.398	100,00	Rendah
7	Samarinda Utara	22.663	99,69	Sedang
8	Sambutan	8.605	99,79	Rendah
9	Sungai Kunjang	6.994	99,42	Rendah
10	Sungai Pinang	3.169	99,88	Sedang
Kota Samarinda		71.520	99,71	Sedang

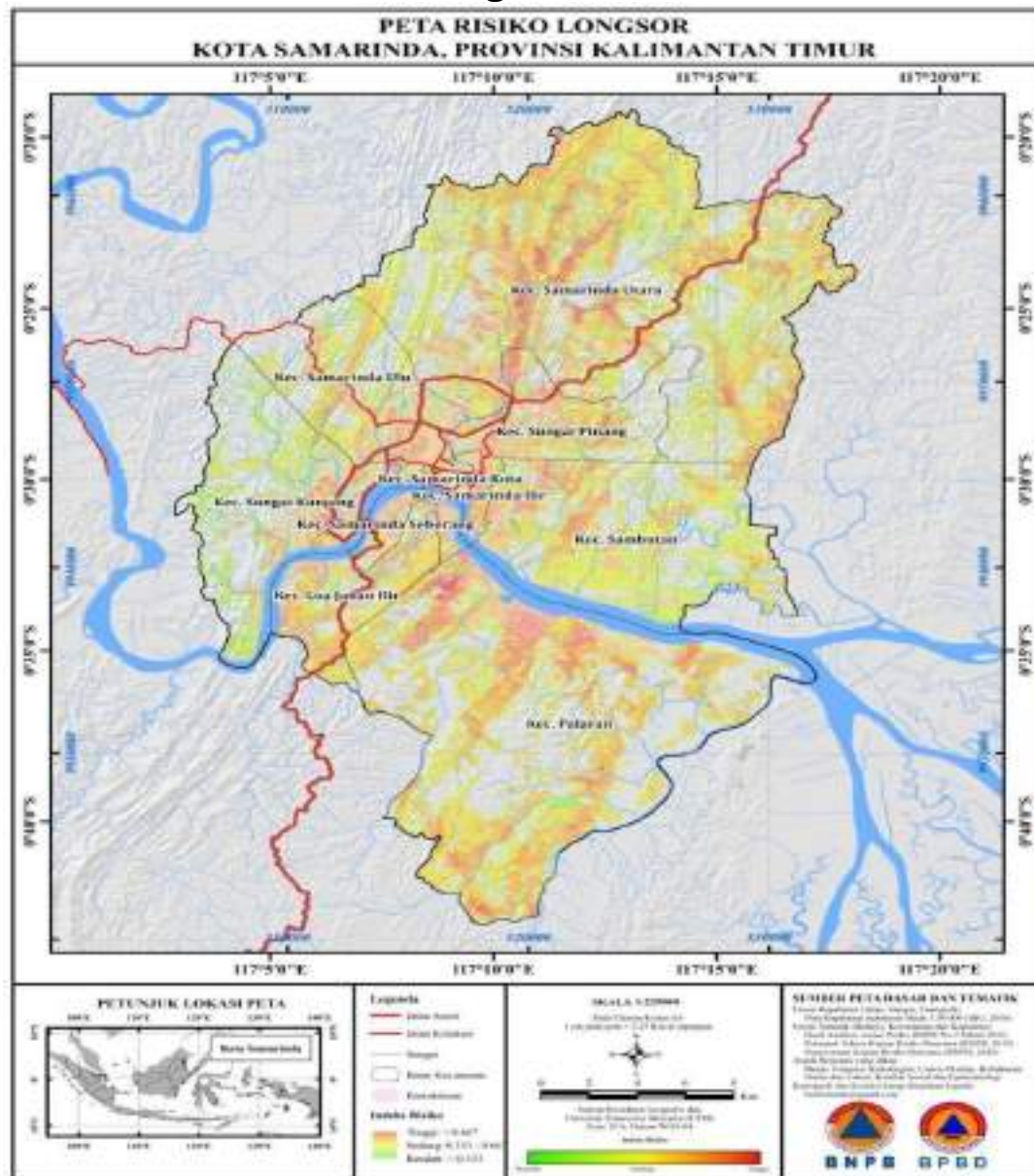
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Indeks risiko tinggi terdapat pada sisi barat laut kelurahan Bantuas, bagian tengah kelurahan Rawa Makmur, bagian barat kelurahan Bukuan, sisi timur laut kelurahan Simpang Pasir, sebagian sisi tenggara dan barat laut kelurahan Sungai Siring, sebagian sisi selatan kelurahan Budaya Pampang sisi barat kelurahan Gunung Lingai dan Lempake, sisi timur kelurahan Sempaja Utara, sebagian perbukitan di barat kelurahan Karang Asam Ulu dan Karang Asam Ilir, bagian tengah kelurahan Air Putih dan Air Hitam, sisi barat kelurahan Sidodadi, sebagian sisi tengah kelurahan Bukit Pinang pada perbukitan yang berarah utara timur laut – selatan barat daya, perbukitan sisi barat kelurahan Sengkotek. Adapun kawasan yang banyak terdapat risiko tinggi Longsor adalah kelurahan Lempake, disusul kelurahan Sempaja Selatan, Sempaja Barat, Sempaja



Timur. Sedangkan kawasan dengan tingkat risiko sebagian besar tergolong sedang dengan sebagian kecil tergolong tinggi, ada pada wilayah kelurahan Tanah Merah, Sungai Siring, Sempaja Utara, Budaya Pampang.

Gambar 2.9.
Peta Risiko Longsor Kota Samarinda



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Namun mengingat Kota Samarinda tidak memiliki wilayah laut, maka nilai IKLH hanya ditentukan oleh 3 (tiga) komponen.



Pada tahun 2023, IKLH Kota Samarinda mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 56,03 menjadi 59,90 dengan kriteria Sedang. Hal ini memberi gambaran upaya yang dilakukan seluruh masyarakat Kota Samarinda untuk menjaga lingkungan hidup. Seluruh komponen IKLH mengalami peningkatan dari kondisi tahun 2022.

Tabel 2.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Samarinda Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	45,81	50
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,81	85,31
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	25,90	29,92
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,03	59,90

Sumber: RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Kementerian LHK, 2024

IKLH dapat digunakan untuk:

- Menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup
- Mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penghitungan IKLH diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks di Kabupaten/Kota (Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)) yang dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Kabupaten/Kota.

$$IKLH = (0,776 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Secara konsepsi, perhitungan IKLH memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu provinsi relatif terhadap provinsi lainnya. Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup.



**Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Samarinda dengan IKLH Provinsi Kaltim dan Nasional**

	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH Kota Samarinda		55,38	52,36	57,78	56,09	59,90
IKLH Provinsi Kaltim	61,47	80,79	76,46	75,06	61,47	75,07
Capaian IKLH Nasional	65,14	66,55	70,27	71,45	72,42	72,54
Target IKLH Nasional	65,00	66,50	68,71	68,96	69,22	69,58

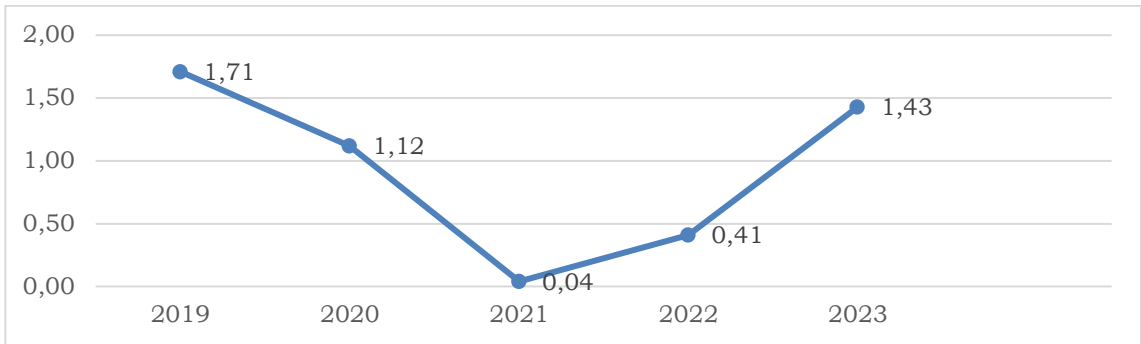
**Sumber: Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dankehutanan – 2024*

Berdasarkan grafik nilai IKLH Kota Samarinda, sepanjang tahun 2019 hingga 2023 mengalami berfluktuasi di sekitar angka 55-60. Nilai IKLH kota Samarinda tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan tersebut cukup tinggi yaitu sebesar 0,81. Pencaapaian IKLH Kota Samarinda di tahun 2023 sebesar 59,90, berada pada status baik. Namun demikian, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus terus dilakukan oleh pemerintah kota untuk agar lebih baik lagi kedepannya.

2.1.2. Demografi
Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam konteks ini, partisipasi aktif penduduk menjadi kunci. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek-proyek pembangunan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi mereka. Keterlibatan ini bukan hanya sebatas memberikan informasi, tetapi juga melibatkan penduduk dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Gambar 2.10.
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)



Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2023

Jumlah penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun terus meningkat, walaupun pertumbuhannya melambat. BPS mencatat pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Samarinda sebesar 861.878 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,43 persen. BPS memperkirakan pula pertumbuhan penduduk Kota Samarinda akan terus melambat rata-rata tahunan di bawah 1 persen dan pada tahun 2035 jumlah penduduk Kota Samarinda akan menyentuh di angka 924.300 jiwa.

Pertumbuhan penduduk yang mengalami perlambatan seringkali mencerminkan adanya perubahan dalam tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang melambat menciptakan peluang untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan jumlah penduduk yang stabil atau bahkan menurun, fokus dapat dipindahkan dari upaya mengatasi pertumbuhan yang cepat menjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Penyebab utama dibalik perlambatan pertumbuhan penduduk ini berkaitan dengan perubahan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi, terutama bagi perempuan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontrol kelahiran dan memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih informan tentang jumlah anak yang diinginkan. Faktor-faktor ekonomi sering kali menyebabkan pergeseran nilai dan norma sosial yang mempengaruhi keputusan keluarga terkait dengan ukuran keluarga. Selain itu, perkembangan teknologi dan akses yang lebih baik terhadap informasi telah memberikan masyarakat pengetahuan yang lebih luas tentang keberlanjutan dan dampak pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan. Kesadaran akan isu-isu seperti keberlanjutan lingkungan, perubahan iklim, dan keterbatasan sumber daya alam telah mendorong banyak individu dan keluarga untuk mengambil tindakan bertanggung jawab terhadap ukuran keluarga mereka.



Kepadatan Penduduk

Perekonomian di Kota Samarinda yang didominasi oleh sektor Konstruksi, Perdagangan dan Jasa, serta Pertambangan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bermigrasi ke Kota Samarinda sehingga berdampak langsung terhadap kepadatan dan persebaran penduduk di Kota Samarinda. Berdasarkan data dari BPS, tercatat pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Samarinda yaitu sebanyak 861.878 dengan kepadatan 1.200,39 jiwa/km². Melihat persebaran penduduk per kecamatan, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sungai Kunjang9 sebanyak 139.320 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebesar 6.027,62 jiwa/km². Adapun penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Samarinda Kota yang hanya 32.379 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebesar 2.911,78 jiwa/km². Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda ulu merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan 6.027,62 jiwa/km².

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023
Kota Samarinda

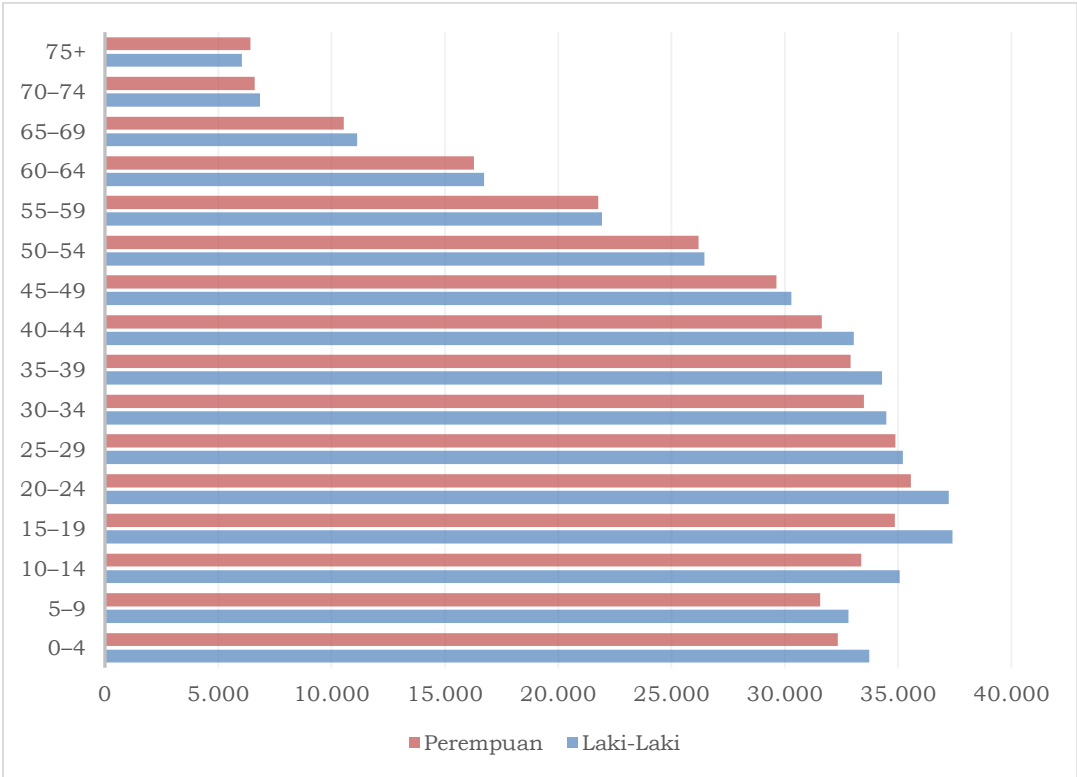
Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan per km ²
Palaran	67.201	107,021	221,19	303,82
Samarinda Ilir	69.358	103,934	17,18	4037,14
Samarinda Kota	33.918	99,612	11,12	3050,18
Sambutan	58.054	104,913	100,95	575,08
Samarinda Seberang	65.743	104,922	12,49	5263,65
Loa Janan Ilir	67.586	103,474	26,13	2586,53
Sungai Kunjang	138.165	103,357	43,04	3210,15
Samarinda Ulu	137.396	101,857	22,12	6211,39
Samarinda Utara	106.942	104,025	229,52	465,94
Sungai Pinang	106.266	102,508	34,16	3110,83
Kota Samarinda	850.629	103,504	718,00	3110,83

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2024



Struktur dan komposisi penduduk dapat digambarkan melalui Diagram Piramida Penduduk. Piramida penduduk Kota Samarinda berbentuk kerucut dengan bagian tengah yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Kota Samarinda termasuk struktur penduduk produktif. Usia 15-24 tahun lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini dapat diartikan bahwa tingkat kelahiran turun dan atau harapan hidup meningkat, sehingga proporsi penduduk usia produktif menjadi lebih besar. Jumlah penduduk usia produktif yang besar diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, karena semakin tinggi usia produktif maka akan semakin banyak penduduk yang terlibat dalam produksi barang dan jasa, sehingga produktivitas daerah akan semakin meningkat.

Gambar 2.11.
Piramida Penduduk Tahun 2023 Kota Samarinda



Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kota Samarinda didominasi oleh lulusan SLTA/Sederajat sebesar 27,85 persen. Penduduk yang menamatkan DI-DIII sebesar 2,48 persen, dan tamatan DIV/S1 – S3 sebesar 7,82 persen.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2023
Kota Samarinda



Tingkat Pendidikan	2020		2021		2022		2023	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)
Tidak/Belum Sekolah	208.302	25,49	216.810	26,08	227.014	26,72	233,449	27,09
Belum Tamat SD/Sederajat	86.656	10,60	86.738	10,44	87.059	10,25	85,765	9,95
Tamat SD/Sederajat	104.040	12,73	103.383	12,44	102.792	12,10	101,821	11,81
SLTP/Sederajat	110.048	13,47	110.502	13,29	111.119	13,08	112,206	13,00
SLTA/Sederajat	228.851	28,00	231.670	27,87	236.052	27,78	240,029	27,85
Diploma I/II	2.968	0,36	2.946	0,35	2.919	0,34	2,908	0,34
Akademi/ Diploma III/ S. Muda	17.104	2,09	17.567	2,11	18.097	2,13	18,475	2,14
Diploma IV/Strata I	54.376	6,65	56.485	6,80	59.283	6,98	61,675	7,17
Strata II	4.612	0,56	4.797	0,58	5.027	0,59	5,272	0,61
Strata III	297	0,04	322	0,04	355	0,04	368	0,04
Jumlah	817.254	100,00	831.220	100,00	849.717	100,00	861.878	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.Fokus Kesejahteraan Ekonomi

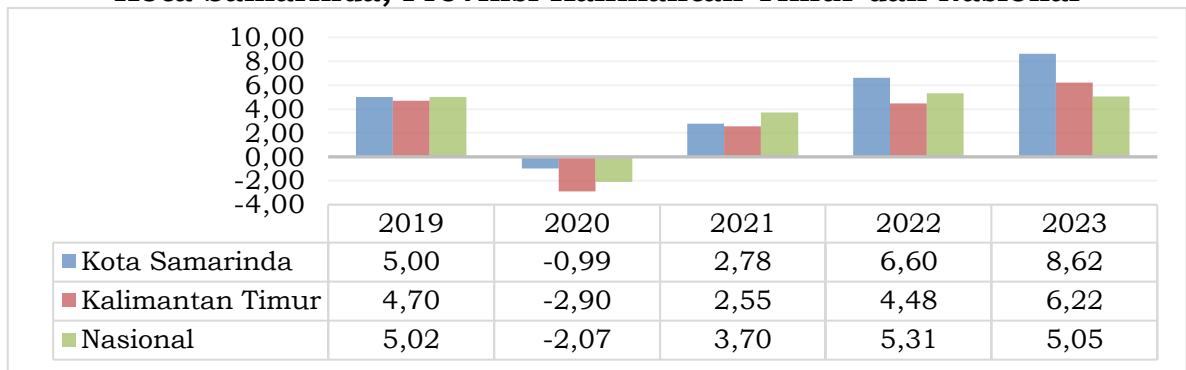
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan indikator utama dalam melihat perkembangan perekonomian secara series sebagai pembandingan antara nilai absolut perekonomian (PDRB atas dasar harga berlaku) dan distribusi nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah potret pembangunan perekonomian suatu daerah dengan membandingkan perencanaan pembangunan perekonomian antar waktu. Pembangunan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang.

Gambar 2.12.



**Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional**



Sumber: BPS Kota Samarinda, 2024 & BPS Kalimantan Timur, 2024

Sebagai ibukota provinsi pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda menjadi sebuah tolak ukur bagi perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjadi barometer pembangunan provinsi. Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda dapat dikatakan tumbuh konstan dan positif dalam kurun waktu 2018-2019. Pada tahun 2020 perekonomian tumbuh negatif yang disebabkan oleh mewabahnya virus COVID-19, sehingga membuat hampir semua lapangan usaha terdampak pengaruhnya. Hal tersebut menyebabkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 0,99 persen karena adanya pembatasan dan penurunan aktivitas bisnis akibat pandemi. Meskipun masih dalam masa pandemi, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya memperbaiki kondisi tersebut. Pada tahun 2021, terlihat tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,78 persen. Trend positif ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,60 persen dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 8,62 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2022 dan 2023 bahkan bisa melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, dimana untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya sebesar 6,22 persen dan nasional pada tahun yang sama hanya sebesar 5,05 persen. Capaian yang terus meningkat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diambil telah berhasil merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama di Kota Samarinda.



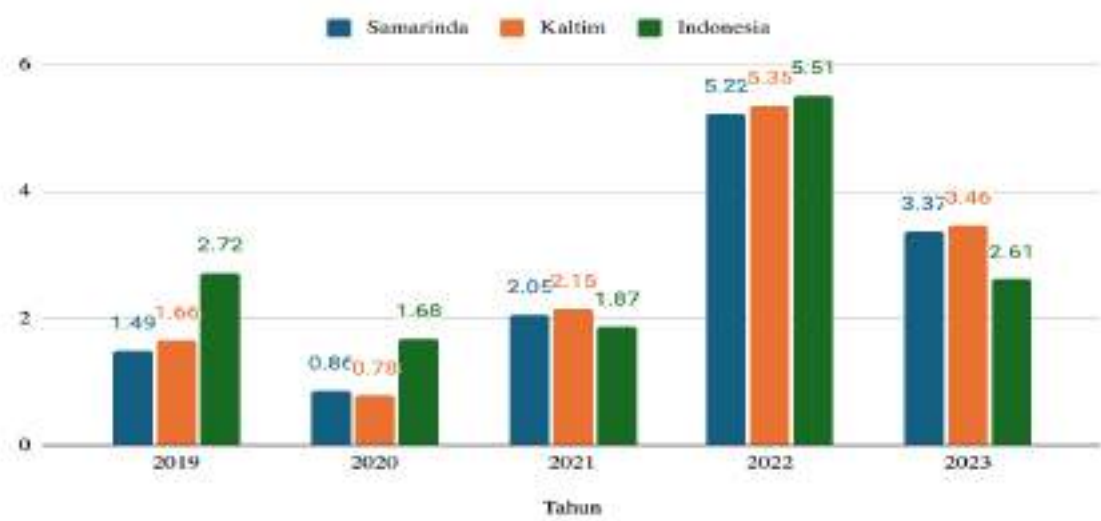
2. Laju Inflasi

Dalam menganalisis pembangunan perekonomian di Kota Samarinda, tidak terlepas dari asumsi mikro terkait stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat terutama bahan pokok. Faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan karena fluktuasi harga terutama di perkotaan sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang dihasilkan sekaligus berdampak pada daya beli masyarakat.

Laju inflasi sangat penting dalam mengkaji gambaran perekonomian Kota Samarinda terutama dalam melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dan mikro dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki laju inflasi yang sangat fluktuatif yang mengindikasikan terjadinya gejolak harga yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pengendalian inflasi di Kota Samarinda tergolong berhasil, karena telah mampu menekan laju inflasi selalu berada di bawah 5 persen. Namun demikian, terjadi kenaikan laju inflasi pada tahun 2021 hingga 2022 menjadi 2,05 (2021) dan 5,22 (2022).

Laju inflasi Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 berada dibawah laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, hanya pada tahun 2021 dan 2023 inflasi kota samarinda berada diatas laju inflasi Nasional dan pada tahun 2020 berada diatas laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.13.
Laju Inflasi Kota Samarinda Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

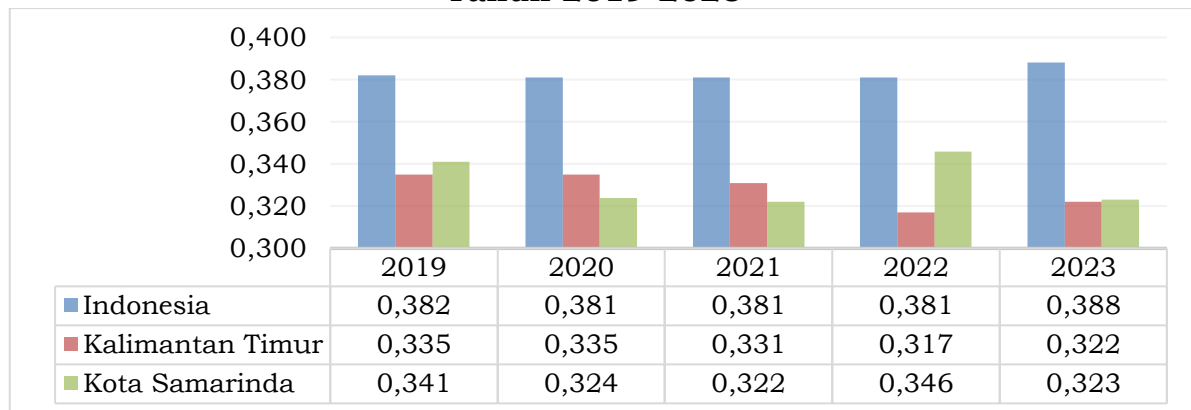


3. Gini Ratio

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Gini Ratio Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 gini ratio Kota Samarinda sebesar 0,341, pada tahun berikutnya hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi 0,322. Selanjutnya, Gini Ratio Kota Samarinda meskipun naik pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 0,323. Nilai Gini Ratio Samarinda pada tahun 2023 berada sedikit di atas Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,322 namun lebih kecil dari Gini Ratio Nasional yang mencapai 0,388.

Gambar 2.14.
Gini Ratio Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

4. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan



pekerjaan. Kemiskinan inilah yang bisa menjadi pemicu bagi permasalahan sosial lainnya, seperti kriminalitas, kekumuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda terus mengupayakan penanggulangan kemiskinan dari hulu ke hilir sehingga tidak berpotensi menimbulkan masalah baru. Tolok ukur paling jelas dalam melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menangani kemiskinan adalah angka kemiskinan. Angka kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan persentase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Angka kemiskinan diperoleh dari perbandingan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan seluruh penduduk yang ditampilkan dalam satuan persen.

Tabel 2.16
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	616.365	719.710	750.055	784.198	850.842
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,57	0,72	1,07	0,59	0,75
3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,11	0,21	0,32	0,13	0,16
4	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	39,23	41,92	42,84	41,95	41,89
5	Persentase penduduk miskin	4,59	4,76	4,99	4,85	4,81

Sumber: BPS Kota Samarinda dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Penanganan kemiskinan di Kota Samarinda dilakukan secara terpadu dan komprehensif dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Samarinda. Secara terpadu dalam artian melibatkan seluruh unsur yang terkait mulai dari penanganan pengangguran, jaminan sosial, serta OPD lain yang terlibat langsung dalam penanganan kemiskinan. Secara komprehensif dalam artian saling mendukung antar sektor dan pelaksanaannya tidak berjalan masing-masing (parsial). Program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui TKPKD yang



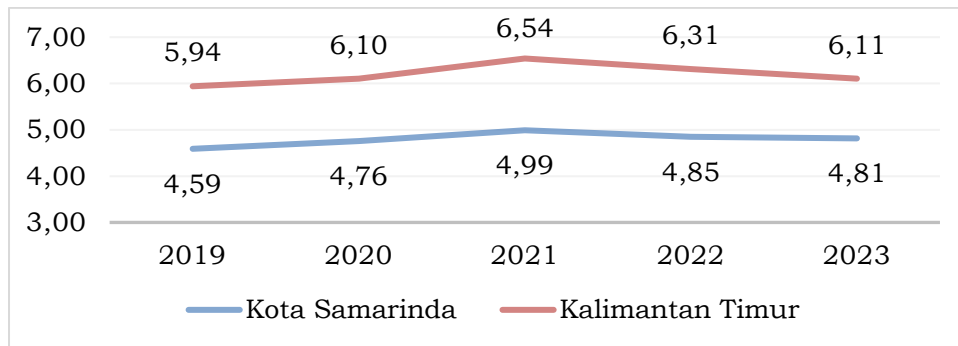
bersinergi dengan pusat terkait dengan program bantuan perlindungan sosial seperti JKN, PKH, BPNT dengan program jaminan daerah seperti PBI daerah, penunjang program kemiskinan yang ada di OPD terkait namun pandemi yang menyebabkan sektor ekonomi minus berakibat angka pengangguran meningkat dan jumlah penduduk miskin yang bertambah sehingga angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 4,59 persen meningkat menjadi 4,76 persen pada tahun 2020, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 (4,99 persen). Namun dengan adanya pemulihan ekonomi sejak tahun 2021 berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi yang menciptakan peluang kerja dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat, sehingga pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,14 atau menjadi 4,85 persen dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan hingga menjadi 4,81 persen atau turun sebesar 0,04 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

Selain angka kemiskinan, pemerintah Kota Samarinda juga selalu memperhatikan pergerakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 maka semakin tinggi pula kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang artinya butuh pembiayaan yang makin besar untuk menanganinya. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi P2 maka akan semakin tinggi pula kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Samarinda sebesar 0,59 persen dan 0,13 persen. Kedua indeks tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing 0,48 dan 0,19. Namun pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Samarinda meningkat menjadi 0,75 persen dan 0,16 persen. Kedua indeks tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing 0,16 dan 0,03.

Gambar 2.15.
Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. Dimana untuk tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Samarinda hanya sebesar 4,81 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,11 persen.

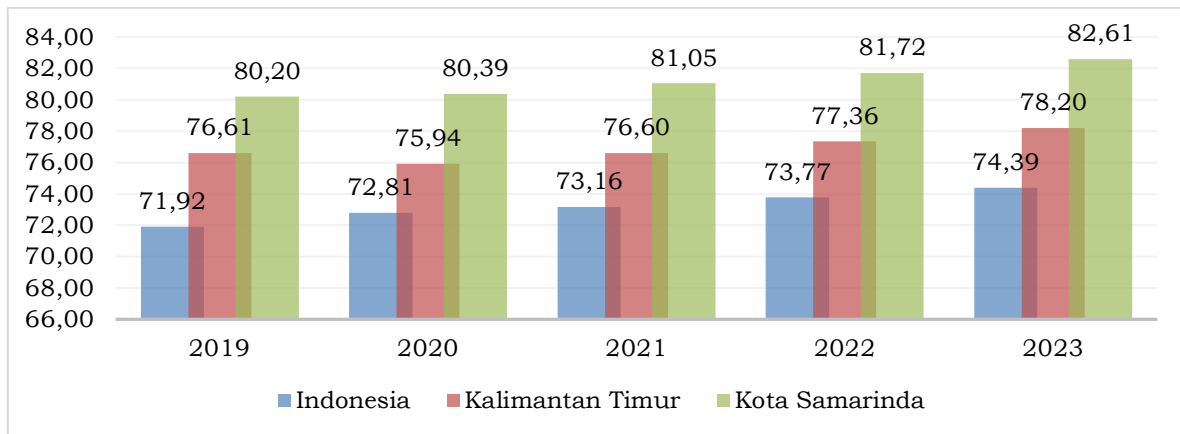
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya.

Terdapat tren positif pada IPM Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. IPM Kota Samarinda selama tahun 2019-2023 berada di atas rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia. Pada tahun 2023 IPM Kota Samarinda mengalami kenaikan sebesar 0,89 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.16.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

a. Angka Harapan Lama Sekolah

IPM dapat menggambarkan perkembangan kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembentuk IPM dari sisi pendidikan yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2.17
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Samarinda	14,70	14,89	15,09	15,10	15,39
2	Kalimantan Timur	13,69	13,72	13,82	13,84	14,02

Sumber: <https://kaltim.bps.go.id>

HLS Kota Samarinda selalu memperlihatkan adanya peningkatan tiap tahun dan pada tahun 2023 telah mencapai 15,39 yang dapat diartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021-2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,39 tahun atau setara dengan diploma 3. Kondisi ini menunjukkan rata-rata masyarakat Kota Samarinda memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya pendidikan hingga tingkat diploma 3.



b. Rata-Rata Lama Sekolah

Pembentuk IPM lainnya dari sisi pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS). RLS mengindikasikan semakin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani RLS yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan RLS, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Samarinda	10,47	10,48	10,49	10,71	10,93
2	Kalimantan Timur	9,70	9,77	9,84	9,92	9,99

Sumber: <https://bps.go.id/>

Rata-rata lama sekolah di Kota Samarinda mencapai 10,93 tahun, yang artinya bahwa rata-rata penduduk Kota Samarinda usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,93 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi, bahkan melampaui rata-rata penduduk se-Kaltim yang berada pada angka 9,99 tahun.

c. Umur Harapan Hidup

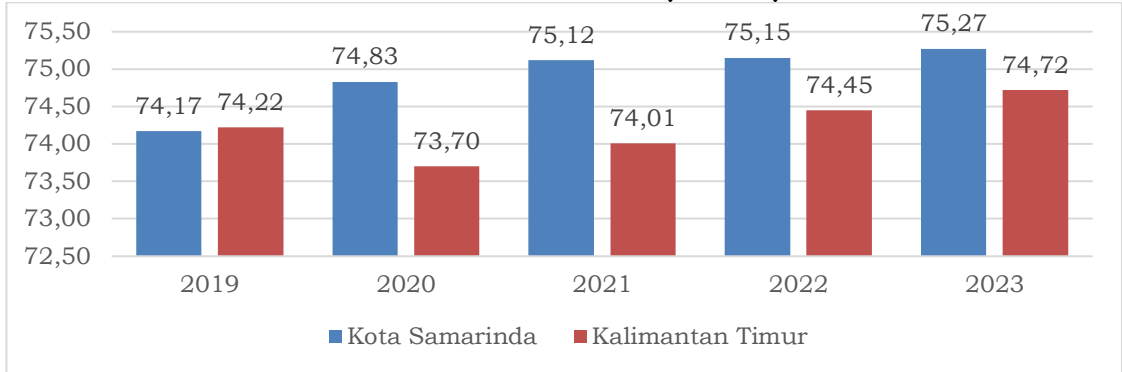
Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan



sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan UHH. Menurut Statistics Indonesia, UHH pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

UHH Kota Samarinda setiap tahunnya terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 telah mencapai 75,27 tahun. Capaian ini dapat diartikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 diprediksikan dapat hidup sampai usia 75 tahun 2 bulan. Semakin tinggi angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Samarinda tergolong sejahtera karena mampu menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terlihat UHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Gambar 2.17.
Umur Harapan Hidup Tahun 2019-2023 Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur (tahun)



Sumber: <https://kaltim.bps.go.id>

Tabel 2.19
Umur Harapan Hidup Penduduk Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kota Samarinda	72,26	75,98	72,38	76,06	72,62	76,23	72,64	76,23	74,68	76,60
Kalimantan Timur	72,41	76,13	72,54	76,21	72,79	76,51	72,80	76,52	74,72	76,62

Sumber: <https://bps.go.id/>

1. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam



pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin tinggi pula angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tabel 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Samarinda	5,87	8,25	8,16	6,78	5,92
2	Kalimantan Timur	6,09	6,87	6,83	5,71	5,31

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2019 TPT Kota Samarinda masih berada pada angka 5,87 persen, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,25 persen meskipun sempat menurun selama 4 tahun berturut-turut. Peningkatan angka pengangguran diduga sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Melandanya pandemi COVID-19 di Kota Samarinda membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan strategis guna memutus rantai penyebaran yang salah satunya adalah menghindarkan terjadinya kerumunan melalui penutupan tempat wisata dan seluruh usaha perdagangan termasuk perhotelan. Keadaan ini membuat para pelaku usaha melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai tindak lanjut atas penurunan penerimaan (*revenue*). Namun pada tahun 2023, TPT mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2020 dari 8,25 persen menjadi 5,92 persen. Membaiknya capaian TPT diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan provinsi Kaltim, TPT Kota Samarinda justru berada diatas rata-rata provinsi selama 4 tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa peran Kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan provinsi Kaltim yang didominasi sektor perdagangan mengalami dampak paling besar pada saat pandemi COVID-19.

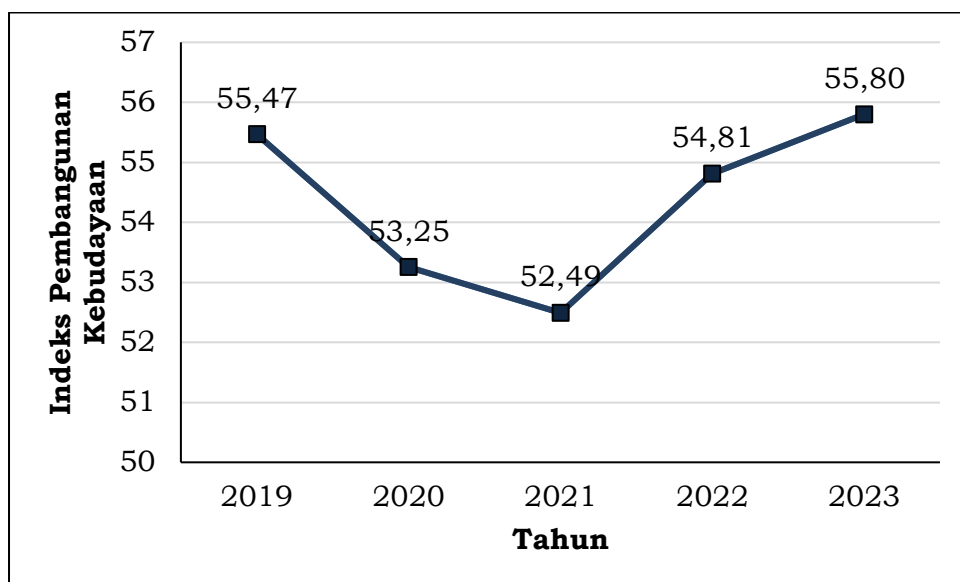
2.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) telah dihasilkan sebagai instrumen yang signifikan dalam menggambarkan perkembangan kemajuan pada ranah kebudayaan. IPK digunakan sebagai fondasi bagi perumusan kebijakan sektor kebudayaan serta panduan dalam harmonisasi lintas sektor untuk memajukan kebudayaan.



Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) telah dirancang berdasarkan kerangka kerja *Culture Development Indicators (CDIs)* yang dikembangkan oleh UNESCO. Dalam kerangka ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Dimensi-dimensi tersebut mencakup Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Dalam upaya mengukur efektivitas pembangunan kebudayaan di Indonesia, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan akan membandingkan IPK dengan indeks serupa atau yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Samarinda tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Samarinda, 2019-2023

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa IPK Kota Samarinda mengalami penurunan sebagai dampak Pandemi Covid-19 dari tahun 2019 sampai 2021 dari skor 55,47 hingga mencapai 52,49. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,22 poin dan berlanjut turun sebesar 0,76 poin pada tahun 2021. Kenaikan skor IPK mulai terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,32 poin menjadi 54,81. Selanjutnya kembali mengalami kenaikan sebesar 0,99 poin hingga mencapai 55,80 pada tahun 2023.



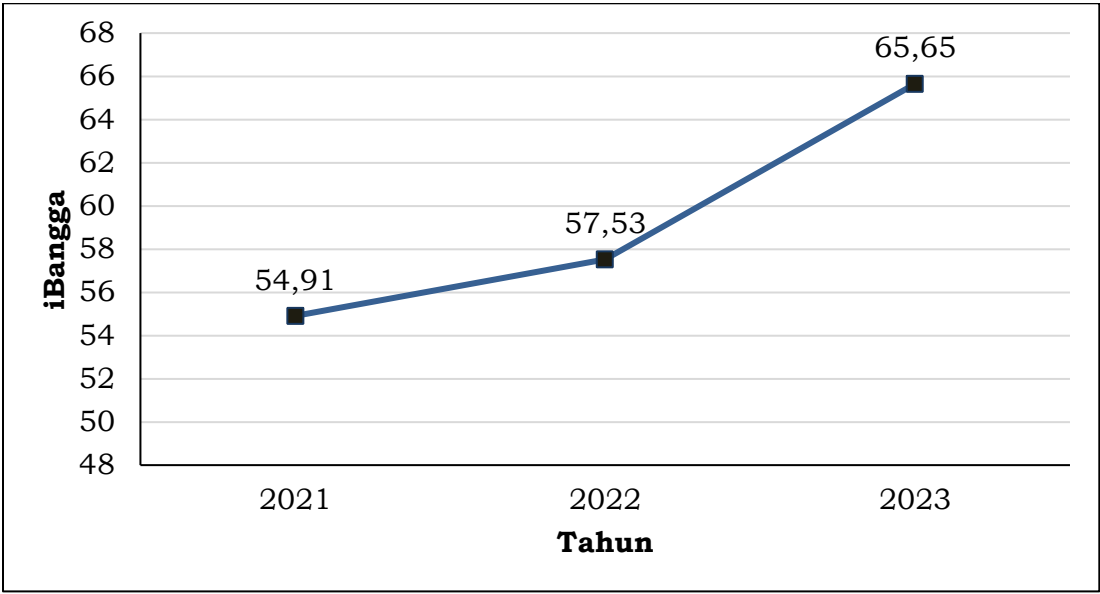
Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia.

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70.
- iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Nilai capaian iBangga Kota Samarinda dari tahun 2021 sampai 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. iBangga Kota Samarinda, 2021-2023

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai capaian iBangga Kota Samarinda mengalami kenaikan sejak tahun 2021 dan berada pada kategori nilai iBangga cukup baik atau berkembang. Pada tahun 2022,



iBangga Kota Samarinda mengalami kenaikan sebesar 4,77% dari 54,91 pada tahun 2021 menjadi 57,53 pada tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 yaitu mencapai 14,11% menjadi 65,65, nilai ini semakin mendekati capaian iBangga yang baik atau tangguh.

2. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Dalam menjalankan kehidupannya, setiap individu membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itulah, masyarakat perlu mendapatkan pekerjaan sebagai sarana mendapatkan penghasilan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan yakni dengan bekerja sebagai karyawan/buruh/pegawai di suatu perusahaan, usaha mandiri, maupun kantor, atau dapat pula membuka lapangan usaha sebagai wirausaha/pengusaha.

Dalam rangka mensejahterakan penduduk Kota Samarinda, maka pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja melalui perluasan lapangan kerja. Semakin tingginya investasi dan proyek pembangunan di Kota Samarinda, maka akan menyebabkan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja. Apabila tenaga kerja semakin banyak yang terserap, maka pengeluaran per kapita akan semakin meningkat, yang artinya daya beli semakin tinggi. Oleh karena itu peningkatan kesempatan kerja akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2018-2023

No .	Lapangan Pekerjaan Utama	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	11.547	11.901	21.222	24.743	19.724	23.518
2	Pertambangan dan Penggalian	19.091	24.472	17.085	16.280	20.770	89.835
3	Industri Pengolahan	37.551	33.069	29.485	25.024	41.733	
4	Listrik, Gas dan Air	7.380	7.198	7.615	7.633	2.918	
5	Bangunan	31.973	23.629	29.473	25.136	34.063	
6	Perdagangan Besar, Eceran,	101.526	39.298	140.507	149.832	128.802	289.785



No	Lapangan Pekerjaan Utama	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rumah Makan dan Hotel						
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	29.502	146.892	35.783	33.331	38.900	
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	38.673	22.059	17.609	18.041	46.222	
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	91.700	94.696	94.891	93.434	62.347	
Jumlah		368.943	403.214	393.670	393.454	395.479	403.138
Tingkat Pengangguran Terbuka		6,16	5,87	8,26	8,16	6,78	5,92

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024

Perkembangan jumlah penduduk bekerja dalam kurun waktu 2018-2019 memperlihatkan perkembangan yang positif, namun terjadi penurunan di tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah untuk menutup tempat usaha secara sementara sebagai langkah agar tidak terjadi kerumunan di masyarakat yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus COVID-19. Kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan dari tempat usaha, sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja yang berujung pada penurunan jumlah penduduk bekerja. Oleh karena itu, pada tahun 2021 hingga saat ini Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan langkah strategis untuk menyediakan lapangan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja semakin tinggi. Pada tahun 2022, upaya tersebut telah memperlihatkan hasil dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.025 pekerja atau menjadi 395.479 pekerja.

Apabila dilihat lebih mendalam, lapangan pekerjaan pada sektor perdagangan masih menjadi primadona dan mampu menyerap tenaga kerja paling banyak, mencapai 128.802 pekerja atau setara 32,57 persen. Melihat kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa dengan semakin melekatnya Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan,



penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut juga akan semakin meningkat, yang artinya akan semakin menekan angka pengangguran.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender.

Gambar 2.18.
Indeks Ketimpangan Gender Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023



Sumber: <https://kaltim.bps.go.id>

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa Indeks Ketimpangan Gender Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan, dari yang semula 0,32 di tahun 2019 turun menjadi hanya 0,23 di tahun 2023. Selama kurun waktu tersebut juga nilai Indeks Ketimpangan Gender Kota Samarinda selalu berada dibawah nilai Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur.

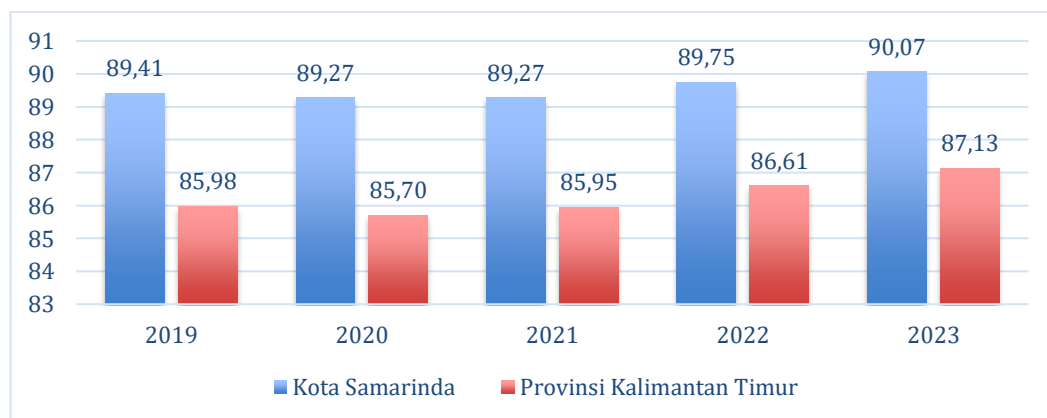
4. Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Hasil pembangunan yang berperspektif gender digambarkan dengan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender atau IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG digunakan untuk melengkapi penghitungan Sementara IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

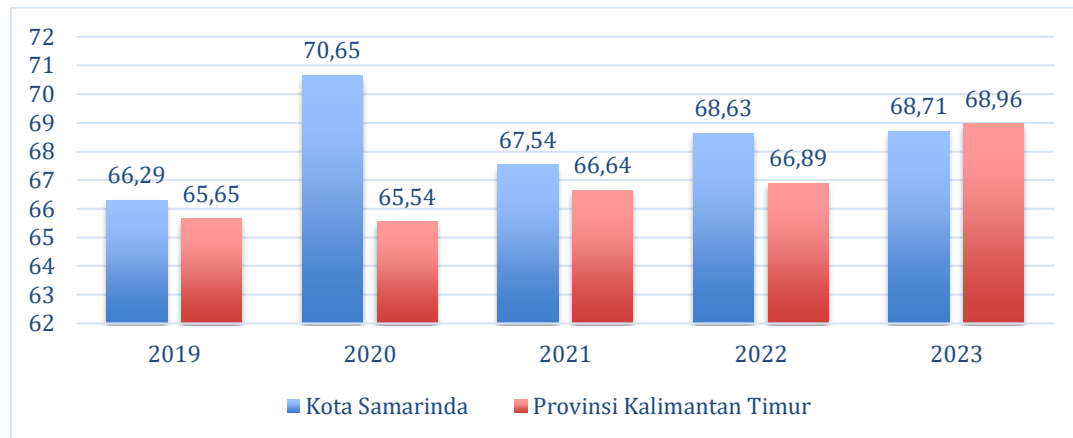
Gambar 2.19.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023



Sumber: <https://kaltim.bps.go.id>

Berdasarkan gambar diatas, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Samarinda sejak tahun 2019 hingga 2023 memiliki trend yang meningkat. Pada tahun 2019 IPG Kota Samarinda sebesar 89,41, mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 90,07. Hanya di tahun 2020 sedikit menurun di angka 89,27. Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 IPG Kota Samarinda selalu di atas angka Provinsi Kalimantan Timur. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Gambar 2.20.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023



Sumber: <https://kaltim.bps.go.id>

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Samarinda sejak tahun 2019 hingga 2023 memiliki trend yang fluktuatif. Pada tahun 2019 IPG Kota Samarinda sebesar 66,29, meningkat di tahun 2020 menjadi 70,65, menurun di tahun 2021 menjadi 67,54, kemudian mengalami kenaikan Kembali hingga tahun 2023 mencapai 68,71. Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 IDG Kota Samarinda selalu di atas angka Provinsi Kalimantan Timur. Namun di tahun 2023 IDG Kota Samarinda berada sedikit di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur dengan selisih 0,25. IDG Kota Samarinda di angka 68,71, sedangkan IDG Provinsi Kalimantan Timur di angka 68,96.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing menggambarkan sejauh mana daerah mampu bertahan atau meningkatkan daya saing secara ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dan tata kelola dengan daerah lain. Semakin tinggi daya saing sebuah daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk berkembang dan mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan daerah, oleh karena itu dengan daya saing yang tinggi juga akan menggambarkan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingginya jumlah penduduk yang ada di Kota Samarinda salah satunya memberikan dampak pada semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang artinya akan meningkatkan proses produksi barang dan jasa. Suatu produk baik berbentuk barang maupun jasa pasti akan menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang secara makro akan menggambarkan output dari suatu daerah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Samarinda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB menggambarkan persentase peningkatan dari output yang dihasilkan oleh suatu daerah setiap tahun, dan tentunya menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dalam 2 jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini yaitu tahun 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel 2.22
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	PDRB Dengan Migas	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ADHB (Rp Juta)	67.604.540,75	66.526.911,43	71.170.547,80	83.353.692,94	89.289.450,00
	Pertumbuhan (%)	6,36	-1,59	6,98	17,12	7,12
2	ADHK (Rp Juta)	45.491.361,79	45.041.329,12	46.294.409,08	49.349.590,41	53.604.330,00
	Pertumbuhan (%)	5,00	-0,99	2,78	6,60	8,62

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024

Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 89,29 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



mengalami kenaikan sebesar 5,94 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 83,35 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini mengindikasikan perekonomian Kota Samarinda semakin membaik pasca pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 lalu. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Samarinda meningkat dari 49,35 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 53,60 triliun rupiah pada tahun 2023. Selain itu, perekonomian Kota Samarinda pada Tahun 2023 tumbuh lebih cepat daripada tahun 2022 yakni dari 6,60 persen menjadi 8,62 persen pada 2023. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda ini menggambarkan pemulihan ekonomi di tahun 2023 seiring dengan masa transisi pandemi COVID-19 menjadi endemi pada tahun 2023.



Tabel 2.23
Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.180.938,58	1.214.911,93	1.241.340,00	1.288.273,14	1.360.145,49
B	Pertambangan dan Penggalian	8.590.835,84	7.302.967,03	8.904.135,94	13.051.181,30	9.514.424,50
C	Industri Pengolahan	5.217.439,01	5.133.070,54	5.314.782,59	5.768.463,03	6.101.951,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	96.214,31	110.305,59	113.155,74	118.687,64	141.750,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.034.163,25	11.390.251,78	11.829.729,29	13.392.966,42	15.047.001,42
F	Konstruksi	14.606.020,35	13.957.503,08	14.771.533,83	17.108.759,88	20.628.241,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.034.163,25	11.390.251,78	11.829.729,29	13.392.966,42	15.047.001,42
H	Transportasi dan Pergudangan	4.864.779,11	4.842.474,67	5.266.550,57	6.287.319,78	7.338.989,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.757.113,49	2.688.564,67	2.786.436,46	3.155.411,37	3.562.770,37
J	Informasi dan Komunikasi	2.257.828,51	2.446.101,29	2.688.636,03	2.931.445,13	3.151.742,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.733.536,04	4.867.158,88	5.209.924,52	6.281.602,65	7.325.146,83
L	Real Estat	1.608.765,63	1.652.008,45	1.619.186,78	1.695.861,68	1.791.527,37



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
M,N	Jasa Perusahaan	549.280,86	533.002,60	540.989,77	576.670,74	628.041,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.274.784,62	4.172.283,19	4.328.427,23	4.721.725,71	5.088.952,61
P	Jasa Pendidikan	2.776.028,84	3.015.165,89	3.087.332,99	3.163.128,26	3.342.725,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	949.911,06	1.137.015,71	1.330.631,31	1.424.477,43	1.549.859,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.005.834,27	1.954.850,08	2.019.179,98	2.259.590,75	2.578.954,79
Produk Domestik Regional Bruto		67.604.540,75	66.526.911,43	71.170.547,80	83.353.692,94	89.289.448,30

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara



Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	748.349,68	753.941,18	757.031,94	767.358,71	779.708,09
B	Pertambangan dan Penggalian	6.337.079,97	6.095.156,12	6.286.877,71	6.430.216,25	6.631.689,65
C	Industri Pengolahan	3.554.282,27	3.413.063,00	3.463.650,69	3.636.279,20	3.743.802,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	79.434,23	90.989,95	93.037,15	94.848,04	110.330,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	78.866,39	84.341,16	88.835,43	94.625,30	100.164,70
F	Konstruksi	9.068.582,25	8.660.528,20	8.821.023,15	9.520.599,44	11.003.330,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.649.078,80	7.790.886,60	8.070.796,51	8.621.093,88	9.327.612,26
H	Transportasi dan Pergudangan	3.121.192,37	3.108.613,87	3.208.754,45	3.513.804,06	3.821.813,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.806.577,24	1.739.046,91	1.773.842,35	1.943.890,44	2.121.397,84
J	Informasi dan Komunikasi	2.055.308,50	2.205.512,49	2.381.477,20	2.581.308,65	2.758.839,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.201.051,28	3.288.510,42	3.359.504,73	3.705.004,74	4.228.215,44
L	Real Estate	1.185.603,39	1.208.847,46	1.184.234,63	1.215.091,51	1.265.332,64



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
M,N	Jasa Perusahaan	351.352,94	339.104,48	344.155,17	362.425,35	378.353,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.687.332,27	2.586.573,08	2.655.998,29	2.894.052,49	3.113.229,44
P	Jasa Pendidikan	1.732.883,11	1.764.219,84	1.785.219,34	1.825.920,54	1.912.568,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	624.382,79	738.022,31	838.860,21	874.989,80	927.150,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.210.004,32	1.173.972,04	1.181.110,12	1.268.082,00	1.380.794,39
Produk Domestik Regional Bruto		45.491.361,79	45.041.329,12	46.294.409,08	49.349.590,41	53.604.333,00

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara



Tahun 2020 menjadi awal pandemi COVID-19 di Indonesia, tanpa terkecuali Kota Samarinda, yang menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan menutup tempat makan, hotel, restoran, sarana perdagangan, serta usaha jasa guna memutus rantai penyebaran. Kebijakan ini berdampak pada perekonomian Kota Samarinda yang sejak lama berbasis pada sektor perdagangan dan jasa, yang menyebabkan perekonomian tumbuh negatif sebesar 0,99 persen. Namun pada tahun 2021 dengan adanya adaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19, Kota Samarinda mampu memperbaiki kondisi ekonomi dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 2,78 persen. Kemudian pada tahun 2022, Kota Samarinda mencatat sejarah baru dengan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,60 persen dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan hingga menjadi 8,62 persen.

Tabel 2.25
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,11	0,75	0,41	1,36	1,61
B	Pertambangan & Penggalan	5,65	-3,82	3,15	2,28	3,13
C	Industri Pengolahan	4,27	-3,97	1,48	4,98	2,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,75	14,55	2,25	1,95	16,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,77	6,94	5,33	6,52	5,85
F	Konstruksi	4,12	-4,50	1,85	7,93	15,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,36	1,85	3,59	6,82	8,20
H	Transportasi dan Pergudangan	7,98	-0,40	3,22	9,51	8,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,66	-3,74	2,00	9,59	9,13
J	Informasi dan Komunikasi	6,39	7,31	7,98	8,39	6,88
K	Jasa Keuangan dan asuransi	2,52	2,73	2,16	10,28	14,12
L	Real Estate	3,01	1,96	-2,04	2,61	4,13
M,N	Jasa Perusahaan	1,70	-3,49	1,49	5,31	4,39



Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,32	-3,75	2,68	8,96	7,57
P	Jasa Pendidikan	4,70	1,81	1,19	2,28	4,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,40	18,20	13,66	4,31	5,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,94	-2,98	0,61	7,36	8,89
	PDRB	5,00	-0,99	2,78	6,60	8,62

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha, lapangan usaha pertama yaitu Pengadaan Listrik dan Gas yang memberikan kontribusi sebesar 16,32 persen atau mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1,95 persen, dominasi lapangan usaha kedua yaitu sektor konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 15,57 persen, dan lapangan usaha ketiga yaitu Jasa Keuangan dan asuransi yang memberikan kontribusi sebesar 14,12 persen. Kondisi ini menandakan bahwa ketergantungan Kota Samarinda dengan Pertambangan sudah mulai bergeser kepada Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi dan Jasa Keuangan dan asuransi, yang semakin menguatkan Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan.

Pada tahun 2023, lapangan usaha Konstruksi berkontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda sebesar 23,10. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,85, kemudian lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,66.

Tabel 2.26
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Samarinda Tahun 2019-2023 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,75	1,83	1,74	1,55	1,52
B	Pertambangan & Penggalian	12,71	10,98	12,51	15,66	10,66
C	Industri Pengolahan	7,72	7,72	7,47	6,92	6,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,17	0,16	0,14	0,16



Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,17	0,15	0,15
F	Konstruksi	21,61	20,98	20,75	20,53	23,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparas dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	16,32	17,12	16,62	16,07	16,85
H	Transportasi dan Pergudangan	7,20	7,28	7,40	7,54	8,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,08	4,04	3,92	3,79	3,99
J	Informasi dan Komunikasi	3,34	3,68	3,78	3,52	3,53
K	Jasa Keuangan dan asuransi	7,00	7,32	7,32	7,54	8,20
L	Real Estate	2,38	2,48	2,28	2,03	2,01
M,N	Jasa Perusahaan	0,81	0,80	0,76	0,69	0,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,32	6,27	6,08	5,66	5,70
P	Jasa Pendidikan	4,11	4,53	4,34	3,79	3,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,41	1,71	1,87	1,71	1,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,97	2,94	2,84	2,71	2,89
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024

6. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikasi awal dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro dimana penghitungan dilakukan dengan membagi seluruh nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk di suatu wilayah, dalam hal ini jumlah penduduk Kota Samarinda.

Tabel 2.27
PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Per kapita ADHB (Ribu Rp)	79.950,97	80.363,21	85.218,57	98.876,87	104.968,73
2	PDRB Per kapita ADHK (Ribu Rp)	53.799,32	54.409,04	55.432,25	58.540,09	63.017,29
3	Pertumbuhan	6,56	1,13	1,88	5,61	7,65



	PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)					

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2024

Nilai PDRB per Kapita Kota Samarinda atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 memiliki trend naik. Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kota Samarinda sebesar 77,46 juta rupiah mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 104,97 juta rupiah. Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2023 sebesar 7,65 persen. Bila dirata-ratakan perbulan, maka PDRB per kapita di Kota Samarinda pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.767.390. PDRB per kapita yang semakin tinggi dapat menjadi pendekatan untuk melihat kemampuan daya beli masyarakat secara makro, yang tentunya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rasio Kewirausahaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Yang dimaksud setiap orang adalah Warga Negara Indonesia. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.

Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi angkatan kerja Indonesia. Populasi wirausaha adalah populasi wirausaha pemula ditambah populasi wirausaha mapan.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Wirausaha} \\ &= \frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula} + \text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja Indonesia}} \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

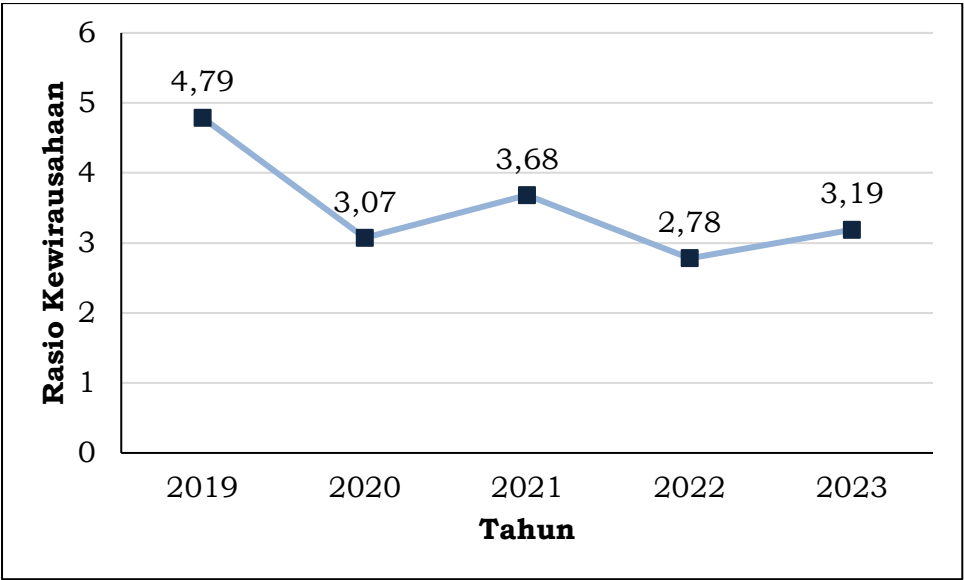
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 target rasio Kewirausahaan pada tahun 2024 adalah 4,0% dengan *baseline* pada tahun 2019 sebesar 3,3% kemudian meningkat menjadi 3,6% pada tahun 2020, 3,7% pada tahun 2021, 3,8% pada tahun 2022, dan 3,9% pada tahun 2023.

Dalam jangka pendek dan menengah, hasil dari pengembangan kewirausahaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan wirausaha



untuk lebih berdaya saing, menyerap belanja pemerintah, BUMN dan/atau BUMD serta menghasilkan produk yang bisa menggantikan produk-produk impor. Secara lebih luas, hasil dari pengembangan kewirausahaan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, kesempatan kerja, dan daya saing. Untuk mengimplementasikan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini, juga ditetapkan Rencana Aksi Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024.

Perkembangan rasio kewirausahaan Kota Samarinda sendiri dari tahun 2019 sampai 2020 dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa rasio kewirausahaan Kota Samarinda tahun 2019 sampai 2023 mengalami perubahan yang fluktuatif.



Gambar 3. Rasio Kewirausahaan Kota Samarinda, 2019-2023

Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan Kota Samarinda mengalami penurunan sebesar 1,72% dari 4,79% menjadi 3,07%. Kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,61% menjadi 3,68%. Namun tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 0,9% menjadi 2,78%, kemudian kembali mengalami kenaikan sebesar 0,41% menjadi 3,19% pada tahun 2023.

2.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Menyandang status sebagai ibukota Provinsi Kaltim, tentunya Kota Samarinda sangat berpeluang untuk mengalami peningkatan jumlah penduduk terutama migrasi dari luar daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi konsumsi akan barang dan jasa,



yang artinya menjadi tugas pemerintah Kota Samarinda untuk terus menjaga agar dapat terpenuhi secara seimbang. Karakteristik konsumsi penduduk Kota Samarinda dapat tergambar dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Dalam kurun waktu 2019-2023 jenis pengeluaran penduduk Kota Samarinda terbesar yaitu non makanan yang selalu berada diatas 50 persen sedangkan makanan selalu berada dibawah 50 persen. Adapun rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Samarinda sebesar Rp. 2.095.988 pada tahun 2023, mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang saat itu masih berada pada Rp. 1.766.863. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase pada makanan dan peningkatan pada non makanan, yang artinya bahwa kesejahteraan penduduk di Kota Samarinda semakin meningkat.

Tabel 2.28
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (Rp/bulan)

No.	Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Makanan	723 328	832.226	670.649	835.992	899.971
	Persentase	40,94	43,00	40,00	41,13	42,94
2	Non makanan	1.043.535	1.103.403	1.009.467	1.196.458	1.196.017
	Persentase	59,06	57,00	60,00	58,87	57,06
Jumlah		1.766.863	1.935.629	2.680.116	2.032.450	2.095.988

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara bukan angkatan kerja, yaitu penduduk umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan angkatan kerja, yaitu penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio



ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.29
Rasio Ketergantungan Kota Samarinda
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun (jiwa)	219.845	203.133	200.128	197.267	198.881
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun (jiwa)	29.541	39.164	41.379	43.718	47.547
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	249.386	242.297	241.507	240.985	246.428
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun (jiwa)	623.322	585.697	589.953	593.839	604.201
5	Rasio ketergantungan (3)/(4) kali 100 (%)	40,01	41,37	40,94	40,58	40,79

Sumber: data diolah oleh walidata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Rasio ketergantungan di Kota Samarinda sangat fluktuatif sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 tetapi berada di bawah 50%. Dimana pada tahun 2019 rasio ketergantungan di Kota Samarinda yaitu mencapai 40,01% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 41,37%. Namun pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan hingga menjadi 40,79% di tahun 2023. Pada tahun 2023 rasio ketergantungan di Kota Samarinda sebesar 40,79% dimana terdapat usia produktif sebanyak 604.201 jiwa dan usia tidak produktif sebanyak 246.428 jiwa. Angka sebesar 40,79% dapat diartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung (mempunyai tanggungan) sebanyak 40-41 orang usia belum produktif atau usia yang tidak produktif lagi.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja dibanding penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK mampu menggambarkan persentase usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa



semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.30
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu 2019-2023 Kota Samarinda (orang)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja	428.353	429.093	428.395	424.229	428.519
	Bekerja	403.214	393.670	393.454	395.479	403.138
	Pengangguran Terbuka	25.139	35.423	34.941	28.750	25.381
2	Bukan Angkatan Kerja	226.615	229.432	237.979	249.607	225.843
	Sekolah	72.425	61.900	61.692	67.741	69.459
	Mengurus RT	127.496	141.834	147.251	152.252	128.564
	Lainnya	26.694	25.698	29.036	29.614	27.820
Jumlah		671.194	654.968	666.374	673.836	654.362
3	TPAK	65,40	65,16	64,29	62,96	65,49
4	TPT	5,87	8,25	8,16	6,78	5,92

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2023

Jumlah angkatan kerja di Kota Samarinda pada tahun 2023 sebanyak 428.519 orang, sedangkan 225.843 orang lainnya bukan angkatan kerja, sehingga TPAK Kota Samarinda tahun 2023 sebesar 65,49 persen artinya hampir 65 persen penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas di Kota Samarinda aktif secara ekonomi. Kondisi ini tentunya sangat bagus untuk mendukung iklim investasi, karena lebih 50% usia produktif di Kota Samarinda terlibat aktif memproduksi barang dan jasa dalam mendukung perekonomian daerah.

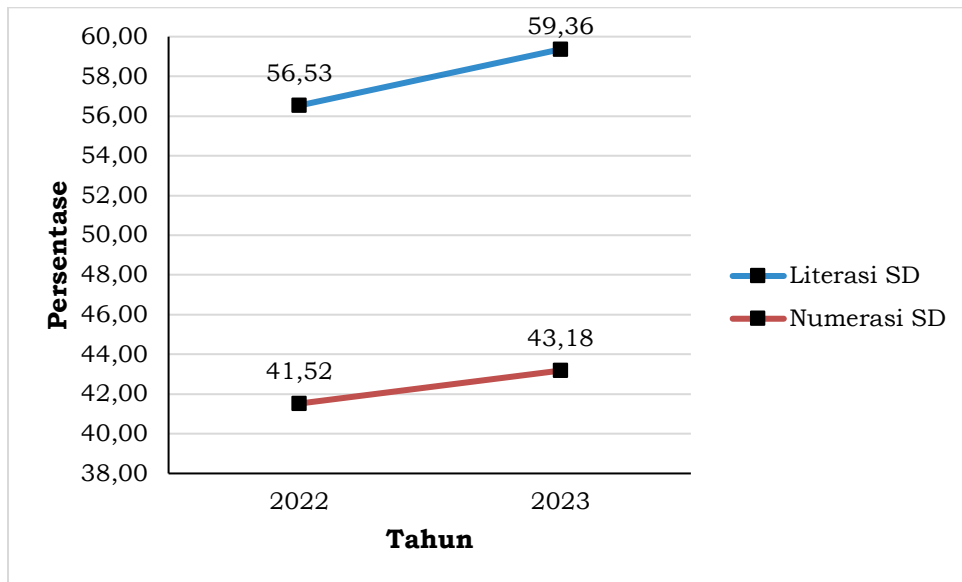
Angka Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk, yaitu teks dan angka. Literasi dimaknai sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dalam bentuk teks. Literasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan interpersonal, sedangkan numerasi merupakan kemampuan untuk memahami angka, simbol numerasi, dan konsep matematika. Numerasi dapat membantu



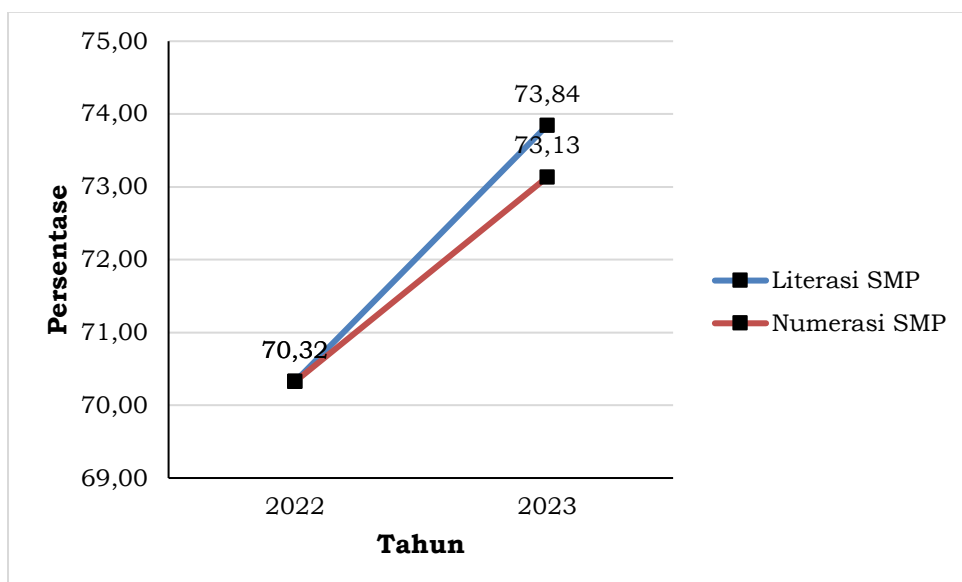
mengasah pengetahuan dan keterampilan tentang angka, grafik, diagram, data, dan tabel. Literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang penting untuk menghadapi masalah dan meningkatkan kualitas hidup yang harus dikembangkan oleh siswa.

Tingkat literasi dan numerik pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Samarinda Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tingkat Literasi dan Numerasi pada Sekolah Dasar Kota Samarinda Tahun 2022 dan 2023

Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat literasi pada siswa/siswi SD di Kota Samarinda mengalami kenaikan pada tahun 2023 dari tahun 2022 sebesar 5,00%. Hal yang sama juga terjadi numerasi pada siswa/siswi SD yang mengalami kenaikan sebesar 4,00%.



Gambar 2. Tingkat Literasi dan Numerasi pada Sekolah Menengah Pertama

**Kota Samarinda Tahun 2022 dan 2023**

Tingkat literasi dan numerasi pada siswa/siswi SMP di Kota Samarinda mengalami juga kenaikan pada tahun 2023 dari tahun 2022 dan hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Tingkat literasi SMP meningkat sebesar 5,00% dan tingkat numerasi SMP mengalami kenaikan sebesar 4,00%. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dari segala aspek khususnya yang mendukung perbaikan tingkat literasi dan numerasi pada siswa/siswi SD dan SMP.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Kota Samarinda dikenal sebagai daerah yang rendah, sehingga tidak mengherankan apabila setiap tahun terjadi bencana banjir genangan yang melanda 50% kecamatan di ibukota provinsi ini. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir genangan yang melanda Kota Samarinda selama kurang lebih 14 hari, dan pada tahun 2020 terjadi kembali hal serupa. Dengan pertimbangan ini, penanganan banjir menjadi agenda prioritas nomor 1 dalam RPJMD Kota Samarinda periode 2011-2015 dan 2016-2021. Bahkan karena kedudukannya sebagai ibukota provinsi, penanganan banjir di Kota Samarinda memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat melalui instansi vertikal Balai Wilayah Sungai.

Perlu diperhatikan bahwa pendekatan penanganan banjir di Kota Samarinda sangat terpusat pada pendekatan fisik mekanik dan teknik sipil, dimana pembiayaannya sangat intensif dan pada beberapa kegiatan harus dilaksanakan melalui proyek tahun jamak (multi-years). Khusus untuk penanganan banjir yang didanai oleh anggaran belanja pemerintah Kota Samarinda, kegiatan yang utama berupa pembangunan sistem drainase baik terbuka maupun tertutup.

Selain infrastruktur penanganan banjir berupa saluran drainase, Kota Samarinda juga membangun dan mengembangkan jaringan irigasi untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian tanaman pangan.

Pemenuhan air bersih menjadi program yang sangat penting dan utama di seluruh daerah, termasuk Kota Samarinda. Jumlah penduduk yang sangat tinggi menjadikan pemerintah Kota Samarinda harus cepat dan tanggap dalam memberikan akses air bersih yang merata ke seluruh wilayah.



Berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, kebutuhan pangan utama di Kota Samarinda mencapai 85.544,09 ton, sementara dari hasil lokal hanya mampu 14.809,4 ton atau hanya 17,3% dari kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa guna memenuhi kebutuhan pangan di daerah, maka pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan kerjasama dengan daerah penghasil agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.

Terkait penanganan sampah pada tahun 2019, volume produksi sampah yang dihasilkan di Kota Samarinda mencapai 857.404 m³, sedangkan volume sampah yang bisa ditangani sebesar 652.932 m³ atau 76,15%.

Peningkatan persentase penanganan sampah tersebut tidak dapat diperoleh apabila tidak diiringi dengan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Mengingat dengan semakin banyaknya TPS maka daya tampung akan semakin meningkat. Pada tahun 2019 jumlah daya tampung TPS mencapai 1.564 m³ untuk melayani 872.768 jiwa penduduk Kota Samarinda dengan rasio daya tampung 1-2 TPS per 1.000 penduduk.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Realisasi Investasi

Pada tahun 2019, realisasi investasi PMDN mencapai Rp 233.47 Triliun, dan merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu 2016-2020, sedangkan PMA mencapai Rp 913,61 Milyar (2019), merupakan angka terendah dalam kurun waktu 2016-2020.

Realisasi PMDN tertinggi berasal dari sektor tersier (service/jasa), sesuai dengan perekonomian Kota Samarinda yang didominasi oleh sektor tersebut. Dominasi sektor tersier dalam perekonomian Kota Samarinda menjadi keunggulan tersendiri, karena meskipun terjadinya penurunan ekonomi global, maka Kota Samarinda masih mampu tumbuh secara positif meskipun dalam persentase yang kecil. Oleh karena itu, Kota Samarinda yang dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan terus mengupayakan pembangunan di semua sektor, agar investasi terus meningkat setiap tahun.

2.3.4.2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari

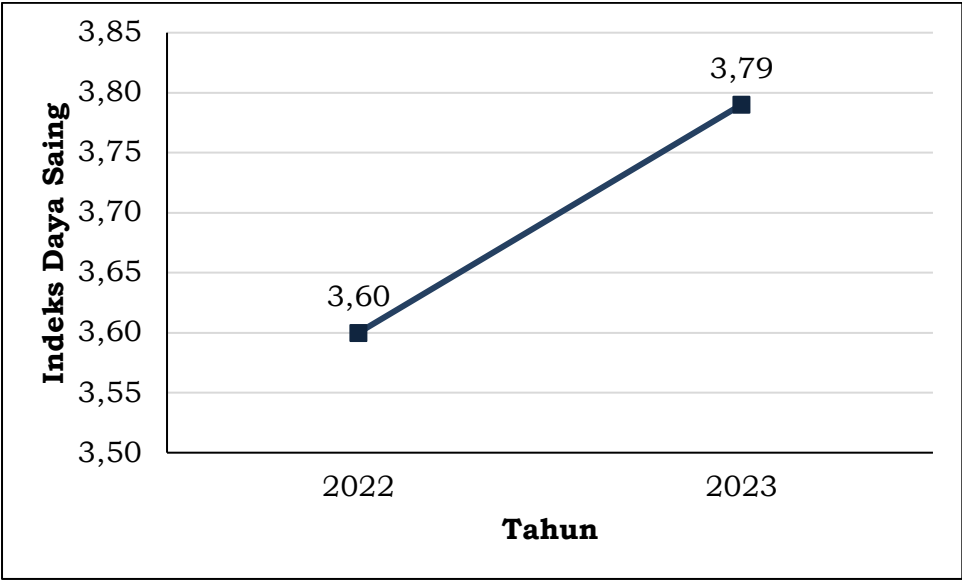


pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Penyusunan IDSD 2023 dilakukan melalui proses yang ketat, dimulai dari pemantapan kerangka konseptual sampai dengan penghitungan skor dari level indikator, pilar, hingga skor akhir IDSD secara agregasi. Dalam proses penyusunannya, kami melibatkan pakar-pakar yang relevan dan peneliti dari pusat riset terkait. Mengikuti ketersediaan data, IDSD 2023 mencakup 34 provinsi untuk 514 kabupaten/kota di Indonesia. Penyempurnaan IDSD 2023 menghasilkan 63 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota. Data sekunder yang digunakan bersumber dari kementerian/lembaga yang merupakan produsen data indikator daya saing

Nilai IDSD Kota Samarinda pada tahun 2022 mencapai 3,60, yang berarti menempati posisi kedua setelah Kota Balikpapan yang mencapai 3,71. Capaian IDSD Kota Samarinda lebih tinggi bila dibandingkan dengan IDSD Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 3,27. Pada tahun 2023, nilai IDSD Samarinda meningkat menjadi 3,79, yang menempatkannya pada posisi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur bahkan diatas IDSD provinsi.

Indeks daya saing daerah (IDSD) diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. IDSD dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

IDSD berperan sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Sepanjang dua tahun terakhir (2022-2023), nilai IDSD Kota Samarinda menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,19 poin, dari sebelumnya tahun 2022 berada pada angka 3,6 menjadi 3,79 tahun 2023. Kenaikan ini tentunya menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian Kota Samarinda.



Gambar 6. Indeks Daya Saing Kota Samarinda, 2022-2023

2.3.4.3. Angka Kriminalitas

Jumlah tindak kriminal pada tahun 2023 mengalami kenaikan lebih 3x lipat dibandingkan tahun sebelumnya atau menjadi 729 kasus yang sebelumnya sebanyak 200 kasus. Dengan membandingkan jumlah penduduk tahun 2023. Kasus Kejahatan di Samarinda didominasi Tindak Kriminal Pencurian kendaraan dan peredaran penyalahgunaan Narkoba.

Tabel 2.31
Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus Narkoba	316	137	219	55	339
2	Jumlah kasus Pembunuhan	3	1	4	2	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	22	7	31	1	6
4	Jumlah kasus Penganiayaan	108	32	114	61	83
5	Jumlah kasus Pencurian	383	66	285	67	255
6	Jumlah kasus Penipuan	41	12	26	14	43
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	86	376	2	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun (kasus)	959	631	681	200	729
9	Jumlah Penduduk (jiwa)	858.080	872.770	827.994	831.460	850.629



No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
10	Angka Kriminalitas (8)/(9) (kasus)	0,001	7,22	8,22	2,40	8,57

Sumber: Kepolisian Resor Kota Samarinda

2.3.5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Urusan Pendidikan

Pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan Kota Samarinda tahun 2023 diukur dengan indikator pada 3 (tiga) jenis pelayanan dasar. Secara umum, pencapaian SPM bidang pendidikan belum optimal sebab jumlah penerima layanan dasar pendidikan dasar hanya mencapai 53% dan jumlah mutu minimal pelayanan yang diberikan untuk pendidikan dasar, kesetaraan dan PAUD masih ada beberapa indikator yang realisasinya dibawah 50%.

Tabel 2.32
Realisasi SPM Urusan Pendidikan Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	13.697	13.697	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	114.164	114.164	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	2.531	2.531	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

Tabel 2.33
Realisasi SPM Urusan Pendidikan Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Layanan Dasar	Indikator			
1		Angka partisipasi sekolah	45,66	45,52	99,69



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Layanan Dasar	Indikator			
	Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi minimal B	71,90	69,81	97,09
		Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/D IV	82,09	79,7	97,09
		Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	1	0,41	41,00
		Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100
		Indeks distribusi guru	0,55	0,53	96,36
		Proporsi PTK bersertifikat	47,5	46,1	97,05
		Proporsi PTK penggerak	1.7	359	92,29
		Pengalaman pelatihan guru	1	0,1	10,00
2	Pendidikan Dasar (SD)	Angka partisipasi kasar	103.57	105.05	100
		Angka partisipasi sekolah	98,89	98,69	99,80
		Angka partisipasi murni	98,60	99,24	100
		Kemampuan literasi	75,23	73,04	97,09
		Kemampuan numerasi	54,75	53,16	97,10
		Perbedaan skor literasi	2,5	2,53	100
		Perbedaan skor numerasi	1,25	1,27	100
		Indeks iklim keamanan	71,49	69,41	97,09
		Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	64.47	62.59	97,08
		Kecukupan formasi guru ASN	40	20	50,00
		Indeks distribusi guru	0,50	0,38	76.00
		Proporsi PTK bersertifikat	90	90,2	100



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Layanan Dasar	Indikator			
		Proporsi PTK penggerak	0,5	0,5	100
		Pengalaman pelatihan guru	65,30	63,40	97,09
	Pendidikan Dasar (SMP)	Angka partisipasi kasar	101,73	406,62	100
		Angka partisipasi sekolah	98,85	98,55	99,70
		Angka partisipasi murni	81,92	82	100
		Kemampuan literasi	80	81,07	100
		Kemampuan numerasi	60	57,68	96,95
		Perbedaan skor literasi	3	3,27	100
		Perbedaan skor numerasi	1,25	1,2	96,00
		Indeks iklim keamanan	71,39	69,31	97,09
		Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	65	62,37	95,95
		Kecukupan formasi guru ASN	30	18	60,00
		Indeks distribusi guru	0,50	0,33	66,00
		Proporsi PTK bersertifikat	90	89,6	99,56
		Proporsi PTK penggerak	0,25	0,2	80,00
		Pengalaman pelatihan guru	45	41,4	92,00
3	Pendidikan Kesetaraan	Angka partisipasi kasar	3,69	41,4	100
		Angka partisipasi sekolah	16,09	16,04	99,69
		Angka partisipasi murni	1,09	15,14	100
		Kemampuan literasi	70	44,89	64,13
		Kemampuan numerasi	60	35,67	59,45
		Perbedaan skor literasi	6,5	3,32	51,08
		Perbedaan skor numerasi	8.8	5,53	62,84
		Indeks iklim keamanan	80	63,37	79,21
		Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	80	57,03	71,29



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Layanan Dasar	Indikator			
		Kecukupan formasi guru ASN	1	0,02	2,00
		Indeks distribusi guru	0,55	0,53	96,36
		Proporsi PTK bersertifikat	-	-	-
		Proporsi PTK penggerak	-	-	-
		Pengalaman pelatihan guru	90	90	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

2. **Urusan Kesehatan**

Pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan kesehatan Kota Samarinda tahun 2023 masih belum optimal baik dari sisi jumlah penerima layanan dasar maupun mutu minimal pelayanan.

Tabel 2.34
Realisasi SPM Urusan Kesehatan Berdasar Penerima Layanan Dasar Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayan	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	14.248	12.737	89,40
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	13.601	12.859	94,54
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	12.953	11.812	91,19
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	62.351	53.142	85,23
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	148.321	111.337	75,06
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	559.894	453.007	80,90
7	Pelayanan	Jumlah warga negara usia	57.968	44.470	76,71



No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayanan	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
	Kesehatan Pada Usia Lanjut	lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	217.409	215.206	98,99
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	24.755	24.251	97,96
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	1.014	1.014	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	14.773	14.773	100
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	24.868	24.868	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

Tabel 2.35
Realisasi SPM Urusan Kesehatan Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Vaksin Tetanus Difteri (Td) - (Unit)	14.248	7.280	51.0
		Tablet tambah darah	14.248	11.111	77.98
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Gluco Protein Urin	14.248	12.737	89.40



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Kartu ibu/rekam medis ibu	14.248	12.737	89.40
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.248	13.673	95.96
		Dokter/dokter spesialis kebidanan	126	36	28.57
		Bidan	840	790	94.05
		Perawat	2.397	2.397	100.00
		Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	14.248	12.737	89.40
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Formulir Partograf	13.601	12.859	94.54
		Kartu ibu (rekam medis)	13.601	12.859	94.54
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.601	12.859	94.54
		Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	126	36	28.57
		Bidan	840	790	94.05
		Perawat	2.397	2.397	100.00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Vaksin Hepatitis B0	12.953	11.812	91.19
		Vitamin K1 injeksi	12.953	11.812	91.19
		Salep/tetes mata antibiotik	12.953	11.812	91.19
		Formulir bayi baru lahir	12.953	11.812	91.19
		Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	12.953	8.216	63.43
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.953	12.595	97.24
		Dokter/dokter spesialis Anak	126	36	28.57



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Bidan	840	790	94.05
		Perawat	2.397	2.397	100.00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	62.351	53.142	85.23
		Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	62.351	53.142	85.23
		Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	62.351	53.142	85.23
		Vitamin A Biru	6.436	5.874	91.27
		Vitamin A Merah	54.242	26.317	48.52
		Vaksin imunisasi dasar: HBO	12.902	10.754	83.35
		Vaksin imunisasi dasar: BCG	12.902	11.113	86.13
		Vaksin imunisasi dasar: Polio	12.902	11.011	85.34
		Vaksin imunisasi dasar: IPV	12.902	10.240	79.37
		Vaksin imunisasi dasar : Campak dan Rubella	12.902	10.451	81.00
		Vaksin imunisasi lanjutan : Campak dan Rubella	12.899	8.140	63.11
		Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	12.902	11.111	86.12
		Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	12.899	8.513	66.00
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	12.902	11.113	86.13
		Peralatan Anafilaktik	130	130	100
		Bidan	8470	790	94.05



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Dokter	561	561	100
		Perawat	2.397	2.397	100
		Ahli Gizi	100	80	80.00
		Guru PAUD	-	-	-
		Kader Kesehatan	4.053	4.053	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Buku rapor kesehatanku	148.321	50.443	34.01
		Buku pemantauan kesehatan	148.321	50.443	34.01
		Kuesioner skrining kesehatan	148.321	111.337	75.06
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	148.321	111.337	75.06
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	26	26	100
		Dokter/Dokter gigi	100	67	67,00
		Bidan	840	790	94,05
		Perawat	2.397	2.397	100
		Ahli Gizi	100	80	80,00
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	298	213	71,48
		Guru	7.416	3.197	43,11
		Kader Kesehatan	-	-	-
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	15	57,69
		Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter,	26	26	100



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Glukometer	52	52	100
		Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol	559.894	453.0007	80,91
		KIT IVA Tes	17	17	100
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	26	100
		Dokter	561	561	100
		Bidan	840	790	94,05
		Perawat	2.397	2.397	100
		Ahli Gizi	100	80	80,00
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	298	213	71,84
		Tenaga Non Kesehatan Terlatih	3.000	2.713	90,43
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	57.968	44.470	76,71
		Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	57.968	44.470	76,71



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Buku kesehatan lansia	57.968	44.470	76,71
		Dokter	561	561	100
		Bidan	840	790	94,05
		Perawat	2.397	2.397	100
		Ahli Gizi	100	80	80,00
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	298	213	71,84
		Tenaga Non Kesehatan Terlatih	3.000	2.7136	90,43
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	26	100
		Tensimeter	26	26	100
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	26	100
		Dokter	561	561	100
		Bidan	840	790	94,05
		Perawat	2.397	2.397	100
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	298	213	71,84
		Hipertensi	26	26	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus x	Glukometer	52	52	100
		Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	24.755	24.254	97,96
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	26	100



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	11	42,31
		Dokter	561	561	100
		Bidan	840	790	94,05
		Perawat	2.397	2.397	100
		Ahli Gizi	100	80	80,00
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	298	213	71,84
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	26	26	100
		Kit berisi 2 Alat Fiksasi	26	26	100
		Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	26	26	100
		Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	26	38,46
		Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa	26	26	100
		tenaga kesehatan lainnya	298	298	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan tuberkulosis	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	10	10	100
		Reagan Zn TB	1.112	1.112	100
		Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	40	40	69,62



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	14.773	14.773	100
		Cartridge tes cepat molekuler	14.773	14.773	100
		Formulir pencatatan dan pelaporan	3.571	3.571	100
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	100
		Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	30	30	100
		Perawat	2.397	2.397	100
		Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	250	224	89,60
		Penata Rontgen	120	62	51,67
		Tenaga kesehatan masyarakat	298	213	71,48
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	3.000	2.713	90,43
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	30	30	100
		Tes cepat HIV (RDT) pertama	24.868	24.868	100
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	24.868	24.868	100



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	52	52	100
		Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	10	6	60
		Perawat	2.397	2.397	100
		Bidan	840	790	94,05
		Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	250	224	89,60
		Tenaga kesehatan masyarakat	298	213	71,48
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	3.000	2.713	90,43

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

3. **Urusan Pekerjaan Umum**

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 masih belum optimal baik dari sisi jumlah penerima layanan dasar maupun mutu minimal pelayanan.

Tabel 2.36
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	856.360	802.026	93.66



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	856.360	658.229	80.02

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

Tabel 2.37
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Layanan Dasar	Indikator			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	171.272	152.723	89.17
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	171.272	152.723	89.17
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Non Jaringan Perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	18.549	7.682	41.41
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Non Jaringan Perpipaan terhadap kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	18.549	7.682	41.41
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALDS terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	214.090	169.560	79.20



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Layanan Dasar	Indikator			
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	214.090	169.560	79.20
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALDT terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	44.530	1.748	3.93
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALDT terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	44.530	1.748	3.93

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

4. **Urusan Perumahan Rakyat**

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat tahun 2023 cukup baik. Pada tahun 2023 Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan belum sepenuhnya memenuhi sejumlah mutu minimal pelayanan, dan juga tidak ada Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni.

Tabel 2.38
Realisasi SPM Urusan Perumahan Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2023



No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Samarinda	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	Tidak ada kejadian bencana yang diatur oleh Wali Kota Samarinda pada Tahun 2023		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	209	209	100.00

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

Tabel 2.39
Realisasi SPM Urusan Perumahan dan Permukiman Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Samarinda		Tidak ada kejadian bencana di Kota Samarinda pada Tahun 2023	-	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	209	209	100.00

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

5. Urusan Trantibunlinmas



Pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan trantibunlinmas Kota Samarinda tahun 2023 sangat baik dan hampir seluruhnya mencapai 100%, kecuali untuk jenis layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang belum dapat mencapai Jumlah Mutu Minimal Pelayanan 100%.

Tabel 2.40
Realisasi SPM Urusan Trantibunlinmas Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk Harus Terlayani	Penduduk Terlayani	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	400	400	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	250	250	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	878	878	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.500	3.500	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.177	1.176	99.92

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

Tabel 2.41
Realisasi SPM Urusan Trantibunlinmas Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2023



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	432	432	100,00
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	6	100,00
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	1.356	1.356	100,00
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2	2	100,00
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100,00
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.190	1.190	100,00
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	250	250	100,00
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	20	20	100,00
3	Pelayanan Pencegahan dan	Sarana prasarana penanggulangan bencana	1.914	1.914	100,00



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
	Kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	481	481	100,00
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	100,00
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	971	971	100,00
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	100,00
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	5	5	100,00
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	258	258	100,00
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	13	13	100,00
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1.681	1.674	99,58
		Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	204	204	100,00
		Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	258	258	100.00
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	4	4	100.00

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

6. Urusan Sosial



Penerapan standar pelayanan minimal urusan sosial Kota Samarinda tahun 2023 sangat baik dan dapat mencapai target.

Tabel 2.42
Realisasi SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Penerima Layanan
Dasar Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk Harus Terlayani	Penduduk Terlayani	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti	54	54	100.00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	39	39	100.00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	63	63	100.00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	20	20	100.00
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara korban bencana Kota Samarinda yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	1.595	1.595	100.00

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023

Tabel 2.43
Realisasi SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Mutu Minimal
Layanan Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Rehabilitasi sosial dasar	Layanan data dan pengaduan	54	54	100.00



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhk an	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
	penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar Panti	1	1	100.00
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	6	6	100.00
		Penyediaan permakanan	6	6	100.00
		Penyediaan alat bantu	45	45	100.00
		Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100.00
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	30	30	100.00
		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100.00
		Akses ke layanan pendidikan	7	7	100.00
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100.00
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100.00
		Layanan rujukan	2	2	100.00
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	59	59	100.00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar	Layanan data dan pengaduan	39	39	100.00



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
	Anak Terlantar di luar panti	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	5	5	100.00
		Penyediaan permakanan	5	5	100.00
		Penyediaan sandang	1	1	100.00
		Penyediaan perbekalan kesehatan	60	60	100.00
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	100.00
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1	1	100.00
		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	100.00
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	25	25	100.00
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	20	100.00
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	30	30	100.00
		Layanan rujukan	1	1	100.00
3	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Layanan data dan pengaduan	63	63	100.00
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	1	1	100.00
		Penyediaan permakanan	1	1	100.00
		Penyediaan sandang	1	1	100.00
		Penyediaan alat bantu	42	42	100.00
		Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100.00
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	5	5	100.00



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhk an	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	1	1	100.00
		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	100.00
		Akses ke layanan Kesehatan Dasar	10	10	100.00
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	20	100.00
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	25	25	100.00
		Layanan rujukan	30	30	100.00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Layanan data dan pengaduan	20	20	100,00
		Penyediaan layanan kedaruratan	3	3	100,00
		Penyediaan permakanan	96	96	100.00
		Penyediaan sandang	30	30	100.00
		Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100.00
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	100.00
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	1	1	100.00
		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100.00
		Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan Dasar	1	1	100,00



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Mutu Dibutuhk an	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	100,00
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	22	22	100.00
		Layanan rujukan	1	1	100.00
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kota Samarinda	Penyediaan permakanan	1.595	1.595	100.00
		Penyediaan sandang	700	700	100.00
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2	2	100.00
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	150	150	100.00
		Pelayanan dukungan Psikososial	1	1	100.00

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2023



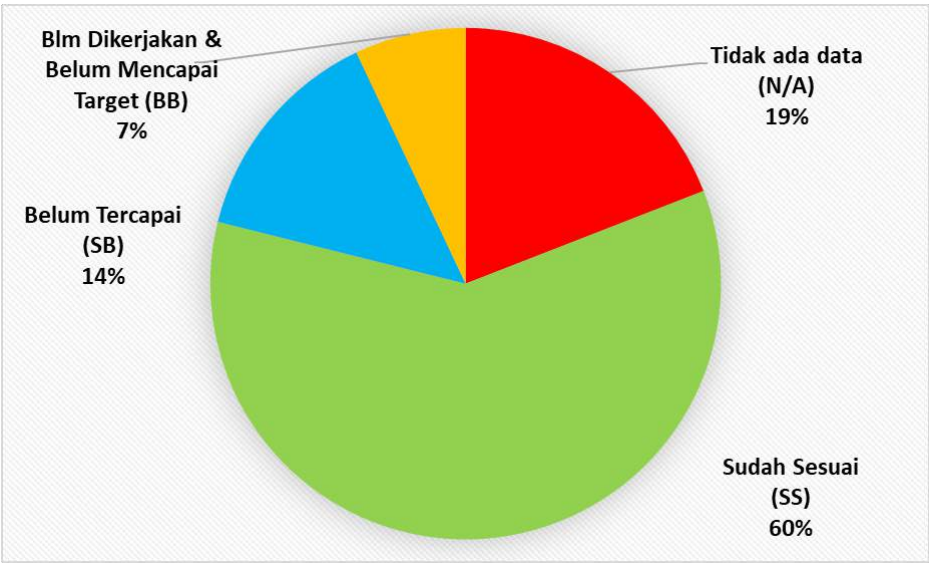
2.3.6. Capaian TPB Kota Samarinda

2.3.6.1. Pelaksanaan TPB di Kota Samarinda

Secara umum pelaksanaan TPB di Kota Samarinda pada tahun 2023 capaian data yang dapat diisi sekitar 81%, indikator TPB yang sudah mencapai target nasional 57%, 17% belum mencapai target nasional, sudah dilaksanakan namun tidak relevan dengan target 7% dan 19% belum ada datanya.

Untuk lebih jelas persentase capaian TPB dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.21.
Proporsi Capaian TPB Kota Samarinda Tahun 2023

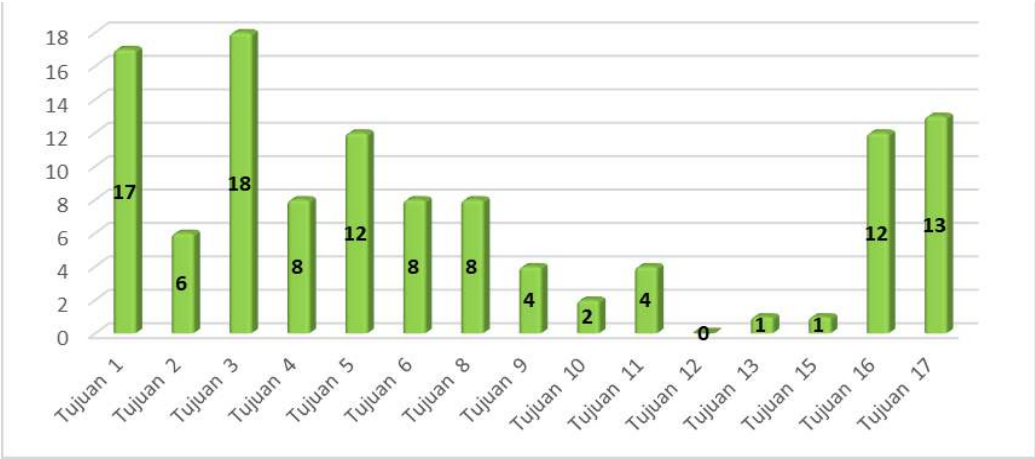


Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2.3.6.1.1. Target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 114 indikator atau 57,29% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah kota. Berikut grafik indikator capaian masing-masing tujuan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

Gambar 2.22.
Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS)

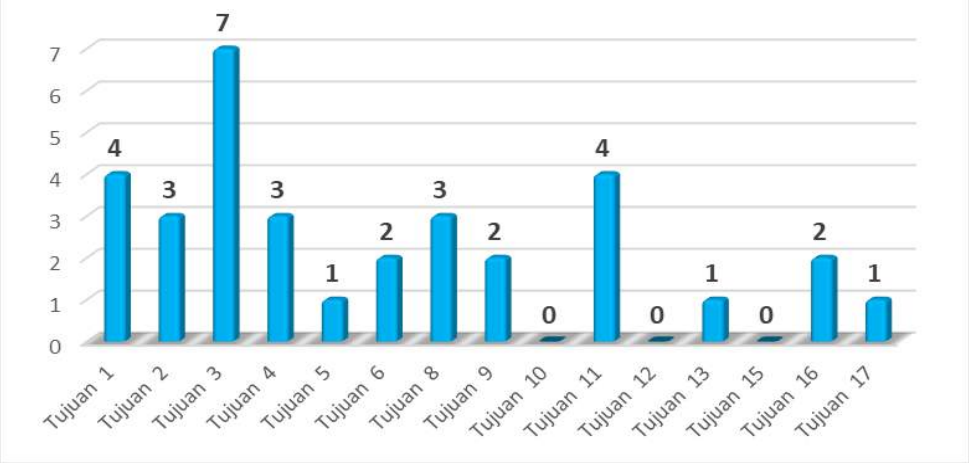


Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2.3.6.1.2. Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 33 indikator atau 16,58% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kota. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian TPB kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) Kota Samarinda dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.23.
Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

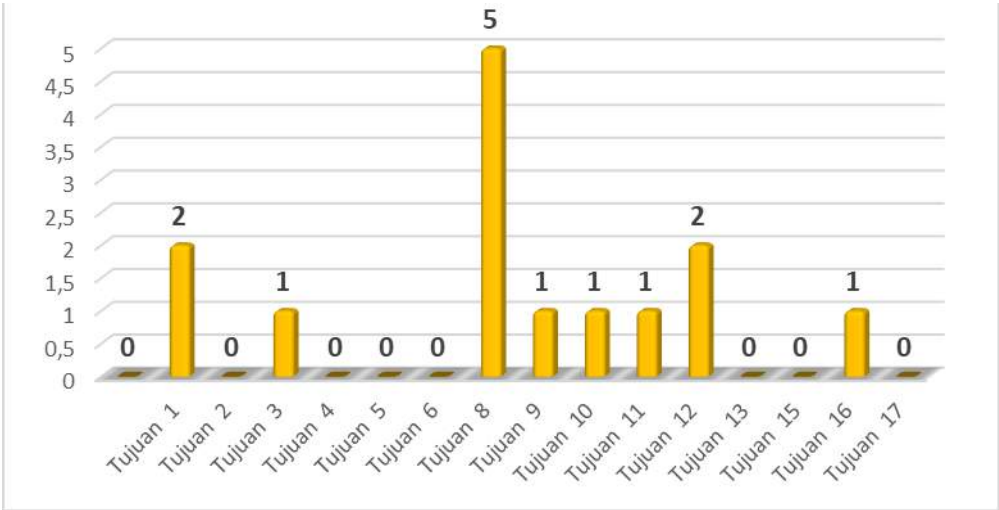
2.3.6.1.3. Target TPB yang belum dikerjakan dan belum target/ (BB)

Indikator TPB yang belum dikerjakan dan belum mencapai target (BB). Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 14 indikator atau 7,04% dari keseluruhan target yang dikaji dalam



kewenangan pemerintah kota. Untuk lebih jelasnya mengenai target TPB yang berstatus BB dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.24.
Capaian TPB Kategori Belum Dikerjakan dan Belum Mencapai Target (BB)

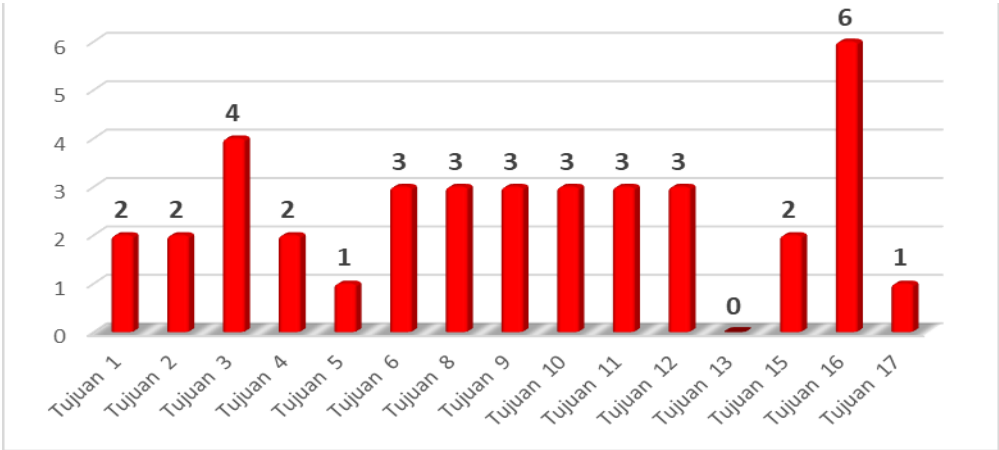


Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2.3.6.1.4. Target TPB yang belum ada data (NA)

Indikator ini tidak ada data yang dapat mendukung penjelasan capaiannya. Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 38 indikator atau 19,10% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah Kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai target TPB yang belum ada data (NA) dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.25.
Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data (NA)



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

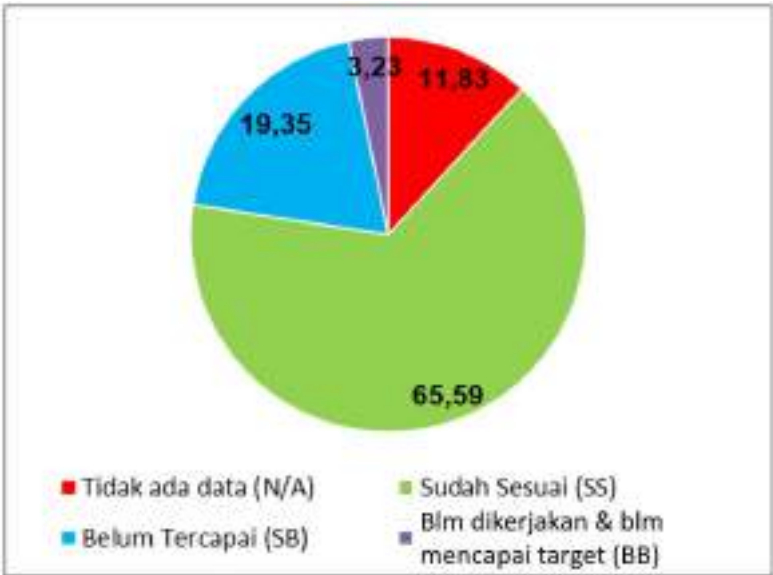


2.3.6.2. Capaian TPB Berdasarkan Pilar

2.3.6.2.1. Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah
Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 01, TPB 02, TPB 03, TPB 04, dan TPB 05. Total indikator untuk pilar sosial adalah sebanyak 93 indikator. persentase capaian indikator pilar sosial disajikan pada Gambar 4.6. Dari total 93 indikator pilar sosial, terdapat 61 indikator atau 65,59% telah mencapai target, 18 indikator atau 19,35% belum mencapai target, 3 indikator atau 3,23% belum dikerjakan & belum mencapai target, dan 11 indikator atau 11,83% tidak ada data.

Gambar 2.26.
Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Sosial



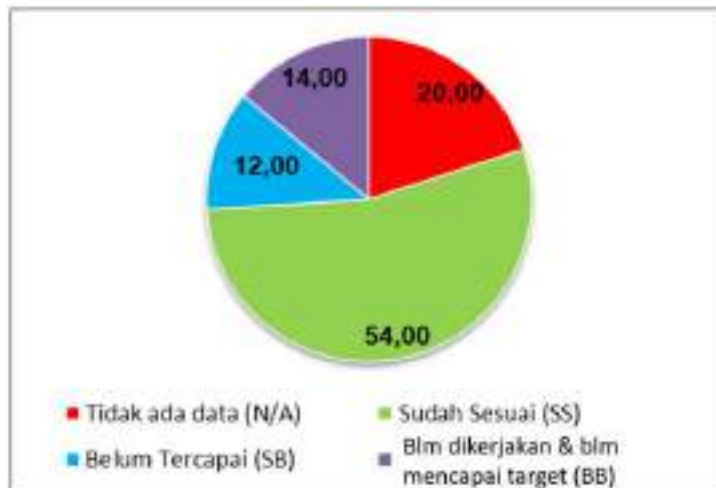
Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2.3.6.2.2. Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 08, TPB 09, TPB 10, dan TPB 17. Total indikator untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 50 indikator. persentase capaian indikator pilar ekonomi disajikan pada Gambar 4.7. Dari total 50 indikator, terdapat 27 indikator atau 54% telah mencapai target, 6 indikator atau 12% belum mencapai target, 7 indikator atau 14% belum dikerjakan & belum mencapai target dan 10 indikator atau 20% tidak ada data.



Gambar 2.27.
Persentase status ketercapaian TPB Pilar Ekonomi

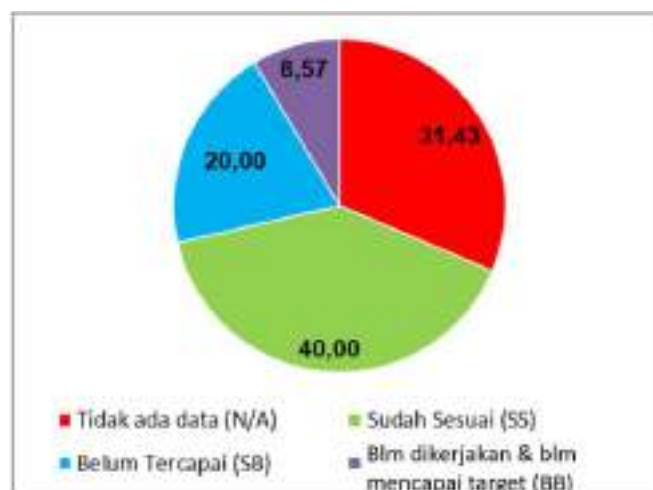


Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2.3.6.2.3. Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan hidup mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 06, TPB 11, TPB 12, TPB 13, dan TPB 15. Total indikator untuk pilar lingkungan hidup adalah sebanyak 35 indikator. persentase capaian indikator pilar lingkungan hidup disajikan pada Gambar 4.8. Dari total 35 indikator pilar lingkungan, terdapat 14 indikator atau 40% telah mencapai target, 7 indikator atau 20% belum mencapai target, 3 indikator atau 8,57% belum dikerjakan & belum mencapai target dan 11 indikator atau 34,43% tidak ada data.

Gambar 2.28.
Persentase status ketercapaian TPB Pilar Lingkungan



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

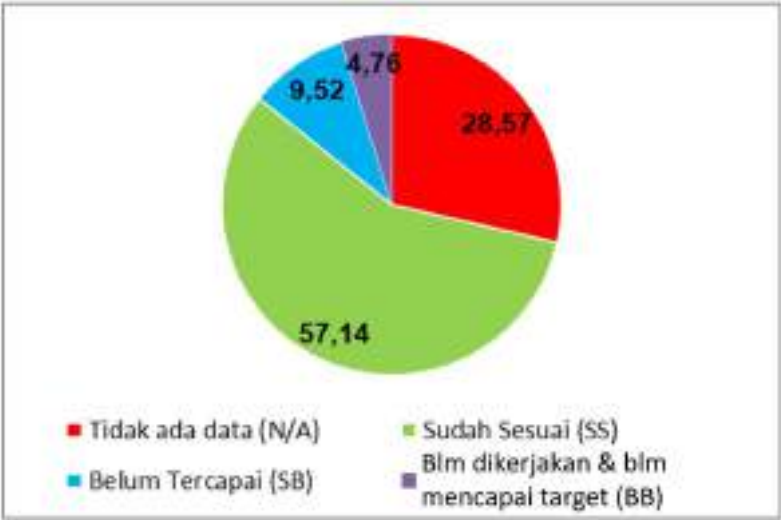


2.3.6.2.4.

2.3.6.2.5. **Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Dan Tata Kelola**

Pilar Hukum dan Tata Kelola mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 16. Total indikator untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator. persentase capaian indikator pilar hukum dan tata kelola disajikan pada Gambar 4.9. Dari total 21 indikator, terdapat 12 indikator atau 57,14% telah mencapai target, 2 indikator atau 9,52% indikator yang belum mencapai target, 1 indikator atau 4,76 belum dikerjakan & belum mencapai target, dan 6 indikator atau 23,57% tidak ada data.

Gambar 2.29.
Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2.4. **Aspek Pelayanan Umum**

Aspek pelayanan umum ini akan menjelaskan terkait perkembangan kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan pembangunan daerah agar tercapai target-target pembangunan. Pada aspek ini terdapat dua fokus layanan yakni wajib yang merupakan kinerja wajib bagi pemerintah kota dan layanan pilihan yang merupakan urusan pemerintah yang terkait dengan potensi dan karakteristik wilayah.

2.4.1. **Fokus Layanan Urusan Wajib**

2.4.1.1. **Pendidikan**

1. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa



memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Tabel 2.44
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (%)

No.	Usia	2019	2020	2021	2022	2023
1	7 – 12	100,00	99,85	99,81	98,69	99,31
2	13 – 15	99,58	99,54	99,98	98,55	98,76
3	16 - 18	83,81	84,73	84,23	84,62	84,41

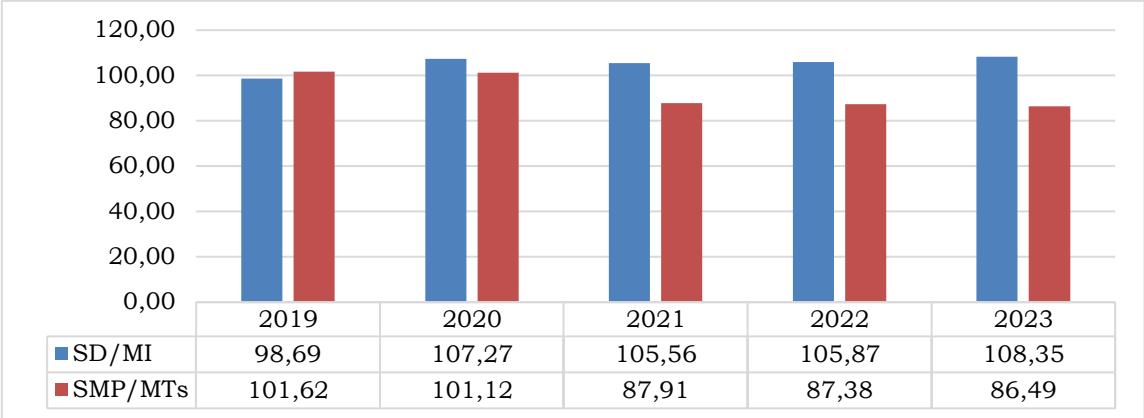
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Samarinda usia 7-12 tahun pada tahun 2023 mencapai 99,31 persen, yang artinya sebanyak 99,31 persen penduduk usia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan. Adapun APS usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun masing-masing mencapai 98,76 persen dan 84,41 persen. Hal ini menandakan bahwa keinginan penduduk untuk mengenyam pendidikan sangatlah tinggi, dan ini tidak terlepas dari peran pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pendidikan di segala umur, mulai dari usia dini hingga menengah baik formal maupun non formal.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, APK Kota Samarinda untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.30.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (%)



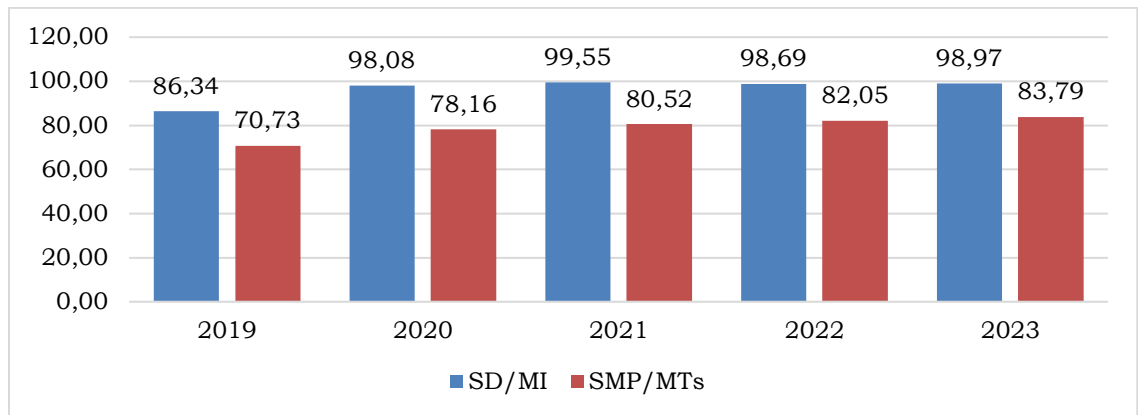
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Kota Samarinda Dalam Angka 2024

Capaian APK SD/MI setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu lebih dari 100 persen kecuali pada tahun 2019 yang hanya sebesar 98,69. Capaian APK SD/MI tersebut artinya siswa pada jenjang SD/MI masih lebih banyak daripada penduduk Kota Samarinda usia 7-12 tahun. Mengindikasikan bahwa terdapat siswa pada jenjang SD/MI yang bukan usia 7-12 tahun atau bukan penduduk Kota Samarinda namun bersekolah di Kota Samarinda. Begitu juga dengan data APK SMP/MTs, tahun 2018 - 2020 lebih dari 100 persen, artinya siswa pada jenjang SMP/MTs masih lebih banyak daripada penduduk Kota Samarinda usia 13-15 tahun. Namun pada tahun 2021 - 2023 mengalami capaian kurang dari 100 persen. Kondisi ini menandakan perlu identifikasi terhadap program pendidikan guna meningkatkan partisipasi sekolah, khususnya pada jenjang SMP/MTs.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Gambar 2.31.
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (%)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Kota Samarinda Dalam Angka 2024

Pada tahun 2023 APM SD/MI mencapai 98,97 persen, menandakan bahwa jumlah siswa usia 7-12 tahun yang menempuh pendidikan jenjang SD/MI sebanyak 98,97 persen dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Kota Samarinda. Sedangkan APM SMP/MTs mencapai 83,79 persen yang menandakan bahwa jumlah siswa usia 13-15 tahun yang menempuh jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 83,79 persen dari seluruh penduduk usia 13-15 tahun di Kota Samarinda.

Meskipun fluktuatif, kondisi tersebut menandakan bahwa secara konsisten masyarakat di Kota Samarinda memiliki minat yang besar untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan usianya. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa akses pendidikan yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.

4. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio Guru terhadap Murid menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid, dimana angka ini akan memperlihatkan kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio guru terhadap murid maka beban mengajar guru semakin berat sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya.

Tabel 2.45
Rasio Guru dan Murid Tahun Ajaran 2018/2019-2022/2023
Kota Samarinda



No .	Jenjang Pendidikan	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1	SD/MI					
	Jumlah Guru (orang)	4.820	4.768	4.393	3.514	4.567
	Jumlah Murid (orang)	90.886	90.590	90.063	72.050	89.034
	Rasio	1:19	1:19	1:21	1:17	1:19
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru (orang)	3.009	2.893	2.555	2.044	2.693
	Jumlah Murid (orang)	43.422	42.917	42.907	34.325	42.434
	Rasio	1:14	1:15	1:17	1:13	1:16

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru menjelaskan bahwa pada jenjang SD dan SMP idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun ajaran 2022/2023 secara keseluruhan rasio murid-guru sudah ideal dimana 1:20 untuk jenjang SD/MI dan 1:16 untuk jenjang SMP/MTs. Namun yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda adalah jumlah guru dari tahun ke tahun yang semakin menurun baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk pemenuhan guru, seperti melakukan rekrutmen yang berkualifikasi dengan didukung peningkatan kesejahteraan guru sesuai kemampuan keuangan daerah.

2.4.1.2. Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.46
Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019-2023
Kota Samarinda



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	AKI per 100.000 kelahiran hidup (kasus)	108	70	156	102	109
2	Jumlah kematian ibu akibat melahirkan (kasus)	17	10	21	13	14
3	Jumlah kelahiran hidup (KH)	15.681	14.767	13.428	12.701	12.789

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Pada tahun 2023 terjadi penurunan AKI dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 AKI mencapai 156 namun pada tahun 2023 turun menjadi 109, yang berarti terdapat 109 kasus kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Penurunan ini merupakan suatu gambaran bahwa Pemerintah Kota Samarinda fokus dalam pembangunan kesehatan.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Tabel 2.47
Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	AKB per 1000 kelahiran hidup (kasus)	3,89	2,44	3,5	4,3	6,8
2	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun (kasus)	61	35	47	54	87



No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah Kelahiran Hidup (KH)	15.681	14.767	13.428	12.701	12.789
4	AKHB (%)	96,11	97,56	96,5	95,7	93,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Keterangan: Jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun termasuk didalamnya kematian neonatal

Pada tahun 2023 dari 12.789 jumlah kelahiran hidup terdapat 87 kasus kematian bayi berusia dibawah 1 tahun, sehingga diperoleh nilai AKB 6,8. Dapat disimpulkan bahwa setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 2 atau 3 kasus kematian bayi berusia dibawah 1 tahun. Jika dibandingkan capaian pada tahun 2021 terjadi kenaikan AKB sebesar 2,5 point.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana mengalami kurang gizi yang diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan *underweight* adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010:

- Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.
- Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan - 3.0 SD baku WHO.

Tabel 2.48
Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase balita gizi kurang	0,62	1,21	1,3	11,39	7,18
2	Jumlah seluruh balita gizi kurang (balita)	710	1.403	877	2.545	1.070
3	Jumlah anak balita 0-3 tahun (balita)	114.593	116.170	66.877	61.332	61.332

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Menjadi salah satu target dalam SDGs, persentase balita gizi kurang tentunya menjadi indikator yang penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di Kota Samarinda. . Dalam 4 tahun terakhir, tren persentase balita gizi kurang konsisten naik, dari

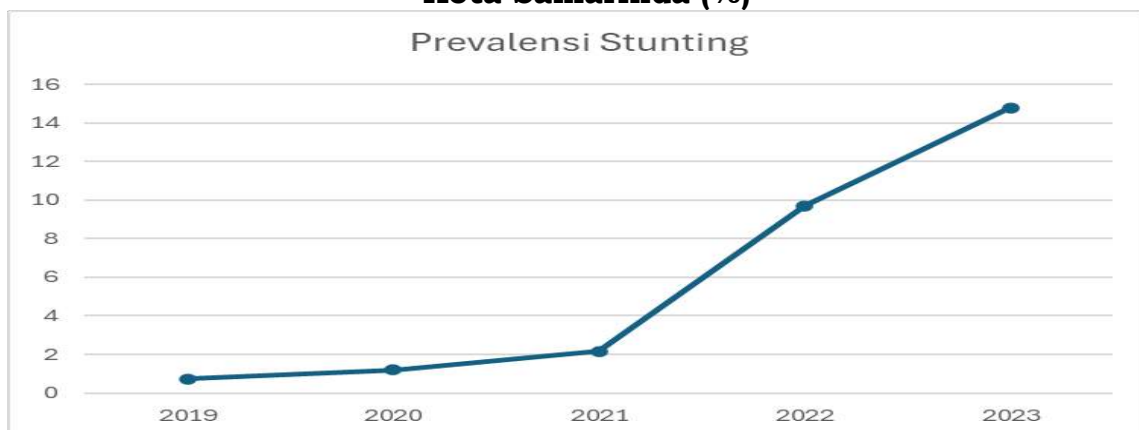


0,62% pada tahun 2019 naik menjadi 7,18% pada tahun 2023. Untuk memperbaiki capaian persentase balita gizi kurang, Pemerintah Kota Samarinda perlu membuat suatu inovasi baru atau memperbaiki program yang telah ada agar mampu mengedukasi masyarakat dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya.

4. Prevalensi Stunting

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak. Target nasional untuk prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat pada tahun 2022, prevalensi stunting Kota Samarinda sebesar 15,5%. Untuk mencapai target nasional, Pemerintah Kota Samarinda minimal setiap tahunnya harus mampu menurunkan capaian prevalensi sebesar 0,75%.

Gambar 2.32.
Prevalensi Stunting Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda



5. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan pembangunan bidang kesehatan, mengingat perannya yang sangat nyata khususnya saat pandemi COVID-19. Melihat pengalaman tahun 2020 saat awal pandemi COVID-19, maka program perluasan cakupan pelayanan kesehatan hingga ke daerah pinggiran harus segera dilakukan guna memperkuat ketangguhan daerah. Perluasan cakupan layanan dimaksud antara lain pembangunan dan pengembangan sarana kesehatan, pendistribusian perlengkapan penanganan COVID-19 dan vaksinasi, serta pendistribusian tenaga kesehatan di seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada tahun 2023 Kota Samarinda memiliki 26 puskesmas yang tersebar pada 10 kecamatan. Rasio puskesmas terhadap kecamatan berkisar 2,6. Dapat diterjemahkan bahwa di setiap kecamatan terdapat 2 sampai 3 puskesmas. Target Nasional yang mengharapkan minimal 1 puskesmas di 1 kecamatan sudah terpenuhi bahkan melampaui target.

Tabel 2.49
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No .	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	793.576	817.254	831.220	849.717	861.878
2	Jumlah Puskesmas (unit)	26	26	26	26	26
	Rasio per 1000 penduduk (unit)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	Jumlah Poliklinik (unit)	85	85	85	90	106
	Rasio per 1000 penduduk (unit)	0,09	0,10	0,10	0,10	0,12
4	Jumlah Pustu (unit)	36	36	36	36	36
	Rasio per 1000 penduduk (unit)	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Menurut *World Health Organization* (WHO), kondisi ideal tenaga Kesehatan dokter dalam memberikan pelayanan adalah 1:2.500 penduduk. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Samarinda, jumlah dokter di Kota Samarinda pada tahun 2023 sebanyak 859 orang yang terdiri atas 378 Dokter Umum, 387 Dokter Spesialis, dan 94 Dokter Gigi.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda mencatat jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2023 mencapai 861.878 jiwa. Dengan membandingkan jumlah dokter dan penduduk, diperoleh rasio tenaga kesehatan dokter di Kota Samarinda sebesar 0,99. Ini berarti terdapat sekitar 1 dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Angka ini menunjukkan rasio tenaga kesehatan dokter sudah tergolong ideal karena 1 orang dokter melayani kurang dari 2.500 penduduk, hal ini pula memberikan gambaran bahwa Pemerintahan Kota Samarinda fokus dalam pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dimana pada tahun 2023 terdapat penurunan 227 Dokter Umum.

Tabel 2.50
Perkembangan Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (orang)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter	715	745	776	1.012	859
	a. Dokter Umum	307	361	369	605	378
	b. Dokter Spesialis	338	318	320	320	387
	c. Dokter Gigi	70	66	87	87	94
2	Jumlah Tenaga Medis	3.431	3.266	3.427	3.801	3.391
	a. Bidan	576	576	600	760	579
	b. Perawat	2.462	2.373	2.438	2.652	2.470
	c. Apoteker	98	94	99	99	115
	d. Sarjana Teknis Kefarmasian	295	243	290	290	227
3	Jumlah Penduduk	793.576	817.254	831.220	849.717	861.878
4	Rasio Dokter per 1.000 penduduk	0,90	0,91	0,93	1,19	0,99
5	Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk	4,32	4,00	4,12	4,47	3,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda yang semakin bertambah menyebabkan peningkatan pergerakan dan aktivitas orang, barang dan jasa. Salah satu infrastruktur utama dalam menunjang



aktivitas manusia maupun aktivitas perekonomian adalah jalan. Keberadaan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta untuk menjamin kenyamanan aksesibilitas antar wilayah.

Panjang jalan dalam kondisi baik selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 442.631 km, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 733.490 dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan serta kenaikan Kembali hingga menjadi 729.352 km di tahun 2023. Demikian pula dengan Panjang jalan dalam kondisi rusak berat, dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2023 juga mengalami fluktuasi dengan kondisi pada tahun 2023 mencapai 79.022 km atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 58.312 km.

Tabel 2.51
Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (km)

No.	Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kondisi Baik	442.631	524.440	733.490	722.025	729.352
2	Kondisi Sedang	57.200	37.970	35.266	41.915	39.599
3	Kondisi Rusak					
	a. Rusak Berat	150.600	121.230	58.312	66.659	79.022
	b. Rusak Ringan	59.210	26.010	54.234	50.703	50.051
Total (1+2+3)		709.638	709.638	881.302	881.302	881.302

Sumber: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2. Kota Samarinda Dalam Angka 2023 dan 2024

2. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Tingginya geliat pembangunan ekonomi dan sosial serta perubahan fisik kota tidak jarang menyebabkan degradasi lingkungan, sehingga keseimbangan ekosistem suatu kota menjadi terganggu. Oleh karena itu, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi isu nasional dan sangat penting untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan di daerah.



Tabel 2.52
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2023
Kota Samarinda

Uraian	2023	Satuan
Jumlah Ruang Terbuka Hijau	277	Unit
Luas Ruang Terbuka Hijau	603.775	Ha
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	0,843	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Pembangunan di Kota Samarinda sangatlah pesat, mulai dari pembangunan fisik hingga pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi ini sangatlah wajar mengingat Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kaltim, sehingga menjadi pusat pertumbuhan provinsi dan menjadi target para pencari kerja baik dari dalam maupun luar provinsi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pembangunan RTH guna menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan serta lingkungan perkotaan yang teduh, rapi, aman dan nyaman. Pada tahun 2023 Kota Samarinda memiliki 277 unit RTH dengan luas 603.775 Ha atau mencapai 0,843% dari luas wilayah Samarinda. Capaian RTH masih perlu ditingkatkan guna memenuhi target nasional sebesar 30% dari luas wilayah.

3. Persentase Penanganan Kawasan Banjir

Kota Samarinda dikenal sebagai daerah yang rendah, sehingga tidak mengherankan apabila setiap tahun terjadi bencana banjir genangan yang melanda 50% kecamatan di ibukota provinsi ini. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir genangan yang melanda Kota Samarinda selama kurang lebih 14 hari, dan pada tahun 2020 terjadi kembali hal serupa. Melihat kondisi ini pemerintah Kota Samarinda tidak tinggal diam, penanganan banjir selalu menjadi agenda prioritas nomor 1 dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah Kota Samarinda. Bahkan karena kedudukannya sebagai ibukota provinsi, penanganan banjir di Kota Samarinda memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat melalui instansi vertikal Balai Wilayah Sungai.



Tabel 2.53
Penanganan Banjir Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kawasan Banjir	1,06	1,02	0,94	0,72	0,68
2	Jumlah Titik Banjir	36	33	32	36	35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Berbagai program dan kegiatan penanganan banjir yang telah dicanangkan pada akhirnya mampu memberikan hasil yang baik, terlihat dari penurunan persentase kawasan banjir dari 1,06% pada tahun 2019 menjadi 0,68 persen pada tahun 2023. Penurunan pun juga terjadi pada titik banjir, dari 36 titik menjadi 35 titik.

Keberhasilan penanganan banjir salah satunya ditempuh melalui program awasanat dan rehabilitasi drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Pada tahun 2022 drainase dalam kondisi baik sebesar 498.898,87 meter atau 24,49%, namun pada tahun 2023 menjadi 549.013.86 meter atau 10,05%.

Tabel 2.54
Kondisi Drainase Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (meter)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang drainase awasa terbuka	585.737,98	598.737,32	645,695,69	678,409,69	695.114,91
1.1	Kondisi baik	220.883,08	259.881,09	400,756,18	498,898,87	549.013,86
1.2	Kondisi sedang	273.641,18	254.142,17	183,704,63	134,633,28	109.575,79
1.3	Kondisi buruk	91.213,73	84.714,06	61,234,88	44,877,76	36.525,26
2	Panjang drainase awasa tertutup	97.185,75	97.449,95	97,822,73	99,938,60	99,938,60
2.1	Kondisi baik	34.963,71	35.756,31	36,874,65	43,222,26	43,222,26
2.2	Kondisi sedang	46.666,53	46.270,23	45,711,06	42,237,25	42,537,25
2.3	Kondisi buruk	15.555,51	15.423,41	15,237,02	14,179,08	14,179,08

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

4. Kondisi Jaringan Irigasi

Keberadaan konstruksi, perdagangan, dan pertambangan sebagai 3 sektor tertinggi dalam perekonomian daerah, tidak menyurutkan pemerintah Kota Samarinda dalam membangun sektor pertanian,



mengingat masih adanya potensi pada sektor tersebut terutama dalam mendukung ketahanan pangan. Guna meningkatkan produksi, pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Tabel 2.55
Perkembangan Jaringan Irigasi Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (meter)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jaringan Irigasi Non Teknis (meter)					
1.1	Saluran Kondisi Baik	33.288	33.863	41.758,86	43.786,86	44.704,31
1.2	Saluran Kondisi Sedang	20.262	20.612	20.879,43	21.893,43	22.352,15
1.3	Saluran Kondisi Rusak Ringan	10.855	11.042	9.636,66	10.104,66	10.316,38
1.4	Saluran Kondisi Rusak Berat	7.960	8.098	8.030,55	8.420,55	8.596,98
2.	Jaringan Irigasi Teknis (meter)					
2.1	Panjang Jaringan Primer					
	a. Saluran Kondisi Baik	9.779	9.779	10.416,42	10.203,84	10.203,84
	b. Saluran Kondisi Sedang	5.952	5.952	2.976,12	3.401,28	3.401,28
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	3.189	3.189	3.188,70	3.188,70	3.188,70
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	2.338	2.338	4.676,76	4.464,18	4.464,18
2.2	Panjang Jaringan Sekunder					
	a. Saluran Kondisi Baik	3.813	4.046	6.798,55	7.180,95	7.809,00
	b. Saluran Kondisi Sedang	2.321	2.463	2.169,75	2.198,25	2.342,70
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	1.244	1.319	3.760,90	3.810,30	3.748,32
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	912	967	1.735,80	1.612,06	1.717,98
2.3	Panjang Jaringan Tersier					
	a. Saluran Kondisi Baik	2.872	2.872	2.997,22	3.212,737	3.179,62
	b. Saluran Kondisi Sedang	1.748	1.748	874,19	960,51	993,63
	c. Saluran Kondisi	937	937	936,63	993,63	993,63



No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Rusak Ringan					
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	687	687	1.436,17	1.457,32	1.457,32

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Permukiman Kumuh

Menyandang status sebagai ibukota provinsi, Kota Samarinda tentunya perlu mengalami perubahan fisik agar menjadi “rumah” yang nyaman bagi masyarakatnya. Program penanganan kawasan permukiman kumuh terus digalakkan, baik melalui APBD Kota Samarinda maupun pemerintah provinsi dan pusat.

Tabel 2.56
Luasan Permukiman Kumuh Kota Samarinda (Ha)
Tahun 2021-2023

Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kuku Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat	Provinsi	Kota /Kab
						(>15 Ha)	(10-15 Ha)	(<10 Ha)
TAHUN 2021								
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 66/404 /HK-KS/XI/ 2020	Karang Mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0,14	6,24		
			Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	0,70			
			Sungai Pinang	Temindung Permai	2,47			
			Sungai Pinang	Bandra	1,33			
			Samarinda Ilir	Pelita	1,60			
			Sungai Pinang	Temindung	4,15		9,47	



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kuku Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)				
						Kewenangan				
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat	Provinsi	Kota /Kab		
						(>15 Ha)	(10-15 Ha)	(<10 Ha)		
		Karang Mumus 2		Permai						
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	5,32					
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Leron g Ulu	0,26				0,26	
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75				0,75	
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		11,34			
			Sambut an	Sunga i Kapih	5,41					
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72				5,72	
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	5,85				5,85	
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	12,20				
			Samarinda Ilir	Sidodamai	3,64					
			Samarinda Ilir	Sunga i Dama	7,13					
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	1,19				1,19	
		TOTAL LUASAN					53,02	18,44	20,81	13,77
		TAHUN 2022								
SAMARINDA	SK Walikota		Samarinda Ulu	Dadimulya	0,14					



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kuku Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat	Provinsi	Kota /Kab
						(>15 Ha)	(10-15 Ha)	(<10 Ha)
	Samarinda 663/404 /HK-KS/XI/2020	Karang Mumus 1	Samarinda Ulu	Sungai Pinang Luar	0,70	3,31		
			Samarinda Kota	Temindung Permai	0,37			
			Sungai Pinang	Bandara	0,5			
			Sungai Pinang	Pelita	1,60			
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	4,15		9,47	
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	5,32			
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0.26			0,26
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75			0,75
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		11,34	
			Sambutan	Sungai Kapih	5,41			
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72			5,72
		Simpan Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	0,00			0,00
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	10,47		
			Samarinda Ilir	Sidodamai	3,64			
			Samarinda Ilir	Sungai Dama	5,4			
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	1,19			1,19



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kuku Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)			
						Kewenangan			
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat	Provinsi	Kota /Kab	
						(>15 Ha)	(10-15 Ha)	(<10 Ha)	
TOTAL LUASAN					42,51	13,78	20,81	13,77	
TAHUN 2023									
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 663/404 /HK-KS/XI/2020	Karang Mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0,14	2,24			
			Samarinda Ulu	Sungai Pinang Luar	0,70				
			Samarinda Kota	Temindung Permai	0,37				
			Sungai Pinang	Bandara	0				
			Sungai Pinang	Pelita	1,60				
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	4,15		9,47		
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	5,32				
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0.26			0,26	
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75			0,75	
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		11,34		
			Sambut an	Sungai Kapih	3,73				
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72			5,72	
		Simpan Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	0,00			0,00	
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	8,25			



Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kuku Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat	Provinsi	Kota /Kab
						(>15 Ha)	(10-15 Ha)	(<10 Ha)
			Samarinda Ilir	Sidodamai	2,53			
			Samarinda Ilir	Sungai Dama	4,29			
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	0,00			0,00
TOTAL LUASAN					36,35	10,49	19,13	6,73

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di Samarinda untuk menangani Kawasan kumuh adalah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda dibentuk sebagai salah satu upaya dalam mempercepat penanganan masalah permukiman kumuh. Dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan terlihat adanya hasil yang positif dalam penurunan Kawasan permukiman kumuh di Samarinda. Tahun 2020 luasan Kawasan permukiman kumuh di Samarinda mencapai 70,51 ha yang lokasinya tersebar di 19 Kelurahan. Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 53,02 hektar yang berada di 17 Kelurahan. Tahun 2022 kawasan permukiman kumuh berhasil dikurangi menjadi tersisa seluas 42,51 ha. Meskipun tetap berada di 17 Kelurahan tetapi ada 4 Kelurahan yang berkurang luasan Kawasan permukiman kumuhnya yaitu Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Sungai Dama.



Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, terdapat 8 kawasan permukiman kumuh yang menjadi fokus penyelesaian pemerintah Kota Samarinda, terutama kawasan yang berada di atas tanah negara atau secara hukum melanggar tata ruang. Meskipun belum mencapai target nasional, namun program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda menunjukkan hasil yang signifikan, terlihat dengan penurunan luasan permukiman kumuh dari 133,33 hektar pada tahun 2018 menjadi 42,51 hektar di tahun 2022. Oleh karena itu program penanganan kawasan kumuh yang telah berjalan masih terus dipertahankan guna menjadikan Kota Samarinda yang nyaman untuk dihuni.

2. Rumah Tidak Layak Huni

Munculnya rumah tidak layak huni sendiri didasari atas ketidakmampuan seseorang untuk menyediakan sarana prasarana dasar yang layak untuk berdiam diri, bahkan beberapa kasus rumah tidak layak huni justru tidak memiliki legalitas yang kuat dikarenakan keberadaannya yang melanggar tata ruang. Namun penanganan kawasan kumuh tidak bisa dipisahkan dari penanganan rumah tidak layak huni. Berbagai program pemerintah mulai dari pusat hingga pemerintah Kota Samarinda telah dilakukan guna mengurangi persentase rumah tidak layak huni. Berdasarkan catatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, rumah tidak layak huni di Kota Samarinda setiap tahunnya terus mengalami penurunan, dan hingga tahun 2022 tersisa 15,57 persen.

Tabel 2.57
Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m2 per orang (Unit rumah tangga)	Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (Unit rumah tangga)	RTLH
Kec. Loa Janan Ilir	9,718.00	8,662	8,961	757
Kec. Palaran	12,876	9,858	10,800	2,076
Kec. Samarinda Ilir	12,664	10,378	10,868	1,796
Kec. Samarinda Kota	8,254	5,832	6,413	1,841
Kec. Samarinda Seberang	6,731	5,432	5,671	1,060
Kec. Samarinda Ulu	24,450	19,333	20,734	3,716
Kec. Samarinda Utara	12,531	9,614	10,543	1,988
Kec. Sambutan	9,255	7,776	7,839	1,416
Kec. Sungai Kunjang	25,712	19,840	21,586	4,126
Kec. Sungai Pinang	19,852	13,466	14,523	5,329



Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m ² per orang (Unit rumah tangga)	Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (Unit rumah tangga)	RTLH
	142.043,00	110.191	117.938	24.105
	Data tambahan baru BNBA			2.400
				26.505

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Demi menciptakan ketertiban dan keamanan di Kota Samarinda serta guna memperlancar pelaksanaan program pembangunan, tentu tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Oleh karena itu peningkatan jumlah personel harus sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk dengan rasio per 10.000 penduduk.

Tabel 2.58
Rasio Pol PP dan Linmas Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (orang)

No .	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	872.770	827.990	831.460	834.824	872.304
2	Jumlah Pol PP	512	512	467	473	449
	Rasio	5,87	6,18	5,62	5,67	5,15
3	Jumlah Linmas	166	174	174	392	392
	Rasio	1,90	2,10	2,09	4,70	4.49

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat barisan Pol PP dan Linmas. Berdasarkan data Satpol PP Kota Samarinda, jumlah personel hingga tahun 2023 mencapai 449 dengan cakupan 5-6 orang per 10.000 penduduk, menurun dibanding tahun 2019 yang mencapai 512 personel dengan cakupan 6-7 orang per 10.000 penduduk. Namun kondisi ini tidak menyurutkan pelaksanaan program pemerintah di lapangan, terbukti berbagai program yang rentan konflik dengan masyarakat berhasil dijalankan dengan lancar dan damai.



2. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan tolok ukur penting dalam keberhasilan pelaksanaan program bidang ketentraman dan ketertiban umum. Timbulnya gangguan dalam ketentraman dan ketertiban umum salah satunya disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap perda, seperti adanya kegiatan ekonomi pada sarana prasarana publik atau bahkan mendirikan bangunan di tanah negara. Namun khusus tahun 2020, pelanggaran yang sering dijumpai yaitu pelanggaran protokol kesehatan sebagai bentuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Samarinda.

Berdasarkan tabel 2.41, terlihat bahwa jumlah pelanggaran terhadap Perda sangat fluktuatif, selama 5 tahun terakhir Jumlah kasus Pelanggaran Perda tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 304 kasus dengan penegakan Perda 100 persen. Adapun pada tahun 2023 terjadi pelanggaran Perda sebanyak 322 kasus dengan penegakan Perda 100 persen. Dengan ditegakkannya seluruh pelanggaran Perda menandakan bahwa pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi lebih nyaman untuk dihuni.

Tabel 2.59
Penegakan PERDA Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelanggaran PERDA (kasus)	89	258	304	104	322
2	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA (kasus)	89	258	304	104	322
3	Persentase penegakan PERDA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

3. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3

Selain penegakan Perda, penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) juga menjadi tolok ukur penting dalam pelaksanaan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Pelanggaran K3 yang kerap terjadi di Kota Samarinda yaitu penyakit masyarakat, yang kerap ditemukan pada saat razia bersama unsur kepolisian dan TNI. Secara keseluruhan penanganan pelanggaran K3 di Kota Samarinda menunjukkan keberhasilan, meskipun jumlah pelanggaran sangat



fluktuatif. Keberhasilan tersebut terlihat pada persentase penyelesaian pelanggaran K3 pada 3 tahun terakhir yang capaiannya konsisten 100%.

Tabel 2.60
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam (orang)	1.095	1.095	1.095	270	1.539
2	Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) (kasus)	360	253	304	149	322
3	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) (kasus)	288	253	304	149	322
4	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (sesudah validasi) (kasus)	44	30	304	100	322
Persentase Pelanggaran K3		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

2.4.1.6. Sosial

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Langkah strategis pemerintah Kota Samarinda dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial salah satunya adalah pemberian bantuan, yang tentunya dilakukan secara selektif agar tepat sasaran.

Tabel 2.61
Persentase PMKS/ PPKS Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	18.225	16.345	16.378	19.559	70
2	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	14.922	22.460	22.460	15.432	2.684
3	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	1.501	19.577	19.519	3.794	1.414

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda



2.4.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap Perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan hak-hak kebebasan, yang terjadi baik di dalam rumah tangga atau keluarga (*private life*), maupun di dalam masyarakat (*public life*) yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi wanita baik secara fisik, seksual maupun psikologis (*United Nations Department of Public Relation 1986*). Masalah kekerasan pada dasarnya erat kaitannya dengan kekuasaan, dan umumnya tindakan kekerasan dilakukan oleh kaum laki-laki. Dominasi pria terhadap wanita menunjukkan adanya kekuasaan pria untuk berbuat sesukanya terhadap wanita. Hal ini juga didukung oleh sistem kepercayaan gender yang berlaku dalam masyarakat, sistem kepercayaan gender mengacu pada serangkaian kepercayaan dan pendapat tentang laki-laki dan perempuan, sistem ini mencakup pengertian bagaimana sebenarnya laki-laki dan perempuan itu. Semakin tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak serta tingginya kejadian *human trafficking*, atau yang lebih dikenal dengan perdagangan orang, menjadikan pembangunan bidang perempuan dan perlindungan anak sebagai isu penting di Indonesia. Kasus-kasus tersebut merupakan cerminan rendahnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat.

Data pada tabel di bawah menunjukkan jumlah laporan masuk terkait kekerasan pada perempuan di Kota Samarinda dalam kurun waktu 2019-2023 konsisten naik, dari 23 laporan pada tahun 2019 menjadi 307 laporan pada tahun 2023. Walaupun jumlah laporan terus bertambah, hal tersebut tidak menyurutkan Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan perhatian yang sistematis guna mewujudkan keadilan khususnya kepada kaum perempuan. Hal ini terlihat dari konsistennya peningkatan Jumlah laporan yang masuk dan telah ditindaklanjuti, dan pada tahun 2023 seluruh laporan telah ditindaklanjuti. Perkembangan yang sama pun terjadi pada kasus kekerasan pada anak. Jumlah laporan masuk menunjukkan kenaikan selama 4 tahun terakhir jumlah laporan yang masuk. Pada tahun 2019, laporan yang masuk sebanyak 111 kasus, persentase tindak lanjut mencapai 72,97 persen. Dan pada tahun 2023



dari laporan yang masuk sebanyak 230 kasus, seluruh kasus telah ditindaklanjuti, dalam artian persentase tindak lanjut mencapai 100 persen. Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak harus dilakukan dengan lebih komprehensif, mendalam dan seimbang antara penanganan pelaku dan korban.

Tabel 2.62
Data Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perempuan					
	Jumlah laporan	23	133	112	274	307
	Jumlah tindak lanjut	15	133	112	274	307
	Persentase	65,22	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Anak					
	Jumlah laporan	111	161	146	188	230
	Jumlah tindak lanjut	81	161	146	188	230
	Persentase	72,97	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

b. Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintah

Berbicara tentang pengarusutamaan gender tentunya tidak pernah terlepas dari kesetaraan gender, yang dapat diartikan secara sederhana bahwa laki-laki dan perempuan atau kelompok lainnya dapat memperoleh hak yang sama serta tidak dibeda-bedakan (setara). Kesetaraan gender harus diterapkan di seluruh aspek pekerjaan, khususnya lembaga pemerintah. Penempatan pejabat eselon II, III, dan IV di Kota Samarinda diupayakan memberikan porsi kepada perempuan secara proporsional. Perhatikan tabel berikut:



Tabel 2.63
Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (orang)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	4	4	3	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	61	55	50	52	56
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	375	348	359	204	204
4	Pekerja perempuan di pemerintahan	4.383	4.314	4.357	4.060	3.712

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2.4.1.8. Pangan

1. Ketersediaan Pangan

Melihat kondisi Kota Samarinda yang terus tumbuh baik ekonomi maupun penduduknya, tentunya mempunyai beban tersendiri untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Jumlah penduduk yang mencapai 900 ribu jiwa tentunya membutuhkan pangan utama yang amat besar, bahkan apabila ada keterlambatan dalam pemenuhannya maka akan berakibat pada kelangkaan pangan utama yang berujung pada inflasi. Kondisi ini yang selalu menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Samarinda, terutama menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan.

Tabel 2.64
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

Tahun		Komoditas			
		Beras	Gula Pasir	Minyak Goreng	Tepung Terigu
2019	Produksi	35.615/9.724	0	0	0
	Impor	46.090/86.526	38.325	14.118	74.704
	Ketersediaan	81.704/96.251	38.325	14.118	74.704
2020	Produksi	7.192	0	0	0
	Impor	67.763	72.940	7.565	13.135
	Ketersediaan	74.955	72.940	7.565	13.135
2021	Produksi	6.645	0	0	0
	Impor	150.363	121.390	34.653	13.894
	Ketersediaan	157.008	121.390	34.653	13.894
2022	Produksi	5,691	0	0	0



Tahun		Komoditas			
		Beras	Gula Pasir	Minyak Goreng	Tepung Terigu
2019	Impor	104,597	12,672	17,676	3,321.46
	Ketersediaan	110,288	12,672	17,676	3,321.46
	Produksi	7,681	0	0	0
2023	Impor	104,597	179.789	94.781	197.160
	Ketersediaan	149.304	179.789	94.781	197.160
	Produksi	7,681	0	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda

Pada tahun 2019 Kota Samarinda mampu menghasilkan 9.724 ton beras, sedangkan pada tahun 2023 hanya mampu memproduksi 7.681 ton. Melihat perkembangan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kota Samarinda dalam menyediakan pangan utama dari hasil lokal semakin menurun, yang artinya pemerintah Kota Samarinda harus melakukan kerjasama dengan daerah penghasil untuk memenuhi kebutuhan pangan utama di masyarakat sebelum terjadi kasus kelangkaan di pasar.

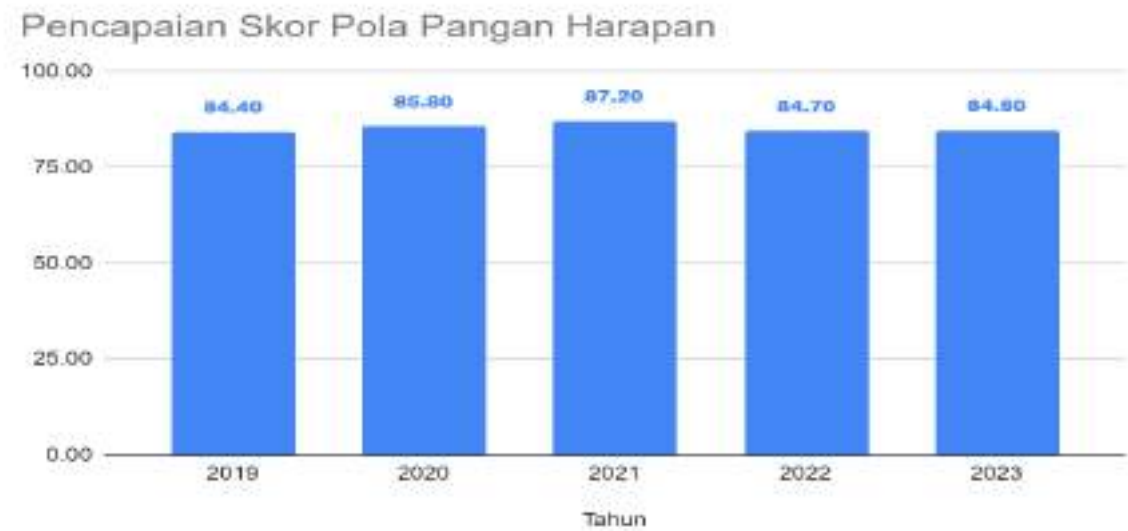
2. Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH dapat menilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Melalui pendekatan PPH, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (*adequacy*), tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*balance*), yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli.

Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100 poin, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. Dalam kurun waktu 2019-2023, skor PPH Kota Samarinda menunjukkan perkembangan positif, beranjak naik dari 84,4 pada tahun 2019 menjadi 84.80 tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat di Kota Samarinda semakin mengarah pada pangan yang beragam dan gizi seimbang.



Gambar 2.33.
Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (poin)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Dalam aplikasinya Pola Pangan Harapan (PPH) dikenal dengan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman atau dikenal dengan istilah menu B2SA. Dengan terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai dengan PPH maka secara implisit kebutuhan zat gizi lainnya juga terpenuhi oleh karena itu skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan.

Sesuai dengan kegunaannya, makanan dikelompokkan dalam tiga kelompok (Tri Guna Makanan) yaitu makanan sebagai sumber zat tenaga, zat pembangunan dan zat pengatur. Oleh karena itu pangan yang dikonsumsi sehari-hari harus dapat memenuhi fungsi makanan tersebut. Semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dapat diperoleh dengan mengkonsumsi pangan yang beranekaragam dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu jenis bahan makanan yang dapat menyediakan zat gizi secara lengkap. Dengan terpenuhinya kebutuhan zat gizi lainnya juga terpenuhi.

2.4.1.9. Lingkungan Hidup

a. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan



Hidup Strategis, analisis materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program paling sedikit memuat kajian:

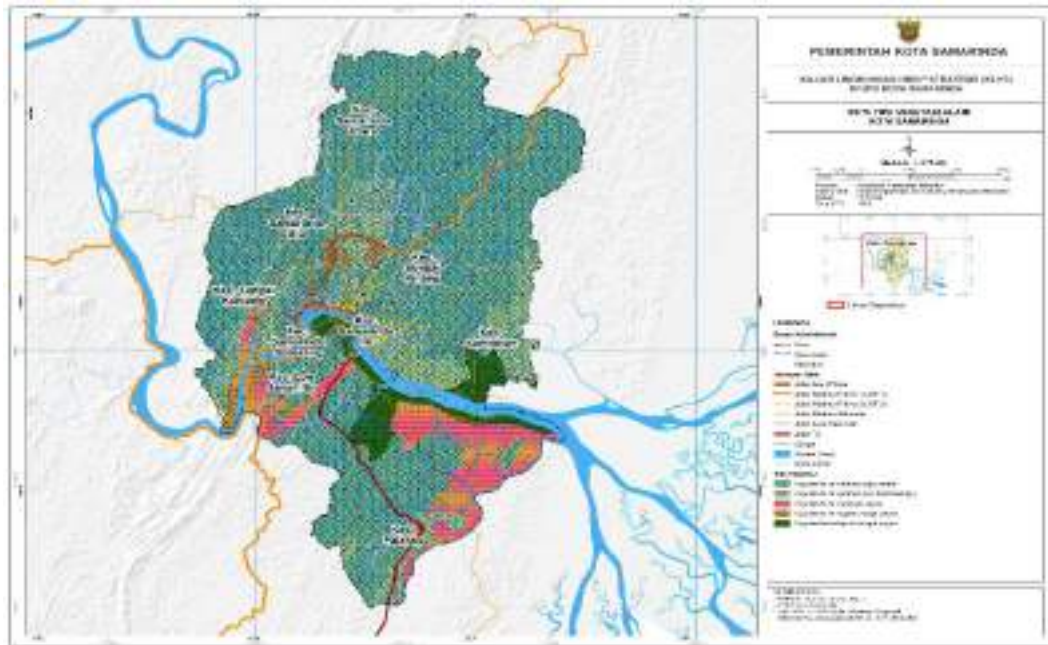
- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup;
- 3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

1) **Ekoregion**

UU No 32 Tahun 2009 mendefinisikan ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya, penentuan daya dukung dan daya tampung dilakukan atas dasar inventarisasi lingkungan hidup dan ekoregion. Pemetaan ekoregion ditujukan untuk meletakkan dasar informasi tematik yang dibutuhkan dalam menentukan kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Peta ekoregion dikembangkan berdasarkan karakteristik bentang alam berupa geomorfologi dan morfogenesis, tipe vegetasi alami dan kondisi terkini tutupan lahan. Bentang alam di Kota Samarinda disajikan dalam gambar diatas, dan dapat dilihat bahwa Kota Samarinda didominasi bentang alam perbukitan struktural dan denudasional, berseling dengan dataran fluvial yang tersebar di alur sungai utama yang membelah Kota Samarinda.

Sebaran tipe vegetasi di Kota Samarinda disajikan dalam gambar berikut dan dapat dilihat bahwa vegetasi alami yang mendominasi wilayah Kota Samarinda adalah hutan dipterokarpa dan non dipterokarpa berseling dengan hutan rawa dan riparian yang ditemui di lahan basah maupun tepi sungai yang membelah Kota Samarinda.

Gambar 2.34.
Peta Tipe Vegetasi di Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2) Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Samarinda menggunakan pendekatan jasa ekosistem memanfaatkan grid skala ragam dengan resolusi 90m x 90m. Datum geodetik yang digunakan adalah DGN95 yang memiliki nilai-nilai parameter ellipsoid sama dengan datum WGS 84. Titik asal sistem koordinat geodetik berada pada 900BT, 150 LS dengan titik batas ujung timur dan ujung utara grid adalah 1440BT dan 80 LU (Riqqi, 2008).

Nilai sebaran jumlah penduduk akan menjadi dasar dalam setiap perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan terkait dengan kebutuhan penduduk, baik itu kebutuhan energi pangan maupun kebutuhan air.

a) Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Mengingat wilayah kota samarinda sebagai daerah perkotaan tentu saja kota ini sudah tidak lagi fokus sebagai wilayah pemasok pangan untuk masyarakat di wilayah samarinda itu sendiri. Meskipun demikian cukup



penting untuk mengetahui kondisi daya dukung pangan tersebut sebagai baseline awal dalam menentukan sebuah kebijakan.

Mengingat wilayah Kota Samarinda sebagai daerah perkotaan dan namun sebagian wilayah masih memiliki lahan untuk penyedia pangan seperti Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Palaran. Sehingga cukup penting untuk mengetahui kondisi daya dukung pangan di Kota Samarinda sebagai baseline awal dalam menentukan sebuah kebijakan. Ketersediaan energi pangan dalam jumlah besar ditemukan di Kecamatan Samarinda Utara yaitu mencapai 612.441 Juta Kkal/tahun. Kebutuhan pangan terbesar ditemukan di Kecamatan Sungai Kunjang yaitu 91.804 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 25.204 juta Kkal.

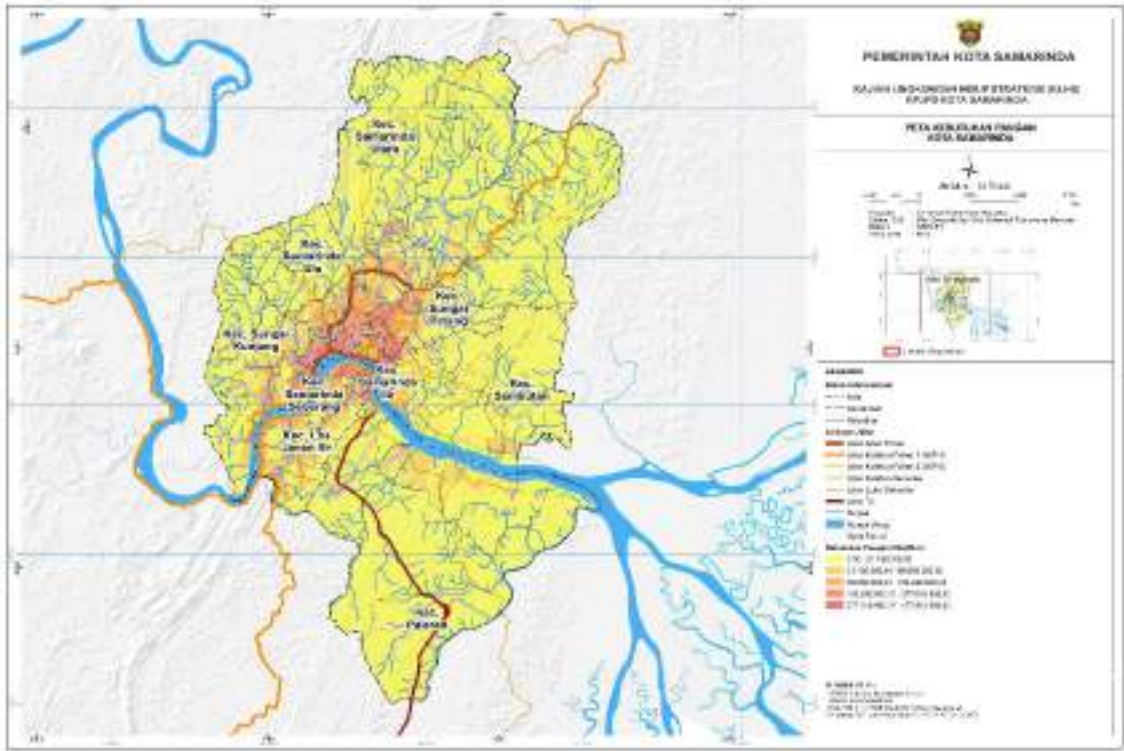
Tabel 2.65
Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih Pangan	Status DDTLH Pangan
1	Kec. Loa Janan Ilir	69.185.982.194	53.759.311.350	15.426.678.485	Belum Terlampaui
2	Kec. Palaran	432.073.158.820	41.680.446.450	390.392.743.767	Belum Terlampaui
3	Kec. Samarinda Ilir	11.841.456.200	54.885.420.250	-43.043.972.700	Terlampaui
4	Kec. Samarinda Kota	5.794.595.470	25.204.603.150	-19.410.010.700	Terlampaui
5	Kec. Samarinda Seberang	25.326.862.400	48.377.489.350	-23.050.629.200	Terlampaui
6	Kec. Samarinda Ulu	107.951.595.278	87.926.507.700	20.025.082.700	Belum Terlampaui
7	Kec. Samarinda Utara	612.441.380.616	74.318.199.600	538.123.262.668	Belum Terlampaui
8	Kec. Sambutan	205.419.452.993	36.074.979.400	169.344.465.587	Belum Terlampaui
9	Kec. Sungai Kunjang	148.939.362.933	91.804.766.350	57.134.598.759	Belum Terlampaui
10	Kec. Sungai Pinang	59.010.076.700	73.693.514.200	-14.683.442.100	Terlampaui
Total		1.677.983.923.603	587.725.237.800	1.090.258.777.266	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

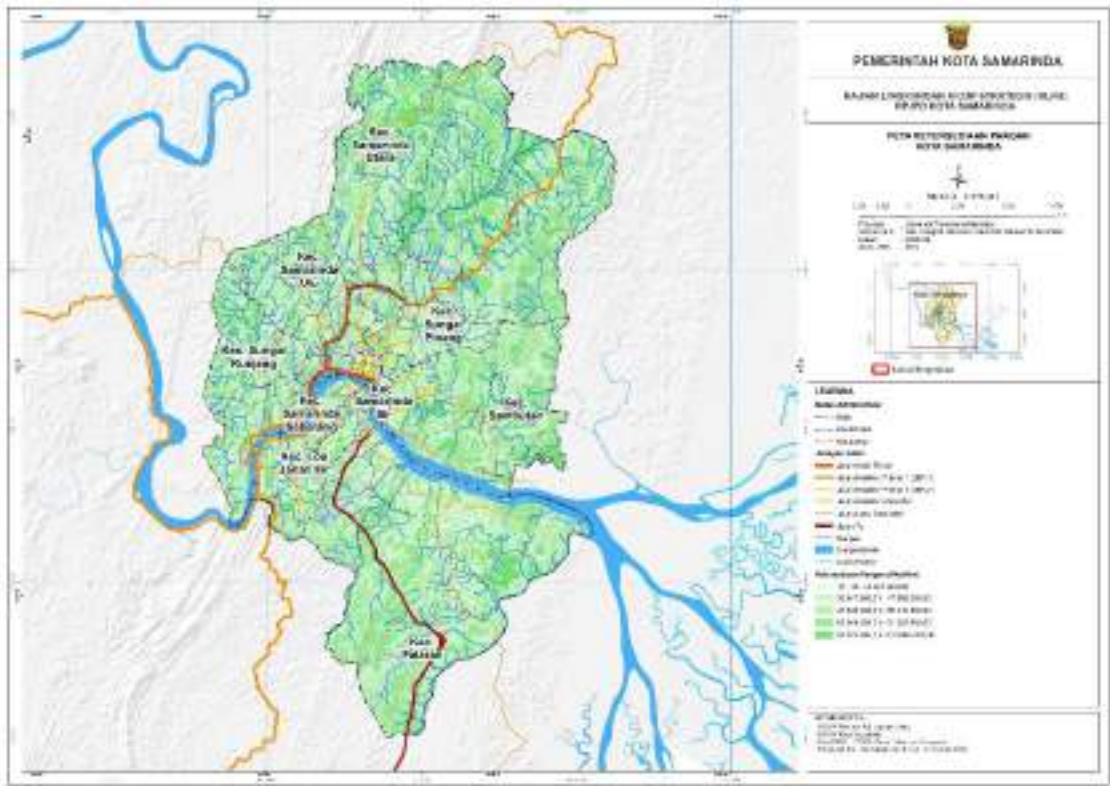


Gambar 2.35.
Peta Kebutuhan Pangan Kota Samarinda



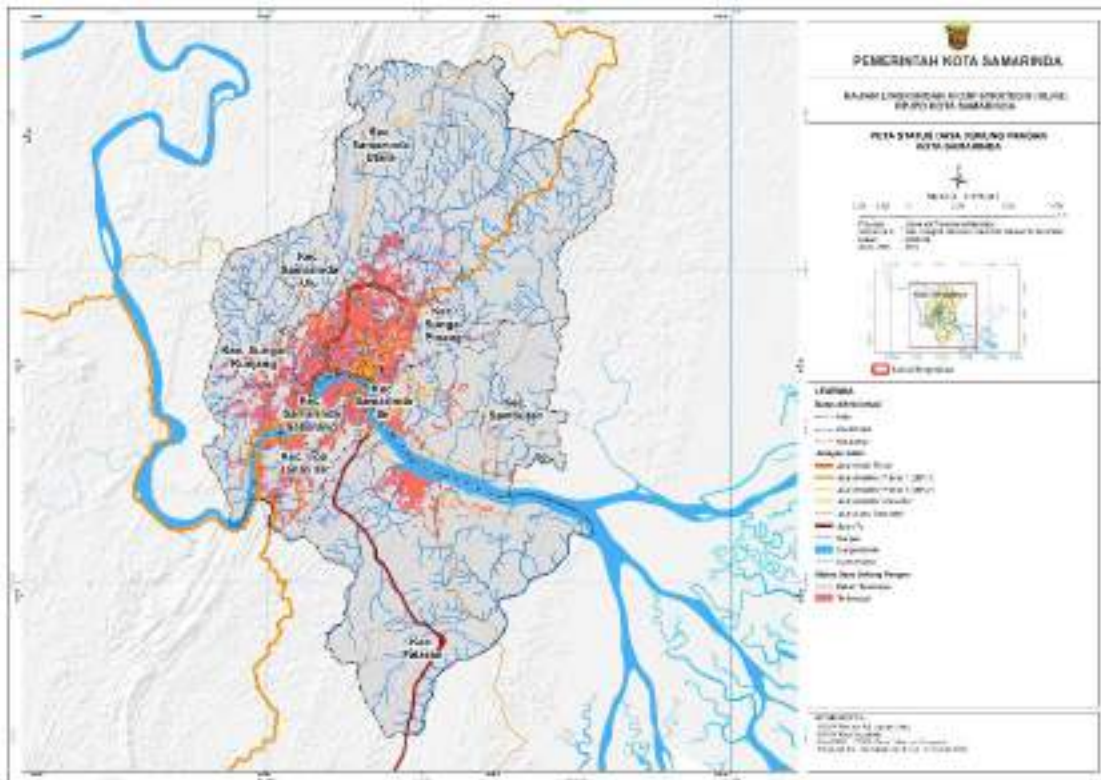
Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Gambar 2.36.
Peta Ketersediaan Pangan Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Gambar 2.37.
Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

b) Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Daya dukung air di Kota Samarinda dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan nondomestik.

Ketersediaan air di Kota Samarinda diperoleh melalui analisis ketersediaan air berbasis zona PDAM dan Air Tanah dan berbasis jasa ekosistem di Kota Samarinda. Daya dukung air di Kota Samarinda dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Hasil perhitungan ketersediaan air dapat dilihat pada Tabel 2.51. Ketersediaan air terbesar dari seluruh kecamatan di Kota Samarinda dalam satu tahun terdapat di Kecamatan Samarinda Utara yaitu 21.642.394,89 m³. Sedangkan ketersediaan air terendah terdapat di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 388.558,60 m³/tahun.

Total kebutuhan air di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 2.51, dimana Kecamatan Samarinda Utara memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 173.396.425,95 m³/tahun



kemudian diikuti oleh Kecamatan Palaran sebesar 109.442.705,08 m³/tahun dan Kecamatan Samarinda Ulu sebesar 32.781.472,91 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 3.285.291,22 m³/tahun. Secara keseluruhan daya dukung air di Kota Samarinda berada pada daya dukung air yang terlampaui.

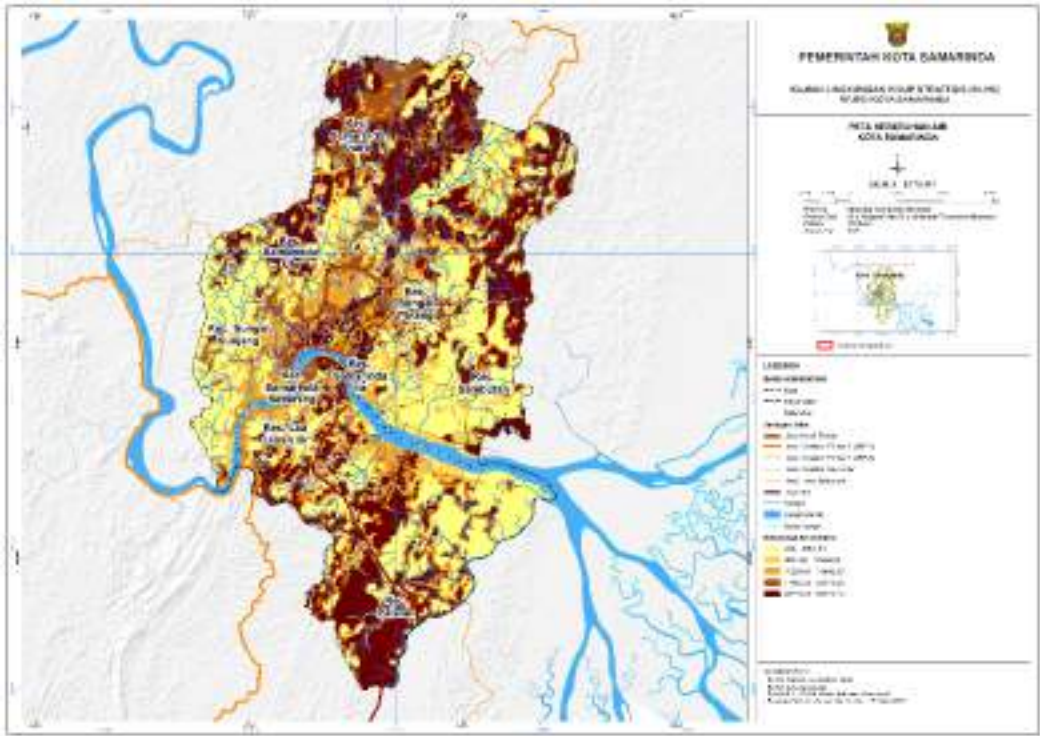
Tabel 2.66
Status Daya Dukung Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih Air	Status DDTLH Air
1	Kec. Loa Janan Ilir	2.910.595,30	18.611.096,06	-15.700.504,65	Terlampaui
2	Kec. Palaran	16.493.605,82	109.442.705,08	-92.949.080,92	Terlampaui
3	Kec. Samarinda Ilir	516.271,20	7.628.133,00	-7.111.867,18	Terlampaui
4	Kec. Samarinda Kota	388.558,60	3.285.291,22	-2.896.735,98	Terlampaui
5	Kec. Samarinda Seberang	1.265.788,33	7.388.441,57	-6.122.657,60	Terlampaui
6	Kec. Samarinda Ulu	4.561.770,92	32.781.472,91	-28.219.733,51	Terlampaui
7	Kec. Samarinda Utara	21.642.394,89	173.396.425,95	-151.753.953,64	Terlampaui
8	Kec. Sambutan	8.158.316,52	25.022.429,43	-16.864.115,10	Terlampaui
9	Kec. Sungai Kunjang	6.945.814,43	18.235.018,89	-11.289.211,80	Terlampaui
10	Kec. Sungai Pinang	2.630.074,47	20.428.375,82	-17.798.311,78	Terlampaui
Total		65.513.190,49	416.219.389,91	350.706.172,15	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



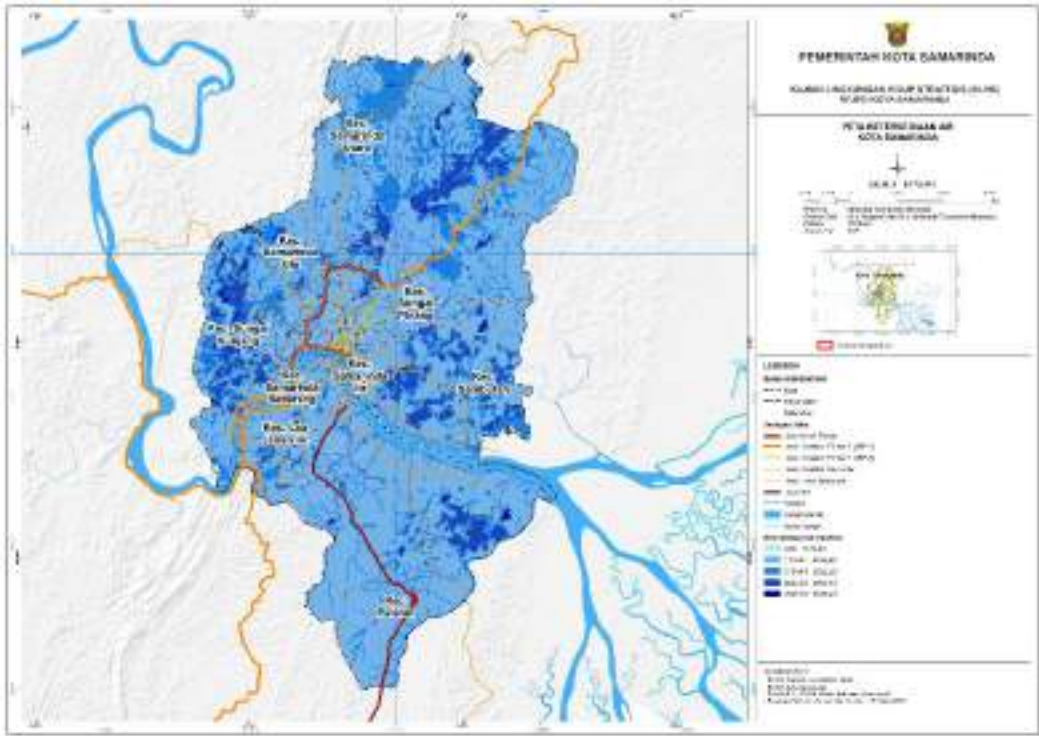
Gambar 2.38.
Peta Kebutuhan Air Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

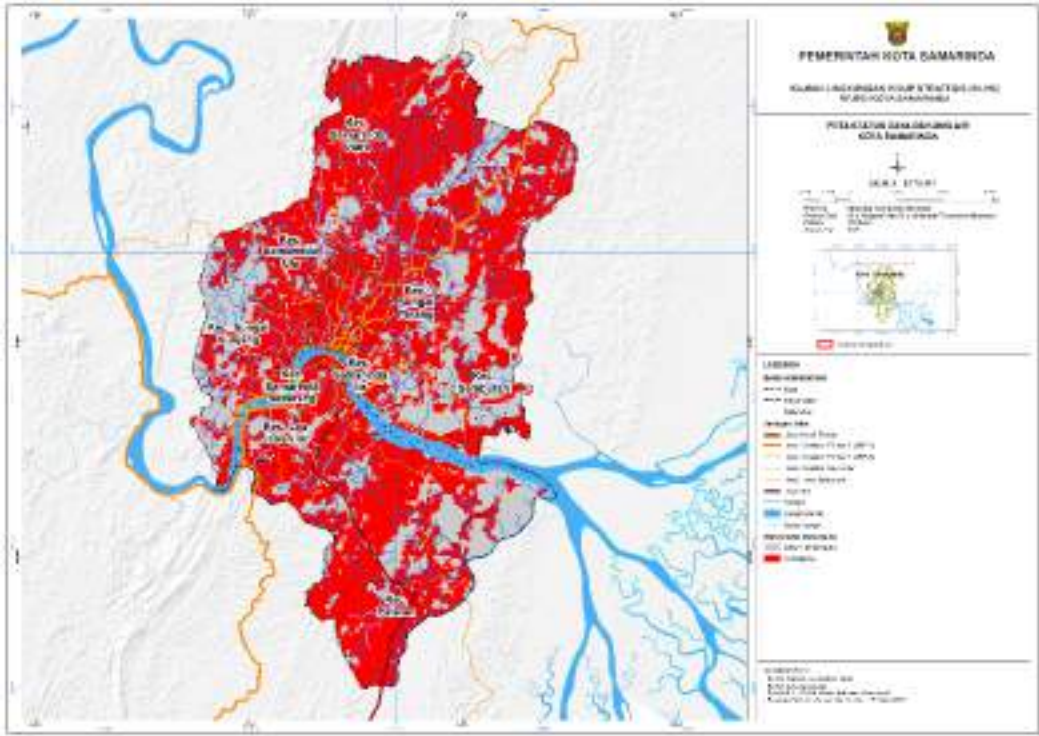


Gambar 2.39.
Peta Ketersediaan Air Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Gambar 2.40.
Peta Status Daya Dukung Air Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



3) **Prakiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup**

a) **Rawan Bencana Kota Samarinda**

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022, diketahui bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan yang tergolong tinggi, diikuti oleh longsor, kekeringan dan konflik sosial. Namun apabila dicermati di tingkat Provinsi Kaltim, Kota Samarinda justru memiliki skor terendah dalam Indeks Rawan Bencana dibanding kabupaten/kota se-Kaltim dengan skor 135 dan masuk kelas rawan sedang. Sebaran risiko bencana tertinggi di Kota Samarinda disajikan sebagai berikut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan paling tinggi di Kota Samarinda. Adapun kelas bahaya yang terjadi untuk aspek bencana lainnya di Kota Samarinda sampai tahun 2019 yaitu:

Tabel 2.67
Kelas Bahaya Dominan di Kota Samarinda

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1	Banjir	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi
3	Difteri	Rendah
4	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah
6	Kekeringan	Sedang
7	Konflik Sosial	Sedang
8	Longsor	Sedang

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Di Kota Samarinda terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 9 kecamatan dimana hanya wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak pernah mengalami bencana banjir seperti yang terlihat pada tabel. Titik bencana banjir terbanyak berada di Kecamatan Palaran yang mencapai 9 titik, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Utara yang masing-masing sebanyak 7 titik banjir. Pada tahun 2005, setiap titik banjir tersebut hanya mengalami 6-10 kali bencana banjir dalam setahun, tetapi pada masa sekarang hampir setiap kondisi hujan mengalami bencana banjir. Melihat



keadaan seperti itu bukan hal yang aneh jika urgensi penanganan banjir di Kota Samarinda menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah periode saat ini.

Selain banjir, bencana longsor kerap terjadi di Kota Samarinda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa di Kota Samarinda telah terjadi total 41 kejadian bencana longsor, 3 orang meninggal, 2 luka-luka dan 422 orang menderita.

Tabel 2.68
Risiko Bencana di Kota Samarinda

No	Risiko Banjir	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	11.179,18	67,07
2	Sedang	3.501,36	21,01
3	Tinggi	1.987,90	11,93
Total (ha)		16.668,44	100

No	Risiko Longsor	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	19.628,95	89,66
2	Sedang	2.264,69	10,34
Total (ha)		21.893,64	100

No	Risiko Karhutla	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	57.919,77	81,28
2	Sedang	13.343,19	18,72
Total (ha)		71.262,97	100

No	Risiko Kekeringan	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	68,49	0,58
2	Sedang	11.759,72	99,42
Total (ha)		11.828,21	100



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

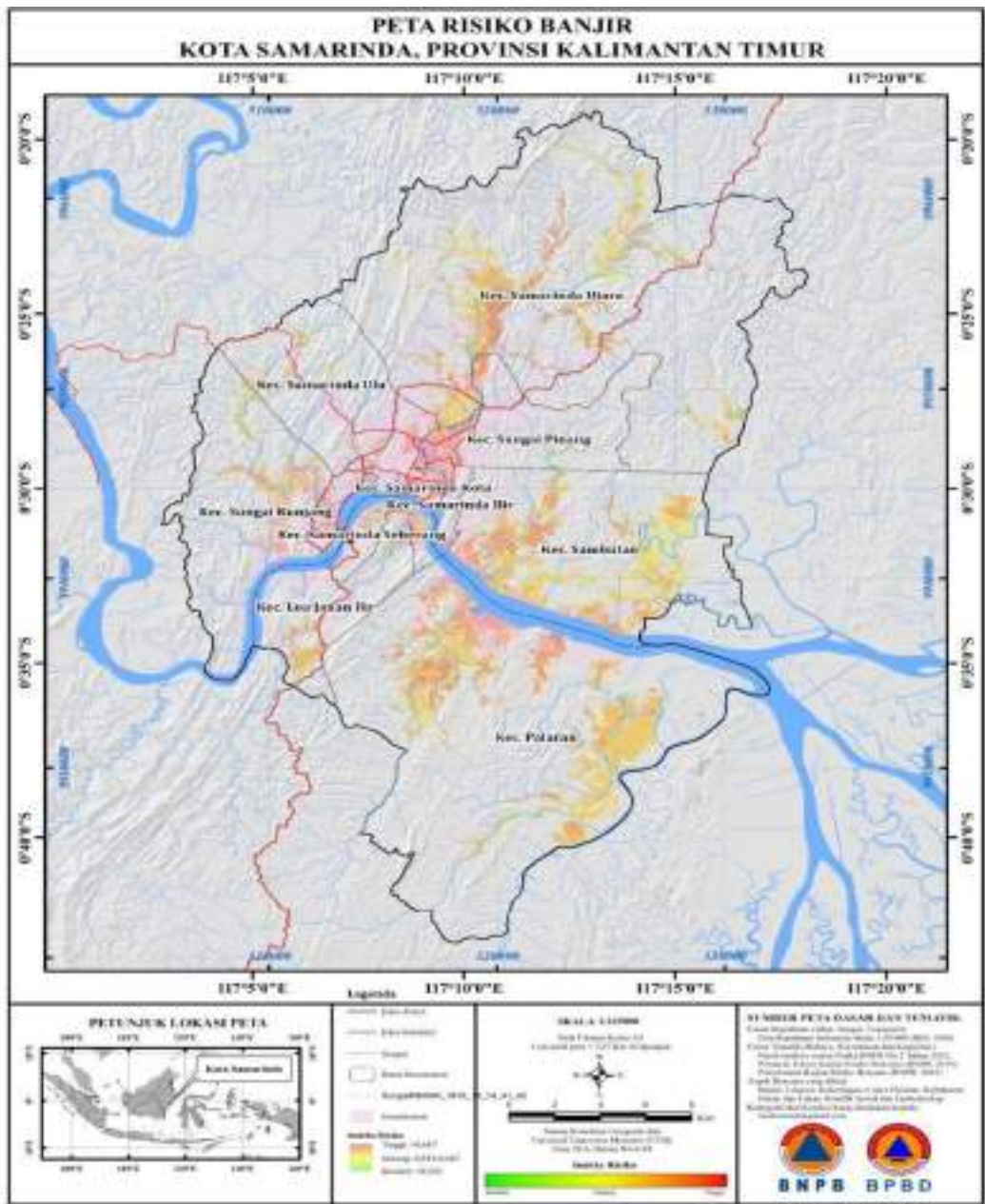


No	Risiko Cuaca Ekstrim	Luas (ha)	(%)
1	Sedang	11.836,43	100
Total (ha)		11.836,43	100

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



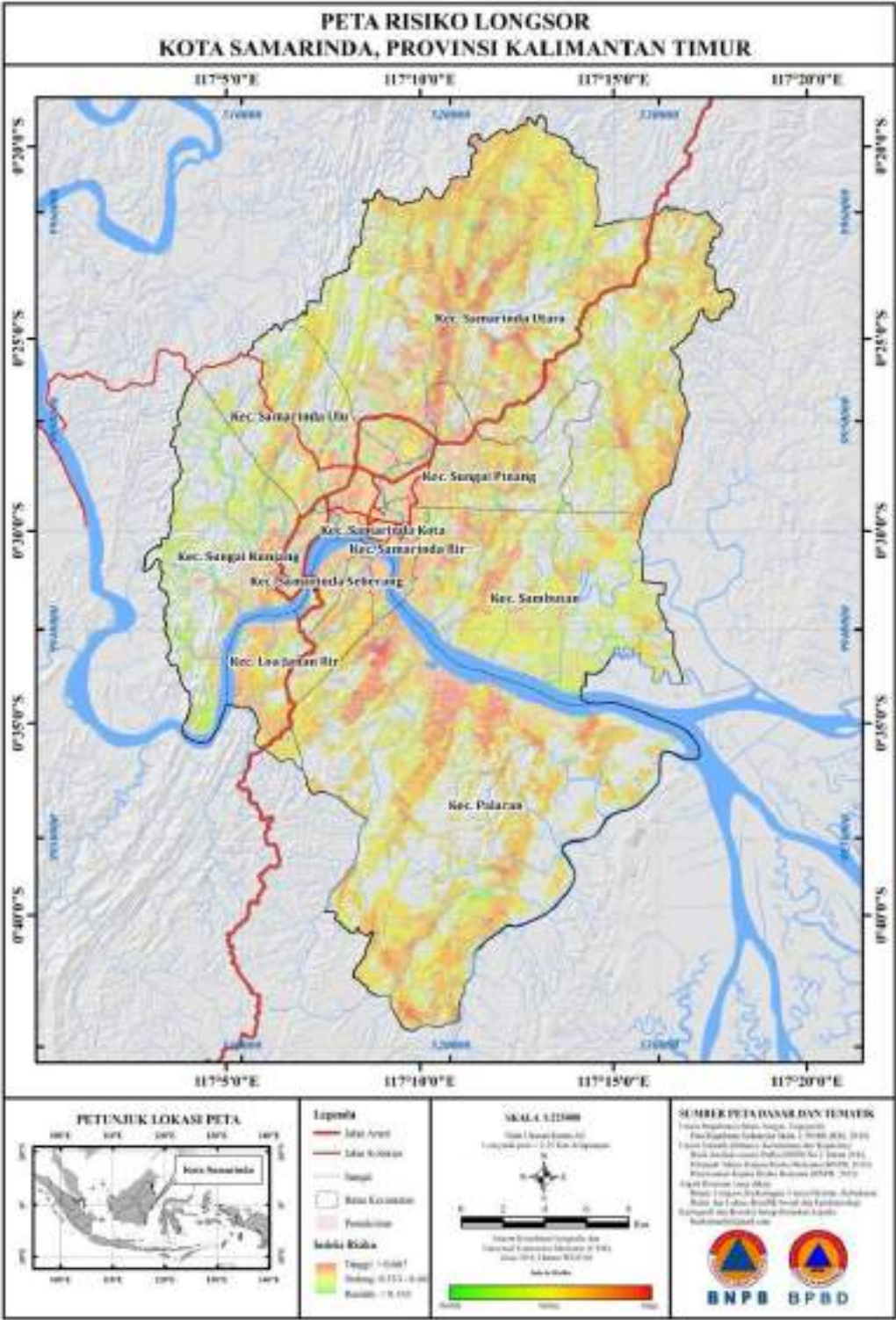
Gambar 2.41.
Peta Risiko Banjir Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

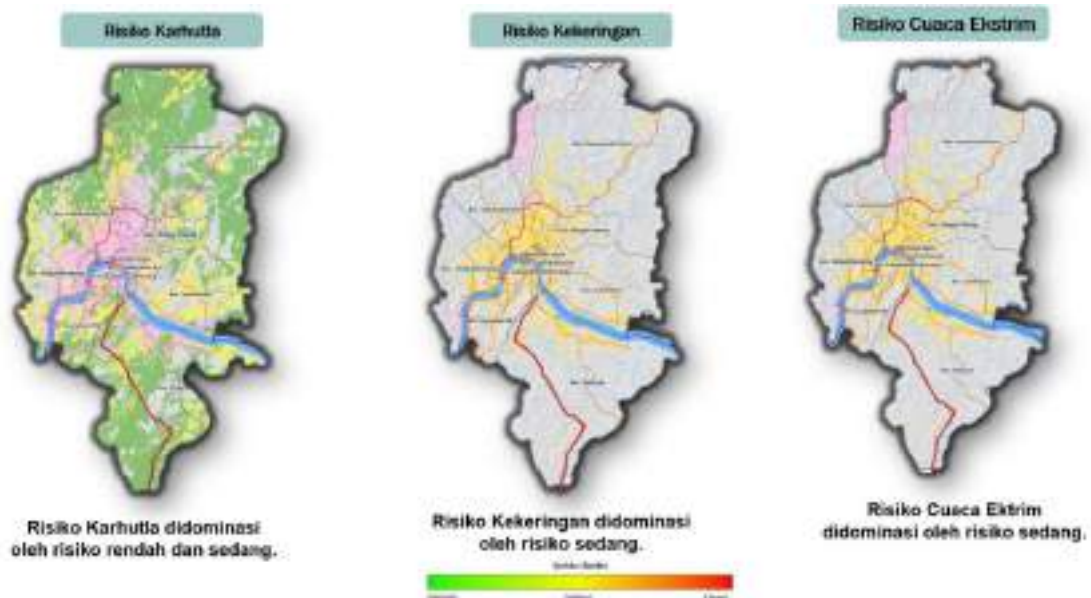


Gambar 2.42.
Peta Risiko Longsor Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Gambar 2.43.
Risiko karhutla, kekeringan dan cuaca ekstrem



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

4) Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu: jasa ekosistem penyedia, pengaturan, kultural, dan pendukung; yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-jenis/kelompok.

- Layanan penyedia (provisioning services): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll.
- Layanan pengaturan (regulating services): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll.
- Layanan kultural (cultural services): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- Layanan pendukung (supporting services): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.



Tabel 2.69
Klasifikasi Jasa Lingkungan

No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (Cultural)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual



N o	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (Supporting)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Adapun dalam penyusunan KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045, akan lebih difokuskan pada:

- a) Jasa Ekosistem Penyedia Pangan
- b) Jasa Ekosistem Penyedia Air
- c) Jasa Ekosistem Tata Aliran air dan Banjir
- d) Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

- a) Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan kinerja ekosistem dalam menyediakan kebutuhan energi pangan di Kota Samarinda. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di setiap kecamatan cukup beragam. Dari hasil analisis diketahui secara umum wilayah Kota Samarinda memiliki jasa ekosistem penyedia pangan sedang..

Jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan kinerja ekosistem dalam menyediakan kebutuhan energi pangan di Kota Samarinda. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di setiap kecamatan cukup beragam. Jika dilihat secara keseluruhan, Kecamatan Samarinda Utara memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi dengan luasan mencapai 2.394,34 ha dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, hal ini terkait dengan jenis penggunaan lahan sawah yang masih produktif di kecamatan tersebut.

Sementara itu, Kecamatan Samarinda Ilir hanya memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi hanya seluas 61,49 Ha. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan dan masing-masing luasannya dapat dilihat pada dibawah. Peta nilai sebaran tingkat jasa ekosistem



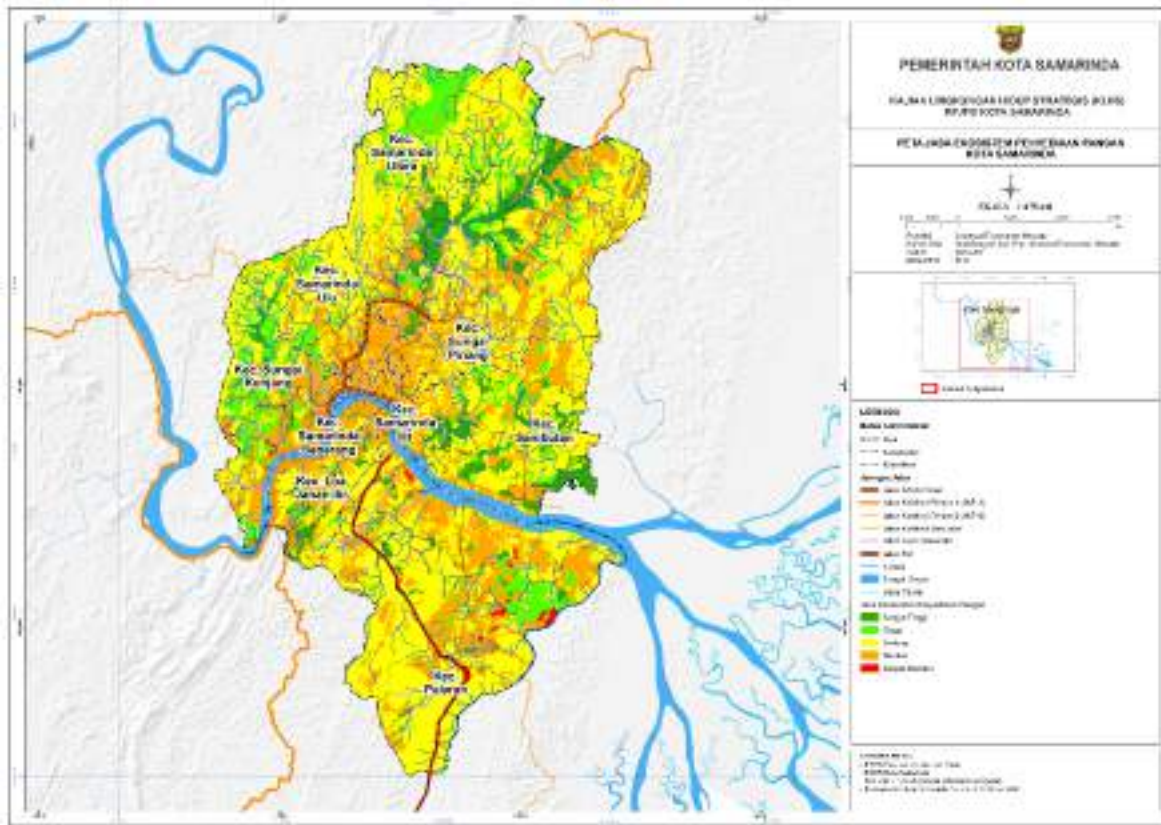
penyedia pangan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Gambar dibawah. Secara umum dapat diketahui bahwa jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Samarinda dalam kelas sedang.

Tabel 2.70
Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir		1.208,29	1.381,06	127,20	540,83	3.257,37
2	Kec. Palaran	196,36	5.657,85	10.906,79	1.894,49	423,45	19.078,94
3	Kec. Samarinda Ilir		345,00	151,91	5,09	61,49	563,50
4	Kec. Samarinda Kota		277,73	16,22		68,47	362,42
5	Kec. Samarinda Seberang		628,45	207,05	98,76	234,46	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu		1.831,06	2.619,46	627,14	84,16	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara		5.226,68	13.325,33	3.122,97	2.394,34	24.069,31
8	Kec. Sambutan		1.809,84	3.647,33	1.063,07	1.524,78	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang	30,25	2.387,36	1.988,11	1.531,47	771,29	6.708,48
10	Kec. Sungai Pinang		1.568,01	1.506,40	27,05	71,46	3.172,91
Total		226,61	20.940,26	35.749,66	8.497,24	6.174,74	71.588,50

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Gambar 2.44.
Jasa ekosistem penyedia pangan Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

b) Jasa Ekosistem Penyedia Air

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan kemampuan atau kinerja ekosistem dalam menyediakan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem penyedia air di Kota Samarinda didominasi oleh klasifikasi rendah yakni sebesar 67%.

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan kemampuan atau kinerja ekosistem dalam menyediakan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi ditemukan di Kecamatan Palaran dengan cakupan wilayah berkisar 1.155,42 Ha. Sedangkan jika dilihat secara keseluruhan maka kelas jasa ekosistem penyedia air di Kota Samarinda tergolong sangat rendah. Luas wilayah berdasarkan nilai indeks jasa ekosistem penyedia air bersih di setiap kecamatan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Sedangkan peta sebaran tingkat jasa ekosistem penyedia air dapat dilihat pada Gambar berikut.

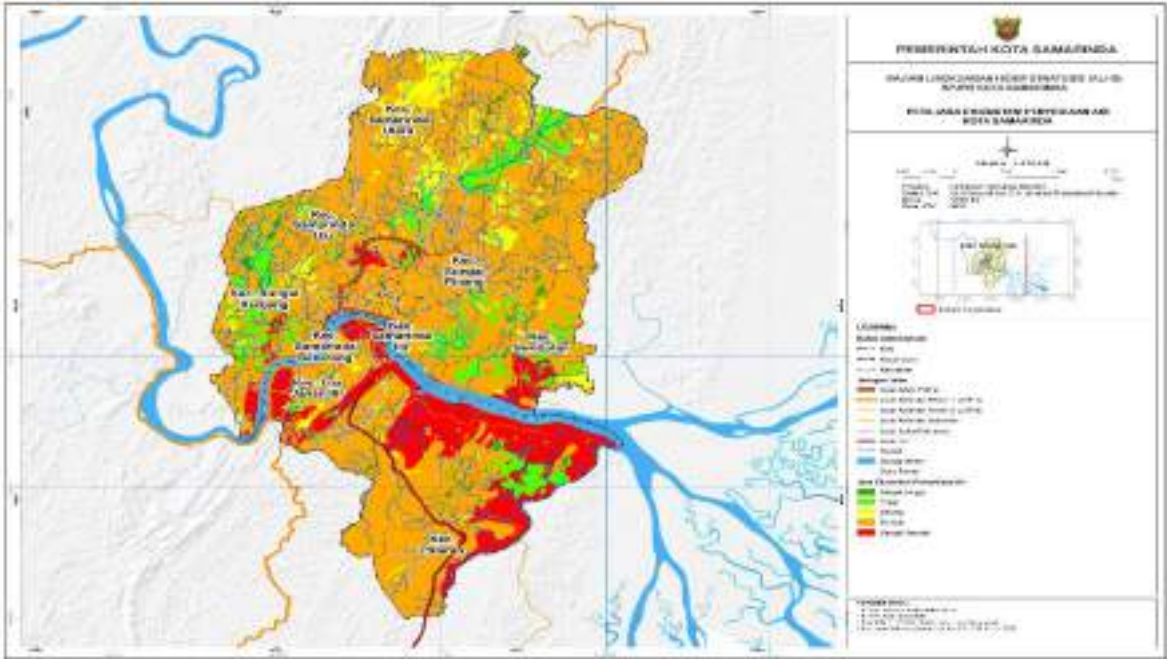


Tabel 2.71
Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kota Samarinda

No	Kecamatan	Penyedia Air Bersih					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir	1.038,6 ₃	1.727,70	166,31	111,03	213,71	3.257,37
2	Kec. Palaran	6.223,1 ₂	10.639,6 ₂	250,75	810,04	1.155,4 ₂	19.078,9 ₄
3	Kec. Samarinda Ilir	0,17	496,75		0,01	66,57	563,50
4	Kec. Samarinda Kota		291,67	2,28		68,47	362,42
5	Kec. Samarinda Seberang	419,39	418,81	4,14	23,26	303,12	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu	196,36	4.246,27	236,39	308,92	173,87	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara	101,47	18.127,9 ₂	3.831,4 ₀	1.651,4 ₈	357,04	24.069,3 ₁
8	Kec. Sambutan	693,56	4.939,28	338,08	1.500,4 ₇	573,62	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang	436,57	4.055,69	298,17	1.279,9 ₁	638,15	6.708,48
10	Kec. Sungai Pinang	7,30	3.067,10	7,25	63,34	27,92	3.172,91
Total		9.116,5 ₇	48.010,8 ₁	5.134,7 ₇	5.748,4 ₆	3.577,8 ₉	71.588,5 ₀

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Gambar 2.45.
Jasa ekosistem penyedia air Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



c) Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir

Ekosistem dapat berfungsi sebagai pengatur tata aliran air sehingga fungsi-fungsi aliran alami dari ekosistem sangat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengaruh penggunaan lahan pun tidak bisa dihindari yang akan berdampak pada kinerja ekosistem dalam menjaga tata aliran air. Fungsi ekosistem yang rendah dalam mengatur tata aliran air akan memberikan potensi yang besar untuk terjadinya banjir jika kondisi hidrometeorologi mendukung. Berdasarkan hasil analisis, jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan banjir di Kota Samarinda didominasi oleh klasifikasi rendah, yani sebesar 39%.

Ekosistem dapat berfungsi sebagai pengatur tata aliran air sehingga fungsi-fungsi aliran alami dari ekosistem sangat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengaruh penggunaan lahan pun tidak bisa dihindari yang akan berdampak pada kinerja ekosistem dalam menjaga tata aliran air. Fungsi ekosistem yang rendah dalam mengatur tata aliran air akan memberikan potensi yang besar untuk terjadinya banjir jika kondisi hidrometeorologi mendukung.

Kota Samarinda memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi sehingga sangat menjadi perhatian penting untuk mengetahui kondisi jasa ekosistemnya dalam mengatur tata aliran air dan mencegah banjir. Berdasarkan hasil analisis, jasa ekosistem pengatur tata aliran air di Kota Samarinda didominasi oleh tingkat jasa ekosistem yang rendah dalam mengatur tata air dan mencegah banjir. Detail kelas jasa ekosistem ini dalam setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Sedangkan peta sebaran jasa ekosistem pengatur air dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tabel 2.72
Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda

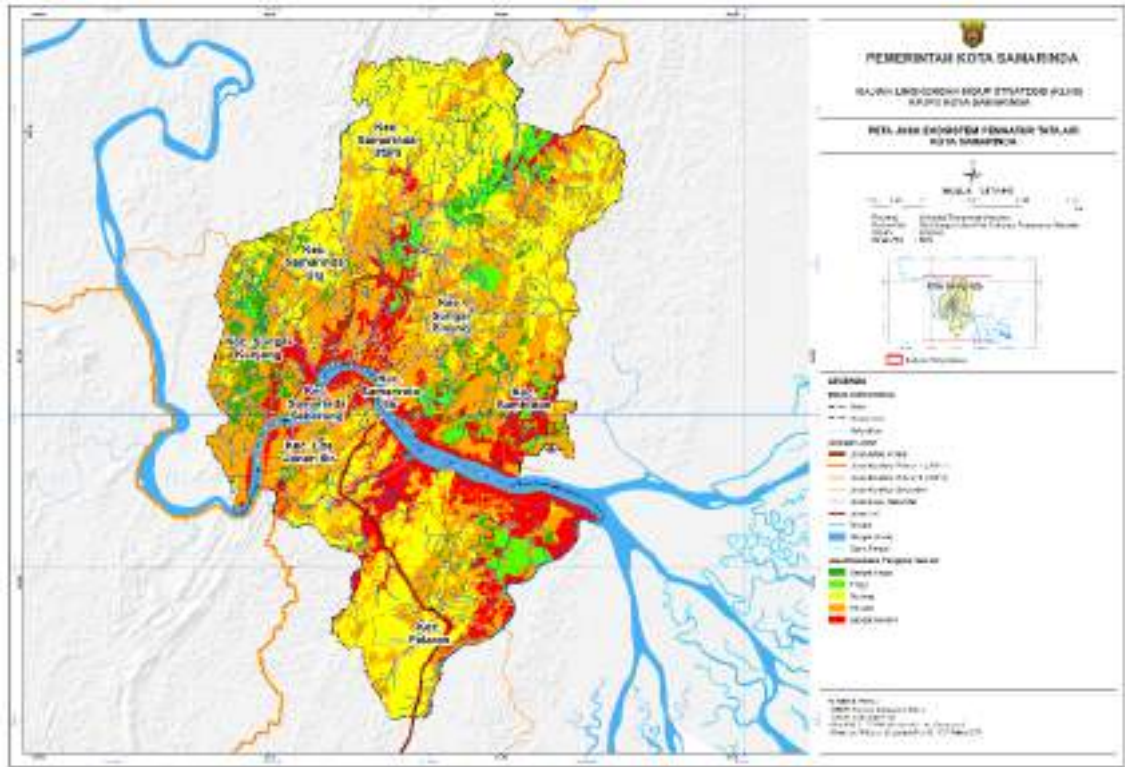
No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir	545,10	1.937,81	449,72	29,23	295,52	3.257,37
2	Kec. Palaran	4.227,44	6.229,08	6.656,97	699,36	1.266,10	19.078,94
3	Kec. Samarinda Ilir	178,38	237,69	80,85	1,05	65,53	563,50
4	Kec. Samarinda Kota	268,75	22,92		6,32	64,44	362,42



No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
5	Kec. Samarinda Seberang	353,79	427,05	61,50	17,26	309,13	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu	438,50	2.443,62	1.789,02	53,59	437,08	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara	1.004,08	7.940,70	12.793,40	1.598,02	733,11	24.069,31
8	Kec. Sambutan	2.267,58	3.283,90	419,44	1.043,06	1.031,03	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang	1.107,12	3.331,53	351,78	356,78	1.561,28	6.708,48
10	Kec. Sungai Pinang	492,85	1.751,31	837,51	63,49	27,76	3.172,91
Total		10.883,58	27.605,61	23.440,18	3.868,16	5.790,97	71.588,50

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Gambar 2.46.
Jasa ekosistem tata aliran air dan banjir Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

5) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dianalisis dari efisiensi sumber daya alam dalam menampung jumlah penduduk. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien berarti memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi dari ekosistem di dalamnya.



Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah ambang batas ketersediaan air dan ambang batas ketersediaan pangan, kecamatan yang memiliki nilai ambang batas belum terlampaui artinya memiliki pemanfaatan sumber daya yang optimal. Ambang batas ketersediaan air secara keseluruhan di Kota Samarinda sudah melampaui nilai ambang batas di seluruh kecamatan Kota Samarinda, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.73
Ambang Batas Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Ambang Batas Penduduk	Penduduk Grid	Selisih
1	Kec. Loa Janan Ilir	49.758	68.505	-18.747
2	Kec. Palaran	-58.600	53.113	-111.713
3	Kec. Samarinda Ilir	61.218	69.940	-8.722
4	Kec. Samarinda Kota	28.610	32.118	-3.508
5	Kec. Samarinda Seberang	54.399	61.647	-7.248
6	Kec. Samarinda Ulu	78.052	112.044	-33.992
7	Kec. Samarinda Utara	-88.695	94.703	-183.398
8	Kec. Sambutan	27.521	45.970	-18.449
9	Kec. Sungai Kunjang	104.976	116.986	-12.010
10	Kec. Sungai Pinang	72.466	93.907	-21.441
Total		329.705	748.933	-419.228

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Ambang batas ketersediaan pangan secara keseluruhan di Kota Samarinda masih belum terlampaui, total nilai ambang batas di Kota Samarinda adalah 2.137.478 jiwa dengan Kecamatan yang memiliki nilai ambang batas terbesar adalah Kecamatan Samarinda Utara sebanyak 779.962 jiwa hal itu terlihat karena Kecamatan Samarinda Utara memiliki penggunaan lahan non terbangun yang masih luas, Kecamatan yang memiliki nilai ambang batas sudah terlampaui adalah Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, dan Sungai Pinang. untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.74
Ambang Batas Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Ambang Batas Penduduk	Penduduk Grid	Selisih
1	Kec. Loa Janan Ilir	88.121	68.505	19.616
2	Kec. Palaran	550.358	53.113	497.245
3	Kec. Samarinda Ilir	15.093	69.940	-54.847
4	Kec. Samarinda Kota	7.384	32.118	-24.734
5	Kec. Samarinda Seberang	32.281	61.647	-29.366
6	Kec. Samarinda Ulu	137.541	112.044	25.497
7	Kec. Samarinda Utara	779.962	94.703	685.259
8	Kec. Sambutan	261.742	45.970	215.772
9	Kec. Sungai Kunjang	189.799	116.986	72.813
10	Kec. Sungai Pinang	75.197	93.907	-18.710
Total		2.137.478	748.933	1.388.545

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

6) Tingkat Ketahanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

a) Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Jasa ekosistem pengatur iklim merupakan fungsi ekosistem dalam menjaga kondisi iklim dari perubahan iklim secara ekstrim akibat pemanasan global. Tutupan vegetasi merupakan salah satu faktor dominan yang akan menentukan apakah ekosistem memiliki fungsi yang baik dalam mengatur iklim dengan salah fungsinya adalah menyerap karbon sebagai salah satu faktor terjadinya peningkatan suhu udara secara global.

Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan akan berpotensi besar dalam memberikan pengaruh pemanasan global akibat meningkatnya fungsi lahan terbangun dan aktivitas masyarakat kota dalam penggunaan energi yang pada akhirnya menghasilkan emisi dan buangan. Jasa ekosistem pengatur iklim berdasarkan tingkatannya di setiap kecamatan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Secara umum, tingkat jasa ekosistem pengatur iklim di Kota Samarinda adalah tinggi seluas 42.562,85 Ha selanjutnya diikuti oleh tingkat jasa ekosistem sedang seluas 2.966,44 Ha.

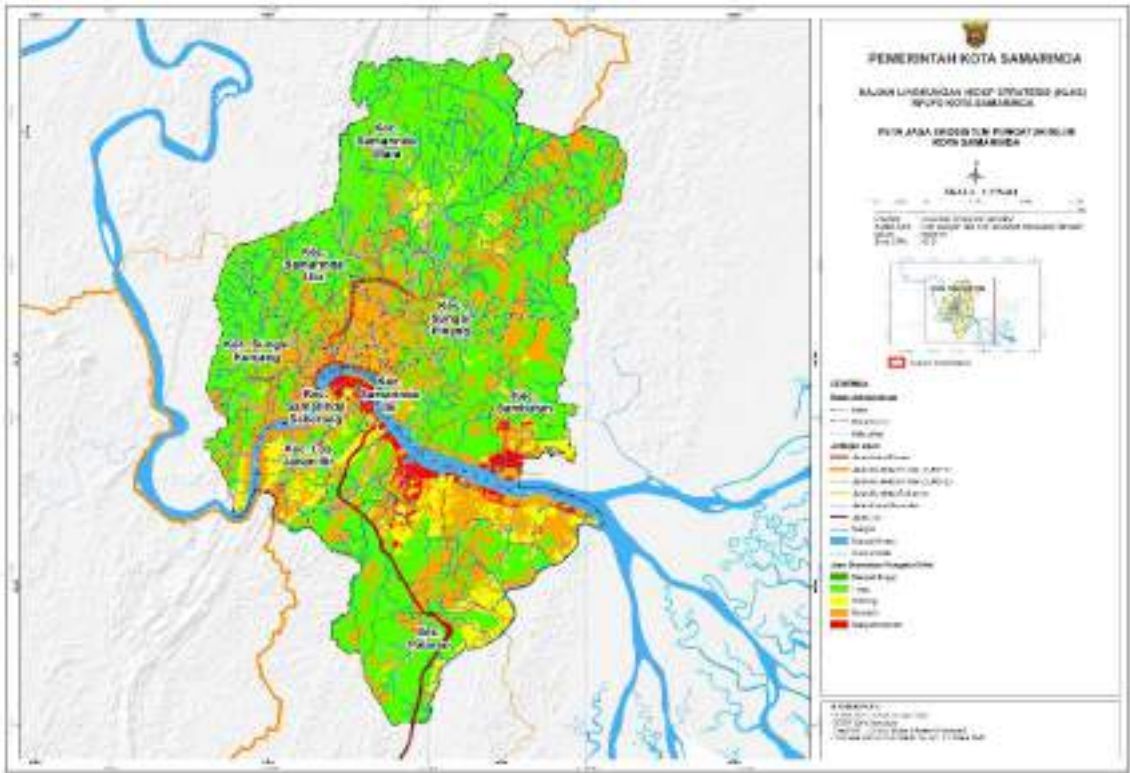


Tabel 2.75
Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Iklim					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir	70,79	1.250,46	770,81	1.100,56	64,75	3.257,37
2	Kec. Palaran	753,46	5.852,26	3.230,39	9.231,83	11,02	19.078,94
3	Kec. Samarinda Ilir	0,21	344,79	0,01	158,04	60,45	563,50
4	Kec. Samarinda Kota		277,73		20,26	64,44	362,42
5	Kec. Samarinda Seberang	347,91	286,71	81,83	234,48	217,79	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu		1.830,93	29,77	3.264,84	36,28	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara		5.226,68	952,95	17.876,20	13,48	24.069,31
8	Kec. Sambutan	354,26	1.957,40	493,11	5.142,02	98,22	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang		2.331,05	247,71	3.935,49	194,24	6.708,48
10	Kec. Sungai Pinang		1.568,01	5,06	1.599,13	0,72	3.172,91
Total		1.526,63	20.926,02	5.811,62	42.562,85	761,37	71.588,50

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Gambar 2.47.
Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kota Samarinda



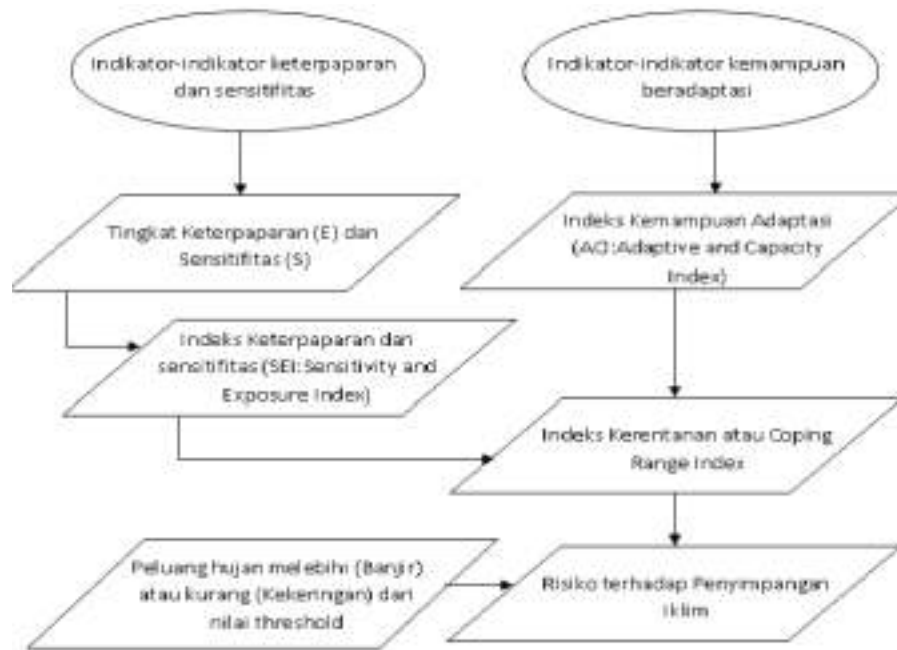
Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



b) Tingkat Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Samarinda

Besar kecilnya dampak atau Konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (perubahan iklim) pada suatu sistem akan ditentukan oleh tingkat keterpaparan (Exposure, E), Sensitivitas (Sensitivity, S) dan Kapasitas (C) dari sistem tersebut. **Kerentanan (Vulnerability)** menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati **batas toleransi dari sistem** maka sistem menjadi rentan karena penyimpangan atau perubahan iklim tersebut menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, **Kerentanan (V)** dapat direpresentasikan oleh kondisi **biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi**, yang selanjutnya dinyatakan dengan indeks sensitivitas dan keterpaparan (Sensitivity and Exposure Index, SEI). Misalnya orang miskin lebih rentan dari orang kaya, atau orang yang tinggal di pinggir sungai lebih rentan terhadap bahaya banjir. **Kapasitas (C)** menunjukkan **kemampuan** untuk menghindari atau mengantisipasi, mengatasi atau mengelola dampak atau kemampuan untuk pulih kembali dengan cepat setelah terkena dampak. Sistem yang memiliki kapasitas yang tinggi akan memiliki selang toleransi yang lebar terhadap keragaman atau perubahan iklim yang terjadi. Kapasitas juga direpresentasikan oleh kondisi **biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi** yang terkait dengan kemampuan. Misalnya petani yang sumber pencaharian satu-satunya hanya dari usahatani akan memiliki kapasitas yang rendah dibanding petani yang memiliki sumber pencaharian alternatif yang banyak. Kemampuan adaptasi ini dinyatakan dalam Adaptive Capacity Index (ACI).

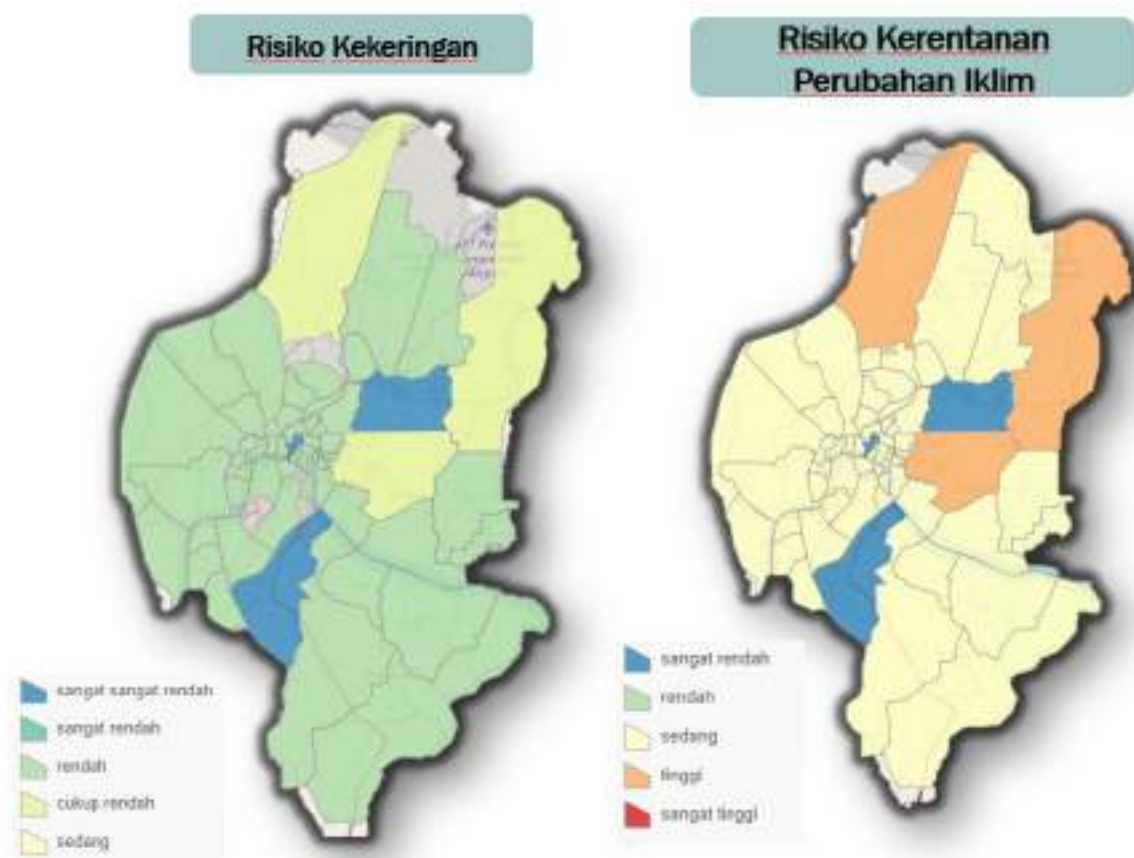
Gambar 2.48.
Kerangka Berfikir Kategori Terhadap Resiko Penyimpangan Iklim



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Berdasarkan data SIDIK pada tahun 2018, diketahui bahwa nilai indeks risiko kekeringan dominan pada tingkat rendah, sedangkan untuk risiko kerentanan perubahan iklim pada kondisi sedang dan tinggi.

Gambar 2.49.
Indeks kerentanan terhadap perubahan iklim Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



7) **Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Keanekaragaman hayati mengandung berbagai manfaat dan dapat memerankan berbagai fungsi sehingga pelestariannya menjadi sangat penting baik ditinjau dari sudut ekonomi maupun ekologi serta etika. Berbagai komponen flora maupun fauna telah memberikan sumbangannya dalam penemuan dan pengembangan farmasi dan kedokteran, substitusi terhadap jenis-jenis bahan pangan baru, dan peningkatan kemampuan rekayasa genetik. Keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati telah memperkaya kehidupan dan kebudayaan kita, menyediakan berbagai obyek penelitian dan pengembangan. Potensi tersebut merupakan modal yang besar dalam pengembangan ecotourism yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Manfaat lain yang sulit untuk dihitung adalah peranan keanekaragaman hayati sebagai pemelihara dan penyangga proses-proses pendukung kehidupan. Hutan misalnya, berfungsi sebagai pengatur iklim dan pelindung siklus air, penyerap bahan-bahan pencemar, dan pelindung tanah dari erosi. Berikut merupakan data dan peta jasa ekosistem pendukung biodiversity di Kota Samarinda.

Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan terus mengalami perubahan alih fungsi kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun. Jasa ekosistem pendukung kehati berdasarkan tingkatannya di setiap kecamatan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Secara umum, tingkat jasa ekosistem pendukung kehati di Kota Samarinda adalah sedang dan tinggi seluas 28.128,24 ha dan 28.253,34 ha. Hal itu terlihat pada Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Palaran.

Tabel 2.76
Jasa Lingkungan Pendukung Kehati Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung KEHATI					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir	71,11	556,76	1.565,34	1.042,77	21,40	3.257,37
2	Kec. Palaran	1.694,38	3.027,23	7.698,79	6.658,55		19.078,94



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

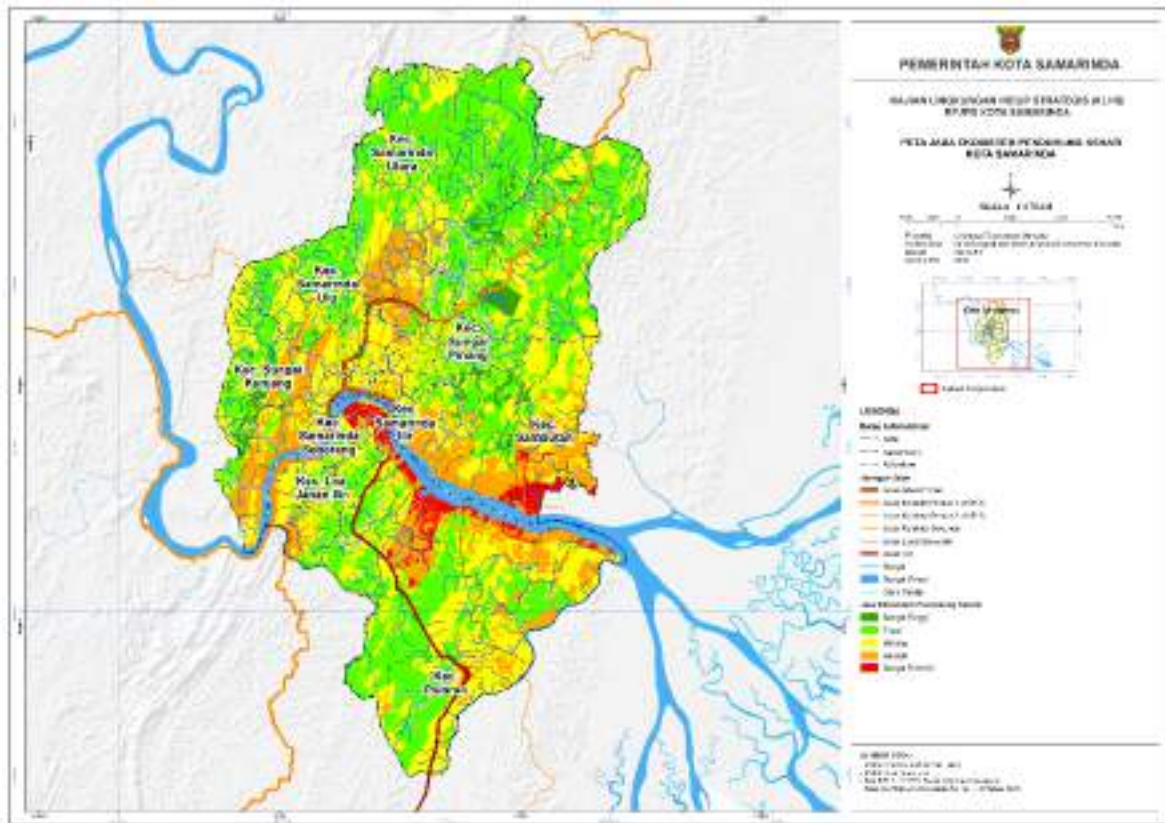


No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung KEHATI					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
3	Kec. Samarinda Ilir	5,18	16,92	391,71	149,69		563,50
4	Kec. Samarinda Kota			357,07	3,08	2,28	362,42
5	Kec. Samarinda Seberang	425,05	72,13	522,65	134,66	14,23	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu		278,39	2.868,96	1.979,62	34,85	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara		1.657,82	7.797,03	13.979,29	635,17	24.069,31
8	Kec. Sambutan	921,21	3.011,74	2.315,55	1.409,59	386,92	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang		1.926,87	3.017,21	1.426,74	337,65	6.708,48
10	Kec. Sungai Pinang		105,12	1.593,93	1.469,36	4,50	3.172,91
Total		3.116,93	10.652,99	28.128,24	28.253,34	1.437,00	71.588,50

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2.50.
Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati Kota Samarinda

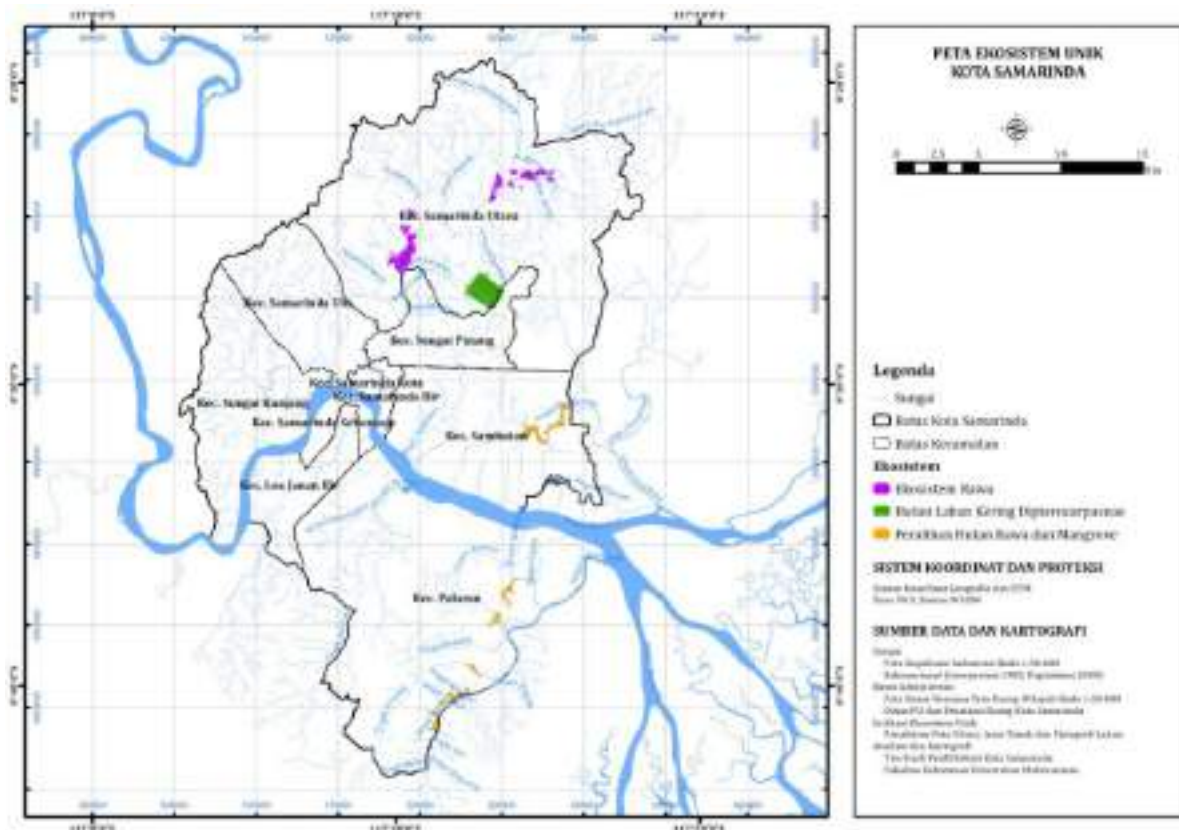


Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Adapun jika dilihat dari keragaman ekosistemnya, sebaran ekosistem unik di Kota Samarinda yang terdiri dari ekosistem hutan lahan kering/hutan tropis dataran rendah, hutan rawa air tawar dan hutan mangrove. Adapun hutan tropis dataran rendah yang tersisa berada di lokasi Hutan Pendidikan dan Penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (KHDTK Fahutan UNMUL) di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.



Gambar 2.51.
Peta Ekosistem Unik di Kota Samarinda



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Kota Samarinda merupakan ekosistem dataran rendah tropis (lowland tropical ecosystem). Ekosistem dataran rendah tropis merupakan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Gambaran kekayaan jenis ini masih terdapat di Kota Samarinda terutama pada lokasi satu-satunya kawasan hutan, yaitu Hutan Pendidikan.

Dari aspek vegetasi dan pepohonan, sebagian besar dari berbagai jenis vegetasi dan pepohonan kota samarinda merupakan jenis vegetasi yang menyusun tegakan kawasan berhutan yang di Kota Samarinda, terutama dari Hutan Pendidikan dan Penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kampus Unmul Gunung Kelua, dan beberapa kawasan dengan tutupan hutan sekunder lainnya. Belum masuk beberapa jenis vegetasi yang berada di lahan basah pasang surut yang dekat dengan delta Mahakam berupa hutan mangrove atau hutan rawa. Untuk keragaman satwa dijelaskan sebagai berikut:

- a) Ditemukan lebih dari 80 jenis burung yang hidup secara alami, namun didominasi jenis-jenis burung yang menyukai kawasan hutan sekunder muda, perkebunan, pertanian, kawasan terbuka, dan pemukiman;



- b) Teridentifikasi lebih dari 20 jenis burung dan mamalia yang diperjualbelikan baik merupakan hasil budidaya, didapat dari kawasan hutan di sekitar Samarinda dan didatangkan dari luar propinsi;
- c) Diperoleh data jumlah mamalia lebih dari 40 jenis yang hidup alami yang mendiami beberapa wilayah berhutan di Samarinda.

d) **Persentase Penanganan Sampah**

Pertumbuhan penduduk yang kian pesat berbanding lurus dengan semakin tingginya konsumsi di Kota Samarinda. Konsumsi yang tinggi tersebut tentunya akan menghasilkan volume sampah yang semakin tinggi pula, dan apabila tidak ditangani dengan baik maka akan mengganggu kebersihan dan keindahan kota. Oleh karena itu pemerintah Kota Samarinda terus meningkatkan penanganan sampah agar dapat menciptakan kota yang bersih dan asri.

Tabel 2.77
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume produksi sampah (m ³)	857.404	873.582	816.588,45	824.167,63	413.949,39
2	Jumlah sampah yang ditangani (m ³)	652.932	639.982	616.739,80	660.521,97	333.960,66
3	Persentase	76,15	73,26	81,04	80,14	80,68

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Pada tahun 2023, volume produksi sampah yang dihasilkan di Kota Samarinda mencapai 413.949,39 m3, sedangkan volume sampah yang bisa ditangani sebesar 333.960,66 m3 atau 80.68%. Angka tersebut menunjukkan penanganan sampah melalui tempat pembuangan akhir di Kota Samarinda mencapai 80.68%, sedangkan sisanya ditangani melalui 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle). Berdasarkan data ini, maka pemerintah Kota Samarinda perlu menyusun langkah strategi untuk memaksimalkan penanganan sampah, baik meningkatkan sarana prasarana persampahan, maupun mengoptimalkan 3R



Tabel 2.78
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	1.564	1.215	912	1.039	1.217
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	793.576	817.254	831.220	849.717	864.878
3	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk (m ³)	1,79	1,37	1,1	1,24	1,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Data di atas memperlihatkan kondisi yang berbanding terbalik, dimana peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah daya tampung TPS. Pada tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 793.576 jiwa dengan daya tampung TPS sebesar 1.564 m³, sedangkan tahun 2023 dengan jumlah penduduk mencapai 861.878 jiwa daya tampung hanya sebesar 1.217 m³. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah Kota Samarinda masih perlu melakukan peningkatan jumlah TPS pada titik-titik pemukiman tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat.

e) Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Terganggunya keseimbangan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh aktivitas perorangan, melainkan aktivitas perusahaan dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tugas penting dalam menjaga keseimbangan antara lingkungan dan kegiatan ekonomi, melalui pengawasan terhadap AMDAL. Dokumen AMDAL menyajikan analisis atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam aktivitas produksi barang dan jasa, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan.



Tabel 2.79
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (perusahaan)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	44	45	46	49	56
2	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	56	64	80	83	90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

2.4.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara. Guna mendapatkan pelayanan, maka masyarakat wajib memiliki legalitas atas keberadaannya atau eksistensinya sebagai penduduk di suatu wilayah. Legalitas yang dimaksud yaitu dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dimana dokumen tersebut tidak hanya untuk memudahkan memperoleh pelayanan, namun juga memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan data persentase kepemilikan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akte Lahir, dan Akte Nikah di Kota Samarinda. Data tersebut menunjukkan seberapa taat masyarakat di Kota Samarinda dalam memenuhi dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya. Selain itu juga menunjukkan seberapa besar usaha dan inovasi pemerintah Kota Samarinda untuk mendorong masyarakatnya agar memiliki dokumen-dokumen yang lengkap, terutama KTP-el dan Kartu Keluarga (KK).

Tabel 2.80
Kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Kepemilikan KTP-el	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepemilikan KTP-el	64,59	66,21	74,42	-	561.041
1.1	Jumlah Penduduk Wajib KTP (orang)	556.011	568.839	580.994	610.669	623.593
1.2	Jumlah Penduduk Memiliki KTP-el (orang)	359.154	376.626	414.941	-	561.041
1.3	Jumlah Penduduk Belum Memiliki KTP-el (orang)	196.857	192.213	166.053	-	62.552



No.	Kepemilikan KTP-el	2019	2020	2021	2022	2023
2	Kepemilikan KK	85,72	87,16	87,13	86,45	
2.1	Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga	224.032	232.058	236.251	241.851	284.454
2.2	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga	37.367	34.173	34.909	37.898	673

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Tabel 2.81
Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Kepemilikan Akta Perkawinan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Memiliki (orang)	10.227	12.356	199.292	231.178	251.109
2	Tidak Memiliki (orang)	20.800	18.709	157.924	154.817	138.564
3	Jumlah (orang)	31.027	31.065	357.216	385.995	389.673
4	Persentase kepemilikan akta perkawinan	32,96	39,77	55,79	59,89	64,44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Tabel 2.82
Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Kepemilikan Akta Perceraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Memiliki (orang)	268	332	384	11,503	13,028
2	Tidak Memiliki (orang)	221	233	227	5.258	5.136
3	Jumlah (orang)	498	553	611	16,761	18.164
4	Persentase kepemilikan akta perceraian	54,81	60,04	62,85	68,63	71,72

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Selain mengarah pada pemenuhan administrasi, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tersebut juga dapat menggambarkan kondisi pertumbuhan penduduk. Data akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen datang-keluar masing-masing menggambarkan fertilitas, mortalitas dan migrasi sebagai indikator pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2023, Kepemilikan Akta Kelahiran telah mencapai 48,04 persen. Adapun Kepemilikan Akta Kematian tiap tahun terus bertambah dan hingga tahun 2023 telah ada 48.070 yang dibuat. Dari sisi perpindahan



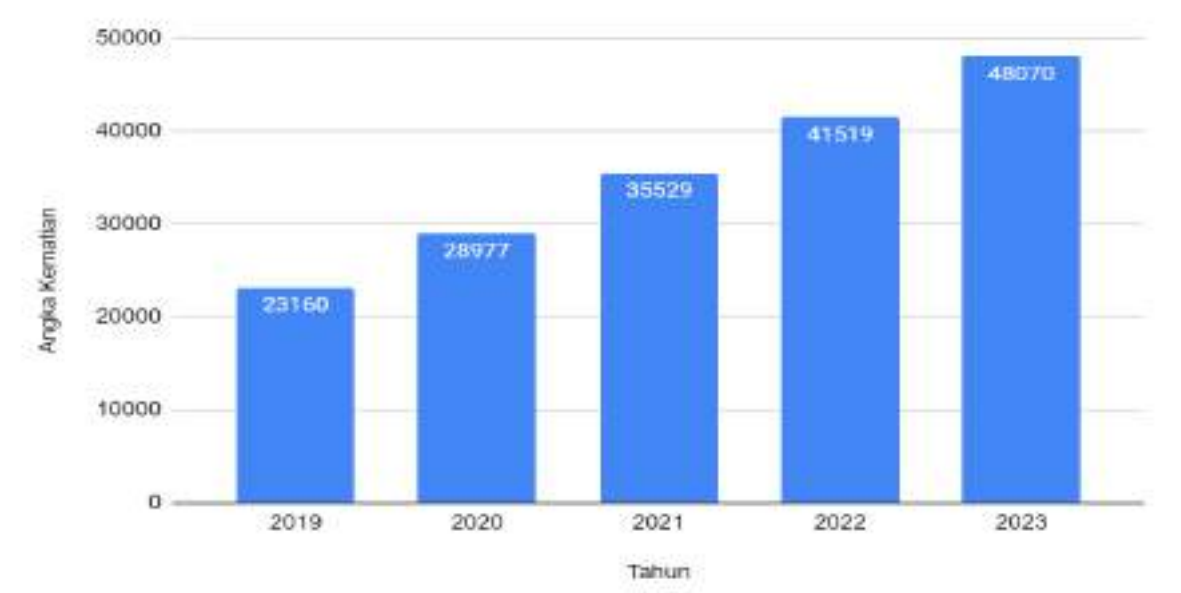
penduduk, pada tahun 2023 terdapat penduduk datang sebanyak 43.802 orang dan penduduk keluar sebanyak 44.034 orang.

Tabel 2.83
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Kepemilikan Akta Kelahiran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Memiliki (orang)	314.718	343.577	363.184	393.166	414.106
2	Tidak Memiliki (orang)	478.858	473.677	468.036	456.551	447.772
3	Jumlah (orang)	793.576	817.254	831.220	849.717	861.878
4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	39,66	42,04	43,69	46,27	48,04

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Gambar 2.52.
Kepemilikan Akta Kematian 2019-2023
Kota Samarinda (orang)



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Tabel 2.84
Perpindahan Penduduk Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Perpindahan Penduduk	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Datang	48.295	38.025	398.238	44.067	43.802
	Laki-Laki	24.236	19.080	202.813	9.766	9.906
	Perempuan	24.059	18.945	195.425	34.301	33.896
2	Penduduk Keluar	19.628	17.550	463.133	46.778	44.034



No.	Perpindahan Penduduk	2019	2020	2021	2022	2023
	Laki-Laki	10.458	9.174	224.718	23.900	22.631
	Perempuan	9.170	8.376	211.415	22.878	21.403

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

2.4.1.11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Cakupan Peserta Program KB Aktif

Laju pertumbuhan penduduk tidak hanya disebabkan oleh migrasi, namun juga dipengaruhi oleh angka kelahiran dan angka kematian. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berpotensi terjadinya ledakan jumlah penduduk dan menyebabkan rasio ketergantungan (usia produktif menanggung usia non-produktif) semakin tinggi. Tingginya angka rasio ketergantungan akan berakibat pada ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi prioritas nasional setiap tahun. Salah satu langkah pemerintah adalah dengan mengendalikan angka kelahiran melalui program Keluarga Berencana. Apabila dilihat dari sudut pandang kesehatan, maka program KB ikut berperan dalam menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan.

Tabel 2.85
Jumlah Peserta Program KB Aktif Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta program KB aktif (pasangan)	100.930	102.640	109.279	63.366	36.312
2	Jumlah pasangan usia subur (pasangan)	146.795	150.847	155.326	96.068	124.812
3	Persentase peserta program KB aktif	68,76	69,31	70,35	65,99	29,09

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Program KB di Kota samarinda pada tahun 2023 mengalami penurunan angka kelahiran anak atau total fertility rate (TFR) dan laju pertumbuhan penduduk sehingga peserta program KB aktif juga menurun. Hal ini juga dipengaruhi oleh Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi yang masih tinggi.



2.4.1.12.Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang

Sarana prasarana perhubungan yang representatif merupakan kebutuhan semua orang untuk dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan lancar, aman dan nyaman. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat akan memberikan efek positif pada jumlah orang yang masuk ke Kota Samarinda dan memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingginya jumlah kunjungan yang masuk ke Kota Samarinda akan memberikan peningkatan pada PAD, yang artinya Kota Samarinda memiliki sumber daya yang lebih banyak lagi untuk membiayai pembangunan.

Tabel 2.86
Jumlah Penumpang Angkutan Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (orang)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Armada	1.505	584	584	584	584
2	Jumlah Armada Siap Operasi	135	164	41	65	65
3	Load Factor	0,42	0,42	0,24	0,24	0,24
4	Jumlah Kursi Penumpang	8	8	8	8	8
5	Jumlah Penumpang per Hari	453,60	551,04	78,72	124,80	99
6	Jumlah Penumpang per Bulan	13.608	16.531	2.362	3.744	2.974
7	Jumlah Penumpang per Tahun	163.296	198.374	28.339	44.928	35.683

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota Samarinda, bahwa pengelolaan angkutan yang dilakukan terbatas pada angkutan umum kota (angkot). Jumlah penumpang angkot pada tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya 99 penumpang per hari,hal ini disebabkan keberadaan ojek online (ojol) semakin banyak dan bervariasi, akan tetapi angkot masih memiliki penggemar tersendiri. Masih digunakannya angkot sebagai angkutan umum oleh masyarakat dikarenakan perbedaan harga yang masih menjadi pertimbangan. Sementara itu, ditengah keberadaan ojol jumlah armada angkot masih bertahan sebanyak 584 unit dan yang siap beroperasi sebanyak 65 unit.



2. Jumlah Kecelakaan

Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya tentunya akan menyebabkan pergerakan orang yang tinggi setiap harinya, sehingga pemerintah Kota Samarinda perlu menjamin kenyamanan dan keamanan mereka dalam berkendara. Kenyamanan dan keamanan dalam berkendara merupakan salah satu tujuan dalam penyediaan sarana prasarana jalan dan lalu lintas seperti Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), traffic light, marka jalan, median jalan dan trotoar, bahkan penempatan CCTV. Kenyamanan dan keamanan tersebut dapat dikatakan tercapai apabila angka kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan.

Tabel 2.87
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

N o	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kecelakaan (kali)	109	64	97	98	173
2	Korban (orang)	165	97	129	153	231
	Meninggal (orang)	48	27	77	65	82
	Luka Berat (orang)	49	24	13	30	46
	Luka ringan (orang)	68	46	39	58	103
3	Kerugian material (Rp.)	338.600.000	145.900.000	675.600.000	476.300.000	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Kota Samarinda Dalam Angka 2024

Berdasarkan catatan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda berfluktuatif namun memiliki kecenderungan turun. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas juga menurunkan jumlah korban dan kerugian material. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang perhubungan di Kota Samarinda telah menunjukkan hasil yang positif. Selain itu, penurunan ini juga sebagai bukti nyata bahwa program pemerintah #dirumahnya# dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 secara tidak langsung turut menekan angka kecelakaan lalu lintas.



3. Persentase Uji KIR

Dalam mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas, maka diperlukan sarana transportasi yang layak dan memadai. Tingginya kecelakaan dapat disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar, yang berarti kendaraan tersebut dapat mengganggu keamanan pengguna jalan yang lain. Selain itu, kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar juga dapat memberikan ketidaknyamanan pengguna jalan, seperti gangguan polusi udara maupun kebisingan suara kendaraan. Oleh karena itu untuk kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan, maka kondisi alat transportasi khususnya transportasi umum harus telah memenuhi uji KIR.

Tabel 2.88
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (unit)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mobil Penumpang Umum					
	Jumlah	490	209	551	93	99
	Jumlah KIR	490	154	708	93	99
	Persentase	100,00	74,00	128,49	100,00	100,00
2	Mobil Bus					
	Jumlah	687	313	344	550	542
	Jumlah KIR	668	268	769	505	514
	Persentase	97,00	86,00	223,55	91,82	94,85
3	Mobil barang					
	Jumlah	31.771	842	37.431	19.690	18.873
	Jumlah KIR	31.771	31.075	37.431	11.220	20.026
	Persentase	100,00	369,06	100,00	56,98	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Pada tahun 2022 sebanyak 93 mobil penumpang umum semuanya telah melewati uji KIR dengan persentase sebesar 100%. Sedangkan dari 550 mobil bus yang harus uji KIR, yang menjalani uji sebanyak 505 unit atau sebesar 91,82 persen. Adapun untuk mobil barang, dari 19.690 kendaraan ada 11.220 yang melakukan uji KIR atau sebesar 56,98 persen. Hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah Kota Samarinda untuk terus



mendorong transportasi umum agar melakukan uji KIR sesuai jadwal, sehingga kenyamanan dan keamanan pengguna lalu lintas dapat tercapai.

2.4.1.13. Komunikasi dan Informatika

Menanggapi perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi di masyarakat, maka pemerintah Kota Samarinda berupaya Samarinda memperoleh predikat kota informatif dengan dukungan digitalisasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi Komisi Informasi Provinsi kaltim, selama tahun 2019-2023, pemerintah Kota Samarinda memperoleh predikat sebagai berikut:

Tabel 2.89
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Hasil penilaian dan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan amanat Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Secara khusus penghitungan indeks didasarkan 4 (empat) indikator yaitu pengembangan website dan digitalisasi, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.

Sejalan dengan salah satu indikator penilaian pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik yaitu pengembangan website dan digitalisasi, maka pemerintah Kota Samarinda menjadikan digitalisasi pelayanan publik sebagai salah satu program prioritas. Pelaksanaan digitalisasi dalam pelayanan publik berpotensi memicu terjadinya kejahatan siber yang menyebabkan kebocoran data pemerintah. Guna menghindari hal tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang didalamnya mengatur bahwa pengembangan aplikasi harus sesuai arsitektur SPBE yang memuat 5 domain, yaitu domain layanan SPBE, domain proses bisnis, domain aplikasi, domain data dan informasi SPBE, dan domain keamanan informasi SPBE. Berdasarkan



hasil evaluasi Kemenpan RB, terjadi penurunan nilai indeks dari 2,79 tahun 2019 menjadi 2,44 tahun 2022. Penurunan ini dikarenakan adanya perubahan domain penilaian yang semula hanya 3 domain tahun 2018-2019, menjadi 5 domain tahun 2021, dan menjadi 6 domain tahun 2022. Namun pada tahun 2023, nilai Indeks SPBR Kota Samarinda mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai 3,14 dengan predikat Baik. Adapun indeks SPBE Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 2.90
Hasil Evaluasi SPBE Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks SPBE	2,79	N/A	2,46	2,44	3,14
2	Predikat SPBE	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, 2024

2.4.1.14.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan bidang yang strategis, mengingat Kota Samarinda dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan. Pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda turut memberi andil dalam tumbuh dan berkembangnya koperasi, usaha kecil dan menengah, karena semakin tinggi jumlah penduduk maka permintaan atas barang dan jasa juga semakin tinggi. Sehingga perlu dipenuhi dengan peningkatan jumlah usaha jasa dan perdagangan untuk memenuhi permintaan tersebut. Tidak hanya itu, koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan bidang usaha yang dapat dikatakan stabil, tidak padat modal, dan bersifat dinamis, dalam artian sangat mudah menyesuaikan kondisi ekonomi di daerah, sehingga pertumbuhannya juga sangat pesat.

Meskipun pesat, keberadaan koperasi serta usaha kecil dan menengah tidak bisa dilepas begitu saja. Pemerintah selaku pelaksana pembangunan harus memperhatikan keberlangsungan koperasi serta usaha kecil dan menengah, baik dari sisi permodalan, pengemasan, pemasaran, dan lain-lain. Sehingga pertumbuhan pesat ini tidak bersifat sementara, namun kokoh dan dapat bersaing.

1. Perkembangan Koperasi

Pembangunan koperasi di arahkan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan



dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Perekonomian Kota Samarinda yang konsisten dan tumbuh positif memperlihatkan bahwa sektor jasa dan perdagangan mampu bertahan di tengah penurunan ekonomi global. Salah satu sektor perdagangan yang menopang adalah koperasi, sehingga pengembangan koperasi di Kota Samarinda terus digalakkan. Pengembangan koperasi di Kota Samarinda diarahkan untuk mengangkat perekonomian masyarakat kecil secara perlahan-lahan, sehingga dapat terwujud ekonomi kerakyatan.

Tabel 2.91
Persentase Koperasi Aktif Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	298	298	330	341	345
2	Jumlah Koperasi	1.310	1.310	1.327	1.327	1.353
3	Persentase Koperasi Aktif	22,75	22,75	24,87	25,67	25,8

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Persentase koperasi aktif menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda. Pada tahun 2022 persentase koperasi aktif berada pada angka 25,67 persen, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 25,8 persen. Walaupun mengalami kenaikan namun capaiannya masih tergolong rendah sehingga perlu adanya pendataan dan pembinaan lebih intens agar persentase koperasi aktif di Kota Samarinda semakin meningkat.

2. Perkembangan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unggulan dalam pembangunan Kota Samarinda yang berbasis jasa dan perdagangan. UMKM menjadi usaha primadona bagi masyarakat Kota Samarinda, dikarenakan tidak padat modal dan tidak membutuhkan SDM yang banyak untuk memulai usahanya, terutama usaha mikro dan kecil. Apalagi dengan semakin banyaknya aplikasi startup dan maraknya penggunaan media sosial, yang mendorong UMKM mulai tumbuh dan berkembang melalui sistem jual beli online. Hal ini berdampak positif, karena dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha melalui UMKM, maka ekonomi kerakyatan di Kota Samarinda dapat



terwujud. Namun apabila pertumbuhannya tidak dikendalikan oleh pemerintah Kota Samarinda, maka secara perlahan berpotensi melanggar tata ruang.

Tabel 2.92
Jumlah UMKM Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (unit)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usaha Mikro Bidang Kuliner	21.533	10.042	15.319	16.111	16.599
2	Usaha Mikro Bidang Fashion	15.344	3.200	5.176	5.315	5.432
3	Usaha Mikro Bidang Pendidikan	1.535	30	45	73	77
4	Usaha Mikro Bidang Otomotif	9.495	803	760	817	817
5	Usaha Mikro Bidang Agrobisnis	2.066	4.433	11.067	11.134	11.171
6	Usaha Mikro Bidang Teknologi Internet	1.517	253	359	398	414
7	Usaha Mikro Bidang Lainnya	9.711	5.934	8.663	9.583	10.437
JUMLAH		58.732	61.201	24.694	43.431	45.001

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Usaha Mikro di Kota Samarinda mengalami tantangan berat pada tahun 2020, merosot 59,65 persen karena dampak pandemi Covid-19. Meskipun demikian, Samarinda sebagai kota yang dinamis mampu membalikkan keadaan, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021, melonjak dari 24.695 unit menjadi 41.389 unit atau mencatat kenaikan sebesar 67,60 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan jumlah Usaha Mikro di Kota Samarinda secara konsisten terus mengalami peningkatan, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan perlambatan. Tahun 2023 tumbuh sebesar 3,61 persen atau menjadi 45.001 unit Usaha Mikro. Hal ini menandakan minat tinggi masyarakat untuk terlibat dalam dunia wirausaha. Bidang Kuliner memimpin dengan 16.599 unit atau 36,89 persen dari total Usaha Mikro kemudian berturut-turut disusul Bidang Agrobisnis (24,82 persen) dan Bidang Lainnya (23,19 persen). Seiring dengan dorongan positif ini, pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan agar Usaha Mikro dapat tetap berkembang secara berkelanjutan dan memperkuat fondasi bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.



2.4.1.15. Penanaman Modal

Pada tahun 2023 realisasi investasi PMA sebesar 313.805.880,00 ribu rupiah atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya yang mencapai 466.540.119,80 ribu rupiah. Sedangkan Investasi PMDN mengalami kenaikan yang semula 1.270.879.500,00 ribu rupiah di tahun 2022 menjadi 1.960.722.300,00 ribu rupiah pada tahun 2023. Realisasi PMDN tertinggi berasal dari sektor tersier (*service/jasa*), sesuai dengan perekonomian Kota Samarinda yang didominasi oleh sektor tersebut. Dominasi sektor tersier dalam perekonomian Kota Samarinda menjadi keunggulan tersendiri, karena meskipun terjadinya penurunan ekonomi global, Kota Samarinda masih mampu tumbuh secara positif meskipun dalam persentase yang kecil. Oleh karena itu, Kota Samarinda yang dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan terus mengupayakan pembangunan disemua sektor, agar investasi terus meningkat setiap tahun.

Tabel 2.93
Realisasi Investasi Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (Ribu Rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PMA	6.528.904,50	270.875.000,00	250.025.000,00	466.540.119,80	313.805.880,00
2	PMDN	5.454.182,40	659.903.000,00	585.533.300,00	1.270.879.500,00	1.960.722.300,00
Jumlah		11.983.086,90	930.778.000,00	835.558.300,00	1.737.419.619,80	2.274.528.180,00

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2023

2.4.1.16. Kepemudaan dan Olahraga

Khusus pembangunan bidang olahraga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda difokuskan pada meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga baik secara mandiri maupun memanfaatkan fasilitas umum yang telah dibangun. Peningkatan minat masyarakat dapat terlihat dengan semakin tingginya pembinaan olahraga usia muda yang mencapai 63 orang pada tahun 2022. Tidak hanya itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga terlihat dengan semakin banyaknya gedung olahraga di Kota Samarinda yang



mencapai 26 gedung pada tahun 2022. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:

Tabel 2.94
Perkembangan Prestasi Olahraga Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah gedung olahraga	9 gedung	9 gedung	9 gedung	9 gedung	9 gedung
2	Cakupan pembinaan olahraga	56 cabor	56 cabor	56 cabor	63 cabor	70 cabor
3	Cakupan pembinaan atlet muda	-	40 orang	40 orang	64 orang	70 orang
4	Jumlah prestasi olahraga	3 cabor	-	16 cabor	20 cabor	20 cabor
5	Persentase perolehan medali	-	-	50	51,3	51,3

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

2.4.1.17. Kepemudaan dan Olahraga

Tersedianya berbagai fasilitas dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda melahirkan berbagai prestasi bidang olahraga yang diraih oleh atlet asal Samarinda, baik yang mewakili kota, provinsi maupun nasional. Pada tahun 2023 sebanyak 20 cabang olahraga (cabor) Kota Samarinda memperoleh prestasi, meningkat dari tahun 2021 yang saat itu hanya 16 cabor. Sedangkan perolehan medali mencapai 50 persen pada tahun 2021 dan 51,3 persen pada tahun 2023.

Pembangunan bidang olahraga harus sejalan dengan pembangunan bidang kepemudaan. Peran pemuda sangat menentukan kelancaran dan kondusifitas pembangunan di Kota Samarinda. Semakin banyak pemuda yang aktif dan berprestasi maka semakin mudah pembangunan dilaksanakan, karena terdapat akselerator yang mendorong tercapainya tujuan pembangunan tersebut. Kondisi ini terlihat di Kota Samarinda, dimana terdapat 146 organisasi kepemudaan yang terbagi ke dalam 16 organisasi politik, 5 organisasi olahraga, 3 organisasi ekonomi, dan 122 organisasi sosial. Semakin banyak program kepemudaan dan tingginya keterlibatan pemuda dalam pembangunan baik melalui organisasi maupun relawan, akan meningkatkan indeks pembangunan



pemuda. Indeks pembangunan pemuda mulai dilakukan penghitungan secara mandiri oleh pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2022 yang menghasilkan nilai 35 poin dan dilakukan kembali tahun 2023 yang menghasilkan nilai 61,17 poin. Meskipun masih jauh dari angka maksimal, namun adanya indeks pembangunan pemuda menunjukkan keberanian pemerintah Kota Samarinda untuk mengukur capaian pembangunan pemuda secara kuantitatif. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:

Tabel 2.95
Capaian Pembangunan Pemuda Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Organisasi bidang politik	16	16	16	16	-
2	Organisasi bidang olahraga	5	5	5	5	5
3	Organisasi bidang ekonomi	3	3	3	3	-
4	Organisasi bidang sosial	104	122	122	122	-
5	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	-	23,66 poin	35 poin	61,17 Poin

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

2.4.1.18.Statistik

Penyelenggaraan bidang urusan statistik di Kota Samarinda dilaksanakan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah. Adapun poin penting dalam NSPK tersebut adalah ketersediaan rekomendasi statistik atas survei dan kompilasi statistik sektoral, serta kelengkapan metadata kegiatan dan metadata variabel. Sampai tahun 2023, sebanyak 57 survei dan 27 kompilasi statistik sektoral yang telah memperoleh rekomendasi. Seluruh kegiatan tersebut telah memiliki kelengkapan metadata kegiatan dan metadata variabel sebesar 100 persen. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:



Tabel 2.96
Capaian NSPK Statistik Sektor Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah survei statistik sektoral yang memperoleh rekomendasi	35	37	50	53	57
2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang memperoleh rekomendasi	1	19	30	38	27
3	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	100	100	100	100
4	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

2.4.1.19. Persandian

Seiring dengan semakin tingginya penggunaan teknologi dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, maka memicu tingginya tingkat kejahatan siber. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, mengingat kejahatan siber semakin sering terjadi baik melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan. Kejahatan siber yang kerap terjadi antara lain pencurian data pemerintah pada aplikasi milik pemerintah, pencurian data pribadi pada aplikasi milik pemerintah, penyalahgunaan data pejabat negara atau daerah, dan penipuan melalui aplikasi pesan instan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara pada tahun 2023 mulai mengarahkan seluruh daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membentuk CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Adapun pemerintah Kota Samarinda menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Kaltim yang menjadi pilot project pembentukan CSIRT. Tidak hanya keamanan informasi dalam aplikasi, pengamanan informasi pimpinan dalam tanda tangan digital juga telah dilakukan, terutama pada saat pandemi COVID-19 melanda Kota Samarinda. Sampai tahun 2023, seluruh unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Samarinda telah menggunakan tanda tangan



elektronik yang disertifikasi dan dilindungi oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

2.4.1.20. **Kebudayaan**

Pembangunan bidang kebudayaan tidak hanya diarahkan pada melestarikan peninggalan leluhur, tetapi melestarikan sesuatu yang mampu mengingatkan kembali perilaku-perilaku luhur khas negara Indonesia yang saat ini sudah mulai ditinggalkan karena kemajuan zaman. Dalam kebudayaan terdapat nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kepada manusia, bahkan dapat menjadi pedoman hidup manusia. Oleh karena itu pembangunan kebudayaan terus ditingkatkan.

Fokus pembangunan bidang kebudayaan mulai dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda sejak terbentuknya Dinas Kebudayaan pada tahun 2017. Meskipun bidang kebudayaan pernah berada di Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan, namun dapat dikatakan pembangunannya tidak tersentuh maksimal, karena tidak adanya pengembangan peninggalan kebudayaan yang bernilai sejarah dan berpotensi jadi objek wisata. Oleh karena itu semua hal yang terkait dengan pelestarian kebudayaan baik benda sejarah, kehidupan masyarakat adat, kesenian, dan sarana prasarana pendukungnya mulai dibangun secara maksimal sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Samarinda.

Tabel 2.97
Sarana Dan Prasarana Seni Budaya Kota Samarinda
Tahun 2019-2023 (unit)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sanggar Kesenian	25	25	25	124	132
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah Museum	1	1	1	1	1
4	Jumlah Pusat Kebudayaan/ Taman Budaya	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Tabel 2.98
Perkembangan Seni dan Budaya Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk (jiwa)	793.576	817.254	831.220	849.717	861.878



No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. (grup)	0,32	0,31	0,30	1,46	1,27
3	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. (unit)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Pagelaran grup kesenian di Kota Samarinda tergolong ramai, meskipun peran pemerintah masih minim. Namun secara perlahan jumlah grup kesenian semakin berkurang, dari 25 grup pada tahun 2019 sampai 2021 meningkat signifikan menjadi 132 grup pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa meskipun pagelaran masih ramai dilakukan, tapi untuk mempertahankan eksistensinya maka dibutuhkan peran pemerintah. Peran pemerintah Kota Samarinda yang bisa dilakukan antara lain memfasilitasi jadwal pagelaran, menyediakan tempat pagelaran, dan memfasilitasi promosinya, sehingga pagelaran tersebut dapat memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat. Berdasarkan jumlah yang ada maka rasio grup kesenian per 10.000 penduduk hanya 0,3, yang artinya butuh peran pemerintah untuk lebih giat memfasilitasi grup kesenian sehingga eksistensinya tetap ada. Selain grup kesenian, pemerintah Kota Samarinda juga membangun museum Samarendah yang dibangun bersamaan dengan Taman Samarendah sebagai bentuk kepedulian terhadap barang-barang peninggalan sejarah. Museum Samarendah juga digunakan sebagai tempat pagelaran seni baik lokal maupun modern, bahkan beberapa acara pemerintahan pun dilakukan di museum ini.

Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya menginventarisasi grup kesenian dan membangun sarana prasarana seni budaya, namun juga menginventarisasi 39 bangunan dan situs cagar budaya yang ada di Kota Samarinda melalui Dinas Kebudayaan. Beberapa diantaranya terdapat cagar budaya yang menunjukkan keragaman dan kekhasan di Kota Samarinda yang telah ada sejak dulu, yaitu Masjid Tua Shiratal Mustaqiem berusia 137 tahun, Kelenteng Thian Le Kong dan Desa Budaya Pampang. Selain itu ada pula cagar budaya yang menunjukkan perjalanan sejarah Kota Samarinda, yaitu Makam Tua Daeng Mangkona dan Rumah Tua.



2.4.1.21. Perpustakaan

Pembangunan bidang perpustakaan saat ini dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan teknologi secara global dan maraknya penggunaan smartphone di Kota Samarinda membuat masyarakat lebih senang mengakses dan membaca media atau buku secara online, yang menyebabkan kunjungan ke perpustakaan menjadi menurun. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong dikembangkannya perpustakaan online yang berisikan buku dan media elektronik.

Tabel 2.99
Koleksi Buku Perpustakaan Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perpustakaan (unit)	458	459	420	541	471
2	Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani (10-58 Tahun)	646.909	646.909	646.909	640.322	-
3	Jumlah Koleksi Judul Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	298.808	299.427	404.717	601.778	32.802

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Tabel 2.100
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kunjungan ke Perpustakaan selama 1 th	859.666	76.672	35.030	407.183	31.597*

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Angka Sementara

Penguatan perpustakaan di Kota Samarinda khususnya perpustakaan daerah dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan pengelolaan koleksi judul buku sampai rehabilitasi fisik gedung perpustakaan yang kesemuanya ditujukan agar terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Koleksi judul buku di perpustakaan daerah Kota Samarinda terus ditingkatkan, pada tahun 2021 mencapai 404.717 judul yang kemudian menjadi 601.778 judul pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 data sementara yang terhimpun sebanyak 32.803 judul. Adapun populasi yang harus dilayani bertambah dari 35.030 orang tahun 2021 menjadi 407.183 orang pada tahun 2022.

Peningkatan pada jumlah koleksi judul buku berbanding lurus dengan jumlah pengunjung perpustakaan daerah. Jumlah pengunjung



mengalami peningkatan dari 859.220 kunjungan pada tahun 2018 menjadi 859.666 kunjungan pada tahun 2019, meskipun di tahun 2020 hanya mencapai 76.672 kunjungan sebagai dampak pandemi COVID-19 dan turun kembali pada tahun 2021 yang hanya memiliki 35.030 pengunjung, Namun pada tahun 2022 mengalami loncatan jumlah pengunjung hampir 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya atau sebanyak 407.183 pengunjung. Melihat perkembangan data tersebut, pemerintah Kota Samarinda terus menggalakkan minat baca masyarakat baik dengan kunjungan ke perpustakaan daerah maupun secara online. Pemerintah Kota Samarinda pun harus terus melakukan pembaharuan koleksi judul buku menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan formal, agar perpustakaan daerah menjadi rujukan bagi siswa maupun mahasiswa untuk memperoleh referensi belajar.

2.4.1.22. Kearsipan

Capaian kinerja pada tahun 2023 bidang kearsipan salah satunya ditunjukkan dengan melalui indikator seluruh OPD telah menerapkan arsip secara baku. Hal tersebut tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak didukung dengan penyediaan tenaga arsiparis. Sampai tahun 2023 pemerintah Kota Samarinda telah memiliki 3 orang arsiparis kategori terampil, yang terdiri atas 2 orang arsiparis tingkat terampil, 2 orang arsiparis tingkat mahir, dan juga memiliki 7 orang arsiparis kategori keahlian , yang terdiri atas 2 orang arsiparis tingkat pertama, 5 orang arsiparis tingkat muda .

Tabel 2.101
Perkembangan Pengelolaan Kearsipan Kota Samarinda
Tahun 2019-2023 (unit)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	8	1	11	44	40
2	Jumlah SKPD	47	47	47	44	40
3	Persentase SKPD yang menerapkan arsip secara baku	17,02	2,13	23,40	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1. Kelautan dan Perikanan



Komoditi perikanan yang menjadi primadona di Kota Samarinda yaitu ikan air tawar khususnya ikan gabus, ikan nila, dan ikan mas, oleh karena itu menjadi komoditi yang dibudidayakan oleh masyarakat Kota Samarinda. Permintaan terhadap ikan gabus selalu tinggi mengingat ikan ini menjadi salah satu pilihan lauk dalam menu nasi kuning di Kota Samarinda. Sedangkan permintaan yang tinggi terhadap ikan nila dan ikan mas dikarenakan semakin banyaknya jumlah rumah makan di Kota Samarinda yang menghadirkan menu kedua ikan tersebut. Produksi Perikanan Budidaya cenderung mengalami pertumbuhan negatif selama periode 2019-2023. Pertumbuhan positif mulai terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 6,89 persen dan pada tahun 2022 kembali tumbuh sebesar 18,3 persen atau menjadi 893,5 ton. Sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 758 ton. Setiap tahunnya produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok budidaya dengan media kolam, rata-rata 79,61 persen. Pembudidaya air tawar di Kota Samarinda tersebar di seluruh kecamatan, dan yang paling banyak berada di Palaran, Samarinda Utara, dan Sambutan.

Tabel 2.102
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (ton)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kolam	718,0	520,2	568,9	676,5	642
2	Keramba	142,0	186,4	186,4	217,0	116
Total		910,20	706,6	755,3	893,5	758

Sumber: Dinas Perikanan Kota Samarinda

Selain perikanan budidaya, perikanan tangkap pun memberikan hasil yang cukup besar dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 hasil perikanan tangkap mencapai 24.405,6 ton, yang kemudian menurun menjadi 18.998,4 ton di tahun 2020. Kondisi yang berbeda ditunjukkan pada tahun 2020, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan menutup restoran maupun tempat makan, sehingga membuat produksi perikanan tangkap terus menurun. Namun pada tahun 2021 jumlah produksi perikanan tangkap mulai tumbuh walau kecil, sebesar 1 persen atau menjadi 19.000 ton, dimana produksi terbanyak merupakan perikanan laut. Di tahun 2023 menurun kembali menjadi 15.012,0 ton. Secara



keseluruhan, meskipun bukan menjadi sektor penting dalam perekonomian, tetapi produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya mampu bernilai secara ekonomis dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Samarinda, sehingga inflasi dapat terkendali.

Tabel 2.103
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (Ton)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perikanan Umum	4.993,4	5.780,0	5.765,0	2.800,0	3.960,0
2	Perikanan Laut	19.412,2	13.218,4	13.235,0	6.620,0	11.052,0
Total		24.405,60	18,998.4	19.000,0	9.420,0	15.012,0

Sumber: Dinas Perikanan Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2024

2.4.2.2. Pariwisata

Kota Samarinda yang telah dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan tentunya masih perlu memaksimalkan sektor pariwisata. Berbekal sebagai kota jasa dan perdagangan, jumlah kunjungan ke Kota Samarinda tahun 2019 mencapai 1.251.575 orang yang terdiri atas mancanegara sebanyak 2.107 orang dan nusantara 1.249.468 orang. Kunjungan yang terjadi lebih disebabkan karena pertumbuhan investasi sektor perdagangan, keberadaan pusat pemerintah Provinsi Kaltim, dan keberadaan jasa pendidikan. Sehingga tidak mengherankan ketika awal pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan secara drastis menjadi 283.809 kunjungan atau turun 77,32% dari tahun 2019. Oleh karena itu, tahun 2021 menjadi awal Kota Samarinda untuk membuktikan ketangguhan daerah dalam menghadapi COVID-19, dan kembali meningkatkan kunjungan wisatawan. Di tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 950.000 kunjungan yang terdiri dari 1.161 wisatawan mancanegara dan 948.384 wisatawan nusantara.

Tabel 2.104
Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (orang)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mancanegara	2.107	213	500	800	1616
2	Nusantara	1.249.468	283.596	895.770	900.000	948.384

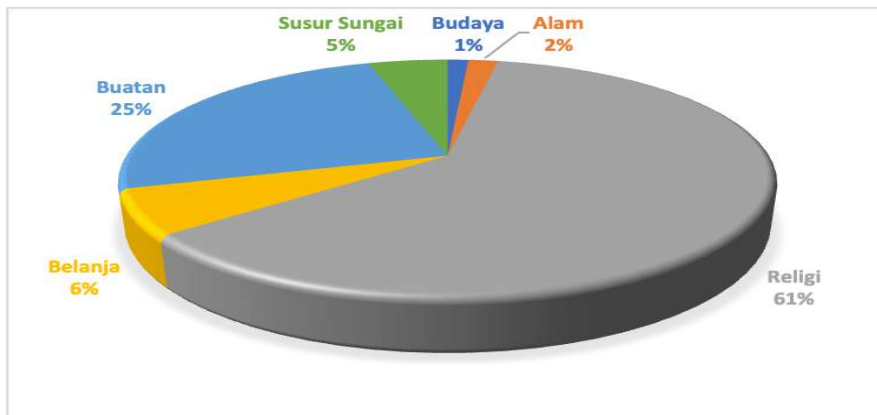


No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah	1.251.575	283.809	896.270	900.800	950.000

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2024

Dominasi kunjungan wisata ke Kota Samarinda dilakukan terbanyak pada wisata religi, wisata buatan, dan wisata belanja dengan proporsi masing-masing 61 persen, 25 persen, dan 6 persen. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 2.53.
Proporsi Kunjungan Wisatawan Domestik Per Objek Wisata Kota Samarinda



Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

2.4.2.3. Pertanian

Kota Samarinda pada saat ini masih dalam proses penetapan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Cakupan lahan LP2B seluas 1.230.88 Ha dan untuk Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) mencakup 760,267 Ha. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. mewujudkan revitalisasi pertanian.



Dalam rangka meningkatkan jumlah produksi, maka pemerintah Kota Samarinda harus memaksimalkan luas tanam. Luas tanam pangan di Kota Samarinda tahun 2019-2023 secara umum mengalami penurunan pada komoditi padi ladang, jagung, ketela pohon, dan kacang tanah, sementara komoditi yang mengalami peningkatan hanya ketela rambat dari 12.20 Ha (2022) menjadi 26 Ha (2023). Melihat kondisi ini, intensifikasi Pertanian yaitu mengolah lahan dengan sebaik-baiknya dari segi benih, pupuk, pestisida, teknologi, tenaga kerja dan pengetahuan) harus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda, guna mendukung perekonomian masyarakat, juga mendukung penyediaan pangan pengganti beras sebagai bagian program ketahanan pangan.

Tabel 2.105
Luas Tanaman Pangan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (Ha)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	3.647,50	3.131,90	2.397,50	2.160,90	1.877,8
2	Padi Ladang	332,70	43,20	7,00	18,00	
3	Jagung	116,40	19,50	180,70	26,20	24,2
4	Ketela Pohon	88,40	35,05	122,40	68,9	40
5	Ketela Rambat	10,10	10,10	24,80	12,20	26
6	Kacang Tanah	32,10	8,30	21,90	18,70	17,7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

2.4.2.4. Perdagangan

Perdagangan termasuk dalam 3 sektor besar yang mendominasi perekonomian Kota Samarinda setelah konstruksi. Dalam kurun waktu 2019-2023, kontribusi perdagangan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 16,03% pada tahun 2018 menjadi 16,85% pada tahun 2023. Laju pertumbuhan perdagangan pun terbilang tinggi, yaitu 5,65% pada 2018 dan 1,84% tahun 2020 di saat kondisi pandemi COVID-19. Peningkatan kontribusi perdagangan disertai laju pertumbuhan yang tinggi semakin mempertegas Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan.



Tabel 2.106
Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Sektor
Perdagangan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Distribusi PDRB	16,32	17,12	16,62	16,07	16,85
2	Laju Pertumbuhan	5,36	1,85	3,59	6,82	8,20

Sumber: Kota Samarinda dalam Angka 2024

Tingginya kontribusi perdagangan dalam perekonomian tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Kota Samarinda untuk mengembangkan sarana perdagangan. Sampai tahun 2023 di Kota Samarinda terdapat 13.956 sarana perdagangan, yang terdiri atas pasar tradisional sebanyak 31 buah, pasar swalayan/supermarket/toserba 284 buah, hypermarket 5 buah, pasar grosir 3 buah, mal/plaza 7 buah, dan pertokoan/warung/kios 13.626 buah. Pemerintah Kota Samarinda terus mengupayakan peningkatan pada sarana perdagangan, sehingga perputaran uang di ibukota ini semakin besar, dan perekonomian Kota Samarinda tetap tumbuh konsisten dan positif.

Tabel 2.107
Jumlah Sarana Perdagangan Tahun 2019-2023
Kota Samarinda (buah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasar Tradisional	25	25	32	31	31
2	Pasar Lokal	0	0	0	0	0
3	Pasar Regional	0	0	0	0	0
4	Pasar Swalayan / Supermarket / Toserba	14	17	288	305	284
5	Hipermarket	8	6	6	5	5
6	Pasar Grosir	3	3	3	3	3
7	Mal/Plaza	6	6	6	7	7
8	Pertokoan/Warung/Kios	15.69 2	15.69 2	14.89 0	13.73 9	13.62 6

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Samarinda

2.4.2.5. Perindustrian

Pada tahun 2019 kontribusi industri pengolahan masih berada pada angka 7,72 persen, sedangkan pada tahun 2023 menjadi 6,83 persen. Penurunan ini merupakan bukti bahwa dominasi industri semakin



menurun setiap tahun. Begitu pula dilihat dari laju pertumbuhannya dari 4,27 persen pada tahun 2019 menurun menjadi 2,96 persen pada tahun 2023. Penurunan kontribusi ini menandakan bahwa terdapat sektor lain yang mampu tumbuh konsisten dan lebih tinggi sehingga secara perlahan menggeser kontribusi industri dalam perekonomian Kota Samarinda.

Tabel 2.108
Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Sektor Industri Pengolahan Tahun 2019-2023 Kota Samarinda (%)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Distribusi PDRB	7,72	7,72	7,47	6,92	6,83
2	Laju Pertumbuhan	4,27	-3,97	1,48	4,98	2,96

Sumber: Kota Samarinda dalam Angka 2024

Tabel 2.109
Jenis Industri Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Agro Industri dan Aneka					
	Unit	626	729	886	886	1.839
	Tenaga Kerja	1.123	4.509	1.201	1.201	6.984
2	Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, dan Elektronika					
	Unit	492	1099	692	692	904
	Tenaga Kerja	7.155	7.497	1.551	1.551	4.525
3	Industri Hasil Hutan					
	Unit	492	544	223	223	295
	Tenaga Kerja	4.245	4.623	1.109	1.109	1.109

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Penurunan kontribusi industri dalam perekonomian justru tidak terlihat pada jumlah industri yang ada di Kota Samarinda. Peningkatan jumlah industri beserta penyerapan tenaga kerjanya terlihat dalam kurun waktu 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah industri mencapai 1.610 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 12.523 orang, kemudian pada tahun 2021 jumlah industri meningkat menjadi 1.801 unit namun terjadi penurunan drastis jumlah tenaga kerja menjadi 3.861 orang tenaga kerja. Pada tahun 2023 jumlah industri telah mencapai 3.038 unit dan jumlah tenaga kerja kembali meningkat menjadi 12.618 orang. Penurunan ini



dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat banyak Industri yang menurun produksinya sehingga melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, industri logam, mesin, perekayasaan dan elektronika paling mendominasi pada tahun 2020 mencapai 46,33% sedangkan pada tahun 2022 didominasi oleh Agro Industri dan Aneka mencapai 49,2%. Kedepannya perlu dilakukan identifikasi komoditi unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat, dan mengarahkan sektor industri kepada komoditi tersebut.

2.4.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya penunjang urusan pemerintahan. Apabila dilihat lebih mendalam, beberapa penilaian seluruh penyelenggaraan urusan dilakukan secara terpadu oleh salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan, dalam hal ini Sekretariat Daerah, yang kemudian hasilnya dapat merepresentasikan kinerja pemerintah Kota Samarinda. Penilaian-penilaian tersebut antara lain Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.110
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No.	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	20,46	20,48	20,67	21,15	21,28
2.	Pengukuran Kinerja	13,10	13,33	13,39	16,54	17,04
3.	Pelaporan Kinerja	10,96	10,98	11,07	10,71	10,76
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,61	5,76	5,81	14,75	15,03
5.	Capaian Kinerja	11,99	12,05	12,11	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		62,12	62,60	63,05	63,15	64,11
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, capaian akuntabilitas pemerintah Kota Samarinda berada pada predikat B dalam kurun waktu



2018-2023, yang artinya implementasi akuntabilitas kinerja berada pada kategori Baik. Meskipun berada dalam predikat dan kategori yang sama, namun terdapat peningkatan poin dari 62,12 tahun 2019 menjadi 64,11 pada tahun 2023. Komponen yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019-2023 yaitu pengukuran kinerja, yang mencapai 13,10 poin pada tahun 2019 menjadi 17,04 poin pada tahun 2023. Sementara komponen lainnya tidak lebih 1 poin bahkan komponen pelaporan kinerja terjadi penurunan. Pada tahun 2023 terjadi perubahan komponen penilaian dari 5 komponen menjadi 4 komponen yang menyebabkan terjadinya peningkatan signifikan pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Tidak hanya berdasarkan evaluasi AKIP, kinerja pemerintah Kota Samarinda dapat dilihat pada Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 2.111
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Samarinda

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Komponen pengungkit	29,41	29,93	29,80	
1.1	Pemenuhan	12,57	13,24	11,72	
1.2	Hasil antara area perubahan	6,37	5,20	5,91	
1.3	Reform	10,47	11,49	12,17	
2	Komponen hasil	30,67	30,23	30,49	
2.1	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	7,35	7,38	7,42	
2.2	Kualitas layanan publik	8,40	8,36	9,26	
2.3	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	8,58	7,63	7,77	
2.4	Kinerja organisasi	6,35	6,86	6,04	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	60,08	60,16	60,29	70,94

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya peningkatan indeks reformasi birokrasi di Kota Samarinda selama tahun 2020 sampai 2023. Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Samarinda mencapai 70,94 dengan predikat B. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang



ditandai dengan meningkatnya nilai hasil antara, area reform, dan komponen hasil. Namun mengalami penurunan pada area pemenuhan. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti dukung yang mendukung pernyataan di area pemenuhan.

Guna meningkatkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, diperlukan peran perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan untuk menghasilkan program/kegiatan pembangunan yang terarah, tepat sasaran, dan akuntabel.

2.4.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1. Perencanaan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun yaitu RPJPD, jangka menengah 5 tahun yaitu RPJMD, dan tahunan yaitu RKPD. Sedangkan tingkat perangkat daerah yaitu jangka menengah 5 tahun yaitu Renstra PD, dan tahunan yaitu Renja PD. Secara lengkap perhatikan ketersediaan dokumen perencanaan Kota Samarinda pada tabel berikut:



Tabel 2.112
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renja PD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	47 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	40 dokumen	40 dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RENSTRA yang telah ditetapkan dengan PERKADA	47 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	40 dokumen	40 dokumen

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas, RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda yaitu RPJPD Kota Samarinda periode 2005-2025 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015. Adapun RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda yaitu RPJMD Kota Samarinda periode 2016-2021 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 untuk data tahun 2018-2021, sedangkan data 2021-2022 adalah RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021. RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada yaitu RKPD Kota Samarinda Murni dan RKPD Kota Samarinda Perubahan yang secara rutin disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota setiap tahun. Sedangkan Renstra dan Renja yang telah ditetapkan dengan Perkada yaitu Renstra dan Renja untuk 47 OPD yang ada pada tahun 2019-2021, sedangkan tahun 2023 dikarenakan perampingan organisasi maka jumlah OPD berubah menjadi 40 OPD.

Setiap tahun dokumen perencanaan tersebut dilakukan evaluasi, terutama konsistensi program dalam dokumen perencanaan yang masuk dalam APBD. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:



Tabel 2.113
Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98,85	100	98,48	98,1	95,65
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	99,71	100	97,97	93,1	99,82

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Secara keseluruhan, konsistensi program dalam RPJMD yang masuk RKPD tidak mencapai 100 persen dikarenakan ada beberapa program pada OPD yang belum dijadikan prioritas pada tahun berkenaan dengan alasan efisiensi dan tidak menunjang secara langsung ke program prioritas daerah, sehingga penganggarannya masih dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Adapun konsistensi program dalam RKPD yang masuk APBD tidak mencapai 100 persen dikarenakan ada beberapa program OPD yang dilakukan rasionalisasi anggaran menyesuaikan kemampuan APBD pada tahun berkenaan, sehingga pelaksanaannya dapat ditunda ke tahun berikutnya.

2.4.4.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas 2 jenis, yaitu pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pendapatan daerah. Kedua poin tersebut saling berhubungan dan berbanding lurus satu sama lain. Semakin tinggi pendapatan daerah yang diperoleh, maka akan meningkatkan kemampuan belanja pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perputaran roda perekonomian, terutama di Kota Samarinda yang memiliki sektor dengan kontribusi tertinggi dalam PDRB yaitu konstruksi. Guna meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Kota Samarinda fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung dapat dikelola oleh daerah. Perhatikan data PAD Kota Samarinda berikut:



Tabel 2.114
Persentase Realisasi PAD Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Target PAD (Rp ribu)	500.991.118,3	392.727.879,0	561.492.908,2	534.888.451,0	600.865.299
2	Realisasi PAD (Rp ribu)	560.679.282,2	485.143.157,8	594.801.655,1	544.179.141,2	753.422.013
3	Persentase realisasi terhadap target (%)	111,9	123,5	105,9	101,7	125,4

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Data di atas memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Samarinda dalam kurun waktu 2019-2023 mampu merealisasikan PAD melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat pada persentase realisasi terhadap target yang melampaui 100%. Bahkan sejak tahun 2021, PAD Kota Samarinda ditarget di atas 500 milyar dan di tahun 2023 mampu mencapai lebih dari 600 miliar. Peningkatan PAD tersebut tentunya semakin meningkatkan kemampuan belanja pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan belanja pemerintah, namun ditentukan juga oleh kemampuan SDM di lingkungan pemerintah daerah selaku aparatur pemerintah yang melaksanakan belanja pemerintah. Artinya tepat atau tidaknya belanja tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme aparatur pemerintah. Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan aparatur pemerintah yang ada di Kota Samarinda, mayoritas PNS memiliki tingkat pendidikan terakhir S.1/D.IV yang mencapai 4.043 orang. Bahkan di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, terdapat lulusan S2 sebanyak 449 orang dan S.3 sebanyak 9 orang. Tingkat pendidikan tersebut dapat dijadikan suatu ukuran bahwa PNS di lingkungan pemerintah Kota Samarinda memiliki kemampuan menyerap pengetahuan dan mengikuti perkembangan teknologi dengan sangat cepat, yang artinya dapat menjadi modal pembangunan Kota Samarinda.



Tabel 2.115
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2019-2023 Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SD/MI/Sederajat	48	43	39	36	27
2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMP/MTs/Sederajat	87	80	72	60	51
3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMA/SMK/MA/Sederajat	1.828	1.708	1.592	1.471	1.265
4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir D.III	738	752	731	736	708
5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-1/D.IV	3.862	4.077	3.949	4.175	4.043
6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-2	484	485	482	477	449
7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-3	8	8	8	9	9

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2024

Tingkat pendidikan yang telah dimiliki oleh PNS di lingkungan pemerintah Kota Samarinda tidak akan berkembang apabila tidak diiringi dengan penempatan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki PNS tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan program Kementerian PAN RB terkait penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tertentu, pemerintah Kota Samarinda telah mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan harapan terjadi sinkronisasi antara disiplin ilmu yang dimiliki dengan penempatan tugas PNS bersangkutan. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka jumlah jabatan fungsional tertentu pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 1.171 orang, dari 4.491 orang tahun 2022 menjadi 5.662 orang tahun 2023. Secara proporsi, jabatan fungsional tertentu (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2023 menempati 18,88 persen dari seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Perhatikan tabel berikut:



Tabel 2.116
Rasio Pegawai Fungsional Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jabatan Fungsional Tertentu	4.331	4.354	4.230	4.491	5.662
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	-	6,6	6,6	7,7	18,88

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

2.4.5. Pengawasan

Penyelenggaraan pemerintah daerah sangat rentan dengan adanya penyalahgunaan, baik anggaran maupun jabatan. Penyalahgunaan tersebut dapat merugikan banyak pihak, bahkan seringkali menyebabkan kerugian negara yang sangat besar sehingga menjadi kasus pidana. Oleh karena itu, guna menghindari kerugian tersebut, dalam lingkungan pemerintah daerah diperlukan adanya perangkat daerah yang menjalankan peran pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan program/kegiatan serta keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Semakin dapat dipertanggungjawabkan suatu program/kegiatan terhadap keuangan daerah, maka semakin bagus opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari keberhasilan pemerintah Kota Samarinda dalam 5 tahun berturut-turut memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah Kota Samarinda yang mampu meningkatkan rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti.

Meskipun dalam 2 tahun terakhir yaitu 2022-2023 jumlah temuan BPK tahun 2023 menurun menjadi 1.192 dari tahun 2022 sebanyak 1.217 temuan, dan pemerintah Kota Samarinda mampu menindaklanjuti setidaknya sebanyak 87,48%. Tingginya temuan BPK tersebut menandakan bahwa kehati-hatian pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan di daerah semakin meningkat. Oleh karena itu peran pengawasan juga harus ditingkatkan mengikuti perkembangan tersebut melalui peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam kurun waktu 2020-2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapabilitas APIP



dari 52 tahun 2020 menjadi 3.000 tahun 2023. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:

Tabel 2.117
Rasio Temuan BPK yang ditindaklanjuti Tahun 2019-2023
Kota Samarinda

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan	87	14	985	1.217	1.192
2	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	64	7	809	1.031	994
3	Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti (%)	73,56	50	82,13	84,72	87,48
4	Peningkatan kapabilitas APIP (orang)	-	52	60	63	3.000

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Samarinda

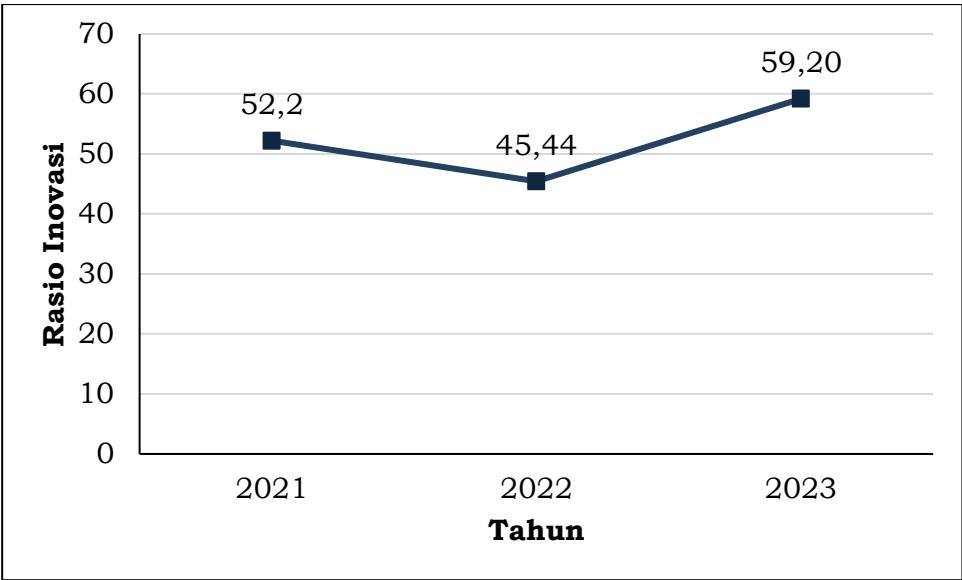
Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berbagai Upaya terus dilakukan untuk mendongkrak nilai IID melalui berbagai kebijakan strategis terkait pembangunan utamanya dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasi.

Gambar 4 menunjukkan nilai IID Kota Samarinda tahun 2021 sampai 2023. Berdasarkan data IID Kota Samarinda tahun 2021 mencapai angka 45,44 yang mana angka tersebut menurun 6,76 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Setahun terakhir, 2023 angka IID Kota Samarinda kembali naik menjadi 59,2 yang berada pada kategori inovatif.



Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2023
Kota Samarinda



Sumber: Bapperida Kota Samarinda

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJPD

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta analisis yang telah dilakukan, maka dalam Evaluasi RPJPD 2005-2025 Kota Samarinda dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek “perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah”, struktur dan kandungan isi dokumen RPJPD telah sesuai dengan pedoman penyusunan yang dimuat dalam Permendagri 86/2017 sebagai perubahan dari Permendagri 54/2010.
2. Berdasarkan aspek “pelaksanaan rencana pembangunan daerah”, tingkat konsistensi implementasi sasaran RPJPD dalam dokumen RPJMD I, RPJMD II, RPJMD III, dan RPJMD IV secara berturut-turut capaiannya adalah 70,79%, 71,43%, 67,86% (kriteria sedang), dan 77,36% (kriteria tinggi); dan tingkat konsistensi implementasi arah kebijakan RPJPD dalam dokumen RPJMD I, RPJMD II, RPJMD III, dan RPJMD IV secara berturut-turut capaiannya adalah 100% (sangat tinggi), 93% (sangat tinggi), 71% (sedang), dan 71,43% (sedang).
3. Berdasarkan aspek “hasil rencana pembangunan daerah”, capaian kinerja pembangunan daerah RPJMD I sampai dengan RPJMD IV berdasarkan target indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD cenderung menurun, secara berturut-turut capaian kinerja pembangunan RPJMD I, RPJMD II, RPJMD III, dan RPJMD IV adalah



113,00% (sangat tinggi), 105,25% (sangat tinggi), 87,21% (tinggi), dan 74,45% (sedang).

4. Capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan Tiga Misi yang ditetapkan dalam RPJPD cenderung dipengaruhi oleh tingkat konsistensi implementasi variabel sasaran dan arah kebijakan dalam empat tahapan RPJMD.

Misi I dengan IPM sebagai indikator sasaran utama dan didukung oleh empat indikator sasaran pokok, capaian kinerjanya termasuk kriteria sangat tinggi untuk semua keempat tahap RPJMD, meskipun cenderung mengalami penurunan dari RPJMD I ke RPJMD IV. Indikator sasaran:

- a. pokok yang menjadi penghambat utama peningkatan IPM adalah “pengeluaran konsumsi rumah tangga per Bulan” dan “rata-rata lama sekolah”.
- b. Misi II dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai indikator sasaran utama dan didukung oleh enam indikator sasaran pokok, capaian kinerjanya termasuk kriteria sangat tinggi pada RPJMD I, tetapi kemudian turun menjadi sangat rendah dan bahkan negatif pada tiga tahapan RPJMD berikutnya. Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda dalam 18 tahun terakhir sangat fluktuatif dan mengalami penurunan rata-rata 4,67% per tahun dengan tingkat ketidakpastian model prediksi >90%. Hanya satu indikator sasaran pokok (kontribusi sektor jasa terhadap PDRB) yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan lima indikator sasaran pokok lainnya cenderung menjadi penghambat Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda.
- c. Misi III dengan Nilai Adipura sebagai indikator sasaran utama dan didukung oleh lima indikator sasaran pokok, capaian kinerjanya berdasarkan target indikator sasaran RPJPD termasuk kriteria sangat tinggi untuk semua keempat tahapan RPJMD, tetapi cenderung mengalami penurunan untuk mendapatkan penghargaan Adipura. Hanya dua indikator sasaran pokok (yaitu: Menurunnya pencemaran udara, dan Menurunnya pencemaran air) pendukung Misi III yang dapat dievaluasi, karena *data series* yang dibutuhkan untuk evaluasi tidak tersedia secara lengkap.
- d. Capaian indikator kinerja makro pembangunan, berdasarkan berdasarkan analisis *data series* secara lengkap, hanya dua indikator kinerja makro yang memiliki pertumbuhan positif secara konsisten, yaitu 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 2) PDRB per Kapita.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, demikian pula empat indikator sasaran lainnya, yaitu: 1) ketimpangan pendapatan, 2) pendapatan per kapita, 3) angka kemiskinan, 4) angka pengangguran, pertumbuhannya fluktuatif, beresiko menjadi negatif, dan perkembangannya kurang prospektif dalam jangka Panjang.

Hasil capaian kinerja pembangunan tahun 2005-2025 tersaji dalam tabel di bawah.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Tabel 2.118
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Samarinda
Periode Pelaksanaan: tahun 2005–2025

Visi: Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan			Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD hadap Sasaran Pokok RPJPD Kabup/Kota (%)				
				(5)				(6)				(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang Berdaya Saing Berbasis Penegakan Hukum																
Sasaran	Sasaran Pokok		Indikator													
a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			IPM	75,10	77,05	78,64	80,34	81,88	77,05	78,69	80,11	81,43*	100	100	99,71	99,45
	1.Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek huruf	96,64	98,01	99,4	100	100	98,01	99,59	99,28	99,18*	100	100	99,28	99,18	
	2.Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	9,67	9,8	10,56	11,21	12	9,80	10,31	10,48	10,71*	100	97,63	93,49	89,25	
	3.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	69,30	71,21	72,33	73,44	74,56	73,49	73,65	74,27	74,56*	103	102	101	100	
	4.Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per Bulan (Rp.000)	638,63	970,47	1.427,73	1.883,97	2.340,22	1.088,42	1.152,08	1.177,97	1.263,50*	112	80,69	62,52	53,99	
Misi II: Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Kota Samarinda yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah																
b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi			Pertumbuhan Ekonomi	-	6.16	8.02	6±1	6±1	6,30	0.04	-1.07	1,07*	102	0,5	-18	18
	1.Meningkatnya kontribusi sub-sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persentase sektor perdagangan terhadap PDRB	-	29,35	42,00	46,00	50,00	30,28	15,39	21,16	20,54*	103	37	46	41	
		Persentase sektor jasa terhadap PDRB	-	11,92	10,44	12,72	15,00	23,74	11,85	17,30	16,13*	199	114	136	108	
	2.Terjangkaunya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat	Tingkat inflasi	16,64	7,00	6,45	5,00	4,00	7,00	4,24	0,86	7,11*	100	152	581**	56	
	3.Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	-	5,21	4,35	3,67	3,0	5,21	4,82	4,76	4,99*	100	90	77	60	
	4.Menurunnya tingkat pengangguran	Angka Pengangguran	-	9,22	7,98	6,49	5,00	9,22	5,61	8,26	6,78*	100	142	79	74	



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Visi: Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan			Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD hadap Sasaran Pokok RPJPD Kabup/Kota (%)			
				(5)				(6)				(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	5. Menurunnya Indeks Gini	Nilai Indeks Gini	-	-	0,30	0,29	0,28	0,110	0,287	0,324	0,322*	-	105	90	87
Misi III: Mewujudkan Lingkungan Yang Sehat dan Asri															
c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Nilai Adipura	-	61,03	70,90	72,90	74,90	61,03	70,90	70,05	70,10*	100	100	96	94
	1. Menurunnya pencemaran udara	Indeks pencemaran udara	-	51-100	51-100	51-100	0-50	-	-	50-100	50-100	-	-	100	75
	2. Menurunnya pencemaran air	Indeks pencemaran air sungai	-	>31, cemar berat	>31, cemar berat	11-30, cemar sedang	1-10, cemar ringan	-	-	>31, cemar berat	>31, cemar berat	-	-	75	50
	3. Mengurangi titik lokasi banjir	Jumlah lokasi banjir	-	60	50	40	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	-	-	7,45	≥ 10	≥ 15	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Menurunnya Penyimpangan Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW	Persentase kesesuaian guna lahan yang sesuai dengan RTRW	-	-	-	≥ 30	≥ 50	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)												113,00	105,25	87,21	74,45
Predikat Kinerja												Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Sedang
Usul tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/Kota: Samarinda (Lanjutan Tabel 2.12)															

Keterangan: * data sementara; ** dianggap data menyimpang.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Tabel 2.128. (Lanjutan)

Visi: Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan			Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
			(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	(10)
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang Berdaya Saing Berbasis Penegakan Hukum					
Sasaran	Sasaran Pokok	Indikator			
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		IPM	Capaian kinerja sasaran pokok belum semuanya mencapai kondisi optimal, dan pelaksanaan RPJMD IV belum selesai.	Secara umum baik langsung maupun tidak langsung semua program dan kegiatan pembangunan mengarah pada peningkatan IPM.	Meningkatkan kinerja sasaran pokok dengan urutan prioritas sasaran pokok no: 4, 2, 1, & 3.
	1. Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek huruf	Target program sudah sangat terbatas dan penyebarannya tinggi, serta adanya mobilitas penduduk yang tinggi.	Ada program kejar Paket A.	Peningkatan dan intensifikasi Program kejar Paket A ke wilayah sasaran.
	2. Meningkatnya Angka Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	Kondisi kemampuan ekonomi masyarakat dan karakteristik sosial-budaya masyarakat.	Program pemberian beasiswa dan sekolah gratis.	Perlu inovasi program terobosan dalam pengelolaan Pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai RLS 12 tahun.
	3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	Pola konsumsi, kemampuan ekonomi, dan kualitas produk pangan.	Penyuluhan kesehatan dan kesadaran hidup sehat dalam masyarakat.	Peningkatan penyuluhan dan promosi gaya hidup sehat.
	4. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per Bulan	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per Bulan	Pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi,	Masih terbuka peluang berusaha atau mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat.	Peningkatan kualitas SDM untuk dapat bekerja/berusaha pada berbagai sektor yang ada tersedia.
Misi II: Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Kota Samarinda yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah					
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi			
	1. Meningkatnya kontribusi sub-sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persentase sektor perdagangan terhadap PDRB Persentase sektor jasa terhadap PDRB	Target capaian kinerja yang ditetapkan terlalu optimis, dan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang sangat fluktuatif. Keragaman jenis jasa masih perlu pengembangan	Pertumbuhan ekonomi masih positif sehingga kegiatan perdagangan masih dapat berjalan. Terbuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan bidang/jenis jasa	Perlu dikembangkan kebijakan untuk mendorong kegiatan perdagangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Diperlukan regulasi perlindungan dan standar pelayanan berbagai jenis jasa
	2. Terjangkaunya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat	Tingkat inflasi	Sangat dipengaruhi oleh banyak faktor pengendali yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah Kota.	Adaptasi masyarakat terhadap pola belanja dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga/sesuai kemampuan.	Mendorong pengembangan komoditi yang berperan dalam pengendalian inflasi.
	3. Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Tingkat inflasi cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.	Adanya beberapa jenis program bantuan dari pemerintah	Perda pengentasan kemiskinan



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Visi: Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan			Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
			(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	(10)
	4. Menurunnya tingkat pengangguran	Angka Pengangguran	<i>Link and match</i> antara peluang kerja yang tersedia dengan <i>skill</i> atau kompetensi pencari kerja belum optimal.	Cukup tersedia peluang kerja/berusaha	Peningkatan kualitas SDM menuju optimalisasi <i>link and match</i> .
	5. Menurunnya Indeks Gini	Nilai Indeks Gini	Dipengaruhi oleh banyak faktor dan di luar kendali Pemerintah Kota Samarinda.	Berkembangnya ekonomi kerakyatan	Kebijakan yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi kerakyatan.
Misi III: Mewujudkan Lingkungan Yang Sehat dan Asri					
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Nilai Adipura	Data pendukung dari sasaran pokok tidak tersedia secara lengkap.	Tersedia data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Perlu pembangunan data based lingkungan hidup secara berkelanjutan.
	1. Menurunnya pencemaran udara	Indeks pencemaran udara	Data seri (RPJMD I hingga RPJMD IV) tidak tersedia	Tersedia teknologi untuk pengukuran indeks pencemaran udara.	Eksekusi program/kegiatan dan pembangunan data based
	2. Menurunnya pencemaran air sungai	Indeks pencemaran air sungai	Data seri (RPJMD I hingga RPJMD IV) tidak tersedia	Tersedia teknologi untuk pengukuran indeks pencemaran air sungai.	Eksekusi program/kegiatan dan pembangunan data based
	3. Mengurangi titik lokasi banjir	Jumlah lokasi banjir	Data seri (RPJMD I hingga RPJMD IV) tidak tersedia	Program unggulan RPJMD IV	Eksekusi program/kegiatan dan pembangunan data based
	4. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Data seri (RPJMD I hingga RPJMD IV) tidak tersedia	Tersedia Perda	Eksekusi program/kegiatan dan pembangunan data based
	5. Menurunnya Penyimpangan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW	Persentase kesesuaian guna lahan yang sesuai dengan RTRW	Data seri (RPJMD I hingga RPJMD IV) tidak tersedia	Tersedia Perda	Eksekusi program/kegiatan dan pembangunan data based

Sumber: Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025



2.5.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan memahami sangat pentingnya dokumen perencanaan jangka Panjang untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan, sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan dokumen RPJPD periode mendatang diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Visi RPJPD 2005-2025 masih relevan untuk diwujudkan ataupun diubah mengikuti dinamika pembangunan dalam periode pembangunan jangka Panjang mendatang, tetapi dengan penguatan pada misi-misinya.
2. Misi RPJPD rumusannya harus mengakomodir aspek pelaksanaan tugas pembangunan untuk urusan wajib dan urusan pilihan dalam pembangunan nasional yang relevan dengan kebutuhan pembangunan Kota Samarinda.
3. Sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung misi harus mempunyai indikator pembangunan secara makro, agar mempunyai keceratan dengan pembangunan di level provinsi dan nasional. Sedangkan untuk indikator spesifik daerah harus dipastikan bahwa *data based* indikatornya dibangun secara berkelanjutan.
4. Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah harus konsisten untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, dengan rancangan strategi sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
5. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing harus menjadi sasaran prioritas dalam RPJPD 2026-2045, melalui inovasi terobosan bidang pendidikan untuk percepatan peningkatan “rata-rata lama sekolah” dan pengembangan pendidikan vokasi serta diploma yang *link and match* dengan pembangunan IKN Nusantara dan mengakomodasi momentum bonus demografi agar menjadi *human capital* yang produktif.
6. Mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang produktif dan berkelanjutan.



2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Penduduk

Publikasi Proyeksi Penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 menyajikan proyeksi penduduk pada periode tahun 2020 hingga 2035. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia. Hasil proyeksi ini digunakan dalam RPJPD Kota Samarinda 2025-2045. Mengingat proyeksi penduduk dalam RPJPD sampai dengan tahun 2045, maka tim penyusun RPJPD melakukan proyeksi untuk tahun 2036 sampai 2045.

Proyeksi penduduk Kota Samarinda pada tahun 2020 sampai tahun 2045 disajikan pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 1.218,62 ribu orang. Bila pada tahun 2020 komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,73 persen, namun secara bertahap mengalami penurunan menjadi 68,56 persen pada tahun 2045. Hal yang sama terjadi pada penduduk belum produktif (0-14 tahun) diproyeksikan mengalami penurunan dari 24,53 persen pada tahun 2020 menjadi 20,73 pada tahun 2045. Sebaliknya, penduduk usia 65 tahun keatas yang dikategorikan penduduk tidak produktif diproyeksikan meningkat dari 4,73 pada tahun 2020 menjadi 10,71 persen pada tahun 2045. Dengan pertumbuhan penduduk demikian, rasio ketergantungan mengalami peningkatan dari 41,37 pada tahun 2020 menjadi 45,86 pada tahun 2045. Rasio ketergantungan 45,86 berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 atau 46 orang tidak produktif.

Angka kelahiran di Kota Samarinda diproyeksikan menurun dari 2,06 pada tahun 2020 menjadi 1,86 pada tahun 2045. Penurunan juga terjadi pada angka kematian, yakni dari 13,47 di tahun 2020 diproyeksikan menjadi 6,66 pada tahun 2045. Lebih rinci mengenai beberapa parameter kependudukan yang diproyeksikan sampai tahun 2045 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.119
Proyeksi Penduduk Kota Samarinda
Tahun 2025–2045

Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (orang)				
	2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
861.878	865.317	897.981	924.303	1.157.771	1.218.624

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
* Hasil proyeksi tim penyusun RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, 2024

Tabel 2.120
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda
Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (orang)				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	438.477	439.043	452.801	463.080	585.907	613.040
Perempuan	423.401	426.274	445.180	461.223	571.864	605.584
Rasio	103,56	103,00	101,71	100,40	102,46	101,23

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
* Hasil proyeksi tim penyusun RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, 2024

Tabel 2.121
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Samarinda
Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (orang)				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14 Tahun	222.255	196,83	195,02	195,91	253,06	252,61
15 – 64 Tahun	603.426	614,22	628,09	630,51	799,51	835,50
> 65 Tahun	36.197	54,26	74,88	97,89	105,21	130,52
Angka Ketergantungan	38,79	40,88	42,97	46,60	44,81	45,86

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
* Hasil proyeksi tim penyusun RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, 2024

2.6.2. Proyeksi Sarana dan Prasarana

Perkembangan penduduk Kota Samarinda 20 tahun kedepan tentu dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan terhadap sarana dan



prasarana untuk mendukung aktivitasnya. Beberapa kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, air limbah, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk sampai dengan tahun 2045, maka dilakukan proyeksi dengan menggunakan standar SNI yang berlaku. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana yang selaras dengan pertumbuhan penduduk Kota Samarinda pada RPJPD Tahun 2025-2045 secara bertahap (5 tahunan) disajikan pada beberapa tabel di bawah. Hasil proyeksi ini bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.122
Proyeksi Jumlah Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Samarinda
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	861.878	865.317	897.981	924.303	1.157.771	1.218.624
Proyeksi Kebutuhan Rumah		2.844	2.993	3.081	3.859	4.062

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
* Hasil proyeksi tim penyusun RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, 2024

Tabel 2.123
Proyeksi Jumlah Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Samarinda
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	861.878	865.317	897.981	924.303	1.157.771	1.218.624
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter)		103.838.040	107.757.720	110.916.360	138.932.520	146.234.880

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
* Hasil proyeksi tim penyusun RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, 2024



Tabel 2.124
Proyeksi Jumlah Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Samarinda
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	861.878	865.317	897.981	924.303	1.157.771	1.218.624
Jumlah Rumah		2.844	2.993	3.081	3.859	4.062
Proyeksi Kebutuhan Listrik (Kwh)		389.392,65	404.091,45	415.936,35	520.996,95	548.380,80

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
* Hasil proyeksi tim penyusun RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, 2024



Tabel 2.125
Proyeksi Jumlah Proyeksi Timbunan Sampah dan Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	861.878	865.317	897.981	924.303	1.157.771	1.218.624
Proyeksi timbunan sampah (ton)		301.683,23	313.071,17	322.248,05	403.644,09	424.859,82
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) (unit)		2	2	2	2	2

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
* Hasil proyeksi tim penyusun RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, 2024

Tabel 2.126
Proyeksi Jumlah Proyeksi Fasilitas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	861.878	865.317	897.981	924.303	1.157.771	1.218.624
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	15	16	16	17	19	19
Puskesmas	26	26	26	27	29	29
Puskesmas Pembantu		29	30	31	39	41
Apotik		51	52	53	61	63
Posyandu		692	718	739	926	975

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
* Hasil proyeksi tim penyusun RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, 2024

Tabel 2.127



**Proyeksi Jumlah Proyeksi Fasilitas Pendidikan Kota Samarinda
Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	861.878	865.317	897.981	924.303	1.157.771	1.218.624
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
TK		233	241	253	271	294
SD/MI		257	260	265	269	276
SMP/MTs		136	138	140	142	144

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

* Hasil proyeksi tim penyusun RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, 2024

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa serta industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda merupakan penjabaran dari tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda meliputi:

- pengembangan Kota Tepian dengan acuan konsep waterfront city development dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan asas berkelanjutan;
- peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem PPK yang merata dan berhierarki;
- peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional;
- peningkatan dan penguatan infrastruktur dan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan karena memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan Wilayah sekitarnya;
- pelestarian dan pemantapan Kawasan Lindung untuk penyelamatan lingkungan hidup berkelanjutan;
- pengembangan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan;



- e. kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan ekonomi kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
- f. kebijakan pemantapan kawasan kepentingan sosial budaya berbasis kearifan lokal; dan
- g. kebijakan pemantapan kawasan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Strategi penataan ruang Kota Samarinda meliputi:

1. Strategi Pengembangan Kota Tepian dengan acuan konsep waterfront city development dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan asas berkelanjutan meliputi: a. melakukan penataan dan pengendalian lingkungan pada Wilayah atau Kawasan tepian air (waterfront) yang telah beralih fungsi dan atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukan fungsi dan pemanfaatan Wilayah atau Kawasan sebagai Kawasan Lindung; b. meningkatkan dan mengendalikan konservasi lingkungan berupa penataan Wilayah terutama Kawasan tepian air (waterfront) yang memiliki nilai sejarah/historis terhadap Daerah dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan; c. melakukan pembangunan kembali (redevelopment) dengan memanfaatkan kembali fungsi-fungsi Wilayah atau Kawasan tepian air (waterfront) lama dan/atau belum berfungsi optimal yang masih ada sampai saat ini dan tetap digunakan untuk kepentingan Masyarakat dengan merevitalisasi ataupun merekonstruksi fasilitas-fasilitas yang ada tanpa penambahan pembangunan permukiman baru guna menjaga fungsi sungai; dan d. mengembangkan Wilayah atau Kawasan tepian air (*waterfront*) yang dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi Kawasan yang ditetapkan.
2. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem PPK yang merata dan berhierarki meliputi: a. penetapan PPK, SPPK, dan PPL secara merata dan berhierarki; b. mengembangkan PPK dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dan industri berskala nasional serta pusat pelayanan umum dan kegiatan lainnya pada simpul-simpul pusat pelayanan; c. mengembangkan pusat pemerintahan baru; d. meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu baik dalam Kawasan maupun antar



- Kawasan; e. menambah dan mengembangkan sarana dan prasarana kota di Kawasan yang belum terlayani oleh pusat atau sub pusat pelayanan kota maupun lingkungan; dan f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah.
3. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional meliputi: a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; b. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi yang merata, menyeluruh, dan terintegrasi; c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah; d. menyediakan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki pada Kawasan fungsional dan sepanjang jalan utama kota; dan e. menyediakan jalur dan Ruang evakuasi bencana pada lokasi-lokasi kawasan rawan bencana yang berisiko terhadap bencana alam maupun bencana lainnya.
 4. Strategi peningkatan dan penguatan infrastruktur dan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan karena memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan Wilayah sekitarnya meliputi: a. menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. pengembangan zona penyangga (buffer zone) pada kawa
 - 5.
 6. san militer berupa Ruang Terbuka Hijau; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan atau aset Tentara Nasional Indonesia.
 7. Strategi pelestarian dan pemantapan Kawasan Lindung untuk penyelamatan lingkungan hidup berkelanjutan meliputi: a. mewujudkan Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya; b. mengembalikan atau memulihkan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan



memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah; c. melindungi dan melestarikan kawasan resapan air untuk mengimbangi perkembangan kegiatan budi daya; d. melindungi dan melestarikan Kawasan Perlindungan Setempat; e. melindungi kawasan rawan bencana; f. membatasi perkembangan Kawasan terbangun dan permukiman dengan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sempadan sungai; g. mempertahankan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada serta menambah penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik dalam bentuk taman kota, taman lingkungan, lapangan olahraga, jalur hijau, makam, dan hutan kota; dan h. mempertahankan dan memelihara keaslian benda dan kawasan cagar budaya dan melakukan konservasi dan preservasi benda dan kawasan cagar budaya yang kondisinya menurun.

8. Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan meliputi: a. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang Wilayah; b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan termasuk di dalamnya pengoptimalan potensi perairan dan perikanan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya dalam bentuk perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata; c. mengendalikan dan mengembangkan Kawasan Perumahan dan permukiman memadai sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; d. meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan; e. mengelola dan menata Ruang serta mengembangkan sarana dan prasarana untuk sektor informal di Kawasan Perdagangan dan Jasa; f. mengembangkan Kawasan Perkantoran baru; g. menetapkan dan menyiapkan Kawasan Peruntukan Industri kecil atau industri rumah tangga sebagai kawasan sentra industri; dan h. pengembangan Ruang evakuasi bencana, dengan strategi menyediakan Kawasan untuk Ruang evakuasi bencana melalui penggunaan Ruang Terbuka Hijau dan bangunan umum.
9. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan ekonomi kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 6 huruf g meliputi: a. mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa, industri dan pariwisata sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi; b. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; c. mengembangkan Kawasan Pariwisata sebagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi; dan d. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata.

10. Strategi pemantapan kawasan kepentingan sosial budaya berbasis kearifan lokal meliputi: a. menetapkan Kawasan yang memenuhi kriteria strategis sosial budaya; b. melindungi dan melestarikan warisan budaya berupa cagar budaya; dan c. penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat lainnya diantaranya manfaat ekonomis bagi perekonomian kota.
11. Strategi pemantapan kawasan untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: a. menetapkan dan memberikan arahan terkait daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui peraturan zonasi; dan b. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan hayati.

Pusat pelayanan kota yang mempunyai skala pelayanan regional terdapat di:

1. PPK Bugis di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota sebagai simpul pusat kegiatan dengan fungsi kegiatan utama pemerintahan, pelayanan umum kota dan pusat perdagangan dan jasa; dan
2. PPK Rawa Makmur di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran dengan fungsi kegiatan sebagai pusat Industri skala nasional, pusat perdagangan dan transportasi regional.

Untuk mendukung pusat pelayanan kota, penyebaran kegiatan yang merata, dan untuk mengurangi beban kawasan pusat kota, maka Kota Samarinda dibagi lagi menjadi 6 Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) sebagai berikut:

1. SPPK Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran dengan fungsi kegiatan utama meliputi Pusat Pemerintahan Baru dan Pusat Transportasi;



2. SPPK Baqa di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang dengan fungsi kegiatan utama meliputi perdagangan jasa skala kota, dan pusat sejarah, budaya dan pariwisata;
3. SPPK Makroman di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan dengan fungsi kegiatan utama perdagangan jasa skala kota;
4. SPPK Loa Bakung di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi perdagangan jasa skala kota, perkantoran; dan industri skala kota;
5. SPPK Bukit Pinang di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu dengan fungsi kegiatan utama perdagangan jasa skala kota; dan
6. SPPK Sungai Siring di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi perdagangan jasa skala regional dan transportasi regional.

Berdasarkan hirarki yang berjenjang, untuk pengembangan 20 tahun mendatang dengan pemerataan jangkauan pelayanan dan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan baru, maka Kota Samarinda memiliki 8 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota. Ciri utama pada kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), adalah skala pelayanan jenis kegiatan yang ada pada kawasan Pusat Lingkungan, diperuntukan untuk skala pelayanan kegiatan lingkup pemukiman setingkat kecamatan, kelurahan, dan RT. Pusat lingkungan dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan pada skala pusat pelayanan lingkungan. Pusat pelayanan lingkungan di Kota Samarinda meliputi:

1. PPL Bantuas di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran;
2. PPL Simpang Pasir di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran;
3. PPL Sengkotek di Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir;
4. PPL Lempake di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara;
5. PPL Sempaja Selatan di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara;
6. PPL Mugirejo di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang;
7. PPL Pulau Atas di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan; dan
8. PPL Lok Bahu di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang

Berdasarkan kondisi Kota Samarinda yang akan menjadi penyangga IKN (Ibu Kota Negara), maka wilayah perencanaan Kota



Samarinda dibagi menjadi 3, yaitu kawasan utara, tengah dan selatan. Adapun batasan wilayah administrasi pada wilayah perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128
Bagian Wilayah Perencanaan Kota Samarinda

Bagian Wilayah Perencanaan	Wilayah Administrasi
BWP 1 (Kawasan Utara)	Kecamatan Samarinda Utara Kel. Budaya Pampang Kel. Lempake Kel. Sempaja Barat Kel. Sempaja Selatan Kel. Sempaja Timur Kel. Sempaja Utara Kel. Sungai Siring Kel. Tanah Merah
	Kecamatan Sungai Pinang Kel. Bandara Kel. Gunung Lingai Kel. Mugirejo Kel. Sungai Pinang Dalam Kel. Temindung Permai
BWP 2 (Kawasan Tengah)	Kecamatan Samarinda Ilir Kel. Pelita Kel. Selili Kel. Sidodamai Kel. Sidomulyo Kel. Sungai Dama
	Kecamatan Samarinda Kota Kel. Bugis Kel. Karang Mumus Kel. Pasar Pagi Kel. Pelabuhan Kel. Sungai Pinang Luar
	Kecamatan Samarinda Ulu Kel. Air Hitam Kel. Air Putih Kel. Bukit Pinang Kel. Dadi Mulya Kel. Gunung Kelua Kel. Jawa Kel. Sidodadi Kel. Teluk Lerong Ilir
	Kecamatan Sambutan Kel. Makroman Kel. Pulau Atas Kel. Sambutan Kel. Sindang Sari Kel. Sungai Kapih
BWP 3 (Kawasan Selatan)	Kecamatan Loa Janan ilir Kel. Sengkotek Kel. Simpang Tiga Kel. Tani Aman Kel. Harapan Baru Kel. Rapak Dalam



Bagian Wilayah Perencanaan	Wilayah Administrasi
	Kecamatan Palaran Kel. Handil Bhakti Kel. Simpang Pasir Kel. Rawa Makmur Kel. Bukuan Kel. Bantuas
	Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Baqa Kel. Gunung Panjang Kel. Mangkupelas Kel. Mesjid Kel. Sungai Keledang Kel. Tenun
	Kecamatan Sungai Kunjang Kel. Loa Buah Kel. Loa Bakung Kel. Teluk Lerong Ulu Kel. Lok Bahu Kel. Karang Asam Ulu Kel. Karang Asam Ilir Kel. Karang Anyar

Sumber: RTRW Kota Samarinda



Skenario kewilayahan yang akan diterapkan, yaitu:

1. Kawasan Selatan akan dilakukan pembatasan laju kawasan masif terbangun dengan prediksi pertumbuhan penduduk bersifat linier;
2. Kawasan Tengah dengan pengembangan pusat layanan skala regional dan nasional dengan prediksi sistem target pada beberapa kawasan; dan
3. Kawasan Utara dengan prediksi pertumbuhan penduduk bersifat linier dilakukan pengembangan dengan tetap mengutamakan dan menjaga fungsi lingkungan hidup.





Kota Samarinda Sebagai Bagian Dari IKN Superhub ekonomi akan mengubah wajah perekonomian Indonesia agar menjadi lebih inklusif melalui strategi tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) serta kerja sama dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu menjadi penggerak perekonomian di Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai nilai domestik di wilayah bagian timur dan seluruh Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh, IKN, Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi.

1. IKN akan menjadi 'saraf dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga akan menjadi basis untuk Smart City dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.
2. Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur
3. Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Samarinda dalam sistem perkotaan PKN dan pusat koleksi distribusi bagi wilayah hinterland di sekitarnya. Samarinda sebagai pendukung IKN dalam masa transisi maupun dalam perkembangannya setelah beroperasi:

1. Logistik
2. Bahan pangan
3. Fasilitas sosial ekonomi
4. Fasilitas akomodasi dan rekreasi



Samarinda memiliki potensi dan keunikan untuk pengembangan kota dan dukungan bagi IKN dalam hal logistik dan pelayanan (pendidikan, rekreasi, transportasi, fasilitas (MICE dan akomodasi).

Perkiraan distribusi dan keterkaitan antar kota dengan adanya IKN adalah:

1. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah mengikuti jaringan jalan
2. Terbentuknya koridor Tana Paser-Kota Sangatta di bagian timur Kalimantan Timur
3. Pertumbuhan IKN dan simpul IKN Balikpapan Penajam
4. Kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan provinsi
5. Kota Balikpapan sebagai gerbang Kalimantan Timur baik darat maupun laut
6. Kota Balikpapan sebagai kota terdekat IKN menjadi semakin kuat
7. Kota Samarinda dapat menjadi kota singgah bagi pelaku perjalanan dari kota lain menuju IKN

2.7.1. Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur adalah terwujudnya penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Adapun potensi pengembangan wilayah ruang Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.129
Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

No	Arahan RTRW Provinsi	Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda
(1)	(2)	(3)
1	Kawasan Andalan	Kawasan andalan Kawasan Bontang – Samarinda - Tenggarong, Balikpapan - Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dengan sektor unggulan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata.
2	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Balikpapan.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No	Arahan RTRW Provinsi	Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda
(1)	(2)	(3)
3	Hierarki Pelayanan Primer	1. Pusat pemerintahan provinsi, 2. Pusat pemerintahan kota, 3. Pusat perdagangan dan jasa regional, 4. Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, 5. Pusat pelayanan jasa pariwisata, 6. Pusat transportasi darat dan laut regional, 7. Pendidikan tinggi, 8. Pusat pelayanan kesehatan, 9. Pusat siaran dan telekomunikasi, 10. Pusat olahraga skala provinsi, 11. Pengendalian lingkungan kelautan, 12. Pusat pengolahan batubara, 13. Pusat transportasi laut regional dan internasional.
4	Kawasan Peruntukan Pertanian	Potensi pengembangan pertanian lahan kering cukup besar sesuai dengan luas lahan potensial yang tersedia di Provinsi Kalimantan Timur, terutama untuk komoditi jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, sayuran, dan buah-buahan. Pengembangan pertanian palawija, hortikultura, dan buah-buahan.
5	Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan kegiatan penangkapan dan budidaya perikanan air tawar.
6	Kawasan Peruntukan Industri	Arahan pengelolaan kawasan industri pengolahan adalah mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan.
7	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Rencana pengembangan kegiatan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk menangkap peluang pasar wisata internasional dan domestik. Pariwisata di Samarinda adalah Desa Budaya Pampang dan Pusat taman batik dan tenun; kebun raya; dan pusat kerajinan Citra Niaga.
8	Kawasan Peruntukan Permukiman	a. Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Pulau Kalimantan menekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sistem pusat permukiman tersebut meliputi PKN, PKW, dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki. b. Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kalimantan Timur seluas 82.059 Ha atau 0,43 % dari luas Kalimantan Timur. Bentuk pengelolaan kawasan permukiman antara lain dengan melengkapi sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing, membentuk <i>cluster-cluster</i> permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, pengembangan permukiman perkotaan kecil melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan. c. Kawasan permukiman perkotaan merupakan kawasan permukiman yang mencakup wilayah administrasi kota dan wilayah pengembangan kota. Selain itu, beberapa wilayah yang memiliki indeks



No	Arahan RTRW Provinsi	Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda
(1)	(2)	(3)
		kekotaan yang tinggi juga berpotensi untuk berkembang menjadi permukiman perkotaan. Arahan pengelolaan kawasan permukiman perkotaan meliputi: 1) Pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru. 2) Pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan. d. Permukiman kawasan khusus meliputi: 1) Kawasan permukiman yang tumbuh akibat perkembangan infrastruktur; 2) Kawasan permukiman yang tumbuh akibat kegiatan sentra ekonomi; 3) Kawasan pertanian yang tidak layak lingkungan perumahannya, termasuk ketersediaan prasarana dan sarana tidak memadai; 4) Kawasan rawan bencana yang mengalami kerawanan lingkungan secara geomorfologis dan geologis, serta adanya kehilangan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan akibat bencana; 5) Kawasan industri, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah dan ketidaklayakan lingkungan perumahan; 6) Kawasan khusus lainnya yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja informal sektoral khusus lainnya, kekumuhan serta adanya isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan terkait dengan prasarana dan sarana umum yang belum memadai.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perumusan perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan isu-isu strategis dengan melakukan analisis dan kajian lingkungan eksternal baik di tingkat internasional, nasional, hingga regional untuk melengkapi analisis permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Suatu analisis isu-isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan Kota Samarinda baik secara sektoral maupun kewilayahan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat.

3.1. Permasalahan

Setiap daerah memiliki permasalahan-permasalahan yang unik sebagai bagian dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga optimalisasi pembangunan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merumuskan antisipasi maupun solusi pada setiap permasalahan yang ada. Terkait hal tersebut, penuntasan permasalahan merupakan esensi dari tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan tahapan demi tahapan pembangunan melalui perumusan perencanaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah mengingat



permasalahan pembangunan bersifat kompleks dan multidimensional yang bersumber dari permasalahan sektoral maupun kewilayahan.

Permasalahan pembangunan di Kota Samarinda dapat teratasi dan dituntaskan dengan adanya kebijakan pemerintah Kota Samarinda yang tepat dan relevan. Kebijakan pemerintah kota akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Samarinda. Oleh karena itu, penting adanya pengendalian dan evaluasi capaian kegiatan serta program kerja sebagai bagian dari pemahaman tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dimasa lalu. Pengendalian dan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan dan monitoring pelaksanaan pembangunan untuk memecahkan setiap permasalahan yang mengiringi realisasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah Kota Samarinda akan diidentifikasi melalui berbagai fenomena yang dikaji dari data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Oleh karenanya, perlu data dan informasi yang valid dan terkini dalam mengkaji setiap gerakan data sehingga tampak fenomena yang terjadi terutama permasalahan pembangunan Kota Samarinda. Dari hasil identifikasi, analisis, maupun kajian data dan informasi pembangunan, maka dirumuskan permasalahan utama dengan menguraikan akar permasalahan dan pokok permasalahan dengan penjabaran sebagai berikut.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal

Hasil pembangunan yang adil dan merata harus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan dampak nyata pembangunan kepada seluruh rakyat atau masyarakat dalam suatu daerah tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Dampak pembangunan diharapkan dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat tercipta sesuai visi jangka panjang pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian kesejahteraan masyarakat bukanlah tugas yang mudah bagi pemerintah daerah, oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan maka diperlukan monitoring dan evaluasi dengan melihat



target kinerja pembangunan daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan lain-lain.

Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat menunjukkan perkembangan yang positif dalam realisasi pembangunan daerah Kota Samarinda. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda sebagai tolok ukur derajat kesehatan, pendidikan, serta kemampuan ekonomi masyarakat konsisten menunjukkan peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dari 80,20 pada tahun 2019 menjadi 82,61 pada tahun 2023. Angka IPM ini baik secara level regional Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional tergolong tinggi karena berada di atas rata-rata IPM provinsi (78,20 tahun 2023) dan IPM nasional (74,39 tahun 2023). Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, IPM Kota Samarinda menduduki peringkat pertama. Tingginya IPM Kota Samarinda tidak serta merta menjadikan pembangunan sumber daya manusia berhenti, namun beberapa kualitas di aspek lain harus ditingkatkan demi mengisi kekosongan-kekosongan kualitas di beberapa bidang atau sektor pembangunan.

Masalah kualitas SDM di Kota Samarinda berkaitan dengan beberapa faktor. Beberapa hal yang bisa mempengaruhinya antara lain:

- Pendidikan: Kualitas pendidikan di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan, termasuk ketersediaan fasilitas pembelajaran dan kualifikasi guru.
- Akses terhadap Pendidikan: Adanya kesenjangan akses terhadap pendidikan yang menyebabkan beberapa kelompok tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia: Masalah dalam pengelolaan dan pengembangan SDM di pemerintahan dan sektor swasta bisa mempengaruhi kualitas tenaga kerja secara keseluruhan.
- Kondisi Sosial Ekonomi: Tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi kualitas SDM.
- Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pendidikan dan pengembangan SDM yang kurang efektif atau tidak terkoordinasi dengan baik dapat menghambat peningkatan kualitas SDM.



2. Masih tingginya angka kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang dimiliki oleh suatu wilayah atau pun regional, sehingga meminimalisasi maupunantisipasi peningkatan kemiskinan di suatu wilayah sangat diperlukan. Begitu juga di Kota Samarinda, angka kemiskinan di Kota Samarinda menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan disini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran baik makanan maupun non-makanan di bawah garis kemiskinan selama sebulan.

Kemiskinan di Kota Samarinda memang lebih rendah dibandingkan dari angka Provinsi Kalimantan Timur, namun dari seriesnya terlihat suatu fenomena yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Fenomena dari series kemiskinan tersebut adalah angka kemiskinan bersifat fluktuatif dan secara umum terjadi stagnasi angka kemiskinan, sehingga saat angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun, angka kemiskinan Kota Samarinda justru masih tetap bahkan cenderung fluktuatif. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, namun tingkat kemiskinan di Kota Samarinda pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada kondisi awal periode (tahun 2019).

3. Masih tingginya angka pengangguran

Dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Samarinda sebagai wilayah tujuan urbanisasi, pemerintah perlu menyiapkan lapangan pekerjaan yang sangat besar agar mampu menyerap tenaga kerja yang kedepannya akan mengurangi tingkat pengangguran. TPT Kota Samarinda pada tahun 2019 sampai dengan 2023 bersifat fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2023 menjadi 5,92 persen. Namun demikian, capaian pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang sebesar 5,87 persen. Selain itu, jika dilihat perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Timur, tingkat pengangguran Kota Samarinda pada tahun 2023 lebih tinggi yakni sebesar 5,92 persen, sedangkan angka provinsi pada tahun yang sama hanya mencapai 5,31 persen. Hal ini sebagai imbas dari posisi Kota Samarinda yang berstatus kota sekaligus ibukota provinsi sehingga banyak



migrasi penduduk untuk mencari kerja namun belum mendapatkannya (pengangguran).

4. Perekonomian yang belum kuat dan mapan

Dalam pembangunan ekonomi masyarakat secara mikro, faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang dihasilkan serta berujung pada penurunan daya beli masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, laju inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu di suatu wilayah dengan memperhatikan pergerakan Indeks Harga Konsumen. Sebagai salah satu kota besar yang cukup tergantung dari komoditas luar daerah, Kota Samarinda memiliki pergerakan harga yang relatif cepat dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah, laju inflasi tahunan Kota Samarinda cukup fluktuatif dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 laju inflasi mengalami peningkatan hingga mencapai 5,22 persen. Laju inflasi Kota Samarinda pada tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Dimana, inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 5,35 dan Nasional mencapai 5,51

Namun dalam perkembangannya, capaian pembangunan dan hasil-hasilnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingginya kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah merupakan permasalahan yang tidak kunjung terpecahkan dalam beberapa periode pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dirasakan sebagai dampak rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan Kota Samarinda.

Sebagai barometer perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda harus dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di provinsi ini dalam menjalankan pergerakan roda perekonomian wilayah. Hal ini mengingat, Kota Samarinda memiliki potensi dan letak yang strategis sehingga pemberdayaan setiap potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat dioptimalkan.

Pada tahun 2021 dengan adanya adaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19, Kota Samarinda mampu memperbaiki kondisi ekonomi dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 2,78 persen. Kemudian pada tahun 2022, Kota Samarinda mencatat sejarah baru dengan mampu mencapai



pertumbuhan ekonomi sebesar 6,60 persen dan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 8,62 persen.

5. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan, adalah meningkatnya tingkat kualitas dan kondisi jalan. Panjang jalan dalam kondisi baik selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi baik yaitu sepanjang 448.180 km dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 442.631 km, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 733.490 dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan serta kenaikan Kembali hingga menjadi 729.352 km di tahun 2023. Demikian pula dengan Panjang jalan dalam kondisi rusak berat, dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2023 juga mengalami fluktuasi dengan kondisi pada tahun 2023 mencapai 79.022 km atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 58.312 km.

Selain jalan, jaringan irigasi juga diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Panjang jaringan irigasi di Kota Samarinda masih belum memadai untuk mendukung penuh lahan pertanian yang tersedia. Dengan luas areal daerah irigasi seluas 4.126,260 Ha, luasan ini belum dapat dimanfaatkan maksimal untuk menghasilkan beras dikarenakan belum baiknya jaringan irigasi. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas jaringan irigasi perlu diperhatikan dalam rangka mendukung Kota Samarinda mewujudkan ketahanan pangan terutama beras. Permasalahan lainnya yaitu terdapat peningkatan saluran kondisi rusak berat pada Jaringan Irigasi Non Teknis yang semula hanya 6.479 meter pada tahun 2018 menjadi 8.420,55 meter di tahun 2022. Begitu pula dengan saluran kondisi rusak berat pada jaringan irigasi teknis baik pada panjang jaringan primer, panjang jaringan sekunder dan panjang jaringan tersier.



6. Banjir

Permasalahan lain yang mendesak yang dimiliki Kota Samarinda dengan peningkatan jumlah penduduk yang paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai ibukota provinsi adalah masalah penanganan banjir. Kota Samarinda dikenal sebagai daerah yang rendah, sehingga tidak mengherankan apabila setiap tahun terjadi bencana banjir genangan yang melanda 50% kecamatan di ibukota provinsi ini. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir genangan yang melanda Kota Samarinda selama kurang lebih 14 hari, dan pada tahun 2020 terjadi kembali hal serupa. Dengan pertimbangan ini, penanganan banjir menjadi agenda prioritas nomor 1 dalam RPJMD Kota Samarinda periode 2011-2015 dan 2016-2021. Bahkan karena kedudukannya sebagai ibukota provinsi, penanganan banjir di Kota Samarinda memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat melalui instansi vertikal Balai Wilayah Sungai. Di masa datang, Kota Samarinda perlu merencanakan pembangunan kotanya yang dapat menyelesaikan masalah banjir dengan memperbaiki tata dan tingkatan drainase (primer, sekunder, tersier, lokal) dan pembangunan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.

7. Pembangunan belum berbasis lingkungan

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan lingkungan yang sehat, kesehatan masyarakat dapat dijaga serta dapat menurunkan angka kesakitan hingga angka kematian. Rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kota Samarinda dipengaruhi oleh pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ada. Selain itu, kesadaran masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda terhadap pengelolaan sampah di Kota Samarinda dirasakan masih belum maksimal.

Sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup. Eksplorasi tambang batubara secara terus-menerus menyebabkan kerusakan wilayah pinggiran Kota Samarinda hingga berdampak pada



wilayah perkotaan. Sektor industri pengolahan akan menghasilkan efek negatif yakni limbah pabrik yang mana jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi penyebab degradasi kualitas lingkungan hidup baik air, udara, maupun tanah.

Salah satu tujuan dilaksanakannya penataan ruang perkotaan adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih dalam kategori sedang yaitu baru mencapai 59,9 di tahun 2023, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2023 yang hanya 29,92. Permasalahan lain yang dihadapi Kota Samarinda adalah sampah. Indikator Persentase Penanganan Sampah selama kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun di tahun 2022 menjadi hanya 80,14 persen. Dengan tingkat persentase 80,14 persen mengindikasikan bahwa terdapat 19,86 persen sampah yang masih menumpuk atau tidak ditangani dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya armada pengangkutan sampah baik dari segi jumlah dan kelayakan kendaraan maupun kurangnya jumlah TPS yang memenuhi standar pelayanan dikarenakan kesulitan penyediaan lahan. Dengan beban Kota Samarinda yang sebagai Ibukota Provinsi, pusat perdagangan dan jasa, serta industri. Permasalahan ini diperparah lagi dengan peningkatan jumlah penduduk Kota Samarinda sehingga memerlukan perencanaan yang baik dalam hal penanganan masalah sampah yang akan terus meningkat setiap tahunnya.

Masalah lingkungan hidup telah menjadi sorotan terutama dalam kaitannya dengan pembangunan daerah berbasis peningkatan perekonomian. Mulai generasi sekarang hingga seterusnya, pembangunan setiap wilayah harus memikirkan kelanjutan dari kualitas lingkungan hidup agar pembangunan yang tercipta akan menuju masa depan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Untuk mengantisipasi terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup, pemerintah Kota Samarinda harus mengetahui akar permasalahan dan merumuskan program kegiatan sebagai solusi bagi pembangunan berkelanjutan.



3.2. Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis akan memberikan panduan terhadap perumusan perencanaan pembangunan daerah karena dalam isu strategis akan termuat hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah mengingat pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, isu strategis akan menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kota Samarinda selama 20 tahun kedepan termasuk dalam penjabarannya dari tujuan pembangunan hingga program dan kegiatan pembangunan.

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kota Samarinda, isu dunia internasional, serta penelaahan kebijakan pembangunan nasional-regional dan Kabupaten/Kota lain di sekitar Kota Samarinda.

3.2.1. Penelaahan Isu Internasional

Isu strategi internasional memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembangunan nasional sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi wilayah administrasi regional terutama Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Jumlah penduduk dunia menjadi 9,45 Miliar (55% di Asia);
2. Urbanisasi meningkat, penduduk tinggal di perkotaan mencapai 66%;
3. Perubahan geopolitik, peningkatan peran Cina dalam perekonomian dunia;
4. Komitmen penurunan emisi GRK dan tantangan perubahan iklim;
5. Perdagangan global tumbuh 3,4% pertahun, negara berkembang menjadi poros perdagangan;
6. Bergesernya kekuatan ekonomi ke negara-negara berkembang;
7. Dimulainya transisi energi;
8. Gangguan rantai pasok dan bencana iklim yang mengakibatkan kerawanan pangan;
9. Stagflasi ekonomi dan inflasi tinggi akibat perang dagang dan penguasaan sumber daya;



10. Dominasi TIK, bioteknologi, rekayasa genetika, AI, Era Industry 5.0 dan sebagainya; dan
11. Tantangan kesehatan masyarakat.

3.2.2. Penelaahan Isu/Kebijakan Nasional

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Isu jangka panjang nasional yang dapat dijadikan referensi dalam merumuskan isu strategis diantaranya adalah dokumen RPJPN Tahun 2025-2045. Penelaahan terhadap RPJPN bertujuan untuk mengetahui visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional pada setiap tahapan lima tahunan selama 20 tahun kedepan. Pemahaman terhadap rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional memandu RPJPD Kota Samarinda agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Indonesia mengalami kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, namun menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan ke depan yaitu:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN).
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.
7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal.



9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
10. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi.
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.
12. Ditengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.
13. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas.
14. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.
15. Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
16. Kualitas pendidikan yang masih rendah.
17. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
18. Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpah tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.
19. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
20. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
21. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.
22. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik.
23. Belum meratanya kualitas pelayanan publik.
24. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.



25. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.
26. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik.
27. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.
28. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarus utamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
29. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
30. Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan.
31. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan.
32. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.
33. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya, diantaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.
34. Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
35. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi.
36. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya .
37. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
38. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan



penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.

39. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 mengusung visi dan misi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun visi nasional periode tahun 2025-2045 adalah:

“NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”.

Misi/Agenda RPJPN Tahun 2025-2045 terdiri atas 8 (delapan), yaitu:

1. Transformasi Sosial

Untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.

2. Transformasi Ekonomi

Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integritas ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Transformasi Tata Kelola

Untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat.

4. Supremasi Hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi

Dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.

5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi

Dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan resiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.



6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata Kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi Supremasi Hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kestinambungan pembangunan

Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Sasaran utama visi terdiri atas:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan, yaitu:

1. Kesehatan untuk Semua
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Transformasi Digital
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9. Regulasi Yang Adaptif dan Taat Asas Serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif
10. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
11. Stabilitas Ekonomi Makro
12. Ketangguhan Diplomasi
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju



14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif
15. Lingkungan Hidup Berkualitas
16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Lebih lanjut, dalam rancangan Akhir RPJPN, wilayah Kalimantan berpotensi menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis kluster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Seiring dengan kehadiran pembangunan Ibu Kota Nusantara serta berbagai kegiatan prioritas strategis pendukungnya maka pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara” dengan 5 (lima) arah pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di Wilayah Kalimantan.
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.
3. Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang



dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

5. Peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

b. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. Pengembangan kawasan dan konektivitas akan terus dilaksanakan pada tahapan berikutnya untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua.

Wilayah Ibu Kota Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektar dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Secara administratif, Wilayah Ibu Kota Nusantara terletak di antara dua kabupaten eksisting, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku) dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Samboja, dan Sanga-Sanga) serta dibatasi oleh:

- a. bagian utara: Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bagian selatan: Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- c. bagian timur: Selat Makassar; dan
- d. bagian barat: Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Perencanaan Ibu Kota Nusantara terbagi atas dua wilayah perencanaan, yakni: a. Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektare termasuk Kawasan Inti Pusat



Pemerintahan (KIPP); dan b. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare.

Berdasarkan Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green and Beautiful oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2019), pemindahan ibu kota negara (IKN) akan menimbulkan efek positif yang disebabkan oleh adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional atau menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah lain jika lokasi alternatif ibu kota memiliki sumber daya yang memadai dan keterkaitan aktivitas ekonomi positif di wilayah lain.

Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Pemindahan ibu kota ke akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Baik perdagangan dalam tingkat regional, nasional, maupun internasional di Kota Samarinda. Diantaranya akan mendorong adanya kebutuhan terhadap akomodasi tempat untuk pertemuan/rapat bagi pejabat-pejabat daerah, nasional, maupun internasional. Hal ini dikarenakan Kota Samarinda yang berperan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi salah satu tujuan untuk mengadakan pertemuan selain IKN itu sendiri.

Untuk itu, perlu adanya akomodasi berupa tempat-tempat pertemuan (meeting) yang skala pelayanannya berstandar nasional maupun internasional. Adanya kebutuhan terhadap tempat-tempat pertemuan tersebut, akan mendorong perkembangan bisnis MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*). MICE merupakan jasa yang identik dengan pemberian pelayan/services. MICE dapat memberikan kontribusi tinggi secara ekonomi dan menguntungkan bagi banyak pihak, karena industri MICE ini merupakan industri yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Sehingga akan menarik investor dan para pelaku bisnis. Kegiatan bisnis MICE telah membuka lapangan kerja baru, tidak hanya menciptakan tenaga kerja musiman saja, tetapi juga telah menciptakan pekerjaan yang tetap bagi banyak masyarakat. Indonesia dengan wilayah yang strategis serta memiliki daya tarik tersendiri bagi warga negara asing, memberikan peluang bagi tumbuhnya industri MICE.



Selain itu event MICE memberikan manfaat langsung pada ekonomi masyarakat seperti akomodasi, usaha kuliner, cinderamata, guide, hingga transportasi lokal sehingga sejalan dengan tiga strategi yang dijalankan pemerintah yakni pro-pengentasan kemiskinan, pro- penciptaan lapangan kerja, serta pro-pertumbuhan. Berbagai acara meeting, incentive, conference, and exhibition yang berskala internasional yang telah diselenggarakan di Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi media untuk mempromosikan produk-produk lokal Kalimantan atau Samarinda. Berbagai jenis produk ekonomi kreatif yang dipamerkan diharapkan mendorong tumbuhnya pelaku kreatif sehingga dapat mampu mendukung ekonomi regional dan nasional.

Melalui destinasi MICE, beragam peluang untuk kebangkitan usaha kecil dan menengah akan dapat terus berkembang. Peran Pemerintah daerah dalam mempromosikan wilayahnya agar menjadi destinasi para konsumen MICE perlu terus ditingkatkan. Pengembangan industri MICE ini bertujuan untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai tujuan pariwisata yang aman, kerja sama antar daerah dan negara dalam memacu investasi. Adapun keunggulan industri MICE antara lain adalah mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar, lama tinggal (length of stay) lebih lama, dampak promosi ke dunia internasional, jumlah uang yang dibelanjakan, peningkatan infrastruktur, serta memberikan kebanggaan dan memperkuat diplomasi bangsa.

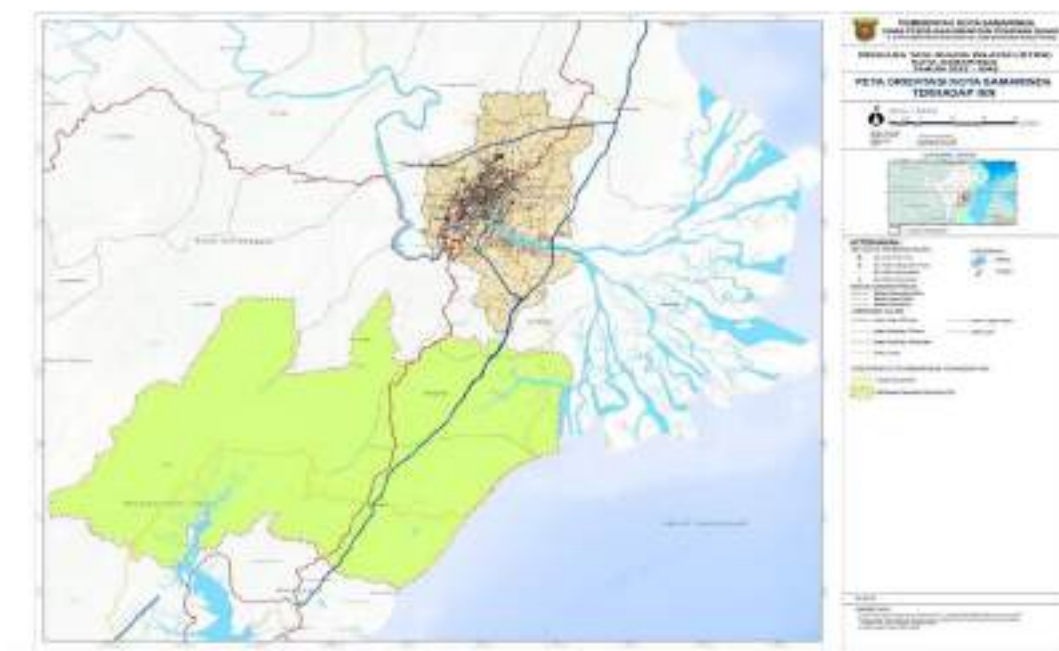
Penyelenggaraan berbagai kegiatan baik itu mega sport event; meeting, incentive, conference, exhibition (MICE); mega entertainment event (live music event yang menjadi trend di dunia saat ini), festival dan lainnya akan mendorong tumbuhnya industri ikutan yang merupakan jagoan dalam urusan perolehan devisa, peningkatan citra, investasi, pengembangan usaha kecil, dan lainnya. Diantaranya adalah meeting/convention industry, sport industry, exhibition industry, music (live music/concert) industry, dan lainnya. Dengan kata lain, peluang pembangunan ekonomi akan semakin terbuka di masa mendatang, asal saja aspek ukuran, manajemen dan pemeliharaan berbagai venue itu terjaga dari waktu ke waktu.

Dengan adanya potensi ekonomi yang ditimbulkan dari rencana pemindahan IKN, akan muncul kebutuhan pembiayaan meliputi pembangunan fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan dalam rangka menunjang fungsi dan keberadaan IKN.

Lokasi Kota Samarinda yang cukup dekat dengan IKN, akan menjadikan Kota Samarinda sebagai alternatif tujuan pendatang maupun pelaku bisnis, sehingga diperlukan infrastruktur penunjang baik sarana maupun prasarana perkotaan maupun regional. pemerintah harus benar-benar memperhatikan perjanjian kerja sama dengan pihak badan usaha atau swasta sehingga kualitas IKN baru beserta infrastruktur pendukung dapat sesuai dengan spesifikasi yang mendukung jalannya pemerintahan dan tidak lagi memberikan beban tambahan bagi APBN maupun APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda.

Gambar 3.1.

Orientasi Samarinda dengan wilayah IKN



c. Pengembangan Tri-City (Tri Kota) IKN, Samarinda, dan Balikpapan

Pembangunan IKN mengedepankan konsep kota pintar yang berkelanjutan dan konsep kolaborasi tri-city (tri kota). Konsep tri-city diusung oleh Nusantara dengan Samarinda dan Balikpapan sebagai kota penyangga. Konektivitas Nusantara akan dibangun melalui konsep tri-city, yaitu Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan sebagai satu kesatuan ekosistem tiga kota yang menggerakkan ekonomi regional dan nasional.

Konsep Tiga Kota yang kokoh, IKN, Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. IKN akan menjadi 'saraf dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan



baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga akan menjadi basis untuk Smart City dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan. Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur. Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Superhub ekonomi IKN juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar ke wilayah mitra Kalimantan Timur yang lebih luas serta akan memainkan peran sebagai 'paru-paru' bagi struktur Tiga Kota. Wilayah Kalimantan Timur yang lebih luas juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan ekowisata dan aktivitas kebugaran terutama di sekitar aset alam dan budaya yang melimpah di bagian utara Kalimantan serta mendukung industri hilir di bidang pertanian melalui produksi dan pengolahan hulu untuk kelapa sawit dan komoditas potensial lainnya.

Samarinda memiliki berbagai potensi dan keunggulan sebagai daerah penyangga IKN. Samarinda dalam sistem perkotaan PKN dan pusat koleksi distribusi bagi wilayah hinterland di sekitarnya. Samarinda memiliki potensi dan keunikan untuk pengembangan kota dan dukungan bagi IKN dalam hal logistik dan pelayanan (pendidikan, rekreasi, transportasi, fasilitas (MICE dan akomodasi).

Pengembangan Tri-City merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memperbaiki tiga kota. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi, dan kualitas hidup secara



keseluruhan di ketiga kota atau wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengembangan Tri-City:

- 1) **Rencana Pengembangan Terpadu:** Membuat rencana pengembangan jangka panjang yang terkoordinasi untuk ketiga kota atau wilayah tersebut. Rencana ini harus mempertimbangkan infrastruktur, transportasi, perumahan, pengembangan ekonomi, dan lingkungan.
- 2) **Infrastruktur Transportasi:** Meningkatkan konektivitas antar-kota melalui pengembangan jaringan transportasi yang efisien, seperti jalan raya, rel kereta api, dan transportasi umum yang terintegrasi.
- 3) **Pusat Ekonomi dan Bisnis:** Mengidentifikasi dan mengembangkan pusat ekonomi atau bisnis yang strategis di masing-masing kota atau wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
- 4) **Pengembangan Perumahan:** Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan berkualitas di ketiga kota atau wilayah untuk mendukung pertumbuhan penduduk dan pekerja yang baru.
- 5) **Pendidikan dan Pelayanan Publik:** Memperbaiki layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan fasilitas umum lainnya agar tersedia secara merata di ketiga kota atau wilayah tersebut.
- 6) **Pengelolaan Lingkungan:** Memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahapan pengembangan, termasuk perlindungan dan pemulihan ekosistem alami serta penerapan teknologi hijau.
- 7) **Promosi Pariwisata dan Budaya:** Memanfaatkan keunikan budaya, sejarah, dan daya tarik pariwisata di masing-masing kota atau wilayah untuk meningkatkan pendapatan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi.
- 8) **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan pengembangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 9) **Pengembangan Teknologi dan Inovasi:** Mendorong investasi dalam teknologi dan inovasi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, teknologi informasi, dan manufaktur, untuk menciptakan lapangan kerja berbasis pengetahuan.



- 10) **Kerjasama Antar Pemerintah:** Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah lokal, provinsi, dan nasional untuk mendukung implementasi rencana pengembangan Tri-City secara efektif dan efisien.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian dari tri-city, ada beberapa langkah yang bisa diambil:

Kolaborasi antar Kota: Tingkatkan kerjasama antara kota-kota yang terlibat dalam tri-city. Ini bisa dilakukan dengan membangun forum atau platform untuk berbagi informasi, koordinasi pembangunan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan di seluruh wilayah.

Pembangunan Infrastruktur: Pastikan infrastruktur yang mendukung sektor jasa dan perdagangan (seperti jalan raya, transportasi publik, dan fasilitas logistik) dikembangkan secara terkoordinasi di seluruh tri-city. Hal ini akan memudahkan mobilitas barang dan orang antar kota, serta meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha.

Promosi Bersama: Lakukan promosi bersama sebagai tri-city untuk menarik investasi dan turisme. Pengembangan kampanye pemasaran bersama yang menonjolkan keunggulan masing-masing kota dalam sektor jasa dan perdagangan dapat meningkatkan citra dan daya tarik tri-city secara keseluruhan.

Pengembangan SDM: Fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam bidang-bidang terkait seperti manajemen bisnis, teknologi informasi, dan pelayanan pelanggan. Ini akan membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor jasa dan perdagangan yang semakin kompleks dan beragam.

Inovasi dan Teknologi: Dorong inovasi dan penggunaan teknologi terbaru di sektor jasa dan perdagangan. Mendorong pembentukan klaster atau ekosistem startup dan industri kreatif di tri-city dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing secara keseluruhan.



Peningkatan Layanan Publik: Pastikan layanan publik seperti perizinan usaha, perpajakan, dan dukungan lainnya disederhanakan dan dipercepat. Hal ini akan membantu mengurangi birokrasi dan meningkatkan iklim investasi di tri-city.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, tri-city dapat mengoptimalkan potensi mereka sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor jasa dan perdagangan, memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk setempat dan ekonomi regional secara keseluruhan.

Kolaborasi antar kota dalam konteks tri-city merupakan langkah kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan:

- 1) Forum Kolaborasi: Mendirikan forum atau platform resmi di mana perwakilan dari setiap kota dapat berkumpul secara teratur. Forum ini dapat digunakan untuk berbagi informasi, mendiskusikan tantangan bersama, dan merencanakan inisiatif kolaboratif.
- 2) Perencanaan Infrastruktur Bersama: Koordinasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur kritis seperti jalan raya, transportasi publik, dan pusat logistik. Hal ini akan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mendukung kebutuhan sektor jasa dan perdagangan di seluruh tri-city.
- 3) Pengembangan Wilayah Ekonomi Bersama: Identifikasi dan pengembangan wilayah ekonomi khusus atau zona industri di wilayah tri-city yang dapat menarik investasi dalam sektor jasa dan perdagangan. Kolaborasi dalam pengaturan perizinan dan fasilitas pendukung lainnya akan mempercepat proses investasi.
- 4) Pemasaran Bersama: Merancang strategi pemasaran bersama untuk mempromosikan tri-city sebagai destinasi yang menarik bagi investasi, bisnis, dan pariwisata. Ini dapat melibatkan kampanye branding yang menggarisbawahi keunggulan masing-masing kota dan sinergi yang diciptakan oleh kolaborasi mereka.
- 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan SDM yang berfokus pada kebutuhan sektor jasa dan perdagangan. Ini dapat mencakup pelatihan dalam manajemen bisnis, teknologi informasi, dan keterampilan lain yang dibutuhkan oleh industri terkait.



- 6) Penelitian dan Inovasi Bersama: Mendorong kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di antara universitas, pusat riset, dan industri di tri-city. Inovasi dalam teknologi dan layanan baru dapat menggerakkan pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan.
- 7) Penyelesaian Masalah Bersama: Menetapkan mekanisme untuk menyelesaikan masalah bersama yang mungkin timbul, seperti regulasi yang berbeda antar kota atau persaingan yang tidak sehat antar perusahaan. Kolaborasi ini akan memperkuat kesatuan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tri-city.

Dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif yang kuat antar kota-kota dalam tri-city, mereka dapat meningkatkan daya saing mereka sebagai kawasan metropolitan yang menarik bagi investasi dan pengembangan sektor jasa dan perdagangan.

Pembangunan infrastruktur adalah kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan di dalam sebuah tri-city. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dalam konteks ini:

- 1) Perencanaan Terpadu: Koordinasi antara kota-kota yang terlibat dalam tri-city untuk merencanakan infrastruktur secara terpadu. Ini meliputi jaringan jalan, transportasi publik, telekomunikasi, dan utilitas lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.
- 2) Prioritaskan Infrastruktur Kunci: Identifikasi infrastruktur yang krusial untuk mendukung pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, seperti akses ke bandara, pelabuhan, pusat logistik, dan pusat kegiatan bisnis. Fokuskan pembangunan pada infrastruktur ini untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi.
- 3) Inovasi dalam Infrastruktur: Pertimbangkan penggunaan teknologi terbaru dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Contohnya termasuk penggunaan energi terbarukan, sistem transportasi pintar, dan digitalisasi layanan publik.



- 4) **Partnership Publik-Swasta:** Melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan skema kemitraan publik-swasta (PPP). Ini dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa memberatkan keuangan publik secara berlebihan.
- 5) **Keterlibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan infrastruktur untuk memastikan bahwa kebutuhan lokal dipertimbangkan. Hal ini juga dapat meningkatkan dukungan publik terhadap proyek-proyek pembangunan.
- 6) **Monitoring dan Evaluasi:** Lakukan pemantauan secara teratur terhadap pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa proyek-proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diinginkan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi dan terencana dengan baik, tri-city dapat meningkatkan daya saing mereka sebagai destinasi investasi dan pusat ekonomi regional yang dinamis dalam sektor jasa dan perdagangan.

Promosi bersama adalah strategi yang sangat penting dalam mengoptimalkan peran sebuah tri-city sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor jasa dan perdagangan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk melakukan promosi bersama:

- 1) **Identifikasi Keunggulan Bersama:** Identifikasi keunggulan kompetitif masing-masing kota dalam tri-city. Hal ini bisa meliputi sektor-sektor unggulan seperti teknologi, pariwisata, pendidikan, atau keunggulan infrastruktur tertentu. Dengan mengetahui keunggulan bersama, dapat dibangun narasi promosi yang kohesif dan kuat.
- 2) **Branding Tri-city:** Buat identitas atau merek bersama untuk tri-city. Ini bisa berupa slogan, logo, atau kampanye pemasaran yang mencerminkan sinergi antar kota dan manfaat kolaborasi mereka dalam sektor jasa dan perdagangan. Branding yang kuat akan membantu membedakan tri-city dari kompetitor dan menarik perhatian investor dan pelaku bisnis.



- 3) Kampanye Pemasaran Bersama: Rancang dan jalankan kampanye pemasaran yang terkoordinasi. Ini bisa meliputi iklan di media cetak dan digital, promosi di acara bisnis dan industri, serta pemasaran langsung kepada pemangku kepentingan potensial seperti investor, pengusaha, dan perusahaan besar.
- 4) Penggunaan Media Sosial: Manfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan tri-city. Buat konten yang menarik dan informatif tentang keunggulan ekonomi, infrastruktur, gaya hidup, dan kesempatan bisnis di tri-city. Libatkan juga penduduk lokal, bisnis lokal, dan influencer untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan interaksi.
- 5) Partisipasi dalam Pameran dan Konferensi: Hadiri pameran perdagangan, konferensi bisnis, dan acara industri baik di dalam maupun di luar negeri sebagai tri-city. Ini adalah kesempatan untuk membangun jaringan, meningkatkan visibilitas, dan mempresentasikan keunggulan bersama di depan khalayak internasional.
- 6) Kemitraan dengan Kamar Dagang dan Asosiasi Bisnis: Bangun kemitraan dengan kamar dagang lokal, asosiasi bisnis, dan lembaga lainnya untuk mendukung promosi bersama. Kolaborasi dengan pihak-pihak ini dapat memperluas jangkauan promosi dan memberikan dukungan yang lebih besar dalam menarik investasi dan pengembangan bisnis.
- 7) Evaluasi dan Penyesuaian: Lakukan evaluasi secara teratur terhadap efektivitas kampanye promosi bersama. Identifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Selalu siap untuk menyesuaikan strategi promosi agar tetap relevan dan efektif dalam menjangkau target audiens.

Dengan mengadopsi pendekatan promosi bersama yang terencana dan terkoordinasi, tri-city dapat memaksimalkan potensi mereka sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dalam sektor jasa dan perdagangan.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek kunci dalam memperkuat sektor jasa dan perdagangan dalam konteks tri-city. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pengembangan SDM:



- 1) Analisis Kebutuhan SDM: Lakukan analisis mendalam terkait kebutuhan tenaga kerja di sektor jasa dan perdagangan di setiap kota dalam tri-city. Identifikasi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh industri-industri utama di wilayah tersebut.
- 2) Program Pelatihan dan Sertifikasi: Berdasarkan analisis kebutuhan, rancang dan implementasikan program pelatihan yang relevan. Ini bisa meliputi pelatihan teknis, manajerial, atau keterampilan soft skills yang diperlukan dalam lingkungan kerja modern.
- 3) Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Sekolah Vokasi: Jalin kemitraan dengan perguruan tinggi, institusi pendidikan vokasi, dan pusat pelatihan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini termasuk menyediakan magang atau program kerja sama yang menghubungkan lulusan dengan pelaku bisnis lokal.
- 4) Program Pengembangan Karir: Buat program pengembangan karir yang jelas dan terstruktur bagi karyawan yang ingin maju dalam karir mereka di sektor jasa dan perdagangan. Dukung pengembangan kompetensi mereka melalui pelatihan berkelanjutan, mentoring, dan kesempatan rotasi pekerjaan.
- 5) Inisiatif Pendidikan Digital: Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pastikan bahwa SDM di tri-city memiliki keterampilan digital yang diperlukan. Ini termasuk pemahaman tentang teknologi informasi, e-commerce, analisis data, dan keamanan cyber.
- 6) Pendanaan dan Dukungan Keuangan: Dukung program pengembangan SDM dengan pendanaan yang memadai, baik dari sektor publik maupun swasta. Bantu karyawan dan calon tenaga kerja untuk mengakses beasiswa atau pinjaman untuk pendidikan yang dapat meningkatkan kualifikasi mereka.
- 7) Evaluasi dan Umpan Balik: Lakukan evaluasi rutin terhadap program pengembangan SDM untuk mengukur keberhasilan dan efektivitasnya. Dapatkan umpan balik dari pelaku bisnis dan individu yang terlibat untuk terus meningkatkan program yang ada.

Dengan fokus yang kuat pada pengembangan SDM yang berkelanjutan dan relevan, tri-city dapat menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing dalam ekonomi global saat ini, serta memperkuat basis industri jasa dan perdagangan mereka secara keseluruhan.



Inovasi dan teknologi memainkan peran kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan di dalam sebuah tri-city. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan inovasi dan pemanfaatan teknologi:

- 1) **Klaster Inovasi:** Mendorong pembentukan klaster inovasi di tri-city, di mana perusahaan, startup, dan lembaga riset dapat berkolaborasi untuk mengembangkan solusi baru dan produk inovatif dalam sektor jasa dan perdagangan. Klaster ini bisa dihubungkan dengan universitas atau institusi riset untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan kerjasama.
- 2) **Inkubator dan Akselerator Startup:** Dukung pembentukan inkubator dan akselerator startup yang fokus pada sektor jasa dan perdagangan. Ini dapat membantu startup untuk mengembangkan ide-ide inovatif menjadi produk yang dapat dijual dan dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan di tri-city.
- 3) **Investasi dalam:** Dorong investasi dalam penelitian dan pengembangan di sektor jasa dan perdagangan. Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mendukung proyek-proyek tersebut yang berpotensi menghasilkan inovasi baru dan meningkatkan daya saing regional.
- 4) **Digitalisasi Proses Bisnis:** Dorong digitalisasi proses bisnis di perusahaan-perusahaan di tri-city. Ini meliputi penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasok, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam sektor jasa.
- 5) **Pelatihan Teknologi:** Sediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi bagi tenaga kerja di tri-city. Ini termasuk pelatihan dalam pemrograman, analisis data, keamanan cyber, dan teknologi informasi lainnya yang relevan dengan kebutuhan industri jasa dan perdagangan.
- 6) **Lingkungan Pro-Inovasi:** Buat lingkungan yang mendukung inovasi dan kolaborasi di tri-city. Ini termasuk kebijakan yang memfasilitasi pertumbuhan startup, insentif pajak untuk investasi, dan platform untuk berbagi ide dan pengalaman antar perusahaan.
- 7) **Pemanfaatan Teknologi Baru:** Tinjau dan terapkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), blockchain,



dan teknologi lainnya yang dapat mengubah cara bisnis dilakukan di sektor jasa dan perdagangan. Manfaatkan potensi teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan solusi baru untuk tantangan industri.

Dengan mengintegrasikan inovasi dan teknologi secara strategis, tri-city dapat meningkatkan daya saing mereka sebagai pusat ekonomi yang modern dan adaptif, serta menarik investasi dan bakat terbaik dalam sektor jasa dan perdagangan.

Peningkatan pelayanan publik adalah kunci dalam mendukung pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan di sebuah tri-city. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan layanan publik:

- 1) Digitalisasi Layanan: Mulailah dengan digitalisasi layanan publik yang ada. Ini termasuk memperkenalkan platform online untuk pengurusan perizinan usaha, pembayaran pajak, dan layanan lainnya yang dapat diakses secara elektronik oleh penduduk dan bisnis di tri-city.
- 2) Peningkatan Efisiensi: Evaluasi proses internal pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Penyederhanaan proses perizinan dan pengurangan birokrasi akan membantu mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi di tri-city.
- 3) Peningkatan Infrastruktur Publik: Pastikan infrastruktur publik seperti jalan, transportasi publik, sistem air minum, dan sanitasi mendukung kebutuhan industri jasa dan perdagangan. Pembangunan infrastruktur yang tepat akan meningkatkan kualitas hidup penduduk dan menarik lebih banyak investasi.
- 4) Pelatihan dan Pengembangan SDM di Pemerintahan: Sediakan pelatihan untuk pegawai pemerintah dalam hal manajemen pelayanan publik yang efektif dan efisien. Keterampilan seperti manajemen proyek, komunikasi publik, dan pemahaman terhadap kebutuhan sektor jasa dan perdagangan dapat membantu meningkatkan pengiriman layanan yang lebih baik.
- 5) Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat: Libatkan masyarakat dan perusahaan lokal dalam proses perencanaan dan pengembangan layanan publik. Melibatkan stakeholders utama dapat membantu



memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang diimplementasikan relevan dengan kebutuhan pasar dan memenuhi harapan masyarakat.

- 6) **Monitoring dan Evaluasi Kinerja:** Implementasikan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja pelayanan publik secara teratur. Dengan memonitor pencapaian dan mendengarkan umpan balik dari pengguna layanan, pemerintah daerah dapat membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan dan efektivitas layanan.
- 7) **Kemitraan Publik-Swasta:** Bangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk meningkatkan pengiriman layanan publik. Contoh kemitraan dapat mencakup penyediaan layanan teknologi informasi, manajemen fasilitas, atau proyek-proyek infrastruktur yang dikelola bersama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan sektor jasa dan perdagangan, tri-city dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kota Samarinda, telah disusun master plan pengembangan dan penataan kota. Hasil kajian tersebut diuraikan sebagai berikut:



Tabel 3.1
Peran dan Fungsi Kabupaten/Kota di Sekitar Kota Samarinda

PERAN & FUNGSI	BONTANG	SAMARINDA	IKN (PPU)	BALIKPAPAN	TENGGARONG (KUKAR)
IKN	-	-	V	-	-
PKN	V	V	V	V	V
PKSN	-	-	-	-	-
PKW	-	-	-	-	-
PKWp	-	-	V	-	-
Pusat Pertumbuhan Kelautan	-	Sentra Industri Maritim	Pelabuhan & sentra kegiatan Perikanan	Sentra Industri Maritim	-
Perguruan Tinggi	V	V	-	V	V
Rumah Sakit	V	V	V	V	V
Hotel Berbintang	V	V	-	V	V
Bandara	V	V	V	V	-
Pelabuhan	V	Pengumpul	Pengumpul	Utama	V
Instansi Pemerintah	Pusat	Pusat, Provinsi	Pusat	Pusat	Pusat
Kawasan Industri	V	V	V	V	V

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Tabel 3.2
Isu Strategis Kota Samarinda Berdasarkan Hasil Analisis Masterplan

No	Klasifikasi Isu	No	Isu Strategis	No	Keterangan
A.	Peran Tri Kota	1	Penguatan peran Kota Samarinda pada tahap pembangunan IKN	1	Menguatkan peran Kota Samarinda dalam Tiga Kota pada tahap awal, tahap lanjut, dan tahap pematangan kawasan IKN
				2	Menguatkan peran Kota Samarinda sebagai super hub regional
		2	Transformasi ekonomi Kota Samarinda menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	1	Tidak lagi terdapat perpanjangan izin kegiatan pertambangan di Kota Samarinda
				2	Meningkatkan nilai komoditas unggulan pada sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian)
B.	Lingkungan	1	Peluang untuk pengembangan dan pembangunan kota: Aspek Daya dukung dan daya tampung lingkungan kota Samarinda Potensi pengembangan wilayah ke selatan (Kecamatan Palaran)	1.	Penggunaan lahan cenderung masih di pusat Kota Samarinda, potensi wilayah pengembangan ke arah utara (Samarinda Utara, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang), timur (Sambutan), dan selatan (Palaran).
				2.	Potensi pengembangan wilayah ke arah utara



No	Klasifikasi Isu	No	Isu Strategis	No	Keterangan
			yang memang diarahkan sebagai PPK		(Samarinda Utara) namun menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagai pusat penelitian hutan tropis lembab Unmul.
				3.	Potensi pengembangan wilayah ke selatan (Kecamatan Palaran) yang memang diarahkan sebagai PPK Bukuan.
		2.	Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi dan jalur perekonomian regional	1.	Kebijakan pengembangan pelabuhan penumpang dan pelabuhan peti kemas yang lebih performa di Kecamatan Palaran
				2.	Membatasi jenis kapal yang terlalu besar dengan dibangunnya Jembatan Mahkota di sisi sebelah barat Pelabuhan Yos Sudarso
		3.	Pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai Wajah Kota Samarinda		Sisi utara Sungai Mahakam yang termasuk dalam Tepian Teras Mahakam sudah tercover, dibutuhkan perencanaan dan penataan tepian di bagian selatan sungai Mahakam
		4.	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kepentingan pengembangan kota	1.	Bekas penambangan batubara meninggalkan kolong-kolong, belum terdapat kondisi nyata terkait pengembalian fungsi lahan eks tambang
		5.	Penanganan area resiko bencana dan penyediaan infrastruktur penanganan bencana di Kota Samarinda	1.	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) untuk Kota Samarinda tahun 2022 adalah Sedang dengan skor 92,77 (terendah bila dibandingkan Kab/Kota lainnya di Kalimantan Timur), dengan resiko bencana tertinggi adalah Banjir (Tinggi), Cuaca Ekstrem (Tinggi), Kekeringan (Sedang), Konflik Sosial (Sedang), Longsor (Sedang)
		6.	Aktivitas kegiatan Kota Samarinda cenderung tidak ramah lingkungan		
	C.	Tata Kota	1. Peningkatan dan pengendalian perkembangan permukiman perkotaan (kumuh, sprawl, tepian sungai, kampung budaya)	1.	Pengupdatean data kawasan kumuh sebanyak 83 lokasi pada 8 kawasan kumuh di Kota Samarinda
				2.	Pelestarian kawasan bernilai budaya (Kota Lama Samarinda Seberang dan Kampung Budaya Pampang)
				3.	Penataan kawasan/kampung di area tepian di bagian utara Sungai Mahakam



No	Klasifikasi Isu	No	Isu Strategis	No	Keterangan
		2.	Pemenuhan fasilitas skala kota untuk peningkatan kualitas taraf hidup penduduk di masa mendatang	1.	Belum intensnya penyediaan fasilitas akomodasi penginapan dan pariwisata skala regional dan nasional
				2.	Belum intensnya penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun sarana publik dalam skala massif
		3.	Pemenuhan infrastruktur yang mencukupi dengan kualitas yang lebih baik	1.	Penyediaan kebutuhan air bersih untuk pelayanan skala kota, antisipasi kemungkinan kondisi intrusi air laut
				2.	Penanganan drainase dalam pencegahan risiko genangan air
				3.	Pengelolaan persampahan dengan baik disaat Capaian Akses Aman
		4.	Pengembangan sistem transportasi berbasis sistem angkutan umum massal (moderen, rendah karbon, hemat energi)	1.	Pengembangan jaringan transportasi darat, penyeberangan sungai, dan alur pelayaran
				2.	Rencana pengembangan KA Trans Kalimantan (angkutan umum berbasis rel di Pulau Kalimantan)
				3.	Rencana pembangunan jalan tol Samarinda - Bontang
				4.	Rencana pengembangan skytrain
		5.	Integrasi objek dan Kawasan strategis kota menjadi kawasan perkotaan baru yang layak huni	1.	Beberapa aset daerah yang tidak terkelola dan termanfaatkan dengan optimal (decline): Stadion Utama Kaltim, Area Pasar Rakyat Harapan Baru
		6.	Menyediakan ruang ekonomi baru dengan mengembangkan dan membangun pusat kegiatan/komersial sejalan dengan pembangunan permukiman baru yang terkoneksi dengan SAUM	1.	Perencanaan pembangunan kota baru yang modern dengan integrasi penguatan Sistem Angkutan Umum Massal

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Gambar 3.2.

Dasar Pertimbangan Penentuan Branding Kota Samarinda



Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Berdasarkan hasil analisis, ditetapkan Branding kota:

SAMARINDA: SPIRIT OF MAHAKAM (Semangat Mahakam)

SPIRIT OF MAHAKAM memiliki makna “Sungai Mahakam sebagai pemersatu Kota Samarinda bagian utara dan selatan Sungai Mahakam”. Kota Samarinda yang tidak hanya disatukan oleh Sungai Mahakam secara fisik namun juga dari aktivitasnya yang saling melengkapi. Oleh karena itu, memadukan dan



menyeimbangkan perkembangan kedua sisi menjadi penting. Wilayah Utara sudah memiliki pengembangan yang cukup pesat dan keterbatasan dari sisi fisik lingkungan dibandingkan wilayah selatan. Wilayah selatan sendiri memiliki potensi penghubung dengan IKN, pengembangan stimulan baru, persebaran kegiatan, dan pengembangan dengan prinsip keberlanjutan melalui implementasi KPI.



Gambar 3.3.
Kebutuhan dan Konsep Penanganan

	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP PENANGANAN
UTARA	1. Peningkatan kualitas mode transportasi antara kawasan 2. Penataan kawasan: penanganan kawasan kumuh tingkat Kota, Beautifikasi kawasan 3. Mitigasi kebencanaan terutama banjir dan longsor	1. Aksesible antara pusat-pusat kegiatan 2. Beberapa penanganan terkait revitalisasi maupun beautifikasi sudah terlaksana/dalam waktu pelaksanaan dan menggunakan pendanaan daerah. Dapat menerapkan Creative City 3. Penerapan Resilient City
KORIDOR SUNGAI	1. Penataan kawasan sebagai Wajah Kota Samarinda 2. Ruang pemersatu/polebutir antara sistem kegiatan di utara dan di selatan Sungai Mahakam	1. Penerapan waterfront city 2. Menghidupkan Sungai Mahakam tidak hanya menjadi badan penampung air namun menjadi Teras Rumah Samarinda, menerapkan prinsip-prinsip yang dapat mendukung Creative city
SELATAN	1. Pengembangan baru kawasan (revitalisasi kawasan eks-tambang, penataan kawasan transmigrasi pembukaan lahan baru) 2. Palaran sebagai kecamatan yang terdekat menuju Kota Balikpapan dan IKN 3. Pengembangan jalan arteri primer (Jalan Soekarno Hatta) selain jalan tol 4. Peningkatan kualitas jalan kolektor 5. Integrasi objek-objek strategis skala Kota (Stadion, Pusat Pemerintahan Baru, Pusat Perkotaan Baru) 6. Meningkatkan hubungan wilayah barat dan timur di bagian selatan Sungai Mahakam	1. Pengembangan baru kawasan dapat menerapkan sistem sponge city, baik penerapan pada tingkat kavling hunian, maupun penerapan drainase kawasan yang baik. 2. Aksesible antara pusat-pusat kegiatan

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Gambar 3.4.
Konsep Penanganan

S SPONGE CITY	W WATERFRONT CITY	R RESILIENT CITY	C CREATIVE CITY
Pendekatan adaptif dan memiliki resiliensi tinggi terhadap air pada berbagai skala SKALA BANGUNAN Aturan ketentuan bangunan zero-runoff SKALA BLOK Sekolah drainase hybrid kombinasi dengan beresale SKALA KAWASAN Komposisi RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Green Belts	Sungai Mahakam sebagai wajah Kota Samarinda ORIENTASI BANGUNAN Aturan ketentuan bangunan menghadap sungai INDUSTRI Pemindahan industri yang tidak terkait dengan sungai VARIASI FUNGSI Variasi fungsi bangunan di tepi sungai	Kota yang mampu mengantisipasi ancaman dan memiliki kemampuan untuk pulih TRANSFORMASI EKONOMI Antisipasi dampak kebijakan pemberhentian tambang MITIGASI BENCANA Mitigasi bencana banjir dan longsor CLIMATE CHANGE RESILIENCY Menghindari pengungkutan hutan dan melindungi area tepi	Menggabungkan industri kreatif, seni, dan budaya sebagai pendorong ekonomi dan daya tarik kota, mendorong inovasi dan ekspresi budaya PELESTARIAN KAMPUNG TRADISIONAL Pelestarian Kampung Adat, Kampung Nelayan dan DUKUNGAN KOMUNITAS Menyediakan ruang-ruang untuk komunitas kreatif

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Gambar 3.5.
Tahap Pengembangan Masterplan



Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

3.2.3. Penelaahan Isu/Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam penyusunan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045, dilakukan penelaahan terhadap dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045 untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah. Beberapa pokok substansi dari RPJPD Provinsi Kalimantan Timur diuraikan pada bagian ini.

Isu strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Pemerataan pembangunan wilayah
3. Akselerasi transformasi ekonomi
4. Pemenuhan infrastruktur dasar serta konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi
5. Peluang pembangunan superhub ekonomi dan Mitra IKN
6. Kualitas lingkungan hidup serta penurunan emisi GRK
7. Tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel menuju *world class government*
8. Pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan



Berdasarkan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045, Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur adalah:

**KALTIM SEJAHTERA 2045;
PENGGERAK SUPERHUB EKONOMI NUSANTARA YANG MAJU,
ADIL DAN BERKELANJUTAN**

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kalimantan Timur. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat KALTIM yang Sejahtera dengan memperhatikan posisi Provinsi Kalimantan Timur sebagai superhub ekonomi IKN dan mitra IKN. Penjelasan makna visi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- a. **Sejahtera**; Konsep sejahtera dimaknai dengan maju masyarakatnya, adil pembangunannya, dan berkelanjutan sosial ekonominya. Ketiga aspek itu menjadi indikator penting yang harus dicapai agar Kalimantan Timur bisa sejahtera pada tahun 2045.
- b. **Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara**; Provinsi Kalimantan Timur sebagai superhub ekonomi IKN menjadi pelaku utama perwujudan Pulau Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara, yang mengarah pada pengembangan pusat aglomerasi dan sektor ekonomi baru berbasis kluster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
- c. **Maju**; Kalimantan Timur yang mampu tumbuh beriringan dengan kemajuan IKN dan menjadi Mitra yang mampu memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik dari aspek perekonomian, SDM, infrastruktur, dan lingkungan; Kalimantan Timur secara optimal menjalankan peran sebagai Superhub ekonomi IKN dan Mitra IKN; Masyarakat Kalimantan Timur mampu bersaing di era perkembangan teknologi dan modernisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan; Kemajuan IPTEKIN tumbuh pesat dan diimplementasikan; Perekonomian di Kalimantan Timur digerakkan dari sektor sekunder dan tersier. Inklusivitas perekonomian daerah meningkat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
- d. **Adil**; Kehidupan yang memberi kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh masyarakat untuk dapat memenuhi hak-hak



ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dalam rangka kehidupan yang lebih bermutu dan maju; seluruh masyarakat memperoleh pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, lebih mudah dan bermutu; Disparitas pembangunan antar-wilayah berkurang; kemudahan memperoleh akses pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi/kemampuan; serta mendapatkan hak pelayanan publik yang setara dan perlindungan yang sama di depan hukum.

- e. **Berkelanjutan**; Jika transformasi ekonomi telah berjalan optimal, maka akan menghasilkan struktur perekonomian yang tidak lagi didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat ekstraktif; sektor industri bernilai tambah tinggi, jasa dan perdagangan mendominasi kontribusi struktur ekonomi Kaltim; Pelaksanaan aktivitas dilakukan secara lestari dan seimbang antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan; Menjadi kontributor utama dalam penurunan emisi GRK.

Sasaran visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 terdiri atas 5 (lima) dengan beberapa indikator sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.3
Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045			
No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	225,27 - 226,88	850,00 – 1.289,73
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	32,92	127,09
	c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	17,75 – 18,00	32,32 – 44,09
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,05-5,67	0,07-0,57
	b. Rasio gini (Indeks)	0,310-0,321	0,254-0,298
3	Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah		
	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,28 – 6,58	5,99 – 7,55
	b. Indeks Daya Saing Daerah	3,4	4,08
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia		
	Indeks Modal Manusia	0,57	0,77
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	40,89	96,37

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 meliputi:



1. Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera
2. Transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan peran sebagai superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara
3. Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas
4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi daerah
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan

3.2.4. Penelaahan Isu/Kebijakan Kota Samarinda

a. Telaahan Isu Strategis Berdasarkan Aspek Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan aspek pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) isu strategis utama Kota Samarinda, sebagai berikut:

1. Isu Lingkungan

Isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kota Samarinda yang terkait lingkungan adalah terkait pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan dan penanggulangan banjir Kota Samarinda.

a. Pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat *concern* terhadap antisipasi *global warming* terutama untuk mengatasi degradasi lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Menindaklanjuti hal tersebut, Provinsi Kalimantan Timur merumuskan sebuah gerakan bernama *Kaltim Green* dimana setiap penentuan arah kebijakan harus berfokus pada kelanjutan lingkungan hidup. Berawal dari komitmen terhadap arus pemikiran agar pembangunan harus menemukan titik tengah antara berbagai kekuatan dan kepentingan yang kerap saling bertolak belakang maka



deklarasi *Kaltim Green* dapat dianggap sebagai salah satu cikal bakal transformasi (pergerakan) perekonomian berbasis lingkungan.

Kaltim Green didefinisikan sebagai kondisi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan serta program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kaltim Hijau menandai dimulainya sebuah proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (*green development*) dengan basis tata guna pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan (*smart environment and smart development*).

Menindaklanjuti perihal tersebut, untuk mendukung terselenggaranya *Kaltim Green*, maka Kota Samarinda harus menjadi barometer wilayah se-Provinsi Kalimantan Timur dalam mendeklarasikan dan merealisasikan pembangunan berkelanjutan terutama dalam pembangunan perekonomian dan sosial. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan daerah yang *concern* terhadap lingkungan hidup beserta realisasi pembangunan berkelanjutan yang selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh instansi terkait. Selain itu, perencanaan tata ruang wilayah Kota Samarinda harus berlandaskan asas berkelanjutan pula dengan implementasi peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Samarinda serta mengatasi degradasi kualitas lingkungan hidup yang memasuki status kritis.

b. Penanggulangan Banjir di Kota Samarinda

Penyebab terjadinya banjir di Samarinda ada dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dimaksud adalah topografi wilayah, curah hujan, pasang sungai, banjir kiriman, dan lain-lain. Faktor alam ini tidak bisa dikendalikan, walaupun bisa memerlukan biaya yang cukup besar. Faktor manusia yang dimaksud adalah pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan infrastruktur seperti pemukiman dan kebutuhan lainnya. Selain itu, diikuti pula peningkatan penyediaan lahan untuk usaha seperti pertanian, perkebunan, maupun industri.



Peningkatan kebutuhan infrastruktur menyebabkan daerah yang semula menjadi daerah resapan air berubah fungsi menjadi pemukiman maupun daerah industri. Daerah resapan air yang berkurang mengakibatkan jika terjadi hujan air yang turun tidak dapat meresap ke dalam tanah melainkan menggenang dan menyebabkan banjir. Drainase yang buruk juga dapat mengakibatkan banjir. Banjir yang terjadi menghambat aktivitas di Kota Samarinda.

Untuk upaya penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Samarinda maka diperlukan untuk menambah daerah resapan air dan memperbaiki sistem drainase yang ada di Kota Samarinda terutama di daerah rawan banjir.

2. Isu Ekonomi

Isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kota Samarinda yang terkait Ekonomi adalah terkait Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Samarinda, transparansi tata kelola pemerintahan (*Good Governance* dan *Clean Government*) penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi, Persiapan Kota Samarinda sebagai Mitra IKN, dan Perwujudan Kota Samarinda menjadi Smart City.

a. Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Samarinda

Pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat dan tersentralisasi di pusat kota secara simultan telah memberikan beban pengelolaan kota Samarinda. Besarnya tekanan yang dialami menyebabkan kebijakan pengelolaan perkotaan seringkali tidak efisien dan cenderung mengikuti mekanisme pasar yang lebih mengejar tujuan ekonomi jangka panjang dalam pemanfaatan tanah-tanah kota. Ketika pengelolaan kota menjadi beban, dan berdampak pada inefisiensi kinerja pemerintahan (dalam jangka menengah dan panjang) maka opsi pemindahan pusat pemerintahan menjadi opsi yang tidak terelakan.

Berikut merupakan beberapa alasan penting mengenai pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda.

- Gedung/bangunan yang digunakan untuk urusan pemerintahan kurang representatif, selain desain interior/ tata ruang yang belum mencerminkan suatu perkantoran modern, jumlah PNS dan jumlah



urusan pemerintahan yang terus bertambah juga mengakibatkan ruangan kantor semakin semrawut karena daya tampung yang tidak mencukupi.

- Lingkungan di sekitar kompleks Balaikota Samarinda telah dikelilingi oleh pusat-pusat keramaian seperti mall, hotel, bank, GOR, dan lain sebagainya. Jarak tempuh yang diperlukan untuk menuju ke pusat keramaian tersebut terbilang cukup dekat. Hal ini mengakibatkan potensi pegawai untuk “mencuri waktu” semakin besar. Selain itu, lingkungan ideal untuk untuk suatu perkantoran apalagi pusat pemerintahan sekaligus sebagai ibukota provinsi adalah lingkungan yang memerlukan ketenangan, kenyamanan, jauh dari kebisingan dan keramaian. Dengan kata lain, idealnya pusat pemerintahan yang identik dengan ibukota sebaiknya dipisahkan dari *image* perdagangan, jasa, maupun industri
- Desentralisasi dan pemerataan, dalam hal ini untuk mengurangi beban pembangunan yang terpusat di Kecamatan Samarinda Kota dan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah Kota Samarinda
- Wilayah Kecamatan Samarinda Kota mengalami kepadatan penduduk serta kemacetan lalu lintas yang parah, sehingga perpindahan dapat mengurangi tekanan ini
- Meningkatkan kualitas hidup dengan memilih lokasi yang memiliki lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat

b. Transparansi tata kelola pemerintahan

Pemerintahan Kota Samarinda sebagai pelaksana inti perencanaan pembangunan daerah memiliki tugas sebagai agen perubahan menuju sebuah reformasi pemerintahan berupa reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik,antisipasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan pemerintahan, hingga peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur negara terutama pegawai pemerintahan Kota Samarinda. Oleh karena itulah, untuk mencapai *Good Governance* dan *Clean Government* perlu adanya transparansi tata kelola pemerintahan Kota Samarinda untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Samarinda.



c. Penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi dan Daerah yang Berdampingan dengan IKN

Status sebagai ibukota provinsi menjadikan Kota Samarinda menjadi salah satu kawasan yang paling sering dikunjungi sehingga menjadikan infrastruktur perhubungan mendapat perhatian lebih dalam pengembangannya. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya karena kemudahan akses dari Kota Samarinda ke wilayah sekitar.

Selain itu, Kota Samarinda berada di wilayah strategis Provinsi Kalimantan Timur yakni berada pada salah satu pusat wilayah yang langsung dikelilingi oleh Kabupaten/Kota lain seperti Kota Balikpapan, Kota Bontang, maupun Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut menjadikan Kota Samarinda maupun akses menuju Kota Samarinda harus ditingkatkan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar selaras sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan provinsi. Terpecahkannya kebuntuan koordinasi pusat –provinsi dalam pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda menjadi isu positif bagi pengembangan Kota Samarinda di masa datang

d. Perwujudan Kota Samarinda menjadi *Smart City*

Konsep manajemen kota cerdas dipercaya oleh banyak pihak, saat ini, sebagai jawaban oleh berbagai permasalahan kota-kota di Indonesia. Pelayanan masyarakat kota yang kian kompleks dalam manajemen kota cerdas dilakukan dengan mengintegrasikan semua sektor yang ada untuk menanggulangi berbagai permasalahan kota seperti ketersediaan listrik, air bersih, banjir, kemacetan, dan lain-lain. Inisiator *smart city* menegaskan bahwa semua masalah kependudukan dapat diselesaikan melalui integrasi di segala sektor khususnya bantuan infrastruktur teknologi informasi atau *Broadband IT*.

Dalam penanganan (manajemen) kota, Samarinda kini menghadapi kompleksitas antara lain pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam karena adanya migrasi, timbulnya pemukiman kumuh, krisis energi, banjir, penurunan kualitas infrastruktur publik, hingga permasalahan sosial yang semakin kompleks seperti kriminalitas.



Sebagai ibukota provinsi yang mencerminkan “wajah” Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda harus mau dan mampu menapaki jalan menuju *Smart City* di masa datang. Tujuan dari realisasi *Smart City* adalah menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Layak Huni terutama bagi generasi mendatang melalui optimalisasi berbagai hal seperti cerdas berkehidupan (*smart living*), cerdas masyarakat (*smart people*), cerdas tata kelola pemerintahan (*smart governance*), cerdas ekonomi (*smart economy*), cerdas pengembangan (*smart development*), dan cerdas lingkungan (*smart environment*).

Untuk mencapai *smart city*, Kota Samarinda harus tetap memperhatikan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Jika dalam usaha mencapai *smart city* tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan maka lingkungan akan menjadi rusak sebagai akibat dari tidak adanya pembangunan yang berkelanjutan yang tidak memperhatikan lingkungan.

3. Isu Sosial

Isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kota Samarinda yang terkait sosial adalah terkait Pembangunan Kota Samarinda berbasis *gender*, Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah sosial masyarakat, dan Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.

a. Pembangunan Kota Samarinda berbasis *gender*

Dalam melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam hal mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan serta tindak lanjutnya dari laporan panel tingkat tinggi (*High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP*) perihal pergeseran transformatif pada pelaksanaan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka Kota Samarinda dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan faktor kesetaraan *gender*.

Kesetaraan *gender* merupakan sebuah kesamaan kondisi yang didapatkan baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional. Kesetaraan *gender* dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus meliputi



penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Selain kesetaraan gender, terdapat juga keadilan gender yang merupakan sebuah proses menuju perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender ini akan membawa pada sebuah kondisi dimana tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan.

b. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah sosial masyarakat

Permasalahan perkotaan pada umumnya adalah urbanisasi yang tidak terkontrol oleh pemerintah kota sehingga menimbulkan berbagai efek negatif. Begitu juga dengan Kota Samarinda, sebagai ibukota provinsi yang memiliki daya tarik berupa kelengkapan infrastruktur dasar, pergerakan ekonomi berbagai sektor terutama jasa (perdagangan, akomodasi, dan sebagainya), hingga peluang penciptaan lapangan usaha mikro yang luas, menjadikan Kota Samarinda bagaikan “gula” bagi para “semut” yang berada di daerah sekitar Kalimantan Timur, bahkan dari luar Pulau Kalimantan.

Peningkatan penduduk yang signifikan karena adanya migrasi jika ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya akan menjadi potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Samarinda. Namun jika sebaliknya, akan menimbulkan permasalahan sosial seperti kriminalitas, munculnya wilayah kumuh, kemacetan, timbunan sampah, hingga penggunaan fasilitas publik tidak pada tempatnya, yang saat ini masih menjadi gambaran umum Kota Samarinda.

c. Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang menjadi sebuah potensi dasar bagi pelaksanaan pembangunan manusia terutama dalam pergerakan roda perekonomian. Oleh karena itu, penting halnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan dan pembenahan sarana prasarana dasar kehidupan yang berhubungan langsung dengan



masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan.

Daya saing sumber daya manusia akan menjadi salah satu penentu utama pembangunan Kota Samarinda dengan tujuan membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Permasalahan dan isu strategis merupakan pijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang saling berkaitan. Untuk mengetahui hubungan permasalahan dan isu strategis perlu adanya kajian berdasarkan *Sustainable Development Aspects* yang terdiri atas tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Hubungan antara Permasalahan dan Isu Strategis Kota Samarinda menurut *Sustainable Development Aspects*

<i>Sustainable Development Aspects</i>	Permasalahan	Isu Strategis	
Lingkungan	Pembangunan belum berbasis lingkungan	1	Pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan
	Penggunaan Lahan dan Fungsi Sungai Belum Sesuai Tata Ruang	2	Penanggulangan Banjir di Kota Samarinda
Ekonomi	Perekonomian yang belum kuat dan mapan	1	Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Samarinda
		2	Transparansi tata kelola pemerintahan (<i>Good Governance dan Clean Government</i>)
		3	Penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi
		4	Persiapan Kota Samarinda Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
		5	Perwujudan Kota Samarinda menjadi <i>Smart City</i>
Sosial	Belum terciptanya Kualitas Hidup dan Kesenjangan Sosial	1	Pembangunan Kota Samarinda berbasis gender
		2	Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah sosial masyarakat
		3	Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing



b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

1) Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Isu strategis TPB, serta isu lainnya yang akan dikaji alternatif skenario dan rekomendasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.6.

Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Isu strategis lainnya yang disepakati dalam KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 meliputi kondisi rawan bencana, dampak pembangunan IKN terhadap pola pengembangan wilayah, transisi terhadap ekonomi hijau, potensi beban pencemar, dan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

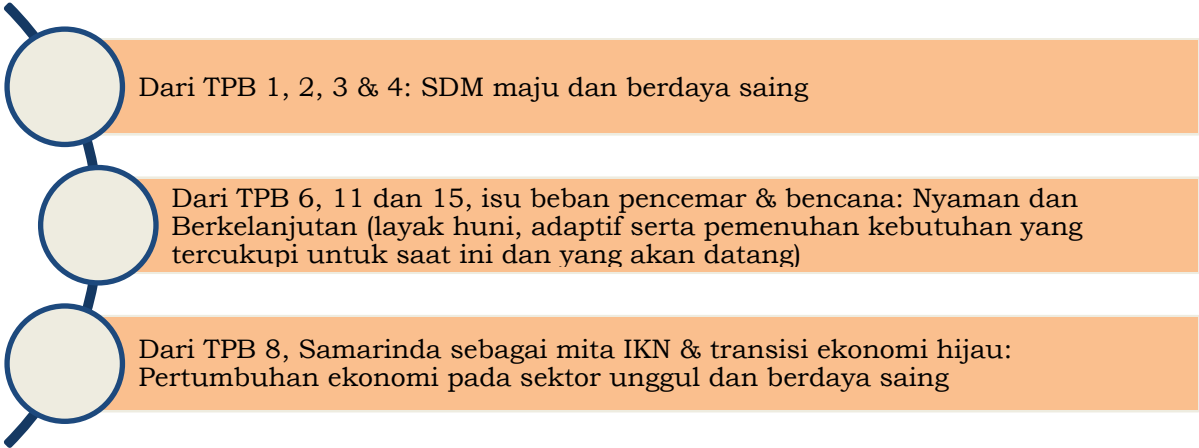
2) Masukan Terhadap Muatan RPJPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis TPB , serta isu lainnya yang ditetapkan, serta rumusan alternatif skenario dan rekomendasi. Berikut merupakan rekomendasi terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok.



Gambar 3.7.

Rekomendasi Terhadap Visi Dan Misi



Tabel 3.5
Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dari TPB 1

Arah Kebijakan		Sasaran Pokok
Indikator: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak		
Peningkatan layanan infrastruktur penyediaan air bersih	Meningkatnya layanan infrastruktur air minum yang layak	
	Meningkatnya jaringan air minum yang terintegrasi	
Perlindungan terhadap sumber-sumber air baku	Terlindungi dan terkelolanya sumber-sumber air baku	
	Meningkatnya penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan	
Indikator: APM SMP/ MTs/ sederajat		
Peningkatan APM SMP/ MTs/ sederajat	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan di tingkat SMP/ MTs/ sederajat	
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik di tingkat tingkat SMP/ MTs/ sederajat	

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Tabel 3.6
Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dari TPB 3

Arah Kebijakan		Sasaran Pokok
Indikator: Persentase merokok pada usia<18 th		
Peningkatan edukasi kesehatan dan pola hidup pada jenjang SD-SMA	Meningkatnya edukasi terhadap kebiasaan merokok	
	Meningkatnya kampanye lingkungan bebas rokok di sekolah	
	Meningkatnya pendampingan berhenti merokok	

Tabel 3.7
Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam dari TPB 6

Arah Kebijakan		Sasaran Pokok
Indikator: Persentase air minum layak		
Peningkatan layanan infrastruktur penyediaan air bersih	Meningkatnya layanan infrastruktur air minum yang layak	
	Meningkatnya jaringan air minum yang terintegrasi	
	Terlindungi dan terkelolanya sumber-sumber air baku	



Arah Kebijakan	Sasaran Pokok
Perlindungan terhadap sumber-sumber air baku	Meningkatnya penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan
Indikator: Persentase air minum aman dan berkelanjutan	
Peningkatan kualitas air minum yang aman dan berkelanjutan	Meningkatnya teknologi dan kualitas pengolahan air baku menjadi air minum yang aman dan berkelanjutan
	Meningkatnya jaringan air minum aman dan berkelanjutan yang terintegrasi
Perlindungan terhadap sumber-sumber air baku	Meningkatnya perlindungan terhadap sumber-sumber air baku

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Tabel 3.8
Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dari TPB 8

Alternatif Arah Kebijakan	Alternatif Arah Sasaran Pokok
Indikator: Laju PDB per Kapita	
Peningkatan kontribusi sub-sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan produk perdagangan daerah
	Percepatan pertumbuhan ekonomi sektor Unggulan
	Meningkatnya ekspor komoditi unggulan
	Meningkatnya aksesibilitas penunjang sektor unggulan dan pemukiman.
Peningkatan PDRB pada sektor unggulan (sektor jasa)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi pada sektor jasa khususnya Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya, serta jasa pendidikan.
	Transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.
	Meningkatnya pemerataan ekonomi dan optimalisasi pembangunan infrastruktur.
	Meningkatnya SDM yang berdaya saing untuk menghadapi tantangan di era industri 4.0.
Indikator: Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB	
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pariwisata dan kawasan strategis kota.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai mitra IKN.
	Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata di dalam dan luar negeri.
	Meningkatnya pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri sebagai Mitra IKN.
	Meningkatnya SDM berdaya saing yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja.

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Tabel 3.9
Rekomendasi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dari TPB 11

Arah Kebijakan	Sasaran Pokok
Indikator: Persentase sampah tertangani	
Mewujudkan Kota Samarinda yang Bersih dan Nyaman	Meningkatnya layanan persampahan melalui peningkatan sarana pengangkutan
	Meningkatnya jumlah sampah yang tereduksi dari upaya 3R
	Meningkatnya nilai ekonomi dari pengelolaan sampah
	Meningkatnya sarana persampahan di ruang-ruang publik



Arah Kebijakan	Sasaran Pokok
	Meningkatnya teknologi pengelolaan sampah di TPS dan TPA
Indikator : Kota Hijau yang menyediakan RTH di Kawasan Perkotaan	
Menciptakan Kota Samarinda yang nyaman/Liveable (layak huni)	Meningkatnya jumlah RTH melalui buffer zona kawasan militer dan penetapan RTH Sempadan sungai
	Dipertahankan dan terpeliharanya RTH eksisting
	Meningkatnya RTH dalam bentuk taman kota, taman lingkungan, lapangan olah raga, jalur hijau, pemakaman dan hutan kota
	Meningkatnya pola kerjasama dalam pemanfaatan lahan untuk RTH Publik
	Meningkatnya pemanfaatan terhadap aset kota yang belum termanfaatkan
Isu Beban Pencemar	
Peningkatan derajat kesehatan melalui sanitasi	Meningkatnya layanan infrastruktur sanitasi yang layak
	Terlindungi dan terkelolanya sumber-sumber beban pencemar di badan air penerima
	Meningkatnya kualitas air pada badan air penerima
	Menurunnya kawasan kumuh di Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

c. **Telaahan Kajian Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Samarinda**

1) **Sektor Energi**

Sumber GRK yang berasal dari sektor energy dan transportasi dihitung dari pembakaran bahan bakar hidrokarbon. Berbagai kegiatan sektor energi dan transportasi menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2) dan sedikit methane (CH4) dan nitrogen oksida (N2O). Emisi GRK (ton CO2e) berdasarkan jenis bahan bakar disajikan pada tabel di bawah. Berdasarkan penggunaan jenis bahan bakar berbeda dihasilkan emisi GRK yang berbeda berdasarkan BAU Baseline penelitian sebelumnya (Emisi GRK Kota Samarinda tahun 2020). Selama periode 2018-2022 emisi GRK Sektor energi dan transportasi mengalami peningkatan secara signifikan. Emisi GRK berasal dari penggunaan bahan bakar jenis premium dan MFO (*Marine Fuel Oil*) menunjukkan nilai yang meningkat sepanjang tahun 2018-2022.



Tabel 3.10
Energi GRK (ton CO2e) Berdasarkan Jenis Bahan Bakar

No	Jenis bahan bakar	2018	2019	2020	2021	2022
1	Premium	526.907,98	565.075,40	605.097,85	645.120,29	685.142,73
2	Pertamax	78.024,22	83.676,03	89.602,53	95.529,03	101.455,53
3	Pertalite	328.346,57	352.130,88	377.071,16	402.011,44	426.951,71
4	Solar	1.954.396,28	2.095.966,11	2.244.416,53	2.392.866,95	2.541.317,37
5	Dexlite	40.813,88	43.770,30	46.870,41	49.970,51	53.070,62
6	MFO	176.208,38	188.972,32	202.356,61	215.740,90	229.125,19
7	Solar (HSD)	32.688,99	35.056,87	37.539,83	40.022,80	42.505,76
8	Biodiesel *)	9.851,47	10.565,08	11.313,37	12.061,66	12.809,95
9	LPG	97.318,91	104.368,36	111.760,43	119.152,50	126.544,57
Total		3.234.723,20	3.469.035,56	3.714.736,00	3.960.436,44	4.206.136,88

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Emisi dari berbagai jenis bahan bakar minyak secara rinci disajikan pada tabel di atas yang menunjukkan emisi yang terbanyak adalah berasal dari konsumsi bahan bakar dari jenis solar. Selanjutnya adalah jenis premium sebagai jenis bbm terbanyak kedua dan ketiga adalah jenis premium dan pertalite. Sementara jenis terkecil yang menyumbangkan emisi adalah biodiesel dan biosolar.

Berdasarkan jenis sektoral, emisi GRK total dari sektor energi dan transportasi di Kota Samarinda didominasi oleh sektor transportasi dan industri. Emisi sektor transportasi berasal dari penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik jenis premium, pertamax, solar dan dexlite. Sedangkan sektor industri menimbulkan emisi GRK baik dari penggunaan kelima jenis BBM tersebut maupun dari penggunaan energi listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

2) Sektor IPPU (*Industrial Processes and Product Use*)

Kota Samarinda saat tidak memiliki industri skala besar dan dominan, seperti halnya tahun `1980 hingga akhir tahun 2000-an yang dikenal sebagai pusat industri kayu lapis di Indonesia. Data dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa hanya industri skala kecil dan menengah saja yang saat ini eksis di kota Samarinda. Data konsumsi bahan bakar dari Dinas Perindustrian Kota Samarinda dikombinasikan dengan data-data sekunder yang dapat diakses seperti BPS Kota Samarinda dan beberapa dokumen hasil kajian lingkungan untuk mendapatkan bahan-bahan analisa yang lebih akurat.



Sementara itu, perhitungan inventarisasi GRK tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 22 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca memisahkan sektor energi dan proses dan penggunaan industri. Berdasar data yang tersedia pada DHL Kota Samarinda untuk 2023 ini, inventarisasi GRK Kota Samarinda terkalkulasi dari aktivitas sektor industri yang terbagi atas 2 kelompok skala industri yaitu industri kecil dan menengah. Sedangkan untuk industri yang termasuk dalam skala besar tidak terdapat di kota Samarinda. Jenis bahan bakar yang dikonsumsi untuk digunakan pada aktivitas industri di kota Samarinda terdiri dari jenis gas alam, LPG dan kayu bakar.

Tabel 3.11
Emisi Sektor Industri dari Tahun 2019 Hingga 2022

	Jenis			
	2019	2020	2021	2022
Industri Kecil dan Menengah	5.699,66	5.528,67	5.360,95	5.199,49

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan data mengenai konsumsi bahan bakar di sektor industri terjadi penurunan emisi dari 5.699,66 ton CO₂e pada tahun 2019 hingga 5.199,49 ton CO₂e pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan penggunaan bahan bakar utama dalam proses produksi di sektor industri. Pada tahun 2020 pemakaian bahan bakar sebagian

3) Sektor Perternakan dan Pertanian

Sektor pertanian memiliki peran sebagai penyumbang utama bagi emisi metana, dimana metana memiliki hubungan yang erat dengan penggunaan dan pengelolaan lahan terutama untuk budidaya tanaman pertanian seperti padi, sayur mayur atau palawija serta tanaman perkebunan lainnya. Pada sistem pertanian yang tidak memperhatikan aspek aspek keseimbangan ekosistem atau lingkungan hidup umumnya sering menerapkan berbagai kegiatan yang berdampak negatif seperti pembakaran untuk membuka lahan dan juga membakar sisa panen dan penggunaan pupuk urea secara berlebihan untuk memacu produksi. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan menghasilkan tambahan emisi karbondioksida (CO₂). Selain itu, pola penanaman tanaman pertanian



seperti padi sawah terkesan memaksakan terus untuk ditanam dan berproduksi sepanjang tahun, sementara tanah atau garapan pertanian memerlukan adanya massa benda atau masa istirahat untuk memulihkan kondisi tanah agar subur kembali. Sumber emisi lainnya dari sektor pertanian yang juga berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar adalah kegiatan peternakan hewan. Beberapa jenis ternak yang banyak diusahakan oleh masyarakat Kota Samarinda adalah sapi, kambing, ayam dan bebek. Peternakan merupakan bentuk kegiatan yang bersifat komplementer atau saling melengkapi pada masyarakat agraris. Walaupun demikian peternakan di Kota Samarinda belum dianggap sebagai sektor yang memiliki potensi ekonomi yang besar, oleh karena itu tidak banyak masyarakat bekerja sebagai peternak. Hasil inventarisasi gas rumah kaca untuk sektor pertanian tahun 2022 di gambar pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Hasil Perhitungan GRK Sektor Pertanian Kota Samarinda Tahun 2022

No.	Uraian	Emisi CO2 eq (ton/tahun)			
		2019	2020	2021	2022
1	Pertanian	6.518,13	6.695,11	6.748,13	6.766,37
2	Peternakan	16.444,12	14.990,50	14.267,65	13.328,62
	Total	22.962,25	21.865,61	21.015,78	20.094,99

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Emisi GRK sektor pertanian yang didalamnya termasuk bidang peternakan secara umum mengalami penurunan emisi, khususnya pada bidang peternakan. Namun demikian penurunan tersebut dikarenakan tidak terdapat data jumlah ternak yang di tahun sebelumnya (2018) tercatat seperti sapi perah, kuda, dan itik atau bebek. Sementara pada bidang pertanian untuk persawahan dan tanaman hortikultura lainnya terjadi sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan adanya penambahan luas lahan pertanian dan bertambahnya pemakaian pupuk.

4) Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya

Serapan karbon untuk sektor kehutanan dan perubahan lahan lainnya di Kota Samarinda dari tahun 2018 hingga 2022, dilakukan dengan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis untuk analisis perubahan tutupan lahan menggunakan citra satelit landsat seusia dengan



tahun liputannya. Emisi GRK sub sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya berfluktuatif dari tahun ke tahun selama periode 2014-2018 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah. Hasil analisa menunjukkan bahwa serapan karbon terbesar adalah pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2022 maupun tahun 2018.

Tabel 3.13
Tingkat Emisi GRK Akumulatif Periode Tahun 2014-2018 Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lainnya (dalam 1000 ton CO₂e)

Sektoral		2018	2019	2020	2021	2022
Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya		1.463.168,00	1.467.391,62	1.476.823,19	1.472.154,02	1.422.119,25

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

5) Sektor Limbah

Perhitungan menunjukkan tiga kecamatan di Kota Samarinda dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Kunjang menyumbang emisi GRK bersih terbesar pula dari sektor limbah. Emisi GRK bersih dari Kecamatan Samarinda Ulu sebesar 42.785,06 ton CO₂e, diikuti Kecamatan Samarinda Utara sebesar 41.410,73 ton CO₂e dan Kecamatan Sungai Kunjang sebesar 40.133,24 ton CO₂e sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.14
Emisi GRK Bersih (ton CO₂e) Sektor Limbah Berdasarkan Kecamatan di Kota Samarinda

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Palaran	20.806,91	21.867,82	21.590,72	21.841,40	22.099,45
2.	Samarinda Seberang	24.414,26	25.634,22	21.884,91	21.886,13	21.885,84
3.	Loa Janan Ilir	28.417,59	25.248,03	22.514,29	22.515,75	22.515,41
4.	Sambutan	20.061,60	21.055,72	19.797,56	19.800,60	19.802,28
5.	Samarinda Ilir	26.380,52	26.172,77	23.624,77	23.635,68	23.644,54
6.	Samarinda Kota	11.629,34	11.914,80	10.837,56	10.982,50	10.975,34
7.	Sungai Kunjang	40.133,08	41.119,25	45.629,61	45.735,90	45.838,51
8.	Samarinda Ulu	42.785,05	43.832,87	44.352,73	44.794,88	45.238,28
9.	Samarinda Utara	41.410,89	44.274,87	36.472,46	36.488,95	36.503,12
10.	Sungai Pinang	36.407,57	37.688,71	36.208,33	36.214,09	36.217,17
	Total	292.446,82	298.809,06	282.912,94	283.895,88	284.719,94

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023



Emisi GRK dari sektor limbah dihitung berdasarkan jenis limbah sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas. Peningkatan jumlah penduduk pada 10 kecamatan di Kota Samarinda menyebabkan peningkatan emisi GRK dari sektor limbah, baik berupa limbah padat maupun limbah cair selama periode 2014-2018. Emisi GRK yang dihasilkan dari limbah padat mencapai 94 persen dari total emisi GRK sektor limbah. Sedangkan sisanya sebanyak 6 persen berasal dari limbah cair. Berdasarkan jenis GRK yang diemisikan meliputi 92 persen berupa gas CO₂, sedangkan gas CH₄ dan N₂O masing-masing sebesar 4 persen. Emisi GRK sektor limbah berdasarkan jenis GRK ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.15
Emisi GRK (ton CO₂ e) Berdasarkan Jenis Limbah

Jenis Limbah	2018	2019	2020	2021	2022
Limbah padat	274.281,38	283.003,95	268.347,05	270.275,97	265.795,29
Limbah cair	18.834,32	19.137,71	18.155,93	18.231,93	18.296,22
Total	293.115,70	302.141,66	286.502,97	288.507,89	284.091,51

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Limbah padat merupakan kategori limbah penyumbang terbanyak dibandingkan dengan limbah cair, Namun hal ini disebabkan karena tingkat kesulitan dan ketelitian untuk mendapatkan data yang valid mengenai limbah cair, khususnya limbah dari lingkungan perumahan atau limbah cair rumah tangga. Meskipun demikian perhitungan emisi khususnya limbah padat merupakan gambaran penanganan yang baik terhadap pengelolaan sampah atau limbah.

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan emisi GRK di Kota Samarinda dari tahun 2018 hingga 2022. Salah satu sebab keberhasilan pada penurunan emisi adalah pengelolaan sampah yang semakin baik. Pembakaran sampah sudah tidak lagi dilakukan dan di sisi lain keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai jenis sampah untuk diolah dan menjadi beberapa produk yang bernilai turun memberikan dampak pada pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Samarinda juga telah menunjukkan usaha serius dengan memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada program Bank Sampah atau Bank Ramah Lingkungan (Bang Ramli) yang saat ini berkembang di lingkungan



masyarakat. Program ini harus mendapatkan penghargaan dan dukungan agar terus berkembang. Berdasarkan jenis emisi GRK yang dihasilkan dari sektor limbah dari tahun 2018 hingga 2020 ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Emisi GRK (ton CO2e) Sektor Limbah Berdasarkan Jenis GRK

Jenis GRK	2018	2019	2020	2021	2022
CO ₂	272.418,62	276.806,84	262.606,33	263.705,60	264.635,52
CH ₄	9.558,24	11.994,82	11.306,04	11.780,58	8.940,59
N ₂ O	11.138,84	13.340,01	12.590,61	13.021,71	10.515,40
Total	293.115,70	302.141,66	286.502,97	288.507,89	284.091,51

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Tingkat emisi aktual GRK sektor limbah tahun 2018 hingga 2022 berdasarkan jenis GRK menunjukkan bahwa CO₂ adalah jenis GRK yang terbesar dengan nilai 264 ribu ton CO₂e (93%) dibandingkan jenis CH₄ dan N₂O yang masing-masing hanya 8 ribu dan 10 ton CO₂ e atau sekitar 3% dan 4%.

d. Telaahan Isu Strategis RTRW Kota Samarinda

Isu-isu strategis yang tervalidasi dan terkonfirmasi berdasarkan RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042, meliputi:

1. Kota Samarinda sebagai Kota Tepian;
2. Perubahan pada batas-batas wilayah administrasi (dari 53 menjadi 59 kelurahan);
3. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda;
4. Pengaruh Pembangunan infrastruktur transportasi seperti Bandara Samarinda Baru dan jalan tol Balikpapan-Samarinda;
5. Kota Samarinda merupakan salah satu kota penyangga IKN;
6. Penguatan Posisi Kota Samarinda dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di sektor perindustrian;
7. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa
8. Upaya rehabilitasi pada lahan-lahan kritis (Pit dan lahan disposal) terutama lahan bekas/terdampak kegiatan pasca penambangan;



9. Alih fungsi lahan tanpa melihat aturan Tata Ruang;
10. Perubahan Pemanfaatan Kawasan Eks. Bandara Temindung;
11. Kawasan rawan bencana yang berpengaruh pada kemampuan pengembangan kawasan di atasnya dan upaya mitigasi serta pengurangan resiko kebencanaan
12. Identifikasi Kawasan Resapan Air; dan
13. Rencana penutupan (penghentian operasi kegiatan) pada TPA Bukit Pinang

3.2.5. Penentuan Isu Strategis RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, maka isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Samarinda Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Penguatan daya saing sumber daya manusia Kota Samarinda untuk bersaing di era globalisasi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu strategis utama yang akan menentukan keberhasilan berbagai aspek pembangunan daerah. Sebab saat ini isu ketimpangan kesehatan dan pendidikan masih terjadi di Kota Samarinda. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan perlu terus menerus dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Perbaikan sarana dan prasarana, dukungan tenaga kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, intervensi program pendidikan dan kesehatan sesuai dengan karakteristik kewilayahan, serta kemudahan akses kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah Kota Samarinda merupakan modal dasar penting yang harus terus menerus menjadi perhatian. Dengan demikian, sumber daya manusia Kota Samarinda memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang inklusif dan berkelanjutan

Untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia memerlukan transformasi ekonomi. Demikian halnya dengan Kota Samarinda, diperlukan upaya transformasi ekonomi untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Transformasi ekonomi diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi Kota



Samarinda tetap berkelanjutan dan cita-cita untuk mencapai pendapatan perkapita tinggi bisa terwujud. Transformasi ekonomi merupakan proses menyeluruh dan terus menerus untuk menggerakkan sumber daya manusia dan sektor-sektor lain yang memiliki produktivitas rendah ke arah yang lebih tinggi. Upaya meningkatkan produktivitas ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Dalam proses transformasi ekonomi ini berbagai kebijakan perlu ditempuh untuk memperkuat struktur perekonomian dan mempercepat peningkatan produktivitas. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi dari berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi berbasis industri bernilai tambah tinggi dengan didukung oleh teknologi serta inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama (1) Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM (2) Pengembangan dan pembangunan kawasan industri kecil dan menengah (3) penerapan teknologi informasi, (4) investasi yang besar dalam riset dan inovasi serta didukung oleh pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi memerlukan kolaborasi berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya.

3. Konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Kota Samarinda

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup (i) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah, (ii) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak), dan (iii) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.

4. Peningkatan reformasi birokrasi secara menyeluruh

Dalam upaya mencapai tujuan Kota Samarinda ke depan tentu perlu didukung oleh sistem tata kelola dan kelembagaan yang mapan, dan profesional. Di sisi lain, salah satu langkah yang dicanangkan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerjasama atau



kemitraan yang semakin luas dan intens baik di internal maupun eksternal pemerintah. Hal tersebut juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola pemerintahan masa depan yang menitikberatkan pada stabilitas dan kelincahan dengan sinergitas multi pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara kontekstual untuk mendukung pencapaian tujuan Kota Samarinda sebagai pusat peradaban yang maju, maka sistem tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah Kota Samarinda diarahkan menuju pada pendekatan yang lebih relevan dengan tujuan pembangunan dengan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur namun juga perlu mengoptimalkan jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah. Optimalisasi jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi yang bersifat horizontal dan dengan instansi vertikal (multilevel governance) dapat diinisiasi dengan joint outcome sehingga tidak lagi berfokus pada pencapaian tujuan berbasis urusan.

Selain itu, dalam isu peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk mempermudah proses bisnis antar pemerintah dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini, digitalisasi adalah keniscayaan dan Kota Samarinda harus bersiap untuk bertransformasi menuju digital. Penerapan digitalisasi dapat menjadi pintu masuk cara lahirnya birokrasi yang lincah dan cepat dengan basis ideal bahwa seluruh informasi dan data terintegrasi, serta infrastruktur digital tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda.

Evaluasi terhadap pengelolaan layanan *e-government* di Kota Samarinda mengidentifikasi bahwa data antarinstansi saat ini masih belum terintegrasi, terlebih faktor penunjang seperti keamanan sistem dan rendahnya keterampilan digital SDM ASN belum optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan baik pada kompetensi SDM ASN maupun sistem *e-government* pemerintahan di Kota Samarinda melalui akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi kebijakan berbasis data yang didukung oleh pusat data terintegrasi.



5. Samarinda menuju Kota Pusat Peradaban Masa Depan dengan pengembangan Tri-City

Pengembangan Tri-City yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, penting untuk memahami keistimewaan masing-masing kota yang terlibat. Keistimewaan Kota Samarinda, Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara akan menjadi perhatian dalam pengembangan konsep ini. Pertama, Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki potensi sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi regional. Keistimewaan kota Samarinda ini terletak pada kekayaan sumber daya alamnya, terutama batu bara, yang telah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam ini, yang membuat pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas yang mendesak. Dengan langkah-langkah seperti pengembangan infrastruktur hijau dan promosi penggunaan energi terbarukan, Samarinda dapat mengubah dirinya menjadi pusat pertumbuhan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk itu diperlukan beberapa strategi yaitu (1) Memperkuat peran Kota Samarinda dalam Tiga Kota pada tahap awal, tahap lanjut, dan tahap pematangan kawasan IKN, dan (2) Memperkuat peran Kota Samarinda sebagai super hub regional

Selanjutnya Balikpapan, dikenal sebagai kota minyak dan gas terbesar di Indonesia, memiliki keunggulan dalam sektor energi. Namun, seperti Samarinda, Balikpapan juga dihadapkan pada tantangan lingkungan yang serius akibat eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi pembangunan yang mengintegrasikan inovasi teknologi dan praktik ramah lingkungan. Dalam hal ini, termasuk pengembangan smart city, untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Ketiga, Ibu Kota Nusantara, yang merupakan kota baru yang sedang dikembangkan sebagai ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, memiliki potensi besar untuk menjadi contoh utama pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional. Dengan membangun kota dari awal, pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip desain dan pengelolaan yang berkelanjutan. Termasuk dalam hal ini, penggunaan teknologi canggih untuk memastikan efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan yang baik. Dalam keseluruhan proyek pengembangan Tri-City, integrasi aspek smart city dan pembangunan



berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

6. Kota Berkelanjutan

Ancaman kerusakan lingkungan dan krisis energi seiring dengan masifnya pembangunan wilayah merupakan hal yang perlu menjadi perhatian. Untuk mengurangi risiko kerusakan, pembangunan kewilayahan perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti, perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; serta mitigasi terhadap risiko yang mungkin timbul.

Di masa mendatang kebutuhan energi akan terus mengalami peningkatan terutama peningkatan kebutuhan listrik dan air. Untuk itu, diperlukan pengembangan energi baru dan terbarukan yang menjadi alternatif dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan efek gas rumah kaca juga diperkirakan akan terus terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan energi ramah lingkungan perlu menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya antisipasi terhadap kerusakan lingkungan perlu diminimalisasi seiring dengan adanya peningkatan eksploitasi sumberdaya alam di masa yang akan datang.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peran penting, terlebih dengan adanya pembangunan IKN yang berdampak pada posisinya dengan Kota Samarinda. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan pembangunan kota untuk 20 tahun kedepan. Dalam menangkap peluang dan menjawab tantangan serta permasalahan daerah, maka ditetapkan visi dan misi daerah untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun periode tahun 2025 sampai dengan 2045.

4.1. Visi

4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045

Sebagaimana disajikan dalam dokumen RPJPN bahwa rumusan Visi Indonesia Emas 2045: **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**, menjadi titik tolak bagi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam penyusunan misi pembangunan jangka panjangnya. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.

Gambar 4. 1
Visi Indonesia Emas Tahun 2045



Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Gambar 4. 2
Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045



Selanjutnya, lima sasaran utama Visi RPJPN tersebut di atas menjadi acuan dalam perumusan sasaran dan target pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

4.1.2. Visi Kota Samarinda 2045

Kota yang ingin maju harus memiliki visi yang besar demi menyatukan pemikiran dan langkah segenap pihak dalam mewujudkannya. Visi RPJPD Kota Samarinda merupakan gambaran atau kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 20 tahun, sampai dengan tahun 2045. Visi RPJPD Kota Samarinda merupakan cita-cita dan perwujudan dari aspirasi seluruh masyarakat Kota Samarinda. Lebih lanjut, mengingat kedudukannya sebagai ibu kota provinsi, visi RPJPD Kota Samarinda boleh jadi merupakan harapan seluruh komponen masyarakat se-Kalimantan Timur.

Sebagai ibukota suatu provinsi yang kerap disebut “provinsi kaya”, merencanakan sekaligus mewujudkan “kota yang layak” adalah suatu keharusan. Menjalani peran strategis tersebut, Kota Samarinda mutlak harus dipandang sebagai perkotaan yang mampu berkembang dan berkelanjutan secara ekologis (*eco-city*) dan berkembang secara berkeadilan (*just-city*) dengan dukungan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (*growth city*) dan pengembangan identitas lokal yang kuat (*urban cultural identity*). Kelayakan kota pada tahapan pembangunan dijadikan sebagai dasar pengembangan, bukan hanya, menjadi kota yang cerdas tetapi menjadi kota yang “cemerlang” di masa datang, sebanding dengan kota-kota besar di dunia.

Visi dan Misi Kota Samarinda dirumuskan antara lain dalam kerangka mempersiapkan fondasi pembangunan menuju pengembangan Kota Cerdas (*smart city*) dalam kebijakan pembangunan jangka panjang tahap berikutnya. Dengan adanya persiapan pembangunan kota cerdas ini diharapkan akan menghasilkan perubahan manajemen perkotaan yang mampu memberikan efek positif dalam segala aspek dan bidang kehidupan masyarakat: ekonomi, sosial, budaya, dan keserasian dengan lingkungan hidup. Penyiapan berbagai prasyarat dasar agar Samarinda dapat lebih lanjut menerapkan manajemen kota berbasis *smart city*, salah satu dampak yang diharapkan Kota Samarinda adalah mampu memecahkan satu per satu permasalahan krusial pembangunan yang dihadapi selama ini dengan



memaksimalkan segala sumber daya dan potensi dan mampu menggiring masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, visi Kota Samarinda dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan memperhatikan juga kondisi Kota Samarinda saat ini, tantangan pembangunan mendatang, dan modal dasar yang dimiliki. Selain itu, perumusan visi Kota Samarinda juga memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 termasuk demi mendukung visi pembangunan nasional dan provinsi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2045 adalah:

**“SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS
PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN
BERKELANJUTAN”**

Penjelasan dari masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

1. Pusat Peradaban

Kota Samarinda dalam 20 tahun kedepan akan menjadi kota yang maju dan terdepan dengan sumber daya manusia (SDM), perekonomian, tata kelola, dan infrastruktur yang unggul, melengkapi ibu kota Nusantara (IKN) sebagai pusat superhub ekonomi. Kota Samarinda berkembang dengan pesat seiring pembangunan IKN, dan menjadi magnet bagi aktivitas perekonomian dan sosial dengan prinsip inklusi dan berkelanjutan.

2. Perdagangan dan Jasa

Perekonomian Samarinda dititikberatkan pada sektor perdagangan dan jasa dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan berbagai peluang yang ada termasuk sebagai daerah yang berdampingan dengan IKN. Perdagangan dan jasa menjadi penggerak utama perekonomian yang akan memberi efek luas bagi berkembangnya sumber-sumber ekonomi potensial lainnya terutama rekreasi dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE).



Secara bertahap akan diupayakan transformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi baru terbarukan, rendah karbon, dan berkelanjutan. Kestabilan perekonomian akan dicapai dengan kolaborasi dan sinergi lintas sektor dan melibatkan investasi dari dalam maupun luar negeri, serta memperkuat koperasi dan UMKM dan industri kecil secara berkelanjutan.

3. Maju

Kota Samarinda yang maju memiliki makna dalam jangka panjang, kota akan menjadi pusat peradaban di Kalimantan dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, perekonomian yang stabil, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, lingkungan yang sehat serta infrastruktur yang modern. Kemajuan kota membawa Samarinda menjadi daerah dengan daya saing yang tinggi dan masyarakatnya hidup sejahtera lahir dan batin.

4. Berkelanjutan

Pembangunan kota menerapkan prinsip memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi masa depan. Kota Samarinda menjadi kota yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan lingkungan hidup dan sosial yang sehat dan serasi. Kota yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani secara adil dan merata. Samarinda menjadi kota yang tertib, indah, asri, dan bersih sebagai cerminan budaya unggul (*culture of excellence*) warga kota dan aparat pemerintahannya.

Dengan memadukan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial diharapkan impian masyarakat terhadap Kota Samarinda dapat terwujud. Pengembangan kota dalam jangka panjang diharapkan tidak saja menjadikan Kota Samarinda sebagai impian warganya, tetapi menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur bahkan di pentas nasional maupun internasional Kota Samarinda diharapkan memiliki daya saing tinggi dan unggul diantara kota-kota besar lainnya di Pulau Kalimantan. Pembangunan dilandasi dengan semangat persatuan yang kokoh dengan senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa



dalam melaksanakan pembangunan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang terdepan di Kalimantan.

Visi “Samarinda Pusat Peradaban Berbasis Perdagangan dan Jasa Yang Maju dan Berkelanjutan” memiliki peran terhadap perwujudan visi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2045 yakni “Kaltim Sejahtera 2045; Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil Dan Berkelanjutan” dan secara tidak langsung mendukung visi RPJPN yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kota, maka ditetapkan sasaran visi RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 yang selaras dengan sasaran visi RPJPN dan sasaran visi RPJPD provinsi, sesuai kondisi dan kewenangan kota.

Sasaran visi RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 disertai dengan indikator dan target setiap tahapan jangka menengah disajikan pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1
Sasaran Visi RPJPD Kota Samarinda 2025-2045

No	Sasaran Visi dan Indikator	Baseline 2025	Target						
			2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita								
	a. PDRB per kapita (Rp juta)	118,41	173,36	190,70	279,20	307,13	449,66	494,63	720,62
	b. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,00	8,61	9,06	11,14	11,73	14,42	15,19	19,66
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan								
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,36	4,01	3,88	3,23	3,03	2,12	1,86	0,33
	b. Rasio gini (Indeks)	0,321	0,319	0,318	0,316	0,315	0,313	0,312	0,309
3	Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah								
	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,28	6,24	6,61	7,59	6,33	6,29	5,87	5,97
	b. Indeks Daya Saing Daerah	3,83	3,92	3,94	3,97	3,97	4,02	4,03	4,25
	c. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	51,74	55,60	56,08	56,84	57,04	57,50	57,65	58,78
	d. Kontribusi PDRB Terhadap Provinsi	10,49	10,41	10,39	10,31	10,29	10,21	10,19	10,09
4	Peningkatan Daya saing Sumber Daya Manusia								
	Indeks Pembangunan Manusia	83,40	84,96	85,35	86,94	87,34	88,97	89,38	91,47
5	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission								
	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	31,90	38,85	40,81	49,70	52,21	63,58	66,79	85,45
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,22	70,89	71,06	71,74	71,91	72,60	72,77	73,64

Sumber: Hasil Analisis, 2024



4.2. Misi

Misi merupakan sebuah usaha atau upaya umum bagaimana mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga setiap tahapan arah kebijakan terarah menuju satu tujuan yang sama. Dalam mewujudkan visi dan misi daerah, diperlukan adanya komitmen bersama dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda ditempuh melalui beberapa misi. Misi RPJPD selain menjawab cita-cita masa depan dan isu strategis daerah, juga mempertimbangkan posisi kota sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan daerah yang berdampingan dengan IKN. Dengan menjaga sinergi pembangunan antara kota, provinsi, dan IKN, maka ditetapkan misi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda periode tahun 2025-2045, yaitu:

- 1. Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**
- 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah.**
- 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**
- 4. Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.**
- 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri.**
- 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.**
- 7. Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis.**
- 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.**

Penjelasan masing-masing misi pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut:



1. Misi 1: Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dan potensial dalam pembangunan suatu daerah karena sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Subyek pembangunan mengandung makna bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki andil dan partisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan menurut bidang keahliannya masing-masing. Pelaksana pembangunan oleh masyarakat dalam hal ini sebagian besar dikaitkan dengan pertumbuhan perekonomian wilayah yang menjadi mesin penggerak perwujudan capaian pembangunan daerah.

Sedangkan sumber daya manusia sebagai obyek pembangunan memiliki makna bahwa setiap masyarakat yang hidup di suatu wilayah harus menikmati dan merasakan hasil dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Hasil dari pembangunan daerah harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan adil tanpa memandang status. Tidak boleh ada diskriminasi oleh pelaksana pembangunan dalam memberikan berbagai fasilitas, sarana, maupun prasarana sebagai bentuk keadilan pemerataan hasil pembangunan daerah.

Terkait dengan fungsi sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, maka kualitas dan daya saing setiap individu harus ditingkatkan dari berbagai bidang dari peningkatan derajat kesehatan baik individu, keluarga, maupun lingkungan; peningkatan kualitas pendidikan formal maupun keterampilan/*skill* yang menunjang pengembangan potensi diri; peningkatan perekonomian diri dan keluarga melalui pendapatan yang sesuai untuk mencapai hidup layak; hingga peningkatan modal sosial manusia sebagai bagian dari masyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti akhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter moral individu.

Pada prinsipnya, terdapat hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Tingkat pendidikan serta kondisi kesehatan yang baik memberikan manfaat tidak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan akan meningkatkan kesadaran akan kesehatan, dan kondisi kesehatan yang baik memberikan kontribusi bagi pencapaian pendidikan. Lebih



lanjut, pendidikan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Peningkatan pada kesehatan juga memberikan manfaat ekonomis secara signifikan.

2. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah

Misi kedua ini dirumuskan berdasarkan kondisi di Kota Samarinda yang memiliki pertumbuhan perekonomian masih fluktuatif, sehingga kestabilan perekonomian berdampak pada kestabilan harga barang dan jasa. Pembangunan jangka panjang diarahkan untuk penguatan perekonomian Kota Samarinda berbasis potensi daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan masyarakat dan mengedepankan pembangunan SDM berkualitas serta berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan IPTEK, pembangunan infrastruktur yang maju seperti pengembangan kawasan industri, jasa dan perdagangan serta permukiman yang berwawasan lingkungan dan representatif.

Dalam konsep Tiga Kota (Tri City) yakni IKN, Samarinda, dan Balikpapan, kawasan IKN sebagai superhub ekonomi di Kalimantan menjadi sentra pelayanan dan administrasi pemerintahan, serta Samarinda dan Balikpapan sebagai pendukung. Pembangunan Kota Samarinda diarahkan untuk mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Kota Samarinda juga memiliki potensi dan keunikan untuk pengembangan kota dan dukungan bagi IKN dalam hal logistik dan pelayanan (pendidikan, rekreasi, transportasi, fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*/MICE dan akomodasi).

Keunikan Kota Samarinda yaitu keberagaman budaya, *traditional watercraft*, perdagangan, potensi alam, gaya hidup tepian, kehidupan spiritual masyarakat, serta festival dan perayaan. Berbagai keunikan tersebut sangat erat kaitannya dengan Sungai Mahakam yang membelah Kota Samarinda. Sungai Mahakam menyatukan Kota



Samarinda secara fisik dan diharapkan dapat memberi semangat bagi pengembangan aktivitas dari dua sisi wilayah kota.

Dengan potensi sebagaimana dijelaskan di atas dan posisi strategis Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi dan daerah penyanggah IKN, maka sektor perdagangan dan jasa diharapkan akan berkembang dengan pesat. Pengembangan kota secara bertahap diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa, sehingga memperkuat perekonomian daerah dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang produktif dan berkelanjutan. Dengan berkembangnya sektor unggulan tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi sektor lainnya.

3. Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *good governance* yang diharapkan. Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *good governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah yang memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan yang dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara objektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Hasil pembangunan yang



diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya.

Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat merupakan 3 pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat tiga elemen esensial dalam tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: 1). Adanya kapasitas dalam pemerintahan untuk membuat kebijakan yang tepat serta adanya administrasi publik yang efisien dan *accountable* untuk menjalankannya; 2). Demokratisasi dan pembangunan partisipatoris dengan mendorong keterlibatan yang lebih besar dari semua *stakeholder*; dan 3). Penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum.

4. Misi 4: Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Untuk melakukan transformasi secara menyeluruh, diperlukan landasan kokoh antara lain berupa keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi. Tantangan untuk mewujudkan landasan yang kokoh masih sangat besar, sehingga perlu kebijakan pembangunan yang tepat dan sinergi antar pelaku pembangunan.

Dalam hal kepatuhan terhadap hukum, perlu adanya peran pemerintah untuk aktif dalam upaya penegakan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peran masyarakat Kota Samarinda juga diperlukan dalam upaya penegakan hukum karena masyarakat sendiri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum tersebut. Dengan terintegrasinya penegakan hukum yang baik antara pemerintah dan masyarakat Kota Samarinda akan dapat menciptakan penegakan hukum yang adil dan masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Sehingga dengan berjalannya penegakan hukum yang adil dan menjadikan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap hukum akan dapat mewujudkan SDM Kota Samarinda yang berdaya saing dan taat hukum.

Kehidupan berdemokrasi perlu terus diperkuat sehingga tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pemilu namun penerapan demokrasi yang lebih substansial. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam



berdemokrasi masih perlu terus ditingkatkan. Kehidupan berdemokrasi yang baik dan sehat akan meningkatkan ketentraman dan ketertiban.

Selain itu, stabilitas ekonomi makro daerah perlu terus dijaga agar kondisi daerah lebih kuat dalam menghadapi berbagai tekanan baik domestik maupun global. Ekonomi makro daerah yang stabil akan mendorong terciptanya kondisi daerah yang kondusif.

5. Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri

Dalam peningkatan modal sosial masyarakat perlu adanya penguatan jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya suku, dan memiliki kebanggaan sebagai warga Kota Samarinda dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan masyarakat.

Penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat diharapkan menciptakan prinsip dan gaya hidup yang juga memperhatikan keseimbangan lingkungan. Perwujudan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan perekonomian yang mantap harus sejalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Samarinda sehingga kesehatan, keasrian, dan kenyamanan kehidupan masyarakat tetap terjaga.

Pelaksanaan pembangunan kota perlu dibarengi dengan upaya menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi serta upaya konservasi. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara berimbang dan berkelanjutan untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan.

Dengan melestarikan lingkungan yang sehat, asri dan nyaman diperlukan komitmen menyeluruh oleh segenap elemen pembangunan Kota Samarinda sekaligus konsistensi dalam penerapan dan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan



berbasis lingkungan hidup. Sehingga pembangunan dalam bidang ekonomi juga harus beriringan dengan pembangunan dalam bidang lingkungan. Dengan demikian, perlu adanya transformasi ekonomi berbasis sumber daya tidak terbarukan ke sumber daya terbarukan harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju *green economy*. Diharapkan transformasi pembangunan menuju *green economy* akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan ekologi wilayah, termasuk risiko bencana serta peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim.

6. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Transformasi pembangunan jangka panjang memerlukan kerangka implementasi yang kuat, salah satu diantaranya adalah pembangunan kewilayahan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang berkualitas. Pembangunan kewilayahan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan.

7. Misi 7: Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis

Dalam mewujudkan Kota Samarinda sebagai pusat peradaban yang maju dan berkelanjutan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang berkualitas, menjangkau seluruh wilayah kota dan terintegrasi. Pengembangan infrastruktur memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah. Sarana dan prasarana berupa konektivitas, sarana dan prasarana dasar, ketenagalistrikan, serta teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi pendukung utama dalam implementasi transformasi pembangunan.

Penyediaan infrastruktur yang memenuhi standar dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar maupun untuk mendukung perekonomian daerah dan pengembangan wilayah menjadi sebuah



keniscayaan. Penyediaan infrastruktur untuk pelayanan dasar dilakukan secara merata dan proporsional dengan memperhatikan prinsip keadilan, serta membuka peluang kerjasama dan pembiayaan dengan berbagai pihak. Selanjutnya, penyediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan arahan rencana tata ruang pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang.

Dalam konsep Tiga Kota, Kota Samarinda merupakan salah satu kota penopang dalam pembangunan IKN. Kota Samarinda dapat menjadi kota singgah bagi pelaku perjalanan dari kota lain menuju IKN. Untuk itu sangat dibutuhkan pengembangan angkutan umum massal perkotaan terintegrasi. Dalam tahap awal, pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis jalan menjadi prioritas, sebagai akselerator perkembangan kota dan daerah sekitarnya.

Selain infrastruktur jalan untuk konektivitas daerah, masih terdapat permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara terpadu dan berkesinambungan. Banjir, kemacetan, persampahan, kurangnya ketersediaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), belum optimalnya kualitas jaringan jalan dan drainase, serta kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sebagian dari berbagai permasalahan yang ditemui sebagai konsekuensi dari kota yang terus berkembang. Sehingga penting bagi Kota Samarinda untuk dapat menyediakan infrastruktur yang memadai agar pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

8. Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Perwujudan visi Samarinda Pusat Peradaban Berbasis Perdagangan Dan Jasa Yang Maju dan Berkelanjutan dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pendanaan pembangunan yang memadai. Komunikasi publik yang efektif menjadi sangat penting guna meningkatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.

Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda memerlukan konsistensi perencanaan dan penganggaran, pengendalian dan evaluasi, penerapan manajemen pembangunan berbasis risiko, mekanisme pengaturan perubahan dokumen sesuai



peraturan perundang-undangan. Dengan pelaksanaan dan penerapan hal-hal tersebut, diharapkan akan terwujud kesinambungan pembangunan melalui pelaksanaan seluruh tahapan pembangunan secara baik sesuai rencana.

Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengerahkan sumber daya dan potensi. Selain SDM yang berdaya saing, tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan profesional, dan sarana prasarana yang berkualitas, pembangunan daerah membutuhkan pembiayaan yang mencukupi. Aspek pembiayaan pembangunan selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota, juga sangat berpeluang untuk melibatkan sumber pembiayaan lainnya baik dari pemerintah pusat dan provinsi, maupun dari luar pemerintahan yang sah secara aturan.

Penyelenggaraan misi merupakan cara untuk mewujudkan visi. Hal ini memiliki makna bahwa keberhasilan pencapaian visi hanya dapat diwujudkan jika seluruh misi dapat berhasil dilaksanakan. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, tata kelola pemerintahan, yang didukung oleh modal sosial, lingkungan yang lestari, sarana dan prasarana berkualitas menjadi “*Trigger*” bagi perwujudan “Samarinda Pusat Peradaban Berbasis Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan”. Keterhubungan visi dan misi RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan seperti Gambar 4.1.

Gambar. 4.1

Keterhubungan Visi Terhadap Misi Kota Samarinda



Sumber: Hasil analisis, 2024

Dokumen RPJPD Kota Samarinda disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional. Visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda selaras dengan visi dan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan visi dan misi tersebut disajikan pada Tabel 4.2.



Tabel 4.2
Penyelarasan Visi dan Misi RPJPD Kota Samarinda dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045	RPJPD Kota Samarinda 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Visi & Agenda/Misi	Visi & Misi	Visi & Misi
	(2)	(3)	(4)	(5)
VISI:				
		NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	KALTIM SEJAHTERA 2045; PENGGERAK SUPERHUB EKONOMI NUSANTARA YANG MAJU, ADIL DAN BERKELANJUTAN	SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN
MISI:				
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera	M1. Transformasi sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
		Transformasi ekonomi	Transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan peran sebagai superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara	M2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah
		Transformasi tata kelola	Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas	M3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik
2	Landasan Transformasi	Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi daerah	M4. Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal	M5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri
3	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	M6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	M7. Memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan strategis
		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan	M8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Sumber: Hasil analisis, 2024



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang merupakan cita-cita seluruh pemangku kepentingan daerah yang harus diejawantahkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok yang jelas dan terukur. Arah kebijakan dan sasaran pokok jangka panjang akan menuntun pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pembangunan melalui penyelenggaraan pembangunan jangka menengah dengan tahapan-tahapan yang rasional dan sesuai isu strategis yang relevan.

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah jangka panjang. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Samarinda.

Pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 terbagi dalam 4 (empat) tahap atau periode pembangunan yang sekaligus akan memberi arahan bagi pembangunan jangka menengah dalam bentuk RPJMD. Adapun keempat tahapan pembangunan jangka panjang, yaitu Tahap I (2025-2029); Tahap II (2030-2034); Tahap III (2035-2039) dan Tahap IV (2040-2045).

Gambar 5.1
Tema Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Sumber: hasil analisis, 2024

Pada setiap tahap pembangunan jangka menengah ditetapkan tema besar pembangunan untuk memberi arahan secara umum. Tema ini selanjutnya dijabarkan secara rinci melalui arah kebijakan RPJPD.

a. Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama ini, merupakan pondasi awal pembangunan dalam perubahan penyelenggaraan sistem kinerja pemerintah, dengan tema **Membangun Fondasi Transformasi Pembangunan**. Arah kebijakan ini diharapkan mampu membangun pondasi yang kuat dengan system pemerintahan yang professional sehingga akan membantu proses pembangunan daerah. Arah Kebijakan pada tahap ini:

Transformasi sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing meliputi; (1). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif

Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah, meliputi: (1) Pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan kecamatan potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, (2) Pemantapan konsep Spirit of Mahakam, (3) Kawasan Prioritas Kota Lama (Samarinda Seberang), (4) Kawasan Prioritas Pasar Palaran Dan Kampung Nelayan, (5) Penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, (6), Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan incubator bisnis, (7) Penataan dan restrukturisasi BUMD, (8) Penanganan permasalahan pada level kota



Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi; (1) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit, (2) Kebijakan pembangunan berbasis bukti, (3) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, (4) Regulasi yang efektif, dan (5) Pemberdayaan Masyarakat Sipil

Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah meliputi; (1) Peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah, (2) Peningkatan partisipasi politik yang mendorong berkembangnya kehidupan berdemokrasi, (3) Difokuskan pada mempertahankan stabilitas ekonomi makro daerah

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri, meliputi (1) Difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, (2) Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, (3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (4) Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, meliputi (1) Percepatan pelaksanaan pengembangan kewilayahan berdasarkan RTRW

Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis, meliputi (1) Penanganan permasalahan infrastruktur dan penguatan infrastruktur dasar (2) Perencanaan dan desain yang mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak lingkungan (3) Pembangunan dengan standar kualitas yang tinggi serta pemeliharaan rutin (4) investasi dan pendanaan (5) Mengadopsi Teknologi Modern (6) Keterlibatan masyarakat (7) Kolaborasi multi sektor

Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan, meliputi (1) Penerapan perencanaan dan penganggaran terpadu, (2) Penerapan manajemen risiko pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan (3) Peningkatan kapasitas institusi (4) Mendorong inovasi dan mengadopsi teknologi baru (5)



b. Tahap II (2030-2034)

Tahap ini merupakan akselerasi pembangunan yang difokuskan pada aspek atau sektor yang telah berhasil dan aspek atau sektor yang berpotensi pada pencapaian keberhasilan pembangunan sehingga dapat menggerakkan aspek atau sektor lainnya. Arah kebijakan pada tahap ini adalah:

Transformasi sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing meliputi; (1). Penguatan pembangunan SDM yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas, (2) Peningkatan kapasitas dan keahlian SDM melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan baik dengan pengembangan kurikulum untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja, infrastruktur pendidikan, kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri maupun pemberdayaan masyarakat lokal

Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah, meliputi: (1) Difokuskan pada percepatan pembangunan kecamatan-kecamatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital, (2) Kawasan Prioritas Sentra nelayan harapan Baru, (3) Kawasan Prioritas Kawasan Stadion Palaran, (4) Peningkatan produktivitas dan keahlian tenaga kerja sesuai kebutuhan pengembangan hilirisasi industri, sektor ekonomi kreatif-digital, dan pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok, (5) Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi, (6) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, dan (7) Peningkatan produktivitas BUMD

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi; (1) Difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan kompeten, (2) Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, dan (3) Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila.



Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah meliputi; (1) Pengembangan kerjasama untuk mempertahankan ketentraman dan ketertiban daerah, dan (2) Difokuskan pada terwujudnya kota yang tentram dan tertib, berkembangnya demokrasi dengan baik, serta stabilitas ekonomi daerah yang terjaga.

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri, meliputi (1) Difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif, dan (2) Akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, meliputi (1) Pengembangan kerjasama pengembangan wilayah dengan pemerintah daerah lain maupun dengan non pemerintah, (2) Pengembangan seluruh bagian kota berdasarkan daya dukung dan daya tampung serta karakteristik daerah

Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis, meliputi (1) Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh kecamatan, (2) Penguatan konektivitas dan aksesibilitas keluar dan menuju Kota Samarinda, (3) Pengembangan sarana dan prasarana sudah beroperasi, dan (3) Penyiapan infrastruktur pada pusat pemerintahan baru

Mewujudkan Kesisinambungan Pembangunan, meliputi (1) Pengembangan skema pendanaan pembangunan dari sektor publik maupun sektor non publik, (2) Pemantapan komunikasi publik dengan seluruh pelaku pembangunan (3) Menggunakan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab

c. Tahap III (2035-2039)

Pembangunan tahap ketiga merupakan kelanjutan pembangunan tahap II. Sehingga pada tahap ketiga ini arah kebijakan diharapkan mampu melanjutkan arah kebijakan pada tahap II, dan akan tercipta pembangunan yang berkesinambungan serta mampu mengatasi kekurangan pembangunan pada tahap II. Arah kebijakan pada tahap ini adalah sebagai berikut:



Transformasi sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing meliputi; (1) Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah, meliputi: (1) Difokuskan pada pemantapan Kota Samarinda sebagai pusat perdagangan dan jasa Kalimantan Timur yang unggul di pulau Kalimantan, (2) Fungsi Kota Samarinda melengkapi kebutuhan IKN yang sedang berkembang, (3) Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya, (4) Pemantapan produktivitas dan pengembangan bisnis BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi; (1) Ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, (2) SDM ASN yang kompetitif, (3) Pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, (4) Perbaikan tata Kelola melalui pendekatan Corruption Impact Assessment, dan (5) Masyarakat Sipil Mandiri

Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah meliputi; (1) Difokuskan pada terwujudnya kota yang kondusif dan tangguh

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri, meliputi (1) Difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, (2) Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, (3) Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, meliputi (1) Seluruh kecamatan berkembang pesat dan terintegrasi sesuai karakteristiknya masing-masing

Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis, meliputi (1) Difokuskan pada peningkatan konektivitas terutama pada kecamatan-kecamatan sebagai wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan, (2) Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar



secara merata di seluruh kecamatan, (3) Pemantapan pemenuhan Infrastruktur pada pusat pemerintahan baru

Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan, meliputi (1) Pelaksanaan pembangunan yang didanai tidak dari sektor publik namun juga dari sektor non publik, (2) Pemantapan kestinambungan pelaksanaan pembangunan

d. Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat ini arah kebijakan diharapkan mampu melanjutkan arah kebijakan pada tahap ketiga. Tahap ini juga merupakan **Terwujudnya Samarinda Pusat Peradaban Berbasis Perdagangan Dan Jasa yang Maju Dan Berkelanjutan**, dengan tetap melakukan percepatan pembangunan di segala aspek atau sektor. Upaya perwujudan pembangunan ini, meliputi:

Transformasi sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing meliputi; (1) Terwujudnya SDM Kota Samarinda yang berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing

Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah, meliputi: (1) Perwujudan Kota Samarinda sebagai Kota berpendapatan tinggi dan jalur Sungai Mahakam menjadi pusat lalu lintas Kalimantan, dan (2) Kota Samarinda menjadi kota terdepan berdampingan dengan kota-kota lainnya

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi; (1) Tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, dan (2) Kota Samarinda menuju zero corruption dan terselamatkannya aset dan keuangan daerah

Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah meliputi; (1) Kota Samarinda menjadi daerah yang berdaya saing tinggi

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri, meliputi (1) Difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, (2) Kota Samarinda menjadi percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, lingkungan hidup



berkualitas baik, (3) Penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission.

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, meliputi (1) Kota Samarinda pusat peradaban yang maju dan berkelanjutan

Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis, meliputi, (1) Difokuskan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di Kota Samarinda dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas

Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan, meliputi (1) Pencapaian target-target pembangunan yang mendorong perwujudan visi RPJPD Kota Samarinda

Arah kebijakan RPJPD Kota Samarinda disusun selaras dengan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dan memperhatikan arah kebijakan transformasi pada RPJPN Tahun 2025-2045 dengan tetap mempertimbangkan kewenangan serta kondisi dan karakteristik kota. Penyelarasan ini bertujuan untuk sinergi rencana pembangunan jangka panjang antara kota, provinsi, dan nasional. Lebih lanjut arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Samarinda yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan disajikan pada Tabel 5.1.

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kota Samarinda sebagai cita-cita masa depan, diharapkan konsep Tiga Kota dapat segera diimplementasikan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan provinsi serta masyarakat luas dan dunia usaha. Berbagai dukungan kebijakan untuk keberhasilan pengembangan kota, baik dari aspek SDM dan sosial, ekonomi, tata kelola, lingkungan, dan infrastruktur telah dimuat dalam tabel di bawah.



Tabel 5.1

Arah Kebijakan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Visi: SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN				
MISI RPJPD 2025-2045	TAHAPAN			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEMANTAPKAN SAMARINDA PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA KALTIM	TERWUJUDNYA SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing	• Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif	• Penguatan pembangunan SDM yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas • Peningkatan kapasitas dan keahlian SDM melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan baik dengan pengembangan kurikulum untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja, infrastruktur pendidikan, kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri maupun pemberdayaan masyarakat lokal	• Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya SDM Kota Samarinda yang berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah	• Pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan kecamatan potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada	• Difokuskan pada percepatan pembangunan kecamatan-kecamatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital.	• Difokuskan pada pemantapan Kota Samarinda sebagai pusat perdagangan dan jasa Kalimantan Timur yang unggul di pulau Kalimantan • Fungsi Kota Samarinda melengkapi kebutuhan IKN yang sedang berkembang	• Perwujudan Kota Samarinda sebagai Kota berpendapatan tinggi dan jalur Sungai Mahakam menjadi pusat lalu lintas Kalimantan • Kota Samarinda menjadi kota terdepan berdampingan dengan kota-kota lainnya



Visi: SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN				
MISI RPJPD 2025-2045	TAHAPAN			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEMANTAPKAN SAMARINDA PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA KALTIM	TERWUJUDNYA SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• Pemantapan konsep Spirit of Mahakam • Kawasan Prioritas Kota Lama (Samarinda Seberang) • Kawasan Prioritas Pasar Palaran Dan Kampung Nelayan • Penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan incubator bisnis. • Penataan dan restrukturisasi BUMD • Penanganan permasalahan pada level kota	• Kawasan Prioritas Sentra nelayan harapan Baru • Kawasan Prioritas Kawasan Stadion Palaran • Peningkatan produktivitas dan keahlian tenaga kerja sesuai kebutuhan pengembangan hilirisasi industri, sektor ekonomi kreatif-digital, dan pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok • Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi • Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. • Peningkatan produktivitas BUMD	• Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. • Pemantapan produktivitas dan pengembangan bisnis BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah	
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	• Peningkatan kualitas ASN berbasis merit • Kebijakan pembangunan berbasis bukti • Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	• Difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan kompeten • Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi,	• Ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif • SDM ASN yang kompetitif • Pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi	• Tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif • Kota Samarinda menuju <i>zero corruption</i> dan terselamatkannya aset dan keuangan daerah



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



Visi: SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN				
MISI RPJPD 2025-2045	TAHAPAN			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEMANTAPKAN SAMARINDA PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA KALTIM	TERWUJUDNYA SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Regulasi yang efektif - Pemberdayaan Masyarakat Sipil	Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila	- Perbaikan tata Kelola melalui pendekatan <i>Corruption Impact Assessment</i> - Masyarakat Sipil Mandiri	
4. Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	- Peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah - Peningkatan partisipasi politik yang mendorong berkembangnya kehidupan berdemokrasi - Difokuskan pada mempertahankan stabilitas ekonomi makro daerah	- Pengembangan kerjasama untuk mempertahankan ketentraman dan ketertiban daerah - Difokuskan pada terwujudnya kota yang tentram dan tertib, berkembangnya demokrasi dengan baik, serta stabilitas ekonomi daerah yang terjaga.	Difokuskan pada terwujudnya kota yang kondusif dan tangguh	Kota Samarinda menjadi daerah yang berdaya saing tinggi
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri	- Difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat - Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana;	- Difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif - Akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi	- Difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana - Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	- Difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana - Kota Samarinda menjadi percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, lingkungan hidup berkualitas baik



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



Visi: SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN				
MISI RPJPD 2025-2045	TAHAPAN			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEMANTAPKAN SAMARINDA PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA KALTIM	TERWUJUDNYA SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.		• Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik	• Penurunan emisi GRK menuju pencapaian <i>net zero emission</i>.
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Percepatan pelaksanaan pengembangan kewilayahan berdasarkan RTRW	• Pengembangan kerjasama pengembangan wilayah dengan pemerintah daerah lain maupun dengan non pemerintah • Pengembangan seluruh bagian kota berdasarkan daya dukung dan daya tampung serta karakteristik daerah	Seluruh kecamatan berkembang pesat dan terintegrasi sesuai karakteristiknya masing-masing	Kota Samarinda pusat peradaban yang maju dan berkelanjutan
7. Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis	Penanganan permasalahan infrastruktur dan penguatan infrastruktur dasar	• Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh kecamatan • Penguatan konektivitas dan aksesibilitas keluar dan menuju Kota Samarinda.	• Difokuskan pada peningkatan konektivitas terutama pada kecamatan-kecamatan sebagai wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan • Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh kecamatan	Difokuskan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di Kota Samarinda dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.



Visi: SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN				
MISI RPJPD 2025-2045	TAHAPAN			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEMANTAPKAN SAMARINDA PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA KALTIM	TERWUJUDNYA SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		• Pengembangan sarana dan prasarana sudah beroperasi • Penyiapan infrastruktur pada pusat pemerintahan baru	• Pemantapan pemenuhan Infrastruktur pada pusat pemerintahan baru	
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	• Penerapan perencanaan dan peganggaran terpadu • Penerapan manajemen risiko pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan	• Pengembangan skema pendanaan pembangunan dari sektor publik maupun sektor non publik • Pemantapan komunikasi publik dengan seluruh pelaku pembangunan	• Pelaksanaan pembangunan yang didanai tidak dari sektor publik namun juga dari sektor non publik • Pemantapan kestinambungan pelaksanaan pembangunan	Pencapaian target-target pembangunan yang mendorong perwujudan visi RPJPD Kota Samarinda

Sumber: hasil analisis, 2024



5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan isu strategis daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sasaran pokok menjabarkan kinerja pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan RPJPD. Sasaran pokok diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan, dan indikator kinerjanya lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

1. Meningkatnya daya saing dan kualitas hidup Sumber Daya Manusia

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Kota Samarinda yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

Kesehatan untuk semua

Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif dilaksanakan untuk menjamin tersedianya akses dan layanan kesehatan berkualitas secara merata dan berkeadilan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif akan dicapai jika prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya sumber daya kesehatan yang adekuat, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan. Arah kebijakan untuk mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang inklusif di Kota Samarinda adalah: (1) Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan, (2) Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis, (3) Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan, dan (4) Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung teknologi informasi dan komunikasi

Pendidikan berkualitas secara inklusif



Prinsip pembangunan pendidikan adalah inklusif dan adaptif. Prinsip inklusif berarti akses yang merata di seluruh wilayah Kota Samarinda dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat Samarinda tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, fisik, mental, maupun usia (lifelong learning). Prinsip adaptif menekankan pada penyesuaian metode pengajaran, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi unik setiap individu dengan optimal. Selain itu, pembangunan pendidikan yang adaptif juga mengarahkan pada kualitas pendidikan multidisiplin dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kesuksesan pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui peningkatan hasil pembelajaran peserta didik, meliputi kemampuan literasi membaca dan numerasi. Proporsi penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan seiring penambahan jumlah pekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

Dalam mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan Pendidikan Kota Samarinda dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada transformasi pendidikan, meliputi transformasi tata kelola pendidikan, akses layanan pendidikan serta mutu pendidikan berorientasi nilai, relevansi dan berbasis teknologi. Arah kebijakan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas secara inklusif untuk dua puluh tahun ke depan adalah: (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun, (2) Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK), (3) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, (4) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, (5) Pemantapan koordinasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dan kebutuhan pasar kerja, (6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, dan (7) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi

Perlindungan sosial yang adaptif

Perlindungan sosial tersebut bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengamanan dari risiko yang mungkin dihasilkan saat terjadi ancaman, serta jaminan bagi setiap individu untuk hidup sejahtera dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Perlindungan sosial diarahkan bersifat inklusif dan



berkeadilan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lanjut usia, dan penduduk rentan lainnya memiliki kesetaraan akses terhadap layanan dan manfaat perlindungan sosial sehingga dapat mengusahakan kesejahteraan dan penghidupan secara mandiri dan berdaya. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi gambaran dari ketangguhan masyarakat serta keberhasilan upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial yang dilakukan, selain peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berguna untuk memastikan keamanan finansial dan sosial kepada pekerja. Selain itu, peningkatan persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dapat menggambarkan inklusivitas serta partisipasi penuh dan setara pada angkatan kerja.

Kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat Kota Samarinda dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: (1) Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, (2) Pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas, dan (3) Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat

2. Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Perwujudan sasaran pokok tersebut dilakukan secara bertahap dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, dan juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia agar lebih produktif dan inovatif agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Upaya yang dilakukan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah yang dilakukan dengan mendorong hilirisasi didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi. Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi



sampai ke generasi berikutnya, maka diterapkan pembangunan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Upaya perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan produktivitas yang semakin meningkat dan menerapkan prinsip ekonomi hijau, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok *Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan* difokuskan pada empat arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

Iptek dan inovasi menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui (1) Pemantapan perekonomian daerah yang berbasis perdagangan dan jasa yang mendukung pengembangan konsep Tri Kota dan superhub ekonomi IKN, (2) Pengembangan destinasi wisata potensial dan ekowisata, (3) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, (4) Industrialisasi koperasi, (5) Peningkatan produktivitas BUMD, (6) Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, (7) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi local, dan (8) Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar akselerasi aktivitas ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui: (1) Pengembangan industri teknologi bersih, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan pariwisata kebugaran, dan ekonomi rendah karbon, (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, (3) Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan

Transformasi digital adalah salah satu upaya untuk mendukung mewujudkan transformasi ekonomi melalui pengembangan super platform, produksi talenta digital dan percepatan transformasi digital diantaranya konektivitas giga (kapasitas bandwidth besar) untuk mendukung penerapan teknologi digital masa depan, peningkatan



inovasi digital, pengembangan SDM digital yang terampil dengan masyarakat digital yang berbudaya, hingga regulasi dan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang merata. Transformasi digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait: (1) regulasi dan institusi; (2) pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk pendidikan dan pelatihan; (3) infrastruktur digital dan teknologi, (4) keterpaduan data (data enablement); (5) modal investasi teknologi (financing technologies); serta (6) riset dan inovasi.

Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan perekonomian Kota Samarinda yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global melalui peningkatan nilai tambah komoditas yang berdaya saing global dan peningkatan sarana prasarana serta konektivitas ekonomi domestik dan global

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih

Dalam semangat menciptakan pemerintah Kota Samarinda yang progresif dan responsif menjawab tantangan perubahan dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat, diperlukan transformasi tata kelola menuju perencanaan regulasi dan sistem pelayanan publik yang berkualitas, harmonis, adaptif dan berintegritas. Adapun keberhasilan dari sasaran pokok ini akan tercermin dalam tingkat integritas aparat pemerintahan yang tinggi, yang ditandai dengan penurunan tingkat korupsi. Selain itu, tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif dapat dilihat dari kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang diiringi dengan inovasi sistem berbasis elektronik. Perancangan regulasi yang harmonis juga menjadi tolak ukur dalam sasaran pokok ini agar tercipta regulasi yang berkualitas, dan akuntabel dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Perwujudan regulasi dan sistem pelayanan publik yang berkualitas, harmonis, adaptif dan berintegritas tersebut dilakukan melalui arah kebijakan transformasi tata kelola.

4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, serta demokrasi

Keberhasilan pencapaian transformasi di Kota Samarinda secara menyeluruh perlu didukung dengan wilayah yang tentram, tertib dan



demokratis. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta demokrasi arah kebijakannya dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: (1) penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, (2) pemenuhan hak asasi manusia, (3) penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, serta (4) penguatan integritas partai politik.

5. Meningkatnya stabilitas ekonomi dan produktivitas daerah

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemudahan dunia usaha mengakses modal dan pembiayaan, terkendalinya inflasi, mengurangi risiko terjadinya fluktuasi ekonomi yang berlebihan dan bertambahnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: (1) Penguatan pengendalian inflasi daerah; (2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; (3) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Peningkatan produktivitas daerah

Peningkatan produktivitas daerah tergantung pada perwujudan daya saing daerah yang dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam membangun daerahnya, termasuk dalam menjaga ketahanan wilayah. Arah kebijakan dalam upaya mewujudkan daya saing daerah dan ketahanan wilayah Kota Samarinda dua puluh tahun ke depan meliputi: (1) peningkatan partisipasi kepala daerah dalam forum internasional, (2) penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, (3) penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.

6. Meningkatnya ketahanan sosial budaya dalam masyarakat



Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya ketahanan sosial budaya dalam masyarakat difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakannya sebagai berikut:

Perwujudan masyarakat beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat tercapai melalui: (1) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; (2) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (3) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, berkeadilan; dan (5) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan

Peningkatan ketangguhan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlindungi sesuai siklus kehidupan, pembagian peran yang setara, serta didukung lingkungan yang aman dan sehat. Keluarga sebagai unit terkecil pada struktur masyarakat berperan penting dalam mewujudkan individu Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (1) peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (2) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (3) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (4) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah



keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (no one left behind) dengan arah kebijakan: (1) penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif; (2) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (3) penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan

7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan: (1) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (2) Peningkatan kualitas penataan ruang, dengan mengupayakan ruang terbuka hijau, pencegahan banjir, dan rehabilitasi lahan pasca tambang, (3) peningkatan kualitas air dan udara melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau (4) peningkatan pengelolaan limbah B3 berkelanjutan; (5) peningkatan pengelolaan ekosistem daratan, laut dan pesisir yang terintegrasi; (6) pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan; dan (7) perumusan regulasi daerah sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, juga dibutuhkan implementasi pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan dengan arah kebijakan pengelolaan air limbah dan sampah melalui penerapan teknologi tepat guna, terpadu, dan terjangkau, serta pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air.

Ketahanan energi diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pasokan energi yang stabil, aman, dan berkelanjutan melalui



diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta pengembangan energi baru terbarukan. Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air adalah konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Hal ini didukung oleh peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air serta sistem informasi sumber daya air. Dari sisi pemanfaatan, pembangunan infrastruktur ketahanan air perlu didorong untuk mewujudkan akses air minum aman serta penyediaan air minum perpipaan bagi rumah tangga di wilayah perkotaan.

Resiliensi terhadap bencana diperlukan untuk mengurangi kerugian langsung maupun tidak langsung akibat bencana. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana antara lain: (1) identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan; (2) penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah; (3) penyediaan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; (4) pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas; peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana; (5) pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Penerapan pembangunan yang rendah karbon untuk mewujudkan Net Zero Emission dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup: (1) peningkatan rehabilitasi hutan, lahan serta mangrove, penghambatan laju deforestasi, serta pencegahan penurunan cadangan karbon, (2) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT, (3) pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (4) pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (5) pengembangan industri hijau; dan (6) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Samarinda dan berkontribusi



terhadap pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional. Penentuan 17 arah pembangunan kota selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional, dengan memperhatikan aspek kewenangan daerah dan karakteristik daerah. Arah pembangunan dalam RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045, meliputi:

Tabel 5.2

Arah Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2045

No.	Misi	Arah Pembangunan
1	Transformasi sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1. Kesehatan untuk Semua
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		5. Penerapan Ekonomi Hijau
		6. Transformasi Digital
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
3	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik	8. Pertumbuhan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Ekonomi
		9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif disertai Pelayanan Publik yang Prima
4	Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10. Hukum Berkeadilan, Ketentraman dan Ketertiban Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		11. Stabilitas Ekonomi Makro
		12. Peningkatan Produktivitas Daerah
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	
7	Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis	
8	Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan	

Sumber: hasil analisis, 2024



5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya yang dipilih untuk mendukung pencapaian arah pembangunan daerah serta menggambarkan upaya transformasi yang sesuai dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi RPJPD Kota Samarinda. Transformasi pembangunan daerah meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang didukung dengan landasan transformasi dan implementasi transformasi. Arah kebijakan transformasi disesuaikan dengan karakteristik daerah serta diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penentuan arah kebijakan transformasi RPJPD Kota Samarinda sebagaimana dimuat pada Tabel 5.3 merupakan hasil penyelarasan dengan RPJPD provinsi dan nasional serta menjawab isu strategis kota.



Tabel 5.3

Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Samarinda

No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
1	Transformasi Sosial	1	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan dilaksanakan melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penguatan peran layanan kesehatan primer	Seluruh Kecamatan, seluruh puskesmas dan posyandu
		2	Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis	Penuntasan stunting dan penurunan insidensi tuberkulosis dilaksanakan melalui pendekatan integrasi multisektor dan pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan	Seluruh Kecamatan
		3	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas serta kualitas tenaga kesehatan dilaksanakan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya, serta afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal	Seluruh puskesmas dan rumah sakit
		4	Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas	Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berbasis kewilayahan dan teknologi	Seluruh Kecamatan
		5	Percepatan wajib belajar 13 tahun	Percepatan wajib belajar 13 tahun dilaksanakan melalui pemenuhan akses 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Seluruh Kecamatan
		6	Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan didukung teknologi informasi dan komunikasi	Seluruh Kecamatan
		7	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dilaksanakan melalui pemberian kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan pemberian dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi serta pengadaan program studi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah	Seluruh Kecamatan
		8	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			modern dan adaptif serta pemenuhan ketersediaan tenaga pendidik	
		9 Pemantapan koordinasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dan kebutuhan pasar kerja.	Pemantapan koordinasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dilaksanakan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global yang didasarkan pada lapangan usaha potensial masa depan dan kebutuhan pasar kerja.	Seluruh Kecamatan
		10 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dilaksanakan melalui revitalisasi dan pengembangan pendidikan vokasi dalam rangka menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perdagangan, jasa, industri dan pariwisata, dengan memperhatikan sistem produksi dan tata niaga serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui <i>skema education to employment</i> .	Seluruh Kecamatan
		11 Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui sertifikasi tenaga konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga jasa konstruksi, dan kerja sama <i>stakeholders</i> dalam pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan.	Seluruh Kecamatan
		12 Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal dengan peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
2	Transformasi Ekonomi	13	Pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pemberian perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, perluasan akses bekerja pada sektor formal untuk penyandang disabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang disabilitas.	Seluruh Kecamatan
		14	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.	Seluruh Kecamatan
		1	Pemantapan perekonomian daerah yang berbasis perdagangan dan jasa yang mendukung pengembangan konsep Tri Kota dan mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN	Pemantapan perekonomian daerah berbasis perdagangan dan jasa yang mendukung pengembangan konsep Tri Kota dan mitra IKN dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur perdagangan, penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran alur barang/jasa, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, promosi dan dukungan usaha, peningkatan iklim dan daya tarik investasi, inovasi dan teknologi, edukasi kesadaran publik, konektivitas dan aksesibilitas. energi baru terbarukan yang rendah karbon, dan berkelanjutan.	Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, dan Palaran
		2	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan kawasan industri lainnya.	Kecamatan Palaran, Sungai Kunjang, Sambutan, Loa Janan Ilir
		3	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai.	Kecamatan Palaran, Sungai Kunjang, Sambutan, Loa Janan Ilir



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		4	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui penguatan nilai tambah industri strategis, pengembangan industri yang memiliki kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.	Kecamatan Palaran, Sungai Kunjang, Sambutan, Loa Janan Ilir
		5	Pengembangan industri energi terbarukan	Pengembangan industri energi terbarukan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan industri panel surya, bioenergi, hidroelektrik dan industri energi terbarukan lainnya, dalam upaya mendukung percepatan transisi energi	Seluruh Kecamatan
		6	Pengembangan destinasi wisata potensial dan ekowisata	Pengembangan destinasi wisata dilakukan dengan mempedomani RIPPDA Kota Samarinda melalui pelestarian lingkungan; pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pemberian insentif; investasi infrastruktur pariwisata; pemasaran pariwisata; serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.	Seluruh Kecamatan
		7	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global dilaksanakan melalui optimalisasi kawasan industri dan peningkatan daya saing komoditas unggulan.	Seluruh Kecamatan
		8	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pengembangan ekonomi masa depan	Seluruh Kecamatan
		9	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, berkelanjutan, dan terintegrasi dilaksanakan melalui penerapan <i>smart environment</i> , <i>smart infrastructure</i> , <i>smart governance</i> , <i>smart economy</i> , <i>smart people</i> dan <i>smart living</i> dalam setiap aspek pembangunan perkotaan.	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		10	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penguatan keterhubungan antar kawasan 3 (tiga) kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) dengan berbasis pada karakteristik wilayah serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Seluruh Kecamatan
		11	Industrialisasi koperasi	Industrialisasi koperasi dilaksanakan melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Seluruh Kecamatan
		12	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Seluruh Kecamatan
		13	Peningkatan produktivitas BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui perbaikan regulasi, penguatan kapasitas pengelola dan akses pembiayaan, serta optimalisasi peluang <i>participating interest</i> .	Seluruh Kecamatan
		14	Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman	Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman dilaksanakan melalui pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> serta transisi <i>school-to-work</i> dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Program Magang dan Praktek Kerja, Pelatihan Keterampilan Teknis, Kolaborasi dengan Perusahaan Lokal, E-Learning dan Pelatihan Online, Simulasi dan <i>Virtual Reality</i> (VR), dan Pelatihan Berkelanjutan.	Seluruh Kecamatan
		15	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dilaksanakan melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	Kota Samarinda
		16	Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	Pengembangan potensi sektor ekonomi baru berbasis inovasi dilaksanakan melalui pengembangan biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan.	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		17 Pengembangan industri teknologi bersih, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan pariwisata kebugaran, dan ekonomi rendah karbon.	Pengembangan industri teknologi bersih, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan pariwisata kebugaran, dan ekonomi rendah karbon dilaksanakan melalui pengembangan industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai. Industri pertanian nabati dan inovasi pangan untuk masa depan yang berkelanjutan dan resilien. Ekowisata yang menyeimbangkan nilai ekonomi, lingkungan dan sosial secara beragam dan inklusif. Dan transformasi sektor energi konvensional dengan melibatkan teknologi berkelanjutan dan inovasi dekarbonisasi.	Kecamatan Samarinda Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Utara, Samarinda Kota, Sungai Pinang, dan Sambutan
		18 Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan	Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dilaksanakan melalui pengembangan teknologi adaptif dan pengembangan industri energi terbarukan dalam upaya percepatan transisi energi menuju energi bersih dan terjangkau.	Kecamatan Sambutan
		19 Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui: (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia, (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik, (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan, (iv) pengembangan system interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik, (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik, (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi, (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
				bersertifikat, dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga Listrik yang berkelanjutan.	
		20	Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital dilaksanakan melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (perluasan jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh Kota Samarinda), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (peningkatan digitalisasi di sektor strategis), peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital (peningkatan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>).	Seluruh Kecamatan
3	Transformasi Tata Kelola	1	Optimasi regulasi daerah	Optimasi regulasi daerah dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, pra-regulasi, re-regulasi dan de-regulasi yang memadai, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan instrument penegakan regulasi daerah.	Kota Samarinda
		2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan	Kota Samarinda



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		3	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Kota Samarinda
		4	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga	Kota Samarinda
		5	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kota Samarinda
		6	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Kota Samarinda
		7	Penguatan integritas partai politik	



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah	Peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas dilaksanakan melalui peningkatan dan fasilitasi penguatan Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan masyarakat, pemetaan wilayah rawan trantibum, pencatatan masyarakat yang pindah domisili atau menetap sementara secara terintegrasi, serta kolaborasi dengan aparat kepolisian	Seluruh Kecamatan
		2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah dilaksanakan melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.	Kota Samarinda
		3	Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang substitusi.	Kota Samarinda
		4	Peningkatan daya saing daerah	Peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui penataan institusi, penyediaan dan pengembangan infrastruktur, penerapan TIK, stabilitas ekonomi makro, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan keterampilan, peningkatan pasar produk, perluasan pasar tenaga kerja, penguatan sistem keuangan, pengembangan pasar, dinamisme bisnis, dan penerapan inovasi.	Kota Samarinda
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		2	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Seluruh Kecamatan
		3	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Seluruh Kecamatan
		4	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter	Seluruh Kecamatan
		5	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya	Seluruh Kecamatan
		6	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Seluruh Kecamatan
		7	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		8	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Seluruh Kecamatan
		9	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Seluruh Kecamatan
		10	Pengembangan diversifikasi pangan	Seluruh Kecamatan
		11	Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut	Kota Samarinda
		12	Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang	Kota Samarinda
		13	Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem.	
		14 Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	Seluruh Kecamatan
		15 Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi	Seluruh Kecamatan
		16 Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk kebakaran hutan	Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk kebakaran hutan dilaksanakan melalui peningkatan pemahaman tentang nilai hutan, peningkatan manajemen pengelolaan risiko kebakaran hutan, dan mendorong alokasi pendanaan penanganan kebakaran berbasis solusi alam	Seluruh Kecamatan
		17 Peningkatan ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dilaksanakan melalui peningkatan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal, dan peningkatan respons adaptif terhadap bencana	Seluruh Kecamatan
		18 Pembangunan bendung/bendungan	Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan	Kota Samarinda
		19 Pembangunan irigasi baru	Pembangunan irigasi baru diutamakan pada wilayah sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan yang sesuai untuk tanaman pangan.	Kota Samarinda
		20 Pengendalian banjir	Pengendalian banjir dilaksanakan terutama melalui pengemban dan pengembangan area yang terdedikasikan sebagai retarding basin (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah sekitar IKN.	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		21	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem	Seluruh Kecamatan
		22	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui optimalisasi penerapan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> serta penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya	Seluruh Kecamatan
6	Implementasi Transformasi	1	Peningkatan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur ruang pengendalian pemanfaatan ruang dan penuntasan RDTR Kota Samarinda	Samarinda Utara, Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Ulu, Seberang, Loa Janan Ilir, Sambutan
		2	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk kelembagaan agrarian di daerah, legalisasi aset, mendorong redistribusi tanah, penyelesaian konflik agrarian secara berkeadilan, berkelanjutan dan akuntabel, serta pemberdayaan ekonomi Masyarakat subjek reforma agrarian, salah satunya melalui program perhutanan sosial.	Seluruh Kecamatan
		3	Pengembangan pelabuhan sungai	Pengembangan pelabuhan laut diutamakan pada pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep <i>Economic Hub</i> tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Samarinda yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai <i>hub</i> internasional)	Tepi Sungai Mahakam
		4	Pengembangan dan Pembangunan bandara	Pembangunan bandara utama Bandara APT Pranoto yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk <i>aerocity</i>) serta pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i> (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi), sementara itu Pembangunan bandara ditujukan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan percepatan Pembangunan.	Kecamatan Samarinda Utara



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		5	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah	Seluruh Kecamatan
		6	Pemantapan koordinasi pengembangan moda kereta api	Pemantapan koordinasi pengembangan moda kereta api ditujukan untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota yang pengembangannya diselaraskan dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah	Kota Samarinda
		7	Pengembangan angkutan Sungai	Pengembangan transportasi sungai ditujukan untuk peningkatan kualitas distribusi logistik dan penumpang serta akses ke simpul utama transportasi	Kota Samarinda
		8	Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi	Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi dilaksanakan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal di kota-kota besar dan sedang yang andal, sesuai, modern dan terintegrasi antar simpul transportasi, sesuai dengan proyeksi perkembangan penduduknya	Seluruh Kecamatan
		9	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan akses sanitasi, peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman	Seluruh Kecamatan
		10	Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilaksanakan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana	Seluruh Kecamatan
		11	Pemerataan terhadap akses hunian layak	Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat	Seluruh Kecamatan



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		12	Penanganan kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman	Seluruh Kecamatan
		13	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman dilaksanakan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau SPALD-S maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau SPALD-T	Seluruh Kecamatan
		14	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen perencanaan di tingkat pusat sebagai acuan penyelarasan lingkup waktu pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan	Kota Samarinda
		15	Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW	Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam dokumen RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis) dalam RTRW dengan mengacu pada lingkup waktu periodisasi RPJPD	Kota Samarinda
		16	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinerja yang mengacu pada pencapaian sasaran daerah	Kota Samarinda
		17	Perkuatan pengendalian pembangunan	Perkuatan pengendalian Pembangunan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penerapan manajemen resiko	
		18	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah, pengendalian	Kota Samarinda



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi		Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
				pengembangan aplikasi bersifat khusus dan optimalisasi penyelenggaraan satu data	
		19	Pengembangan pembiayaan inovatif	Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, <i>blended finance</i> , pemanfaatan dana abadi daerah, dana jasa ekosistem dan pasar karbon	Kota Samarinda
		20	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasi keberlanjutannya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah antar periode	Kota Samarinda

Sumber: hasil analisis, 2024



5.2.3. Upaya Transformasi Super Prioritas (GAME CHANGERS)

Berbagai arah kebijakan transformasi telah ditentukan untuk keberhasilan transformasi pembangunan jangka panjang daerah. Dari seluruh arah kebijakan tersebut, dipilih beberapa upaya transformasi yang super prioritas atau disebut *game changers* yang berdaya ungkit tinggi dan akan memberi dampak luas termasuk bagi arah kebijakan lainnya. Upaya transformasi super prioritas (*Game Changers*) untuk akselerasi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda tahun 2025-2045, meliputi:

Transformasi Sosial

1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun
2. Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
3. Penuntasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Adaptif Terintegrasi

Transformasi Ekonomi

4. Pengembangan Industri pengolahan dan peningkatan Investasi
5. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman
6. Pengembangan *Smart City Plus*
7. Pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan daerah mitra yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing
8. Integrasi Infrastruktur Konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi

Transformasi Tata Kelola

9. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

10. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
11. Penegakan peraturan daerah
12. Peningkatan nilai kemandirian fiskal daerah

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

13. Lingkungan hidup berkualitas dan reformasi pengelolaan sampah
14. Energi Terbarukan Lokal

Implementasi Transformasi

Penyajian *Game Changers* pembangunan jangka panjang yang disajikan berdasarkan misi RPJPD yang selaras dengan game changer Provinsi Kalimantan Timur dan RPJPN disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.4
Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*)

Misi	Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)		
	RPJPD Kota Samarinda	RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	RPJPN
Misi 1. Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun 2. Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 3. Penuntasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Adaptif Terintegrasi	1. Pemenuhan akses wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan menengah) serta peningkatan investasi di bidang Pendidikan secara efektif yang selaras dengan potensi pengembangan perekonomian daerah; 2. Percepatan peningkatan kualitas Pendidikan menengah yang mampu bersaing di level Nasional; 3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi berbasis Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic (STEAM); 4. Pemenuhan akses dan layanan Kesehatan berkualitas secara merata, mengakselerasi penurunan angka prevalensi stunting, eliminasi penyakit menular, serta peningkatan kesadaran penerapan pola hidup bersih dan sehat; 5. Pengurangan kemiskinan secara massif melalui intervensi yang efektif dan tepat sasaran, serta perlindungan social adaptif yang terintegrasi; 6. Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja.	1. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) 2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan 3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan. 4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta) 5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



Misi	Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)		
	RPJPD Kota Samarinda	RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	RPJPN
Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah	4. Pengembangan Industri pengolahan dan peningkatan Investasi 5. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman 6. Pengembangan <i>Smart city plus</i> 7. Pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan daerah mitra yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing 8. Integrasi Infrastruktur Konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi	7. Peningkatan kegiatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) dan penerapannya yang mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan; 8. Akselerasi Pembangunan dan pengembangan Superhub Ekonomi IKN berbasis aglomerasi yang terintegrasi dan terkoneksi kuat dengan daerah mitra IKN; 9. Percepatan pengembangan energi baru terbarukan dalam kerangka transisi energi berkeadilan; 10. Pengembangan kewirausaha, pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan; 11. Peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pada Kawasan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah; 12. Percepatan Pembangunan ekosistem digital dan produksi talenta digital; 13. Optimalisasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sumber daya pesisir dan kelautan dalam konteks ekonomi maritim; 14. Pembangunan desa menuju desa mandiri berbasis inovasi dan kreatifitas.	6. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri. 7. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor 8. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transformasi hijau 9. Super Platform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. 10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi 11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	9. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas	15. Penerapan sistem merit secara optimal dan peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN);	12. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



Misi	Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)		
	RPJPD Kota Samarinda	RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	RPJPN
Pemerintahan yang Baik	aparatur daerah dan lembaga	16.Digitalisasi seluruh layanan pemerintahan.	penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi; 13.Penguatan integritas partai politik.
Misi4 Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 11.Penegakan peraturan daerah 12.Peningkatan nilai kemandirian fiskal daerah	17. Penguatan keamanan dan ketertiban umum berbasis masyarakat; 18.Penegakan peraturan daerah secara menyeluruh; 19.Peningkatan kualitas kemandirian fiskal daerah.	14.Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advocat general. 15.Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan <i>value chain</i> industri nasional 16.Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal 17.Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran
Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri	13.Lingkungan hidup berkualitas dan reformasi pengelolaan sampah 14.Energi Terbarukan Lokal	20.Penguatan karakter dan budaya asli daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 21.Pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang dapat menciptakan ekonomi sirkular;	18.Penguatan karakter dan jati diri bangsa 19.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir 20.Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water)



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



Misi	Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)		
	RPJPD Kota Samarinda	RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	RPJPN
		22. Penguatan ketahanan energi, air dan pangan secara terpadu dan berkelanjutan	
Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan			
Misi 7. Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis			
Misi 8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan.			

Sumber: hasil analisis, 2024



5.2.4. Indikator Utama Pembangunan Daerah

Penetapan sasaran pokok RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 memiliki peran yang sangat penting sebab akan menjadi sasaran 4 (empat) periode RPJMD. Untuk itu, sasaran pokok harus dapat menggambarkan kinerja daerah yang akan dicapai secara bertahap sampai dengan akhir periode RPJPD pada tahun 2045. Sasaran pokok dilengkapi dengan indikator kinerja yang disebut Indikator Utama Pembangunan (IUP). IUP yang digunakan untuk mengukur kinerja sasaran pokok RPJPD merupakan hasil penyelarasan dengan IUP pada tingkat provinsi.

Indikator utama pembangunan jangka panjang Kota Samarinda dilengkapi dengan target per tahapan. Target IUP pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah yang disajikan berdasarkan misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan disajikan pada Tabel 5.5. Penentuan indikator memedomani Surat Edaran Gubernur Nomor: 000.7.2.1/4322/Bapp-II tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Indikator yang disajikan pada tabel tersebut selaras dengan IUP provinsi, walaupun terdapat beberapa indikator yang merupakan indikator proksi. Selain itu, terdapat juga beberapa indikator yang digunakan oleh provinsi namun tidak dimuat dalam Tabel 5.5 sebab tidak tersedia data di kabupaten/kota dan/atau bukan kewenangan kabupaten/kota.

Pada tabel tersebut, sasaran pokok Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih dan sasaran pokok Terwujudnya pembangunan yang efektif dan efisien dilaksanakan dengan arah pembangunan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif disertai Pelayanan Publik yang Prima. Hal ini dengan pertimbangan bahwa kedua sasaran pokok dimaksud memiliki keterkaitan dan dapat dicapai dengan strategi yang sama. Selain itu, jumlah arah pembangunan harus berjumlah 17 agar selaras dengan 17 Indonesia Emas (IE) pada RPJPN dan 17 arah pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



Tabel 5.5

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target				
							2029	2034	2039	2045	
1	Transformasi sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya daya saing dan kualitas hidup Sumber Daya Manusia	1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,63	76,51	77,61	78,82	80,29	
				2	a) Jumlah Kematian Ibu (kasus)	11	10	9	6	2	
					b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,80	16,98	13,04	9,10	4,71	
				3	a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (%)	84,42	87,61	91,61	95,61	100	
					b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90,44	92,21	94,86	96,63	99,28	
				4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100	
			2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:						
					Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
					a) Literasi Membaca SD/Sederajat		65,04	70,70	75,38	80,06	85,67
					b) Literasi Membaca SMP/Sederajat		81,41	86,07	87,07	88,07	89,27
					c) Numerasi SD/Sederajat		50,70	55,02	60,42	65,82	72,3
					d) Numerasi SMP/Sederajat		74,13	76,13	78,63	81,13	84,13
					e) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)		11,40	11,92	12,57	13,21	13,99
					f) Harapan Lama Sekolah (tahun)		15,73	15,89	16,09	16,28	16,52
					6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)	17,80	18,24	18,79	19,34	20,00



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%)	67,14	70,71	75,18	79,64	85,00
			3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	4,15	2,90	2,20	1,80	1,32
				9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	36,7	49,36	65,19	81,01	100
2	Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah	2. Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	7,00	8,61	11,14	14,42	19,66
				12	Pengembangan Pariwisata	4,61	5,17	5,97	6,89	8,18
					a) Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	7209	11535	16942	22349	28838
					b) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	7,00	8,61	11,14	14,42	19,66
				13	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif (%)	2000	3600	5600	7600	10000
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
					a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%)	0,1	0,5	0,10	0,15	2
					b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,94	4,69	5,84	7,27	9,45
					c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,32	0,45	0,55	0,61	0,66
					d) <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	6,74	12,60	19,93	27,26	36,06
				15	Penciptaan Lapangan Kerja yang baik					
					a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,31	4,26	4,19	4,12	4,04
					b) Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	63,71	69,23	75,96	82,68	90,75



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
				16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,48	57,84	59,74	61,55	65,68
				17	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	61,16	66,01	72,63	79,90	89,60
			5. Penerapan Ekonomi Hijau							
			6. Transformasi Digital	19	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir (%)	85,50	88,06	91,27	94,47	98,32
			7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Disparitas Harga (%)	-9,86	-8,99	-8,17	-7,54	-6,94
				21	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	47,52	47,16	46,71	46,26	45,73
				22	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	-8,40	-6,68	-5,33	-4,98	-3,94
			8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
				23	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	89,74	100	100	100	100
3	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih	9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif disertai Pelayanan Publik yang Prima							
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,85	4,22	5,00	5,00	5,00
				26	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,30	4,50	4,60	4,70	4,80
				27	Indeks Integritas Pemerintah (indeks)	74,50	78,58	82,32	85,04	91,50



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2029	2034	2039	2045
4	Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta demokrasi	10. Hukum Berkeadilan, Ketentraman dan Ketertiban Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Penguatan Demokrasi dan Penegakkan Peraturan Daerah a) Persentase Penegakkan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100	100
				29	a) Jumlah kejadian tindak kriminal (kasus)*	1.202	1.199	1.194	1.190
					c) Jumlah Kejadian Konflik SARA	0	0	0	0
				30					
		5. Meningkatnya stabilitas ekonomi dan produktivitas daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,78	0,89	1,04	1,23
				32	Tingkat Inflasi (%)	2,50	2,39	2,26	2,14
				33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
					a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	60,21	64,26	69,70	75,60
					b) Total Kredit/PDRB (%)	38,89	43,75	50,69	58,72
				34					
			12. Peningkatan produktivitas daerah	35	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	4,16	4,22	4,28	4,34



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri	6. Meningkatnya ketahanan sosial budaya dalam masyarakat	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (indeks)	57,5	60,9	65,14	69,39	74,49
			14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (indeks)	74,96	78,51	83,20	88,16	94,50
				40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	0,21	0,185	0,158	0,135	0,112
		7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41						
				42	Kualitas Lingkungan Hidup					
					a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	70,22	70,90	71,74	72,60	73,64
					b) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	71	76,80	84,05	91,30	100
					c) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	98,00	100	100	100	100
		16. Berketahanan Energi, Air, dan		43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
					a) Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	3,34	3,88	4,56	5,23	6,04



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2029	2034	2039	2045
			Kemandirian Pangan	b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,76	3,60	1,64	0,75	0,29
				c) Cakupan Layanan Perkotaan terhadap Air Minum Aman	86,85	92,24	98,97	100,00	100,00
			17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Indeks Risiko Bencana (IRB)	82,73	74,07	64,20	55,74	48,67
				45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
				a) Kumulatif	0,16	3,13	9,03	16,28	26,49
				b) Tahunan	-9,36	16,52	36,53	50,06	70,26

Sumber: hasil analisis, 2024



BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan selama 20 (duapuluh) tahun kedepan. Pada satu sisi, RPJPD Kota Samarinda merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Pada sisi lain, RPJPD Kota Samarinda 2025-2045 juga diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Samarinda bagi seluruh *stakeholder*.

Dokumen RPJPD Kota Samarinda merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Samarinda selama dua puluh (20) tahun mendatang di mana dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi calon Walikota dan calon Wakil Wali Kota Samarinda dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas. Dengan berpedoman pada RPJPD, maka arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD dapat selaras dengan RPJP Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pembangunan Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi RPJPD Kota Samarinda yaitu “SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”, perlu didukung dengan adanya:

1. Komitmen dan integritas pemimpin yang kuat dan demokratis.
2. Ketersediaan pendanaan yang mendukung implementasi kebijakan.
3. Konsistensi kebijakan pemerintah.
4. Keberpihakan kepada rakyat.
5. Peran serta partisipasi masyarakat, stakeholder dan dunia usaha secara aktif.



6. Komitmen melakukan manajemen risiko pembangunan daerah di lingkungan pemerintahan daerah kota.

Pencapaian keberhasilan RPJPD Kota Samarinda 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen, konsistensi, dan partisipasi dari penyelenggara pemerintahan Kota Samarinda. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan daerah jangka panjang tetap dalam koridor sebagaimana telah ditentukan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan lima tahunan (RPJMD).

Dengan segala optimisme dalam membangun Kota Samarinda untuk masa depan yang lebih baik, setelah berupaya seoptimal mungkin maka kita serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ridho dan karunia-Nya menyertai upaya-upaya kita semua dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan pada saat RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 akan berakhir, maka pemerintah daerah akan menyusun Rancangan Awal RPJPD periode berikutnya. Tahapan dan tatacara penyusunan dokumen tersebut mempedomani kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan tetap menjaga keselarasan perencanaan pembangunan dengan provinsi dan nasional serta mempedomani RTRW Kota Samarinda.

6.2. Manajemen Resiko

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan perlu diterapkan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan prinsip antara lain yaitu: terintegrasi, kolaboratif, transparan dan inklusif, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhitungkan ketidakpastian (*uncertainty*), dan perbaikan terus menerus. Proses manajemen risiko dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) komunikasi dan konsultasi, dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal; (2) identifikasi risiko, dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari risiko yang dapat menghambat capaian RPJPD; (3) analisis risiko dengan menentukan tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko; (4) evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan Keputusan, dan upaya untuk mengatasi risiko; (5) mitigasi risiko dilakukan



dengan mencari alternatif mitigasi risiko yang terbaik, menyusun rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi risiko, dan (6) pemantauan dan review terhadap seluruh aspek proses manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko mencakup pembentukan struktur manajemen risiko, dan pengembangan budaya sadar risiko. Struktur manajemen risiko terdiri dari komite manajemen risiko, unit pemilik risiko, dan *Compliance Office for Risk Management*. Sementara itu pengembangan budaya risiko dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai dari setiap proses pengambilan keputusan.

RPJPD Kota Samarinda menjadi pedoman bagi calon Walikota dan calon Wakil Walikota dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Samarinda yang berdimensi 5 (lima) tahunan dan RKPD Kota Samarinda. Dalam penyusunan RPJPD Kota Samarinda dilakukan penyelarasan dengan Provinsi Kalimantan Timur meliputi visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan dan indikator utama pembangunan. Pada pelaksanaannya harus melibatkan berbagai pihak baik pemerintah daerah, instansi pemerintah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan monitoring yang harus dilakukan secara rutin. Evaluasi dan perubahan dapat dilakukan paling sedikit 1 kali dalam dalam 5 tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi. Mekanisme evaluasi dan perubahan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3. Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi “Samarinda Pusat Peradaban Berbasis Perdagangan dan Jasa Yang Maju dan Berkelanjutan”, diperlukan pembiayaan pembangunan yang memadai. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi lebih tinggi melalui inovasi optimalisasi dan ekspansi sumber-sumber pendapatan. Optimalisasi dan ekspansi sumber-sumber pendapatan dilakukan melalui mekanisme yang baru, didukung oleh kelembagaan dan regulasi yang lebih adaptif, dengan menggunakan sistem digital. Selain itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, dunia usaha dan sektor perbankan, untuk terlibat aktif dalam



BAB VI PENUTUP



mewujudkan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Pembiayaan pembangunan dari dunia usaha atau swasta dilakukan secara transparan, dengan tetap mengedepankan aspek kualitas.

